

S
U
T
A
K
E
P
R
O
S
P
E
K
T
U
S

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2024
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	1 – 2 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	3 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi")	:	5 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK BTPN Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK BTPN Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan

JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950

Telepon: +62 21 30026200; Fax: +62 21 30026308

Website: www.btpn.com; E-mail: corporate.secretary@btpn.com

Jaringan Kantor Per 31 Desember 2023:

1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional,
58 kantor cabang, 197 kantor cabang pembantu,
1 kantor fungsional operasional, dan 214 ATM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp355.060.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR ENAM PULUH JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp114.755.000.000 (seratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp240.305.000.000 (dua ratus empat puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR ATAU COUNTERPARTY UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMAN ATAU MEMENUHI KEWAJIBAN KONTRAKTUAL USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPIN PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT :

AAA(idn) (TRIPLE A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

OCBC Sekuritas

PT OCBC SEKURITAS INDONESIA

BCAsekuritas

PT BCA SEKURITAS

Penawaran Obligasi Ini Dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024.

PT BANK BTPN Tbk, selanjutnya disebut Perseroan atau BTPN, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 (“Obligasi”) melalui surat No.S.245/DIR/CCS/IV/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024” pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04310/BEI.PP1/05-2024 tanggal 6 Mei 2024, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan obligasi yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	xiii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM.....	1
1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan	2
2. Penawaran Umum Obligasi	2
3. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan	17
4. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi.....	17
5. Keterangan Mengenai Wali Amanat.....	20
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	21
III. PERNYATAAN UTANG.....	22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	39
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	39
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	42
3. Rasio-Rasio Penting	43
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	44
1. Faktor yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan.....	44
2. Kebijakan Akuntansi Penting.....	46
3. Kebijakan Pemerintah.....	47
4. Kinerja Keuangan	47
5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan	55
6. Segmen Operasi Grup.....	56
7. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi atau Perubahan Penting dalam Ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas	58
8. Risiko Fluktuasi Mata Uang dan Suku Bunga Acuan Pinjaman	58
9. Batasan Pengalihan Dana Entitas Anak Kepada Perseroan	58
10. Pinjaman Perseroan.....	58
11. Belanja Modal	59
VI. FAKTOR RISIKO.....	61
1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan	61
2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Grup	61
3. Risiko Umum	63
4. Risiko bagi investor.....	64
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	65
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	66
A. Keterangan Tentang Perseroan.....	66
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	66
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	68
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	69
4. Perjanjian Penting	73
5. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	80
6. Keterangan Tentang Pemegang Saham Pengendali dan Utama	81
7. Keterangan Mengenai Entitas Anak	83
8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.....	87
9. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>)	94

10.	Sumber Daya Manusia	117
11.	Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.....	122
B.	Keterangan tentang Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.....	123
1.	Umum	123
2.	Keunggulan Kompetitif.....	127
3.	Strategi Usaha	128
4.	Aset tetap yang penting dan dimiliki oleh perseroan	128
5.	Kebijakan Riset dan pengembangan perseroan.....	132
6.	Tingkat kesehatan perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir	132
7.	Persaingan Usaha.....	133
8.	Pemasaran dan Jaringan distribusi	133
9.	Pendanaan dan Likuiditas	134
10.	Portfolio Kredit.....	136
11.	Manajemen Risiko	139
12.	Asuransi	142
13.	Hak Kekayaan Intelektual	143
14.	Kecenderungan usaha	149
15.	Uraian transaksi afiliasi.....	149
IX.	PERPAJAKAN	151
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	152
1.	Penjaminan Emisi Obligasi	152
2.	Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi.....	152
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	153
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	156
1.	Riwayat Singkat.....	156
2.	Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham	157
3.	Susunan Pengurusan dan Pengawasan	158
4.	Kegiatan Usaha.....	158
5.	Tugas Pokok Wali Amanat.....	159
6.	Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat	159
7.	Pengalaman Bank Mega selaku Wali Amanat di Pasar Modal (5 tahun terakhir)	160
8.	Ikhtisar Data Keuangan Penting Wali Amanat.....	162
9.	Alamat Wali Amanat.....	165
XIII.	TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	166
1.	Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif.....	166
2.	Pemesan Yang Berhak	166
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi.....	166
4.	Jumlah Minimum Pemesanan.....	167
5.	Masa Penawaran Awal Obligasi	167
6.	Masa Penawaran Umum Obligasi.....	167
7.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi.....	167
8.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi	167
9.	Penjatahan Obligasi.....	167
10.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi	168
11.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik.....	168
12.	Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi	169
13.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi.....	169
XIV.	AGEN PEMBAYARAN.....	171
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	172
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	173
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	205

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:</p> <p>(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. <p>(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan. <p>(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</p> <p>(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</p> <p>(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</p> <p>(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</p> <p>(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</p>
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda dan manfaat lain (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (<i>a member firm of KPMG International Limited</i>) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.</p>
“ATM”	<p>Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.</p>

“ATMR”	Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>).
“Aset Tetap”	berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“BI”	Berarti Bank Indonesia.
“BOPO”	Berarti Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“CKPN”	Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

“Dokumen Emisi”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip BEI, dan dokumen-dokumen Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, POJK No. 7/2017 dan POJK No. 36/2014, termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas sebagaimana akan diedarkan kepada Masyarakat.
“Efek”	berarti surat berharga (termasuk Obligasi ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Force Majeure”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Jumlah Terhutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kredit yang Diberikan”	Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan) kecuali dinyatakan lain.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti HWMA Law yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis”	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, yang dapat dilampiri keterangan dari Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/KTUR”	Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/KTUR
“Kredit yang Diberikan”	Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan) kecuali dinyatakan lain.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“KSEI”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang- Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

“LDR”	Berarti Loan to Deposit Ratio, yaitu rasio kredit yang diberikan (termasuk piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan) terhadap jumlah simpanan dari nasabah.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT OCBC Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“NIM”	Berarti <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
“NPL”	Berarti <i>Non Performing Loan</i> yaitu kredit bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang,
“Otoritas Jasa Keuangan / OJK”	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan V yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.

“Pengakuan Hutang”	berarti Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 No. 63 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat di hadapan hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi dengan kewajiban untuk membeli sisa Obligasi yang tidak terjual, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 7 tanggal 3 April 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 No. 6 tanggal 2 April 2024, sebagaimana telah di ubah pada Perubahan I pada akta No. 9 tanggal 7 Mei 2024, Perubahan II pada akta No.2 tanggal 3 Juni 2024 dan diubah kembali pada Perubahan III pada akta No.62 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dihadapan hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 No. 5 tanggal 2 April 2024, sebagaimana telah di ubah pada Perubahan I pada akta No. 8 tanggal 7 Mei 2024, Perubahan II pada akta No 3 tanggal 3 Juni 2024 dan dirubah kembali pada Perubahan III pada akta No 61 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dihadapan hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta

“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No.SP-021/OBL/KSEI/0224 tanggal 3 April 2024 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN No. 4 tanggal 2 April 2024, sebagaimana telah di diubah pada Perubahan I pada akta No. 7 tanggal 7 Mei 2024, dan diubah kembali pada Perubahan II pada akta No.1 tanggal 3 Juni 2024, Perubahan III pada akta No.60 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dihadapan hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
“Perseroan”	berarti PT BANK BTPN Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Persetujuan Prinsip”	berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. S-04310/BEI.PP1/05-2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas (i) suatu Efek; dan/atau (ii) pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, yang dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit (L/C)</i> atau instrumen sejenis.

“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 11/2016”	Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
“POJK No. 14/2017”	Berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2016”	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp355.060.000.000 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Kepastian Jumlah Pokok Obligasi akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari RUPS Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp 1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“UU Cipta Kerja”	berarti Perppu Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No.6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845.
“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk., berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

PT Oto Multiartha : OTO

PT Summit Oto Finance : SOF

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Umum

Riwayat singkat Perseroan

PT BANK BTPN Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Dedeh Ramdah Sukarna, S.H., notaris pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No. 1148 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer ("**Bapemil**") yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 22 tanggal 21 Januari 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) persetujuan penggabungan dengan SMBCI dimana SMBCI bertindak sebagai pihak yang menggabungkan diri dan Perseroan bertindak sebagai pihak penerima penggabungan (ii) perubahan nama Perseroan menjadi menjadi PT BANK BTPN Tbk, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0006176 tanggal 22 Januari 2019 dan (iii) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 55 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0069408 tanggal 21 Maret 2024 ("**Akta Perseroan No. 55/2024**") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 57 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0073264 tanggal 26 Maret 2024 ("**Akta Perseroan No. 57/2024**").

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian hingga terakhir diubah dengan Akta Perseroan No. 55/2024 dan 57/2024 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha utama, yaitu:
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
 - Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

- 2) Kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah:
 - o Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - o Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - o Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
 - o Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - o Obligasi;
 - o Surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - o Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
 - Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;
 - Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
 - Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
 - Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

- Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu:

- Izin Bank Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung
- Izin Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana No. 02/PM.2/STTD/APERD/2016 tanggal 29 Juni 2016.
- Izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan no. KEP-80/D.03/2015 tentang Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta asing Bagi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
- Izin Penyedia Jasa Pembayaran Kategori Izin 1, berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 23/680/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021 tentang Konversi Izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Pasca Pemberlakuan Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Kepemilikan Saham dan Struktur permodalan terakhir perseroan

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

	Modal saham dengan nilai nominal Rp 20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SMBC	9.692.826.975	193.856.539.500	91,05%
Masyarakat (masing-masing <5%)	953.118.773	19.062.375.460	8,95%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.645.945.748	212.918.914.960	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	4.354.054.252	87.081.085.040	

Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki empat Perusahaan Anak baik langsung maupun tidak langsung, dengan keterangan sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Kontribusi Pendapatan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Tahun Operasional
1	PT BANK BTPN SYARIAH TBK	Perbankan	70,0%	30,54%	1991	2014	Jakarta	2014
2	PT BTPN SYARIAH VENTURA	Modal Ventura	1%	-	2021	2021	Jakarta	2022
3	PT Oto Multiartha	Lembaga Pembiayaan	51%	-	1994	2024	Jakarta	1994
4	PT Summit Oto Finance	Lembaga Pembiayaan	51%	-	1990	2024	Jakarta	1990

*) Pemegang saham lain dalam PT BTPN SYARIAH VENTURA adalah PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dengan kepemilikan sebesar 99%.

Prospek Usaha Perseroan

Berdasarkan *Press Release* Bank Indonesia pada Maret 2024, Perekonomian global diproyeksikan tumbuh 3.0% pada 2024, ditopang oleh penguatan perekonomian Amerika Serikat dan India sejalan dengan konsumsi dan investasi yang diharapkan lebih tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di China dan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Inggris dan Jepang selama dua triwulan berturut-turut diekspektasikan berlanjut di 2024 dan dapat menurunkan propek pertumbuhan ekonomi global. Risiko tekanan inflasi global dapat bersumber dari eskalasi konflik geopolitik global yang dapat menyebabkan peningkatan harga komoditas energi. Selain itu, adanya gangguan cuaca turut berpotensi pada peningkatan risiko inflasi global dan domestik.

Tren penurunan tingkat suku bunga acuan di Amerika Serikat diekspektasikan akan dimulai pada semester kedua tahun 2024 dikarenakan tekanan inflasi Amerika Serikat masih relatif cukup tinggi. Adanya penguatan indeks dollar membuat terjadinya pelemahan nilai tukar negara berkembang terhadap Amerika Serikat. Hal ini membuat

Bank Indonesia berhati-hati dalam memutuskan kapan dimulainya siklus penurunan tingkat suku bunga acuan domestik, sehubungan adanya peningkatan risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang masih relatif cukup tinggi, walaupun risiko inflasi domestik relatif terjaga di level 2.6% YoY pada 2023.

Inflasi 2024 diespektasikan akan berada pada kisaran 2.5% dengan deviasi 1%. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan berada pada kisaran 4.7%-5.5% YoY untuk 2024, didukung oleh permintaan domestik yang didukung dengan adanya penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan kredit 2024 diperkirakan meningkat dalam kisaran 10-12% YoY.

Pada industri perbankan, Bank BTPN mengantisipasi adanya potensi peningkatan kompetisi dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berimbas pada penyesuaian suku bunga dana dan kredit secara bertahap. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bank tetap menjaga resiliensi dan mampu menyerap berbagai potensi risiko di tengah dinamika lingkungan ekonomi global.

Dalam rangka mendukung tujuan jangka panjang, Bank BTPN juga akan menciptakan pertumbuhan anorganik. Untuk mewujudkan upaya itu, pada tahun 2024 Bank menargetkan dapat merealisasikan rencana akuisisi 51% saham di PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF) dengan melakukan right issue, yang rencananya diselesaikan di Triwulan I 2024. Bank meyakini aksi korporasi ini akan melahirkan berbagai potensi sinergi di antara entitas dalam grup.

2. Keterangan Tentang Obligasi Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan :

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp Rp355.060.000.000 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Seri A dengan jumlah sebesar Rp 114.755.000.000 (seratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah); dan • Seri B dengan jumlah sebesar Rp 240.305.000.000 (dua ratus empat puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah).
Jangka Waktu	: • Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan • Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Tingkat Bunga Obligasi	: • Seri A sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun; dan • Seri B sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun.
	Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp 1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.

- Jaminan** : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali (*Buyback*)** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan** : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak.
- Hasil Pemeringkatan** : idAAA (Triple A) dari Pefindo
- Wali Amanat** : PT Bank Mega Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang yang Belum Dilunasi

No	Nama Efek	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Jatuh Tempo	Jumlah Nominal (Dalam jutaan Rupiah)
1.	Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019	7,75%	5 tahun	AAA(idn)	26 November 2024	201.000

Terhadap Obligasi yang telah diterbitkan, Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran atas Obligasi IV Tahap I Seri A yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 November 2022, sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. S.114/CCS/XI/2022 perihal Keterbukaan Informasi Pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi tanggal 28 November 2022. Sedangkan sisa jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), yaitu keseluruhannya berjumlah Rp201.000.000.000,00 (dua ratus satu miliar Rupiah) per tanggal 19 Januari 2024.

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi setelah dikurangi biaya - biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (*a member firm of KPMG International Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya masing-masing tertanggal 22 Februari 2024 dan 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212), yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Mei 2024

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset	201.448.392	209.169.704
Jumlah Liabilitas	150.244.468	159.913.419
Jumlah Dana Syirkah Temporer	9.920.820	9.843.261
Jumlah Ekuitas	41.283.104	39.413.024

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Dalam jutaan Rupiah)

	Tahun Berakhir 31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih	12.044.063	11.678.315
Pendapatan Operasional Lainnya	2.073.443	2.012.615
Beban Operasional Lainnya	(10.656.471)	(9.033.254)
Pendapatan Operasional Bersih	3.461.035	4.657.676
Beban Non-operasional	(3.353)	(357)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.457.682	4.657.319
Laba Bersih	2.682.484	3.629.564
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.700.832	3.474.962
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	293	384

Rasio Keuangan Penting

	31 Desember	
	2023	2022
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit & operasional	30,31%	27,42%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	29,90%	27,29%
KUALITAS ASET		
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,68%	0,68%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	0,68%	0,68%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,46%	1,85%
RENTABILITAS		
<i>Return on Asset</i> (ROA)	1,73%	2,36%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	6,54%	9,15%
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	6,45%	6,32%
Total liabilitas terhadap total ekuitas (x)	3,88	4,31
Total liabilitas terhadap total aset (x)	0,80	0,81
TINGKAT EFISIENSI		
Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	83,72%	75,05%
<i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	52,69%	49,79%
KUALITAS KREDIT		
<i>Non Performing Loan</i> (NPL) – kotor	1,36%	1,43%
NPL – bersih	0,40%	0,44%
LIKUIDITAS		
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	142,68%	126,66%
KEPATUHAN		
Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan		
Rupiah		
GWM Primer	8,30%	8,20%
GWM PLM	9,49%	10,91%
Mata Uang Asing		
GWM Mata Uang Asing	4,02%	4,02%
GWM Perusahaan Anak		
Rupiah		
GWM Total	5,54%	5,77%
Posisi Devisa Neto (PDN) Perseroan	0,52%	0,33%

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Bank dapat membagikan dividen pada tahun dimana Bank mencatatkan laba positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham, Bank wajib mendasarkan atas berbagai pertimbangan dari aspek eksternal dan internal. Perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar. Besaran dividen yang dibayarkan harus mempertimbangkan dampak terhadap kinerja keuangan tahun yang bersangkutan, tingkat kesehatan keuangan Bank dan kebutuhan dana untuk pengembangan usaha, dengan mempertimbangkan strategi Bank di masa depan.

Pembayaran dividen dilakukan mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Pemegang saham pada suatu tanggal tertentu sesuai peraturan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen tunai yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.

7. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak positif ataupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum, yang telah disusun berdasarkan bobot dari yang paling signifikan, sebagai berikut:

- **Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan**
 - Risiko kredit timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*
- **Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**
 - Risiko Pasar
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Operasional
 - Risiko Hukum
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Strategi
 - Risiko Kepatuhan
- **Risiko Umum**
 - Kondisi Perekonomian secara makro atau global
 - Perubahan kurs valuta asing
 - Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha perusahaan terbuka
 - Tuntutan atau gugatan hukum
 - Kebijakan Pemerintah
 - Ketentuan negara lain atau peraturan internasional
- **Risiko bagi Investor**
 - Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
 - Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
 - Risiko penurunan nilai obligasi, risiko ini terjadi jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan.
 - Risiko peraturan dan/ atau perundang-undangan, jika ada peraturan atau perundang-undangan, misal perpajakan, yang berlaku yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Penjelasan mengenai faktor risiko Perseroan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM



PT BANK BTPN Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: +62 21 30026200; Fax : +62 21 30026308
Website : www.btpn.com;
E-mail: corporate.secretary@btpn.com

Jaringan Kantor Per 31 Desember 2023:

1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional,
58 kantor cabang, 197 kantor cabang pembantu,
1 kantor fungsional operasional, dan 214 ATM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut,
Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp 355.060.000.000
(TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR ENAM PULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp114.755.000.000 (seratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp240.305.000.000 (dua ratus empat puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan

1.1. Nama Obligasi Berkelanjutan

Obligasi Berkelanjutan V BANK BTPN

1.2. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan

Target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

2. Penawaran Umum Obligasi

2.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V BANK BTPN Tahap I Tahun 2024

2.2. Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

2.3. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

2.4. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

2.5. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp 355.060.000.000 (Tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp114.755.000.000 (seratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp240.305.000.000 (dua ratus empat puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024
2	5 Januari 2025	5 Januari 2025
3	5 April 2025	5 April 2025
4	5 Juli 2025	5 Juli 2025
5	5 Oktober 2025	5 Oktober 2025
6	5 Januari 2026	5 Januari 2026
7	5 April 2026	5 April 2026
8	5 Juli 2026	5 Juli 2026
9	5 Oktober 2026	5 Oktober 2026
10	5 Januari 2027	5 Januari 2027
11	5 April 2027	5 April 2027
12	5 Juli 2027	5 Juli 2027
13	-	5 Oktober 2027
14	-	5 Januari 2028
15	-	5 April 2028
16	-	5 Juli 2028
17	-	5 Oktober 2028
18	-	5 Januari 2029
19	-	5 April 2029
20	-	5 Juli 2029

2.6. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

2.7. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("Peraturan KSEI"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

2.8. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

2.9. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp 1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.10. Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

2.12. Pembelian Kembali Obligasi (Buy back)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;

- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui: situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan

- xvii. Pengumuman sesuai butir vii dan viii tersebut di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan
 - ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. bagi perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - i) situs web perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

2.13. Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan / penyediaan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

2.14. Pembayaran Manfaat Lain atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

2.15. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat

akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

- v. Setiap Obligasi sebesar Rp 1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

2.16. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan Republik Indonesia);
 - b. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perusahaan, yang secara material akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan atau kemampuan Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan terhadap Obligasi, kecuali:
 - (i) atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia) yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak -terbatas pada peraturan OJK; dan/atau
 - (ii) sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan penggabungan, pemisahan, peleburan dan/atau akuisisi tersebut disetujui oleh Bank Indonesia atau OJK.
 - c. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi kecuali bila transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan OJK;
 - d. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen surat hutang lain yang sejenis dengan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, dan pembayarannya diutamakan dari Obligasi;
 - e. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Perusahaan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva milik Perusahaan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva milik Perusahaan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen-pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- iii. Perseroan berkewajiban untuk :
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. menyetorkan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia secara penuh (in good funds) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda;
 - c. Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan selalu dalam keadaan minimal pada komposit 3 (tiga) dengan predikat bank berkategori cukup baik sesuai kriteria penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia;
 - d. Mempertahankan kecukupan modal (CAR) sesuai dengan ketentuan/peraturan Bank Indonesia atau otoritas keuangan lainnya yang berwenang.
 - e. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain yang berkenaan dengan laporan berkala Perseroan kepada Wali Amanat;
 - f. Memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung dan halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku, izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Memberitahukan kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari Obligasi;
 - h. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Kerja sejak terjadinya -hal-hal sebagai berikut :
 - (i) Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi ini;
 - (ii) Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham Perseroan yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih dari modal ditempatkan dan diikuti dengan penyerahan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan/atau dokumen penunjang lainnya, setelah akta tersebut dan/atau dokumen penunjang lainnya diterima oleh Perseroan ;
 - (iii) Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
 - i. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - (i) Salinan dari laporan termasuk laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang --berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada ---pemegang saham dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang -disebutkan di atas;
 - (ii) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau paling lambat pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Emiten;
 - (iii) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai dengan laporan akuntan publik, atau

- 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai dengan laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan terbatas, atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai dengan laporan akuntan -publik yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, atau
 - Pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang terlebih dahulu.
- j. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;
- k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Emisi kepada dan atas nama KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi tersebut kepada Wali Amanat.
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi Perseroan, dan menyerahkan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat/laporan hasil pemeringkatan dari Pemeringkat tersebut.
- m. Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 36.
- n. Perseroan wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada Masyarakat paling sedikit melalui:
- (i) situs web Emiten dan
 - (ii) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional.
- paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.

2.17. Pernyataan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

- i. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan menjalankan usaha dengan sebaik mungkin dan mentaati semua ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan kegiatan usaha bagi bank di Indonesia antara lain yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- ii. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- iii. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memperoleh, mematuhi semua ketentuan dan melakukan hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya semua kuasa, ijin dan persetujuan (baik pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi, dalam hal Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di negara Republik Indonesia;
- iv. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memelihara asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan;
- v. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.

- vi. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- vii. Perseroan dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Emiten dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- viii. Perseroan dengan ini membebaskan Wali Amanat dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

2.18. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan ketentuan sepanjang jumlah yang terutang tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana yang tercantum pada Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Perseroan yang terakhir; atau
 - c. Perseroan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan -hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar -salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan yang diberikan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. butir i huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir i huruf c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. butir i huruf d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta EMITEN untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Emiten atas seluruh Jumlah Terhutang.

Dengan demikian, Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo seketika.

iii. Apabila :

- a. Perseroan dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga sebagian besar atau semua harta kekayaan Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau
- c. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian; atau
- d. Perseroan atas inisiatif sendiri menyatakan moratorium atau melakukan tindakan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mengajukan permohonan penutupan usaha atau diperintahkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulai proses likuidasi atau Perseroan dinyatakan dalam penutupan -usaha

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2.19. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 20/2020");
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk Wali Amanat pengganti menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

- d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 20/2020”)
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 1. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 2. agenda RUPO;
 3. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 4. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 5. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan

- dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- e. setiap Obligasi sebesar Rp 1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Suara blanko, abstain, dan/atau suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
 - h. sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;

- 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5) Perjanjian Perwaliamanatan.
- viii. Biaya-biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan RUPO, termasuk tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan dan menjadi tanggung jawab EMITEN dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima EMITEN dari Wali Amanat yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris;
 - x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Hutang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Pengakuan Hutang" dengan menambahkan Pengakuan Hutang yang baru.
 - xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
 - xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - xiv. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Hutang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Pengakuan Hutang" dengan menambahkan Pengakuan Hutang yang baru.
Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20, Emiten dapat melaksanakan RUPO secara elektronik apabila telah disediakan e-RUPO oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020.

- xv. Apabila ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundangan di -bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2.20. Hak Keutamaan (Senioritas) Obligasi

Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Obligasi dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Obligasi. Obligasi bersifat pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

2.21. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi

Perseroan :

Nama : **PT BANK BTPN Tbk.**
Alamat : Menara BTPN, Lt 29 CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kav 5.5 – 5.6 Jakarta Selatan 12950
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (62 21) 3002 6200
Faksimili : (62 21) 3002 6308
Email : corporate.secretary@btpn.com
Untuk perhatian : Corporate Secretary

Wali Amanat :

Nama : **PT Bank Mega Tbk.**
Alamat : Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon : (62 21) 7917 5000
Email : waliamanat@bankmega.com
Untuk perhatian : Capital Market Services

2.22. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

2.23. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten/ perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK;
- ii. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024;
- iii. Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- iv. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar dan Laporan Akuntan Independen tanggal 3 April 2024.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

4. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi

4.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) sesuai dengan surat No.RC-320/PEF-DIR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Peringkat PT BANK BTPN Tbk., dengan peringkat :

idAAA
(Triple A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

4.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan :

idAAA	Efek utang dengan peringkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah superior.
idAA+	Efek utang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.
idAA	Efek utang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat.
idAA-	Efek utang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.
idA+	Efek utang dengan peringkat idA mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan emiten mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan emiten yang peringkatnya lebih tinggi. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.
idA	Efek utang dengan peringkat idA mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan emiten mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan emiten yang peringkatnya lebih tinggi.
idA-	Efek utang dengan peringkat idA mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan emiten mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan emiten yang peringkatnya lebih tinggi. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.
idBBB+	Efek utang dengan peringkat idBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.
idBBB	Efek utang dengan peringkat idBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang.

idBBB-	Efek utang dengan peringkat idBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.
idBB+	Efek utang dengan peringkat idBB mengindikasikan parameter proteksi yang sedikit lemah dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut mudah terpengaruh oleh memburuknya perkembangan perekonomian, bisnis, dan keuangan, yang akan dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.
idBB	Efek utang dengan peringkat idBB mengindikasikan parameter proteksi yang sedikit lemah dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut mudah terpengaruh oleh memburuknya perkembangan perekonomian, bisnis, dan keuangan, yang akan dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang.
idBB-	Efek utang dengan peringkat idBB mengindikasikan parameter proteksi yang sedikit lemah dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut mudah terpengaruh oleh memburuknya perkembangan perekonomian, bisnis, dan keuangan, yang akan dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.
idB+	Efek utang dengan peringkat idB mengindikasikan parameter proteksi yang lemah dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang, dibandingkan emiten Indonesia lainnya, akan sangat mungkin diperlemah oleh memburuknya kondisi bisnis, keuangan atau perekonomian. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.
idB	Efek utang dengan peringkat idB mengindikasikan parameter proteksi yang lemah dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang, dibandingkan emiten Indonesia lainnya, akan sangat mungkin diperlemah oleh memburuknya kondisi bisnis, keuangan atau perekonomian.
idB-	Efek utang dengan peringkat idB mengindikasikan parameter proteksi yang lemah dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang, dibandingkan emiten Indonesia lainnya, akan sangat mungkin diperlemah oleh memburuknya kondisi bisnis, keuangan atau perekonomian. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.
idCCC	Efek utang dengan peringkat idCCC pada saat ini rentan untuk gagal bayar dan tergantung pada kondisi bisnis dan keuangan emiten yang lebih menguntungkan untuk dapat memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang.
idD	Efek utang diberi peringkat idD pada saat gagal bayar, atau gagal bayar atas efek utang terjadi dengan sendirinya pada saat pertama kali timbulnya peristiwa gagal bayar atas efek utang tersebut.

Peringkat dari idAA sampai dengan idB dapat dimodifikasi dengan menambahkan tanda tambah (+) atau tanda kurang (-) untuk menunjukkan kekuatan relatif dalam kategori peringkat tertentu.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK No. 49/2020.

5. Keterangan Mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 ini adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan Surat Pernyataan No. XX/CAMS-WA/24 tanggal 20 Maret 2024. Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan No. XX/CAMS-WA/24 tanggal 19 Maret 2024. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/ 2020 dan Wali Amanat tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan Wali Amanat No. XX/CAMS-WA/24 tanggal 19 Maret 2024.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya – biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,04% (satu koma nol empat persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar 0,19% yang termasuk didalamnya adalah 0,14% biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), 0,025% untuk biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), dan 0,025% untuk biaya jasa penjualan (*selling fee*) ;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 0,45%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik 0,28%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,11%, dan biaya jasa Notaris 0,06%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,12%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,03% dan biaya jasa Perusahaan Pemingkat Efek sekitar 0,09%; dan
- Biaya lain-lain 0,28%, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya jasa konsultasi keuangan, biaya penyelenggaraan Penawaran Awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya penerjemah.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil pemegang obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib:

- a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, penggunaan dana terhadap hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, telah dipergunakan secara penuh sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang didalam Prospektus, dan telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana surat Perseroan, dengan surat No. S.025/DIR/CCS/II/2020 tanggal 14 Januari 2020.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (*a member firm of KPMG International Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 22 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212), yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Mei 2024

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp 150.244.468 juta, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Liabilitas segera	71.606
Bagi hasil yang belum dibagikan	21.951
Simpanan nasabah:	
- Pihak ketiga	97.793.480
- Pihak berelasi	484.276
Beban bunga yang masih harus dibayar	179.647
	98.457.403
Simpanan dari bank-bank lain:	
- Pihak ketiga	1.253.579
- Pihak berelasi	9.561.059
Beban bunga yang masih harus dibayar	7.483
	10.822.121
Liabilitas derivatif	
- Pihak ketiga	1.014.819
- Pihak berelasi	57.285
	1.072.104
Liabilitas akseptasi	
- Pihak ketiga	2.160.250
- Pihak berelasi	163.383
	2.323.633
Utang pajak:	
- Pajak penghasilan badan	107.880
- Pajak lain-lain	130.038
	237.918
Efek-efek yang diterbitkan	
- Utang obligasi	200.569
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.514
	202.083

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Pinjaman yang diterima:	
- Pihak ketiga	12.682.950
- Pihak berelasi	18.569.798
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48.251)
Beban bunga yang masih harus dibayar	151.020
	<u>31.355.517</u>
Akrual	478.981
Pinjaman subordinasi	3.079.400
Beban bunga yang masih harus dibayar	10.960
	<u>3.090.360</u>
Liabilitas imbalan kerja karyawan:	
- Imbalan kerja jangka pendek	511.188
- Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	170.105
	<u>681.293</u>
Liabilitas sewa	353.990
Liabilitas lain-lain	1.075.508
	<u>150.244.468</u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Liabilitas segera

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>31 Desember 2023</u>
Rupiah	
Titipan transaksi surat berharga	19.844
Hutang kepada pihak ketiga	16.336
Kewajiban penutupan tabungan	14.253
Titipan bagi hasil deposito	3.943
Titipan uang notaris	1.296
Kiriman uang yang belum diselesaikan	580
Titipan uang pensiun	905
Lain-lain	9.878
	<u>67.305</u>
Mata Uang Asing	
Titipan transaksi surat berharga	4.565
Kewajiban penutupan tabungan	6
Kiriman uang yang belum diselesaikan	-
	<u>71.606</u>

Titipan transaksi surat berharga merupakan tampungan atas uang penjualan surat berharga yang belum diselesaikan. Titipan uang pensiun merupakan tampungan uang pembayaran pensiun nasabah yang akan dibayarkan ke rekening nasabah.

Simpanan nasabah

	(Dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Pihak ketiga:	
Giro	26.578.680
Tabungan	16.580.693
Deposito berjangka	40.975.031
Deposito on call	13.659.076
	97.793.480
Pihak berelasi:	
Giro	50.003
Tabungan	88.170
Deposito berjangka	106.953
Deposito on call	239.150
	482.276
	98.277.756
Beban bunga yang masih harus dibayar	179.647
	98.457.403

Berdasarkan mata uang:

	(Dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Simpanan nasabah:	
Rupiah	75.476.253
Dolar Amerika Serikat	19.815.371
Yen Jepang	2.564.810
Mata uang asing lainnya	421.322
	98.277.756
Beban bunga yang masih harus dibayar	179.647
	98.457.403

Giro

Berdasarkan mata uang:

	(Dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Rupiah	15.846.676
Dolar Amerika Serikat	8.735.833
Yen Jepang	1.928.682
Mata uang asing lainnya	117.492
	26.628.683
Beban bunga yang masih harus dibayar	5.960
	26.634.643

Giro Wadiah yang dikelola oleh Perusahaan Anak sebesar Rp 24.009 juta pada tanggal 31 Desember 2023.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	31 Desember 2023
Rupiah	1,64%
Mata uang asing	1,85%

Saldo giro yang diblokir sebesar Rp 329.041 juta pada tanggal 31 Desember 2023. Pemblokiran giro sebagian besar dikarenakan giro tersebut diperuntukkan sebagai akun tabungan untuk cicilan pinjaman yang diberikan dan sebagai agunan pinjaman yang diberikan.

Tabungan

Berdasarkan jenis:

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Tabungan "Jenius"	11.414.116
Tabungan "Citra Pensiun"	2.155.288
Tabungan "Tepat Tabungan Kelompok Syariah"	2.140.799
Tabungan "Se To"	738.244
Tabungan "Pasti"	154.263
Tabungan "Tepat Tabungan"	57.010
Lain-lain	9.143
	16.668.863
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.499
	16.670.362

Berdasarkan mata uang:

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Rupiah	15.660.285
Dolar Amerika Serikat	543.438
Yen Jepang	215.605
Mata uang asing lainnya	249.535
	16.668.863
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.499
	16.670.362

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	31 Desember 2023
Rupiah	1,86%
Mata uang asing	1,34%

Saldo tabungan yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.384.408 juta. Pemblokiran tabungan sebagian besar dikarenakan tabungan tersebut diperuntukkan sebagai dana nasabah yang tidak dapat ditarik hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Deposito berjangka

Berdasarkan mata uang:

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Rupiah	35.300.062
Dolar Amerika Serikat	5.673.926
Dolar Singapura	54.295
Yen Jepang	53.701
	41.081.984
Beban bunga yang masih harus dibayar	143.663
	41.225.647

Berdasarkan jangka waktu:

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Hingga 1 bulan	24.720.307
Lebih dari 1 - 3 bulan	11.175.601
Lebih dari 3 - 6 bulan	2.601.838
Lebih dari 6 - 12 bulan	2.570.983
Lebih dari 1 tahun	13.255
	41.081.984
Beban bunga yang masih harus dibayar	143.663
	41.225.647

Berdasarkan tingkat suku bunga:

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Hingga 3%	679.070
Lebih dari 3 - 5%	25.049.460
Lebih dari 5 - 7%	15.353.454
	41.081.984
Beban bunga yang masih harus dibayar	143.663
	41.225.647

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	31 Desember 2023
Rupiah	4,78%
Mata uang asing	4,03%

Saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 265.002 juta. Pemblokiran deposito berjangka sebagian besar dikarenakan deposito berjangka tersebut diperuntukkan sebagai agunan pinjaman yang diberikan dan sebagai akun tampungan untuk cicilan pinjaman yang diberikan.

Deposito on call

Berdasarkan mata uang:

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Rupiah	8.669.230
Dolar Amerika Serikat	4.862.174
Yen Jepang	366.822
	13.898.226
Beban bunga yang masih harus dibayar	28.525
	13.926.751

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	31 Desember 2023
Rupiah	4,59%
Mata uang asing	4,33%

Simpanan dari bank-bank lain

	(Dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Pihak ketiga	1.253.579
Pihak berelasi	9.561.059
	10.814.638
Beban bunga yang masih harus dibayar	7.483
	10.822.121

Tidak ada saldo simpanan dari bank-bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2023.

Berdasarkan jenis

	(Dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Call money	10.463.200
Giro	349.438
Deposito berjangka	2.000
	10.814.638
Beban bunga yang masih harus dibayar	7.483
	10.822.121

Berdasarkan mata uang

	(Dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Rupiah	1.576.438
Dolar Amerika Serikat	9.238.200
	10.814.638
Beban bunga yang masih harus dibayar	7.483
	10.822.121

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	31 Desember 2023
Rupiah	
Call money	6,17%
Deposito berjangka	2,44%
Giro	0,00%
Dolar Amerika Serikat	
Call money	6,03%

Jangka waktu

	31 Desember 2023
Sesuai Permintaan	349.438
Hingga 1 bulan	8.592.545
Lebih dari 1-3 bulan	1.872.655
	10.814.638
Beban bunga yang masih harus dibayar	7.483
	10.822.121

Efek – Efek Yang Diterbitkan

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Nilai Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	201.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(431)
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.514
	202.083
Utang Obligasi sesuai dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun	201.000

Beban bunga atas utang obligasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 16.013 juta

Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman bukan bank yang dilakukan dengan pihak berelasi dan pihak ketiga.

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Pihak ketiga:	
Pinjaman bank:	
PT Bank Central Asia Tbk	6.000.000
Pinjaman bukan bank:	
International Finance Corporation	6.682.950
	12.682.950
Pihak berelasi:	
Pinjaman bank:	
SMBC	18.569.798
	31.252.748
Dikurangi:	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48.251)
Ditambah:	
Beban bunga yang masih harus dibayar	151.020
	31.355.517

Pinjaman bank

Jumlah pokok pinjaman berdasarkan jangka waktu:

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Lebih dari 1-2 tahun	16.392.975
Lebih dari 2-3 tahun	170.383
Lebih 3 tahun	8.006.440
	24.569.798
Ditambah:	
Beban bunga yang masih harus dibayar	52.745
	24.622.543

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk

Perseroan memiliki 5 fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank Central Asia Tbk yang ditandatangani pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2022, dengan total fasilitas sebesar Rp 6.000.000 juta, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pinjaman *Revolving Term Loan I* sebesar Rp 500.000 juta yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2009 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2022.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Fasilitas harus ditarik dalam 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40% berlaku terhitung sejak tanggal 13 Mei 2022 hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

Sampai dengan tanggal 28 Desember 2023, Bank telah melakukan penarikan sebesar Rp 500.000 juta dengan jatuh tempo pada 13 Mei 2025.

- 2) Perjanjian pinjaman *Revolving Term Loan III* sebesar Rp 1.000.000 juta yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 27 September 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40% terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

Pada tanggal 25 April 2022, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000 juta. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 29 September 2023.

Pada tanggal 22 Desember 2023, Bank melakukan penarikan kembali atas fasilitas ini sebesar Rp 1.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada 1 April 2025.

- 3) Perjanjian pinjaman *Non-revolving Term Loan IV* sebesar Rp 1.000.000 juta ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas terakhir, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian kredit. Suku Bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR +0,40%

Pada tanggal 28 Desember 2023, Bank melakukan penarikan kembali atas fasilitas ini sebesar Rp 1.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada 24 November 2024.

- 4) Perjanjian pinjaman *Non-revolving Term Loan II* sebesar Rp 2.500.000 juta ditandatangani pada tanggal 29 April 2020 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40%.

Pada tanggal 4 Mei 2022, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp 2.500.000 juta, dengan jatuh tempo pada 4 November 2024.

- 5) Perjanjian pinjaman *Revolving Term Loan VI* sebesar Rp 1.000.000 juta ditandatangani pada tanggal 29 November 2022.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40%.

Pada tanggal 29 Mei 2023, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada 29 Mei 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023 Bank telah menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Pada tanggal 31 Desember 2022, total fasilitas PT Bank Central Asia Tbk yang belum digunakan adalah sebesar Rp 1.500.000 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang dipersyaratkan.

Pinjaman Bilateral PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 2021, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit – *committed term loan* sebesar Rp 1.000.000 juta dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai kreditur. Tujuan pinjaman adalah untuk modal kerja Bank.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Fasilitas kredit harus ditarik sepenuhnya dalam batas waktu penarikan dengan ketentuan jumlah minimum penarikan adalah Rp 500.000 juta atau sebesar jumlah fasilitas kredit yang belum ditarik.

Pinjaman harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian pinjaman. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,25%, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 25 Februari 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000 juta. Perjanjian ini telah berakhir dan dilunasi pada tanggal 25 Agustus 2022.

Pada tanggal 23 September 2022, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit – *committed term loan* sebesar Rp 1.000.000 juta dengan PT Bank UOB Indonesia.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, jangka waktu fasilitas 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal fasilitas. Tanggal fasilitas adalah tanggal dimana dilakukan penarikan untuk pertama kali atau 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal perjanjian Kredit, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

Batas waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal fasilitas. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,30%, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 12 Oktober 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000 juta. Perjanjian ini telah berakhir dan dilunasi pada tanggal 29 September 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman yang ada.

Pinjaman PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 13 Desember 2021, Entitas Anak mendapatkan fasilitas pinjaman dengan akad mudharabah yang diberikan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp 100.000 juta. Fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Tujuan pinjaman adalah untuk menunjang bisnis Entitas Anak.

Penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp 100.000 juta dengan indikasi bagi hasil setara 5%. Entitas Anak telah melunasi pinjaman pada tanggal 9 Maret 2023.

Pinjaman Bilateral Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Cabang Singapura

Perseroan mendapatkan *revolving long-term borrowings* dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura, dengan total fasilitas setara dengan USD 3.625.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS atau jumlah yang setara dari jumlah tersebut dalam mata uang selain dari Dolar AS dan Dolar Singapura.

Total pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 1.195.000.000 (nilai penuh) dan EUR 10.000.000 (nilai penuh) (31 Desember 2022: USD 2.372.000.000 (nilai penuh) dan EUR 20.000.000 (nilai penuh)).

Pinjaman ini akan jatuh tempo berkisar antara tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Tingkat suku bunga kontraktual setahun atas pinjaman jangka panjang ini adalah cost of fund ditambah margin tertentu. Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2023, margin yang diterapkan adalah 0,50% (untuk total pinjaman USD 1.195.000.000 (nilai penuh) dan EUR 10.000.000 (nilai penuh)). Untuk posisi 31 Desember 2022, margin yang diterapkan adalah 0,66% (untuk total pinjaman USD 355.000.000 (nilai penuh)) dan 0,50% (untuk total pinjaman USD 2.017.000.000 (nilai penuh) dan EUR 20.000.000 (nilai penuh)).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang disyaratkan dalam pinjaman jangka panjang ini.

Pinjaman bukan bank

Jumlah pokok pinjaman berdasarkan jangka waktu:

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Lebih 3 tahun	6.682.950
Dikurangi:	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48.251)
Ditambah:	
Beban bunga yang masih harus dibayar	98.275
	6.732.974

Pembayaran bunga pinjaman telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Pinjaman bukan bank adalah fasilitas pinjaman dengan International Finance Corporation (IFC) dan Pemerintah, bukan pihak berelasi yang terdiri dari beberapa perjanjian sebagai berikut:

1) Perjanjian Pinjaman 2019

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro, usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, *green loans*, pinjaman *Supply Chain Finance* (SCF). Perseroan akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa jumlah agregat dari pencairan yang diberikan untuk setiap pinjaman setidaknya sama dengan 25% dari jumlah maksimum pinjaman.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp 699.250 juta, ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,75% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2024. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2021 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2024.

Pada tanggal 28 Januari 2020, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp 1.364.600 juta, ekuivalen USD 100.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,30% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2025. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 28 Juli 2021 dan akan berakhir pada tanggal 28 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman yang ada.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substantial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman;
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *demerger*, restrukturisasi korporasi, yang dapat memberikan dampak merugikan yang material;
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah SMBC menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia;

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh pembatasan yang dipersyaratkan.

2) Perjanjian Pinjaman 2023

Pada tanggal 20 Juni 2023, Perseroan telah menandatangani perjanjian Fasilitas pinjaman sebesar USD 500.000.000 (nilai penuh). Bentuk pinjaman ini adalah *Privately Placed Senior Sustainability Bond*. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk pembiayaan usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, pembangunan bangunan ramah lingkungan, dan *Social Bond*.

Pada tanggal 25 Agustus 2023, Perseroan melakukan penarikan sebesar USD 300.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,846%. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, yang dimulai pada tanggal 27 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas yang belum digunakan adalah sebesar USD 200.000.000 (nilai penuh).

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Menyatakan atau membayarkan dividen apa pun atau melakukan pembagian apa pun atas modal sahamnya (selain dividen atau pembagian yang harus dibayar dalam saham Perseroan), kecuali pembayaran atau pembagian yang diusulkan diambil dari penghasilan bersih dari tahun buku yang relevan.
- Membuat atau memungkinkan utang apa pun yang dijamin atau berperingkat di atas atau senior terhadap obligasi, kecuali untuk transaksi sewa guna usaha (*leasing*) atau transaksi lain yang didukung aset dalam operasional bisnis perbankan pada umumnya.
- Membentuk atau memiliki Perusahaan Anak utama apa pun (selain BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura).
- Tidak melakukan perubahan mendasar atas Anggaran Dasar dengan cara apa pun yang dapat tidak sesuai dengan ketentuan pada perjanjian.
- Tidak melakukan atau mengizinkan penggabungan, pemekaran, peleburan atau reorganisasi apa pun; atau menjual, memindahkan, menyewakan atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau suatu bagian substantial dari aset-asetnya selain aset-aset yang diambil alih dalam mengeksekusi jaminan yang dibuat untuk kepentingan Perseroan dalam usaha perbankannya.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan telah memenuhi persyaratan terkait penarikan pertama fasilitas IFC.

Akrual

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Akrual beban operasional	328.468
Akrual beban promosi	101.610
Akrual jasa profesional	48.903
Akrual beban kepegawaian	-
	478.981

Akrual jasa profesional merupakan akrual untuk biaya konsultan yang bekerjasama dengan Perseroan untuk menyelesaikan proyek tertentu, termasuk akrual untuk biaya konsultan hukum, konsultan bisnis, akuntan publik dan lainnya.

Liabilitas imbalan kerja karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

	<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2023
Imbalan kerja jangka pendek	
Akrual bonus karyawan, THR, tantiem dan liabilitas jangka pendek lainnya:	
Perseroan	323.918
Perusahaan Anak	187.270
	511.188
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka Panjang lainnya	
Perseroan	128.085
Perusahaan Anak	42.020
	170.105
	681.293

Grup menerapkan kebijakan program manfaat imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (“**UUCK**”) No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerjasama yang berlaku di Grup. Dasar perhitungan manfaat ini menggunakan gaji pokok terkini. Program pensiun manfaat pasti ini dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendanaan program pensiun ini dilakukan oleh Grup dengan membayar iuran tahunan yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang Bank dan Entitas Anak menggunakan hasil perhitungan Aktuari periode 31 Desember 2023 dengan informasi komparatif 31 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah karyawan Bank yang memiliki hak atas manfaat ini adalah 6.237 karyawan (31 Desember 2022: 6.271 karyawan) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah karyawan Entitas Anak yang memiliki hak atas imbalan ini adalah sebanyak 3.628 karyawan (31 Desember 2022: 3.924 karyawan) (tidak diaudit).

Selain memberikan manfaat yang disebutkan di atas, Perseroan juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman dari SMBC Cabang Singapura sejumlah USD 200.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp 3.079.400 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan sejumlah USD 200.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp 3.113.500 juta pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman subordinasi sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh) dan USD 100.000.000 (nilai penuh) masing-masing diperoleh pada tanggal 26 September 2018 dan 23 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2028 dan 21 November 2028.

Untuk fasilitas USD 100.000.000 (nilai penuh) yang diperoleh pada tanggal 26 September 2018, telah terdapat Perjanjian Tambahan yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2021, sehingga tanggal jatuh tempo berubah dari tanggal 26 September 2025 menjadi tanggal 26 September 2028.

Pinjaman subordinasi memiliki opsi pembayaran lebih awal dengan pemberitahuan 20 hari sebelumnya dan dengan persetujuan dari kreditur.

Kisaran tingkat suku bunga pinjaman subordinasi adalah 6,90% - 6,93% per tahun.

Pinjaman subordinasi digunakan untuk memperkuat struktur modal Bank sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*).

Sesuai Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, Kreditur dan Debitur memahami bahwa terdapat kondisi yang menyebabkan (*trigger events*) pinjaman yang diberikan sesuai dengan Perjanjian ini harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down*, yaitu dalam hal kelangsungan usaha debitur berpotensi terganggu (*point of non viability*) sehingga mempengaruhi kewajiban debitur kepada kreditur, yaitu dapat berupa:

- 1) rasio Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan Entitas Anak; dan/atau
- 2) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Debitur yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
- 3) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *writedown*.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman subordinasi.

Liabilitas lain-lain

	(Dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Transaksi ATM, transfer dan tagihan <i>merchant</i>	253.284
<i>Term Deposit DHE</i>	250.201
Pendapatan ditangguhkan	102.106
Beban <i>Standby Letter of Credit</i> yang masih harus dibayarkan	81.244
Utang premi asuransi kredit	53.828
Cadangan kerugian penurunan nilai – komitmen	52.990
Utang kepada pihak ketiga	37.685
Komisi asuransi diterima dimuka	11.667
Utang premi asuransi lainnya	11.184
Klaim asuransi	4.009
Lainnya	217.310
	1.075.508

Transaksi ATM, transfer dan tagihan *merchant* merupakan hutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya, serta transaksi dengan *merchant* melalui gerbang pembayaran.

Term Deposit DHE adalah Liabilitas untuk memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia, dengan mekanisme *pass on* transaksi bank dengan nasabah (eksportir) kepada Bank Indonesia. Bank mencatat *Term Deposit DHE* tersebut pada akun Liabilitas lain-lain dan kewajiban kepada nasabah (eksportir) pada akun liabilitas lainlain dengan nilai yang sama.

Pendapatan ditangguhkan terdiri atas pendapatan dari pembelian wesel ekspor yang ditangguhkan.

Beban standby letter of credit yang masih harus dibayarkan merupakan beban yang masih harus dibayar atas *standby letter of credit* terkait dengan pinjaman yang diberikan.

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Utang kepada pihak ketiga sebagian besar merupakan utang kepada mitra bisnis Perusahaan Anak, utang terkait Teknologi dan Informasi (TI) dan utang kepada ASABRI.

Komisi asuransi diterima dimuka merupakan komisi yang diterima dari Allianz atas penjualan produkproduk asuransi kepada nasabah Bank melalui seluruh saluran distribusi Bank.

Utang premi asuransi lainnya merupakan premi terutang atas asuransi karyawan Grup.

Klaim asuransi terdiri dari dana yang diterima dari hasil klaim asuransi atas nasabah kredit pension yang meninggal dunia dan pencatatan sementara penerimaan kembali premi asuransi Perseroan. Dana yang diterima akan berada dalam akun ini sampai Perseroan dapat mengidentifikasi kontrak terkait.

Lainnya terutama terdiri dari akun tampungan sementara atas penerimaan pembayaran dimuka dari debitur, yang akan didebitkan pada waktu penyelesaian kewajiban kontrak dengan debitur di masa mendatang.

Komitmen dan Kontinjensi

Berdasarkan Jenis:

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2023

Aset Komitmen

Fasilitas pinjaman yang belum ditarik

Pihak Ketiga

3.079.400

Pihak Berelasi

37.247.514

40.326.914

Aset Kontinjensi

Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan yang bermasalah – Pihak Ketiga

275.731

Garansi yang diterima – Pihak Ketiga

30.270.312

30.546.043

Liabilitas komitmen

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan – *committed*

Pihak Ketiga

10.870.217

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan – *uncommitted*

Pihak Ketiga

100.533.280

Pihak Berelasi

4.301.821

Fasilitas kredit kepada bank yang belum digunakan – *uncommitted* – Pihak Ketiga

74.196

Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan – Pihak Ketiga

721.016

116.500.530

Liabilitas kontinjensi

Garansi yang diberikan

Pihak Ketiga

5.425.734

Pihak Berelasi

30.000

5.455.734

Berdasarkan kolektabilitas:

	(Dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Lancar	120.577.548
Dalam perhatian khusus	1.378.716
Kurang Lancar	-
Diragukan	-
Macet	-
	121.956.264

Kasus hukum:

Perseroan menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi dan klaim yang belum terselesaikan, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Adalah tidak mungkin untuk memastikan apakah Perseroan akan memenangkan atau tidak menang atas masalah atau tuntutan hukum tersebut. Namun demikian, manajemen Perseroan yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Perseroan.

Perjanjian Kerjasama, Kontrak dan Komitmen yang signifikan

PT Taspen (Persero)

Sejak tahun 2007, Bank telah bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) dimana Bank menjadi salah satu mitra untuk penanganan pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai pemerintah.

PT Pos Indonesia (Persero)

Sejak bulan Maret 2012 Bank telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dimana PT Pos Indonesia (Persero) membantu Bank dalam melakukan pemotongan uang pensiun para pegawai Pemerintah untuk angsuran kredit pensiun dan memasarkan produk kredit pensiunan Bank. Perjanjian kerjasama Bank dengan PT Pos Indonesia (Persero) diperbaharui secara berkala dan berdasarkan perjanjian terakhir kerjasama ini akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 25 Juli 2024. Untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2023 terkait dengan kerjasama ini, Bank membayarkan komisi kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp 73.185 juta (31 Desember 2022: Rp 74.764 juta).

Perjanjian Pembiayaan Bersama

PT KB Finansia Multi Finance

Pada bulan Oktober 2022, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT KB Finansia Multi Finance ("FMF"). Dalam kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak FMF. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 300.000 juta. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2022 hingga 28 Oktober 2025. Berdasarkan perubahan pada Agustus 2023, fasilitas maksimum diubah menjadi Rp 600.000 juta.

PT Home Credit Indonesia

Pada tanggal 23 Juni 2014 melalui Perjanjian Kerjasama No PKS.087/DIR/TFI/VI/2014, Bank melakukan Perjanjian Kerjasama pembiayaan bersama *without recourse* dengan PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Dalam Perjanjian Kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak HCI.

Pada tanggal 8 Maret 2023 melalui Perjanjian Kerjasama No PKS.015/RLBJF/III/2023 fasilitas pembiayaan bersama ditingkatkan menjadi Rp 4.200.000 juta dan jangka waktu perjanjian telah diperpanjang hingga 8 Maret 2026.

PT Mandiri Utama Finance

Pada bulan Agustus 2023, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT Mandiri Utama Finance (“MUF”). Dalam kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah maksimum 99% dari Bank dan minimum 1% dari pihak MUF. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 500.000 juta. Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 hingga 21 Agustus 2026.

Perjanjian Kerjasama Jasa Pemasaran dan Administrasi Produk BTPN

PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku)

Pada bulan Juni 2023, Bank melakukan kerjasama penyaluran pendanaan dengan PT Mitrausaha Indonesia Grup (“MIG”). Fasilitas maksimum penyaluran pendanaan adalah sebesar Rp 100.000 juta. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023 hingga 14 Juni 2024 dan setelahnya dapat diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Perjanjian Kerjasama Bancassurance

Pada bulan Agustus 2014, Bank melakukan kerjasama *bancassurance* dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia (“Allianz”). Bank akan mendistribusikan produk-produk asuransi jiwa dari Allianz kepada nasabah Bank melalui seluruh jalur distribusi Bank. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun.

Komitmen signifikan lainnya

Bank menyewa kantor dengan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa antara 5 – 11 tahun dengan mayoritas perjanjian jasa dapat diperbarui pada akhir periode dengan harga pasar. Bank diharuskan memberitahukan enam bulan lebih awal apabila berniat mengakhiri perjanjian sewa. Beban terkait transaksi sewa yang dibebankan pada laba rugi selama tahun berjalan diungkapkan dalam Catatan 30 dan 33 Laporan Keuangan Audit Perseroan.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Bank:

Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian
PT Bumi Serpong Damai	Ruang Kantor	1 Februari 2023 –1 September 2026
PT Bahana Semesta Citra Nusantara	Ruang Kantor	5 Oktober 2015 –14 Maret 2027

Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
Hingga 1 tahun	-	4.484
Lebih dari 1 - 5 tahun	97.355	410.185
	97.355	414.669

Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian	April 2024	Mei 2024	Juni 2024
Liabilitas			
Deposito	1.005.390	641.099	539.009
Liabilitas Derivatif	58.363	17.208	738
Liabilitas akseptasi	259.627	599.027	143.662
Pinjaman yang diterima	-	1.000.000	-
Liabilitas sewa	769	-	-
Liabilitas lain	247	148	231
Jumlah Liabilitas	1.324.396	2.257.482	683.640

Adapun cara pemenuhan kewajiban tersebut berasal dari internal kas Perseroan.

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi atau dibayar.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya masing-masing tanggal 22 Februari 2024 dan 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212), yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Mei 2024.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas	1.428.683	1.747.461
Giro pada Bank Indonesia	9.276.598	10.215.350
Giro pada Bank-Bank lain		
Pihak ketiga	500.326	1.549.854
Pihak berelasi	462.061	639.707
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)
	962.229	2.189.146
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8.961.654	21.885.214
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	2.624	2.851
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)
	8.964.278	21.887.894
Efek-efek		
Pihak ketiga	17.038.501	18.650.367
Pihak berelasi	-	185.510
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	225.855	214.812
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(799)	(999)
	17.263.557	19.049.690
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	636.924	1.131.664
Pihak berelasi	496.225	615.160
	1.133.149	1.746.824
Tagihan akseptasi	3.289.757	3.069.854
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.637)	(4.495)
	3.281.120	3.065.359

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
Pinjaman yang diberikan		
Pihak ketiga	141.400.072	132.208.660
Pihak berelasi	3.773.364	2.387.393
Pembiayaan/piutang syariah:		
Pihak ketiga	11.387.861	11.527.463
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	1.097.796	878.534
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.618.047)	(3.579.119)
	153.041.046	143.422.931
Penyertaan saham		
Pihak ketiga	80.086	80.973
Pihak berelasi	22.500	22.500
	102.586	103.473
Beban dibayar dimuka	1.184.067	1.465.142
Klaim pengembalian pajak	67.337	50.357
Aset pajak tangguhan	715.152	545.029
Aset tetap	5.040.250	5.109.182
Dikurangi : Akumulasi penyusutan	(2.992.438)	(2.990.677)
	2.047.812	2.118.505
Aset takberwujud dan goodwill	3.541.155	3.237.937
Dikurangi : Akumulasi amortisasi	(2.451.771)	(2.161.199)
	1.089.384	1.076.738
Aset lain-lain	996.966	538.312
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.572)	(52.507)
	891.394	485.805
JUMLAH ASET	201.448.392	209.169.704

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas segera	71.606	59.045
Bagi hasil yang belum dibagikan	21.591	18.996
Simpanan nasabah		
Pihak ketiga	97.793.480	103.942.403
Pihak berelasi	484.276	1.080.884
Beban bunga yang masih harus dibayar	179.647	145.624
	98.457.403	105.168.911
Simpanan dari bank-bank lain		
Pihak ketiga	1.253.579	18.779
Pihak berelasi	9.561.059	147.352
Beban bunga yang masih harus dibayar	7.483	-
	10.822.121	166.131
Liabilitas derivatif		
Pihak ketiga	1.014.819	1.323.645
Pihak berelasi	57.285	124.091
	1.072.104	1.447.736
Liabilitas akseptasi		
Pihak ketiga	2.160.250	2.157.596
Pihak berelasi	163.383	199.232
	2.323.633	2.356.828
Utang pajak		
Pajak penghasilan badan	107.880	44.342
Pajak lain-lain	130.038	128.934
	237.918	173.276

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
Efek-efek yang diterbitkan		
Utang Obligasi	200.569	200.134
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.514	1.514
	202.083	201.648
Pinjaman yang diterima		
Pihak ketiga	12.682.950	7.663.850
Pihak berelasi	18.569.798	37.257.744
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48.251)	(9.988)
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	151.020	155.802
	31.355.517	45.067.408
Akrual	478.981	453.992
Pinjaman subordinasi	3.079.400	3.113.500
Beban bunga yang masih harus dibayar	10.960	12.078
	3.090.360	3.125.578
Liabilitas imbalan kerja karyawan		
Imbalan kerja jangka pendek	511.188	443.476
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	170.105	64.228
	681.293	507.704
Liabilitas sewa	353.990	425.887
Liabilitas lain-lain	1.075.508	740.279
JUMLAH LIABILITAS	150.244.468	159.913.419
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Bukan Bank		
Tabungan Mudharabah		
Pihak ketiga	887.890	763.070
Pihak berelasi	2.064	596
	889.954	763.666
Deposito Mudharabah		
Pihak ketiga	8.997.932	9.043.060
Pihak berelasi	32.934	36.535
	9.030.866	9.079.595
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	9.920.820	9.843.261
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Modal dasar Rp 300.000 terdiri dari 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.149.106.869 saham	162.982	162.982
Tambahan modal disetor	11.162.238	11.160.647
Cadangan revaluasi aset tetap	954.224	874.452
Cadangan nilai wajar – bersih	2.906	(7.704)
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(24.267)	(24.267)
Saldo laba		
- Dicadangkan	32.596	32.596
- Belum dicadangkan	26.369.641	24.702.316
Komponen ekuitas lainnya	260.801	260.801
Saham treasury	(254.695)	(255.147)
	38.666.426	36.906.676
Kepentingan non-pengendali	2.616.678	2.506.348
JUMLAH EKUITAS	41.283.104	39.413.024
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	201.448.392	209.169.704

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Dalam jutaan Rupiah)

	Tahun Berakhir 31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	13.069.491	10.525.856
Pendapatan syariah	5.746.182	5.373.790
	18.815.673	15.899.646
Beban bunga	(6.285.177)	(3.876.891)
Beban syariah	(486.443)	(344.440)
	(6.771.610)	(4.221.331)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH	12.044.063	11.678.315
Pendapatan operasional lainnya:		
Pendapatan operasional lainnya	1.423.949	1.228.130
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	649.494	784.485
	2.073.443	2.012.615
Beban operasional lainnya:		
Beban kepegawaian	(3.756.478)	(3.403.319)
Beban umum dan administrasi	(3.273.766)	(3.272.015)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.049.919)	(1.840.167)
Beban operasional lainnya	(576.308)	(517.753)
	(10.656.471)	(9.033.254)
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	3.461.035	4.657.676
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL		
Pendapatan non-operasional	10.053	10.020
Beban non-operasional	(13.406)	(10.377)
	(3.353)	(357)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.457.682	4.657.319
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(775.198)	(1.027.755)
LABA BERSIH	2.682.484	3.629.564
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	79.772	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(92.262)	(37.209)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	20.204	8.186
	7.714	(29.023)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
(kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	13.663	(160.999)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.999)	35.420
	10.634	(125.579)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	18.348	(154.602)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	2.700.832	3.474.962
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	2.358.334	3.095.701
Kepentingan non-pengendali	324.150	533.863
	2.682.484	3.629.564
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	2.376.847	2.939.728
Kepentingan non-pengendali	323.985	535.234
	2.700.832	3.474.962

(Dalam jutaan Rupiah)

	Tahun Berakhir 31 Desember	
	2023	2022
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)		
Dasar	293	384
Dilusian	293	384
DIVIDEN PER SAHAM	-	76,8

3. Rasio-Rasio Penting

	31 Desember	
	2023	2022
PERMODALAN		
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit & operasional	30,31%	27,42%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	29,90%	27,29%
KUALITAS ASET		
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,68%	0,68%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	0,68%	0,68%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2,46%	1,85%
RENTABILITAS		
<i>Return on Asset</i> (ROA)	1,73%	2,36%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	6,54%	9,15%
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	6,45%	6,32%
Total liabilitas terhadap total ekuitas (x)	3,88	4,31
Total liabilitas terhadap total aset (x)	0,80	0,81
TINGKAT EFISIENSI		
Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	83,72%	75,05%
<i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	52,69%	49,79%
KUALITAS KREDIT		
<i>Non Performing Loan</i> (NPL) – kotor	1,36%	1,43%
NPL – bersih	0,40%	0,44%
LIKUIDITAS		
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	142,68%	126,66%
KEPATUHAN		
Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan Rupiah		
GWM Primer	8,30%	8,20%
GWM PLM	9,49%	10,91%
Mata Uang Asing		
GWM Mata Uang Asing	4,02%	4,02%
GWM Perusahaan Anak Rupiah		
GWM Total	5,54%	5,77%
Posisi Devisa Neto (PDN) Perseroan	0,52%	0,33%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (*a member firm of KPMG International Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 22 Februari 2024 dan 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212), yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Mei 2024

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. Faktor yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup meliputi:

Kondisi Umum Perekonomian

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (“OECD”), dampak penuh terhadap output dari pengetatan kebijakan moneter yang cepat dan tersinkronisasi sejak awal tahun 2022 kemungkinan besar akan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, khususnya pada investasi swasta. Dengan adanya inflasi yang tetap tinggi, suku bunga diekspektasi untuk tetap tinggi, serta posisi berbagai negara untuk mempertahankan sikap fiskal yang ketat untuk meringankan beban utang yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, OECD memproyeksikan pertumbuhan global berada pada angka 3,0% pada tahun 2023 dan terus menurun menjadi 2,7% pada tahun 2024, karena inflasi inti yang masih tinggi dan risiko-risiko penurunan yang terus berlanjut. Pemulihan global yang lemah ini mencerminkan asumsi penurunan harga energi, serta pertumbuhan yang berasal dari negara-negara emerging market dan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC).

Perekonomian global sendiri telah membaik, dimana harga energi yang lebih rendah telah menurunkan inflasi umum di banyak negara dan mengurangi beban anggaran rumah tangga. Sebagai dampaknya, sentimen bisnis dan konsumen mulai meningkat kembali. Demikian pula dengan tekanan terhadap rantai pasokan, permintaan yang banyak juga dipandang sebagai pemicu tingginya inflasi. Meskipun demikian, selama beberapa waktu, inflasi yang mendasarinya secara konsisten lebih tinggi dan lebih susah turun dari perkiraan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menilai kapan tekanan inflasi dapat kembali ke tingkat yang ditargetkan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi diperkirakan akan melambat secara bertahap pada tahun 2023 dan 2024, dan diperkirakan akan tetap berada di atas target bank sentral di sebagian besar negara.

Menghadapi inflasi yang tetap tinggi, banyak negara melanjutkan penerapan kebijakan moneter yang ketat dengan harapan bahwa pengetatan kebijakan akan memungkinkan inflasi inti secara bertahap kembali ke tingkat sasarannya. Oleh karena itu, kebijakan moneter diperkirakan akan tetap restriktif hingga terdapat tanda-tanda jelas yang mendasarinya dan tekanan inflasi telah diturunkan ke tingkat yang memadai. Pada tahun 2023, kebijakan suku bunga tampaknya berada pada atau mendekati

puncaknya di sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat dan kawasan Eropa, dengan kebijaksanaan kebijakan lebih lanjut sangat bergantung pada data ekonomi yang baru dirilis pada tingkat yang memadai berbasis ad-hoc. Hal ini melibatkan data seperti indikator Purchase Managers Index (“PMI”) dan pesanan baru di bidang manufaktur, serta pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran dan lain-lain.

Walaupun situasi relatif terkontrol, masih terdapat downside risks, karena ketidakpastian mengenai kekuatan dan dampak kebijakan moneter, serta tetap stabilnya inflasi yang masih menjadi kekhawatiran utama. Persistensi inflasi memerlukan pengetatan kebijakan tambahan yang mungkin menunjukkan kerentanan keuangan melalui penilaian ulang secara tiba-tiba terhadap risiko likuiditas, jangka waktu dan kredit. Ketegangan politik global dan konflik antar negara juga telah berpengaruh terhadap pasokan dan harga komoditas pada tahun 2023. Situasi politik global yang masih berkelanjutan juga dapat berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia di tahun 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat berdampak lebih lanjut ke berbagai negara lain. Meskipun saat ini eskalasi terlihat dari dukungan negara-negara lain di seluruh dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa, terdapat juga risiko keterlibatan negara-negara Timur Tengah lainnya yang berpotensi memicu kembali tekanan inflasi dan mempengaruhi pasar energi global.

Federal Reserve Amerika Serikat terus mempertahankan posisi mereka untuk menaikkan suku bunga secara agresif untuk meredam inflasi. Sejauh ini, mereka telah menaikkan suku bunga Federal Funds sebesar 1% pada tahun 2023. Meskipun kenaikan ini tidak seagresif tahun sebelumnya pada tahun 2022, suku bunga Federal Funds terus meningkat dari kisaran antara 4,25% – 4,50% hingga kisaran 5,25% – 5,50% pada tahun 2023. Diyakini bahwa suku bunga acuan Federal Reserve Amerika Serikat masih dapat dinaikkan sekali lagi pada tahun 2023 ke level tertinggi di 5,50% – 5,75%. Namun, dengan perekonomian Amerika Serikat yang terus bertumbuh pada tingkat tren yang diperkirakan sekitar 1,80%, bahkan di kalangan pembuat kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat, perkiraan Pendapatan Domestik Bruto (“PDB”) rata-rata untuk tahun 2023 adalah 2,10%, Federal Funds Rate diperkirakan akan turun menjadi 5,1% pada akhir tahun 2024 dan 3,9% pada akhir tahun 2025. Ukuran utama inflasi bank sentral juga diproyeksikan turun menjadi 3,3% pada akhir tahun 2023, 2,5% pada tahun 2024 dan 2,2% pada akhir tahun 2025. Mengikuti perhitungan ini, Federal Reserve Amerika Serikat memperkirakan inflasi akan kembali ke target 2% pada tahun 2026.

Menurut Asian Development Bank (“ADB”), perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2023 dan tetap berada di 5,0% pada tahun 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan karena Indonesia terlihat memiliki kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta menjaga sektor keuangan yang stabil, serta posisi eksternal yang kuat. Meskipun kegiatan perbankan dan neraca perdagangan mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor barang, cadangan devisa dan nilai tukar Rupiah diperkirakan akan tetap stabil. Permintaan dalam negeri juga mendorong pertumbuhan dan mendukung pertumbuhan PDB. Selain itu, inflasi mereda lebih cepat dari perkiraan, dengan rata-rata laju inflasi Indonesia diperkirakan sebesar 3,6% pada tahun 2023 dan 3% pada tahun 2024. Pesatnya penurunan laju inflasi ini juga tercermin dari data inflasi terkini yang menunjukkan pada bulan September 2023, Indonesia mencatat tingkat inflasi tahunan sebesar 2,28% secara Year on Year (“YoY”), masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2% hingga 4%. Defisit fiskal juga diperkirakan akan tetap berada di bawah batas atas pada tahun 2023 dan 2024, yang diproyeksikan oleh ADB mencapai 2,30% dari PDB pada tahun 2023, dan 2,29% dari PDB pada tahun 2024. Meskipun secara global, suku bunga telah meningkat, Bank Indonesia telah mempertahankan suku bunga kebijakan pada angka 5,75% untuk sebagian besar tahun 2023, walaupun Bank Indonesia juga telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke 6% di bulan Oktober 2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan memberi sinyal untuk melakukan pengetatan lebih lanjut jika diperlukan. Meskipun demikian, inflasi telah ditekan dengan tetap menjaganya stabilitas perekonomian. Dalam kondisi ini, risiko-risiko negatif terhadap Indonesia sebagian besar berasal dari faktor eksternal, dengan dampak dari peristiwa-peristiwa seperti kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan lemahnya permintaan dari RRC yang mungkin membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal; meskipun peluang dan risiko yang ditimbulkan oleh pemilihan presiden mendatang pada tahun 2024 juga ada. Walaupun demikian, strategi diversifikasi Indonesia yang fokus pada kegiatan hilir komoditas mentah seperti nikel, dan permintaan domestik Indonesia yang kuat terus menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di Indonesia.

Kondisi Bank yang Sehat

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Grup mencatat rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) berada di level yang kuat. Posisi rasio kecukupan modal Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 30,31% dan 27,42%. Posisi CAR Grup berada diatas ketentuan yang ditetapkan oleh OJK yaitu sebesar 9%-10% sesuai dengan profil risiko Grup.

Kualitas Aset

Grup senantiasa berkomitmen menjaga kualitas kredit. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 rasio NPL – kotor masing-masing sebesar 1,36% dan 1,43%, relatif lebih rendah dibanding rata-rata industri yang tercatat sebesar 2,19% pada akhir Desember 2023.

Rentabilitas

Di tahun 2023, Grup mencatat pertumbuhan positif dengan meningkatnya pendapatan bunga yang tumbuh sebesar 18% YoY, sementara pendapatan bunga bersih tercatat sebesar Rp 12,04 triliun, atau naik 3%, di tengah kenaikan suku bunga.

Grup memutuskan untuk menambah pencadangan kredit yang juga sebagai bentuk antisipasi berakhirnya POJK relaksasi kredit restrukturisasi pada 31 Maret 2024. Melalui penambahan pencadangan ini, biaya kredit meningkat sebesar Rp 1,21 triliun. Kebijakan itu mempengaruhi laba bersih setelah pajak Grup (konsolidasi) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, sehingga lebih rendah 23,8% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 2,36 triliun.

Marjin pendapatan bunga bersih/*Net Interest Margin* (NIM) merupakan pendapatan bunga - bersih dibagi dengan rata-rata saldo aset produktif yang menghasilkan bunga (*interest earning assets*). Marjin pendapatan bunga bersih pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 6,45% dan 6,32%.

Rasio imbal hasil aset/*Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Grup dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimiliki. Rasio imbal hasil aset pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 1,73% dan 2,36%.

Rasio imbal hasil ekuitas/*Return on Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Grup dalam menghasilkan laba setelah pajak dari ekuitas yang dimiliki. Rasio imbal hasil ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 6,54% dan 9,15%.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi Grup. Rasio BOPO pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 83,72% dan 75,05%. Perseroan terus berupaya untuk melakukan efisiensi dalam segala bidang, sehingga investasi-investasi yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses bisnis.

2. Kebijakan Akuntansi Penting

Berikut ini adalah standar dan interpretasi standar yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023, memiliki pengaruh atas laporan keuangan konsolidasian Grup, dan mungkin akan membutuhkan penerapan secara retrospektif sebagaimana diatur dalam PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”:

- Amandemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”
- Amandemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait: Definisi Estimasi Akuntansi”
- Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan tentang: Pajak Tangguhan: Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal”
- Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan tentang: Reformasi Pajak Internasional – Modal Pilar Dua”

Penerapan standar akuntansi yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Terkait Amandemen PSAK 46 “Pajak Tanggahan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi Tunggal”, Bank mengakui aset pajak tanggahan tersendiri sehubungan dengan liabilitas sewa dan kewajiban pajak tanggahan sehubungan dengan aset hak guna nya. Namun, tidak ada dampak pada laporan posisi keuangan konsolidasian karena saldo memenuhi syarat untuk saling hapus sesuai PSAK 46. Lihat catatan 13f atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2023 untuk mengetahui dampak penerapan amandemen tersebut.

3. Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan Pemerintah dalam sektor keuangan dan perbankan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum. Perseroan senantiasa menyesuaikan kegiatan usahanya dengan perubahan peraturan dan kebijakan terbaru. Sebagai penyesuaian terhadap perubahan peraturan terkini, Perseroan telah melakukan penyesuaian aktivitas bisnis sebagaimana diatur didalam POJK No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Terkait dengan Peraturan Bank Indonesia No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah juncto Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana diubah dengan PADG No.21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, per 31 Desember 2019 Perseroan telah melakukan penyesuaian terkait GWM dalam Rupiah yang ditetapkan sebesar rata-rata 6,00% dari DPK Bank Umum Konvensional dalam Rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

- a. secara harian sebesar 3,00%; dan
- b. secara rata-rata sebesar 3,00%.

Peraturan Bank Indonesia No.21/1/ PBI/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing, di mana PBI ini terbit dalam rangka memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga dapat memitigasi berbagai risiko yang dapat timbul, agar tidak menimbulkan kerentanan terhadap sektor eksternal Indonesia. Selain itu, pengaturan mengenai ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing perlu selaras dengan perkembangan berbagai produk dan kegiatan perbankan terkini. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan penyesuaian ketentuan internal sesuai dengan PBI yang berlaku. Terhadap adanya Peraturan Bank Indonesia No.21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap kriteria pemenuhan giro RIM dan laporan RIM secara harian serta melakukan penyesuaian peraturan internal.

4. Kinerja Keuangan

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

ASET

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas	1.428.683	1.747.461
Giro pada Bank Indonesia	9.276.598	10.215.350
Giro pada bank-bank lain		
Pihak ketiga	500.326	1.549.854
Pihak berelasi	462.061	639.707
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)
	962.229	2.189.146

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8.961.654	21.885.214
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	2.624	2.851
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)
	8.964.278	21.887.894
Efek-efek		
Pihak ketiga	17.038.501	18.650.367
Pihak berelasi	-	185.510
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	225.855	214.812
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(799)	(999)
	17.263.557	19.049.690
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	636.924	1.131.664
Pihak berelasi	496.225	615.160
	1.133.149	1.746.824
Tagihan akseptasi	3.289.757	3.069.854
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.637)	(4.495)
	3.281.120	3.065.359
Pinjaman yang diberikan		
Pihak ketiga	141.400.072	132.208.660
Pihak berelasi	3.773.364	2.387.393
Pembiayaan/piutang syariah:		
Pihak ketiga	11.387.861	11.527.463
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	1.097.796	878.534
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.618.047)	(3.579.119)
	153.041.046	143.422.931
Penyertaan saham		
Pihak ketiga	80.086	80.973
Pihak berelasi	22.500	22.500
	102.586	103.473
Beban dibayar dimuka	1.184.067	1.465.142
Klaim pengembalian pajak	67.337	50.357
Aset pajak tangguhan	715.152	545.029
Aset tetap	5.040.250	5.109.182
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(2.992.438)	(2.990.677)
	2.047.812	2.118.505
Aset takberwujud dan <i>goodwill</i>	3.541.155	3.237.937
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(2.451.771)	(2.161.199)
	1.089.384	1.076.738
Aset lain-lain	996.966	538.312
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.572)	(52.507)
	891.394	485.805
JUMLAH ASET	201.448.392	209.169.704

Jumlah Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Pada tahun 2023, aset yang dibukukan Grup mencapai Rp 201.448.392 juta, lebih rendah 3,7% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 209.169.704 juta. Penurunan aset tersebut terutama disebabkan oleh karena optimisasi dan diversifikasi pendanaan yang di jalankan oleh Grup ditengah meningkatnya suku bunga. Optimisasi ini dijalankan dengan tetap memperhitungkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan kredit. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah mencapai Rp 156.561.297 juta, tumbuh 7,1% dari tahun 2022 yang sebesar Rp 146.123.516 juta.

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain turun sebesar Rp 12.923.560 juta (59,1%), dimana ruang yang ada di penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain digunakan untuk mendukung pertumbuhan kredit, serta menjaga rasio likuiditas dan pendanaan tetap sehat.

Pinjaman yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Grup mengelompokkan nasabah di lini usaha kredit menjadi 2 (dua) segmen: pertama *growing business* yang mencakup korporasi dan komersial, pembiayaan syariah, UKM, Jenius dan *Joint finance*; dan kedua *transforming business* yang mencakup *retail lending* dan mikro. Hingga tahun 2023, total kredit yang disalurkan Bank mencapai Rp 156.561.297 juta, lebih tinggi 7,1% dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp 146.123.516 juta. Peningkatan kredit terutama didorong oleh peningkatan pada segmen korporasi dan komersial sebesar 7,6% dibandingkan posisi tahun 2022, diikuti oleh segmen UKM, Jenius, dan Joint Finance yang masing-masing naik 17,7%, 131,1%, dan 681,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi segmentasi, sebagian besar realisasi pendanaan diserap oleh segmen *growing business* yang mencapai Rp 132.735.400 juta atau 84,8% dari total kredit. Kredit kepada korporasi dan komersial merupakan komponen utama dalam segmen tersebut, yang pada tahun 2023 nilainya Rp 104.904.359 juta atau 79,0% dari total kredit di segmen *growing business*.

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	71.606	59.045
Bagi hasil yang belum dibagikan	21.951	18.996
Simpanan nasabah		
Pihak ketiga	97.793.480	103.942.403
Pihak berelasi	484.276	1.080.884
Beban bunga yang masih harus dibayar	179.647	145.624
	98.457.403	105.168.911
Simpanan dari bank-bank lain		
Pihak ketiga	1.253.579	18.779
Pihak berelasi	9.561.059	147.352
Beban bunga yang masih harus dibayar	7.483	-
	10.822.121	166.131
Liabilitas derivatif		
Pihak ketiga	1.014.819	1.323.645
Pihak berelasi	57.285	124.091
	1.072.104	1.447.736
Liabilitas akseptasi		
Pihak ketiga	2.160.250	2.157.596
Pihak berelasi	163.383	199.232
	2.323.633	2.356.828
Utang pajak		
Pajak penghasilan badan	107.880	44.342
Pajak lain-lain	130.038	128.934
	237.918	173.276
Efek-efek yang diterbitkan		
Utang obligasi	200.569	200.134
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.514	1.514
	202.083	201.648

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
Pinjaman yang diterima		
Pihak ketiga	12.682.950	7.663.850
Pihak berelasi	18.569.798	37.257.744
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48.251)	(9.988)
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	151.020	155.802
	31.355.517	45.067.408
Akrual	478.981	453.992
Pinjaman subordinasi	3.079.400	3.113.500
Beban bunga yang masih harus dibayar	10.960	12.078
	3.090.360	3.125.578
Liabilitas imbalan kerja karyawan		
Imbalan kerja jangka pendek	511.188	443.476
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	170.105	64.228
	681.293	507.704
Liabilitas sewa	353.990	425.887
Liabilitas lain-lain	1.075.508	740.279
JUMLAH LIABILITAS	150.244.468	159.913.419
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Bukan Bank		
Tabungan mudharabah		
Pihak ketiga	887.890	763.070
Pihak berelasi	2.064	596
	889.954	763.666
Deposito mudharabah		
Pihak ketiga	8.997.932	9.043.060
Pihak berelasi	32.934	36.535
	9.030.866	9.079.595
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	9.920.820	9.843.261

Jumlah Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas (termasuk Dana Syirkah Temporer) Grup pada tahun 2023 tercatat mencapai Rp 160.165.288 juta, mengalami penurunan 5,7% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 169.756.680 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diterima sebesar 30,5% serta penurunan pada simpanan nasabah (termasuk Dana Syirkah Temporer) sebesar 5,8%. Pada tahun 2023, Bank melakukan pembayaran pinjaman luar negeri dari SMBC dalam rangka optimalisasi biaya dana dan pendapatan bunga bersih dengan tetap menjaga likuiditas dan pendanaan yang kuat.

Simpanan Nasabah

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Total simpanan nasabah (termasuk dana syirkah temporer) menurun 5,8%, dari Rp 114.866.548 juta di tahun 2022 menjadi Rp 108.198.576 juta pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan upaya untuk optimiliasi biaya dana sebagai respon atas kenaikan tingkat suku bunga. Penurunan disebabkan oleh penurunan saldo Deposito sebesar 14,3%. Sementara saldo CASA (*Current Account and Saving Account*) mengalami peningkatan sebesar 10,0%, terutama dari nasabah korporasi dan Jenius, sehingga pada akhir Desember 2023 rasio CASA mencapai 40,8%, meningkat dari 35,0% pada akhir Desember 2022. Sebagian besar dana nasabah Bank dalam bentuk deposito, yang pada tahun 2023 nilainya mencapai Rp 64.011.076 juta atau 59,2% terhadap total simpanan. Sedangkan simpanan dalam bentuk giro 24,6% dan tabungan 16,2%.

Simpanan dari Bank Lain

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Pada 31 Desember 2023, jumlah simpanan dari bank lain tercatat sebesar Rp 10.814.638 juta, meningkat dibandingkan posisi 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 166.131 juta. Peningkatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung likuiditas dan kenaikan pinjaman yang diberikan pada akhir tahun.

Surat Berharga yang diterbitkan

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Saldo Surat Berharga yang diterbitkan pada posisi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tercatat sebesar masing-masing Rp 200.569 juta dan Rp 200.134 juta.

Pinjaman yang diterima

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Hingga akhir Desember 2023, pinjaman yang diterima Bank mencapai Rp 31.204.497 juta, lebih rendah 30,5% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 44.911.606 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dari SMBC dalam rangka optimalisasi biaya dana dan pendapatan bunga bersih dengan tetap menjaga likuiditas dan pendanaan yang kuat.

Pinjaman Subordinasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Pinjaman Subordinasi pada posisi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tercatat sebesar masing-masing Rp 3.079.400 juta dan Rp 3.113.500 juta.

EKUITAS

(Dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Modal dasar Rp 300.000 terdiri dari 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20 (nilai penuh) per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.149.106.869 saham	162.982	162.982
Tambahan modal disetor	11.162.238	11.160.647
Cadangan revaluasi aset tetap	954.224	874.452
Cadangan nilai wajar – bersih	2.906	(7.704)
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(24.267)	(24.267)
Saldo laba		
- Dicadangkan	32.596	32.596
- Belum dicadangkan	26.369.641	24.702.316
Komponen ekuitas lainnya	260.801	260.801
Saham treasury	(254.695)	(255.147)
	38.666.426	36.906.676
Kepentingan non-pengendali	2.616.678	2.506.348
JUMLAH EKUITAS	41.283.104	39.413.024

Jumlah Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Komponen ekuitas terdiri atas modal saham, tambahan modal disetor, Cadangan revaluasi aset tetap, dan lain-lain. Hingga berakhirnya tahun buku 2023, total ekuitas Bank mencapai Rp 41.283.104 juta, naik 4,7% dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp 39.413.024 juta. Komponen ekuitas yang mengalami kenaikan, antara lain saldo laba dan kepentingan non-pengendali.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA TAHUN BERJALAN

(Dalam jutaan Rupiah)

	Tahun Berakhir 31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	13.069.491	10.525.856
Pendapatan syariah	5.746.182	5.373.790
	18.815.673	15.899.646
Beban bunga	(6.285.177)	(3.876.891)
Beban syariah	(486.433)	(344.440)
	(6.771.610)	(4.221.331)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH	12.044.063	11.678.315
Pendapatan operasional lainnya:		
Pendapatan operasional lainnya	1.423.949	1.228.130
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	649.494	784.485
	2.073.443	2.012.615
Beban operasional lainnya:		
Beban kepegawaian	(3.756.478)	(3.403.319)
Beban umum dan administrasi	(3.273.766)	(3.272.015)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.049.919)	(1.840.167)
Beban operasional lainnya	(576.308)	(517.753)
	(10.656.471)	(9.033.254)
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	3.461.035	4.657.676
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL		
Pendapatan non-operasional	10.053	10.020
Beban non-operasional	(13.406)	(10.377)
	(3.353)	(357)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.457.682	4.657.319
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(775.198)	(1.027.755)
LABA BERSIH	2.682.484	3.629.564
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	79.772	-
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(92.262)	(37.209)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	20.204	8.186
	7.714	(29.023)

(Dalam jutaan Rupiah)

	Tahun Berakhir 31 Desember	
	2023	2022
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
(Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	13.633	(160.999)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.999)	35.420
	<u>10.634</u>	<u>(125.579)</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	18.348	(154.602)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	2.700.832	3.474.962
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	2.358.334	3.095.701
Kepentingan non-pengendali	324.150	533.863
	<u>2.682.484</u>	<u>3.629.564</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	2.376.847	2.939.728
Kepentingan non-pengendali	323.985	535.234
	<u>2.700.832</u>	<u>3.474.962</u>
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)		
Dasar	293	384
Dilusian	293	384

Pendapatan Bunga dan Syariah

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Grup mencatatkan kenaikan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp 2.916.027 juta menjadi Rp 18.815.673 juta dari sebelumnya Rp 15.899.646 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan bunga dari pihak ketiga yang didominasi oleh pinjaman yang diberikan sesuai dengan pertumbuhan kredit terutama di segmen korporasi dan komersial, segmen SME dan pembiayaan syariah.

Beban Bunga dan Syariah

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Grup mencatatkan kenaikan beban bunga dan syariah sebesar Rp 2.550.279 juta menjadi Rp 6.771.610 juta dari sebelumnya Rp 4.221.331 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya dana sejalan dengan tren kenaikan suku bunga dan meningkatnya simpanan nasabah terutama deposito.

Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Secara keseluruhan, pendapatan bunga bersih mencapai Rp 12.044.063 juta, mengalami kenaikan sebesar 3,1% yoy dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang sejalan dengan peningkatan pendapatan bunga dan syariah yang lebih tinggi dibandingkan beban bunga dan syariah.

Pendapatan Operasional - bersih

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Grup memutuskan untuk menambah pencadangan kredit yang juga sebagai bentuk antisipasi berakhirnya POJK relaksasi kredit restrukturisasi pada 31 Maret 2024. Melalui penambahan pencadangan ini, biaya kredit meningkat sebesar Rp 1,21 triliun. Kebijakan itu mempengaruhi pendapatan operasional – bersih, sehingga menurun sebesar Rp 1.196.641 juta menjadi Rp 3.461.035 juta dari sebelumnya Rp 4.657.676 juta. Selain itu terjadi peningkatan di beban kepegawaian sebesar Rp 353.159 juta atau sebesar 10,4%. Peningkatan beban kepegawaian dikarenakan oleh kenaikan inflasi dan penyesuaian penghasilan karyawan.

Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Grup mencatatkan penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 947.080 juta atau 26,1% menjadi Rp 2.682.484 juta dari sebelumnya Rp 3.629.564. juta. Hal ini terjadi sehubungan dengan penurunan pendapatan operasional – bersih yang disebabkan adanya peningkatan di beban operasional yang disebabkan karena kenaikan biaya kepegawaian untuk penyesuaian tahunan dan kenaikan beban cadangan kerugian penurunan nilai.

Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Setelah Pajak

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Grup mencatatkan penurunan laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak sebesar 22,3% menjadi Rp 2.700.832 juta dari sebelumnya Rp 3.474.962 juta. Hal ini terjadi karena penurunan laba bersih tahun berjalan yang di *off-set* dengan kenaikan penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak yang sebesar Rp 172.950 juta atau 111,9%.

Arus Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dikontribusi oleh pendapatan bunga dan pendapatan syariah sedangkan untuk arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebagian besar digunakan untuk pembayaran bunga, pembayaran bagi hasil syariah, pembayaran tenaga kerja dan pembayaran untuk beban operasional lainnya. Arus kas dari aktivitas operasi juga dipengaruhi oleh adanya kenaikan dan penurunan dalam aset dan liabilitas operasional seperti pinjaman yang diberikan, pembiayaan/piutang syariah, simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain.

Pada periode 31 Desember 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi menjadi Rp 2.397.197 juta dari sebelumnya Rp 4.416.068 juta pada periode 31 Desember 2022.

Arus kas terkait dengan aktivitas pendanaan pada Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh adanya pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima, penerimaan pinjaman yang diterima dan pembayaran dividen. Pada periode 31 Desember 2023, arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan menjadi Rp 13.887.114 juta.

Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan dan Entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun Berakhir 31 Desember	
	2023	2022
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(2.397.197)	(4.416.068)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	394.010	3.151.992
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(13.887.114)	9.056.776
(Penurunan) Kenaikan bersih kas dan setara kas	(15.890.301)	7.792.700
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	(14.462)	3.376
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	39.377.753	31.581.677
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	23.472.990	39.377.753

Arus kas dari aktivitas operasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi pada tahun 2023 tercatat Rp 2,4 triliun, lebih rendah 45,7% dibandingkan kas yang digunakan selama tahun 2022 yaitu Rp 4,4 triliun.

Arus kas dari aktivitas investasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2023 mencapai Rp 0,4 triliun, lebih rendah 87,5% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 3,2 triliun

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 tercatat Rp 13,9 triliun, menurun 253,3% dibandingkan tahun 2022 dimana Perseroan sebaliknya memperoleh arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 9,1 triliun.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup mendapatkan likuiditas dari berbagai sumber. Sumber likuiditas internal Grup berasal dari, antara lain internal kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan obligasi Pemerintah serta penempatan pada bank lain. Sedangkan sumber eksternal berasal dari simpanan nasabah, pinjaman dari pemegang saham utama (SMBC) baik jangka panjang maupun jangka pendek, pinjaman bilateral dengan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yaitu IFC, dan BCA serta surat berharga yang diterbitkan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar Rp 40.326.914 juta. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Grup dari sumber-sumber tersebut, maka Grup berkeyakinan bahwa Grup memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal Grup. Akan tetapi jika terdapat kondisi stress seperti halnya yang sudah Grup sampaikan dalam Dokumen Rencana Aksi yang sudah disetujui oleh Pemegang Saham, maka beberapa langkah berikut dapat diambil yaitu memanfaatkan pendanaan dari SMBC Grup, menghentikan pencairan kredit, mengumpulkan pendanaan dari dana pihak ketiga, menerbitkan instrumen utang dan lain-lainnya.

6. Segmen Operasi Grup

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi Perseroan, yang bertindak sebagai pengambil keputusan operasional, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Grup telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan SAK 5: Segmen Operasi. Grup memiliki 5 (lima) pelaporan segmen, berdasarkan produk usaha, sebagaimana disajikan di bawah ini.

1. **Ritel.** Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah pensiunan dan nasabah individual lainnya.
2. **Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM).** Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah usah mikro, kecil dan menengah yang digunakan untuk kegiatan usaha.
3. **Penghimpunan dana dan treasury.** Terdiri dari aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga dan bank lain, serta aktivitas treasury termasuk pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan. Penghimpunan dana treasury berada di bawah direktorat yang sama.
4. **Korporasi.** Terdiri dari pinjaman dan layanan yang diberikan dari nasabah korporasi yang digunakan untuk kegiatan usaha.
5. **Syariah.** Merupakan lini segmen operasi atas Perusahaan Anak yang dimulai dari tanggal efektif beroperasi sebagai bank umum syariah. Terdiri dari pembiayaan syariah dan dana pihak ketiga dari nasabah syariah yang digunakan untuk kegiatan usaha. Dalam mengalokasikan beban operasional, manajemen mengatribusikan beberapa pos beban operasional sesuai dengan kebijakan pelaporan internal Grup.

(Dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan dan beban operasional							
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	3.842.949	1.208.448	1.158.880	6.864.214	5.746.182	-	18.815.673
Pendapatan bunga antar segmen	(1.966.935)	(694.991)	7.979.661	(5.317.735)	-	-	-
Beban bunga antar segmen	99.394	36.584	(3.550.414)	3.414.436	-	-	-
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(9.473)	(11.227)	(4.077.996)	(2.186.482)	(486.432)	-	(6.771.610)
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan - bersih	1.965.935	538.814	1.505.131	2.774.433	5.259.750	-	12.044.063
Pendapatan operasional lainnya:							
Pendapatan operasional lainnya	194.157	334.504	1.075.173	257.981	60.949	(498.815)	1.423.949
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	287	93.261	556.838	(892)	-	649.494
Pendapatan operasional lainnya	194.157	334.791	1.168.434	814.819	60.057	(498.815)	2.073.443
Beban operasional lainnya:							
Beban operasional lainnya	(1.650.923)	(717.917)	(2.023.436)	(1.171.656)	(2.042.620)	-	(7.606.552)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(296.016)	(120.903)	(278)	(734.605)	(1.898.117)	-	(3.049.919)
Beban operasional lainnya	(1.946.939)	(838.820)	(2.023.714)	(1.906.261)	(3.940.737)	-	(10.656.471)

(Dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan operasional lainnya - bersih	(1.752.782)	(504.029)	(855.280)	(1.091.442)	(3.880.680)	(498.815)	(8.583.028)
Pendapatan (beban) non-operasional	845	1.742	(6.745)	(20)	825	-	(3.353)
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	213.998	36.527	643.106	1.682.971	1.379.895	(498.815)	3.457.682
Beban pajak penghasilan	(39.525)	(6.747)	(118.780)	(310.840)	(299.306)	-	(775.198)
Laba (rugi) bersih	174.473	29.780	524.326	1.372.131	1.080.589	(498.815)	2.682.484

(Dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan dan beban operasional							
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	4.265.547	981.674	960.274	4.318.361	5.373.790	-	15.899.646
Pendapatan bunga antar segmen	(2.259.272)	(351.222)	5.192.551	(2.582.057)	-	-	-
Beban bunga antar segmen	91.090	20.948	(2.320.670)	2.208.632	-	-	-
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(21.769)	(4.349)	(2.577.615)	(1.273.158)	(344.440)	-	(4.221.331)
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan - bersih	2.075.596	647.051	1.254.540	2.671.778	5.029.350	-	11.678.315
Pendapatan operasional lainnya:							
Pendapatan operasional lainnya	160.206	218.666	840.897	279.535	61.818	(332.992)	1.228.130
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	286	189.913	590.458	3.828	-	784.485
Pendapatan operasional lainnya	160.206	218.952	1.030.810	869.993	65.646	(332.992)	2.012.615
Beban operasional lainnya:							
Beban operasional lainnya	(1.587.330)	(881.123)	(1.904.827)	(950.315)	(1.869.492)	-	(7.193.087)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(234.311)	(269.769)	482	(391.517)	(945.052)	-	(1.840.167)
Beban operasional lainnya	(1.821.641)	(1.150.892)	(1.904.345)	(1.341.832)	(2.814.544)	-	(9.033.254)
Pendapatan operasional lainnya - bersih	(1.661.435)	(931.940)	(873.535)	(471.839)	(2.748.898)	(332.992)	(7.020.639)
Pendapatan (beban) non-operasional	1.516	698	(4.502)	(11)	1.942	-	(357)
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	415.677	(284.191)	376.503	2.199.928	2.282.394	(332.992)	4.657.319
Beban pajak penghasilan	(80.581)	55.092	(72.987)	(426.465)	(502.814)	-	(1.027.755)
Laba (rugi) bersih	335.096	(229.099)	303.516	1.773.463	1.779.580	(332.992)	3.629.564

7. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi atau Perubahan Penting dalam Ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal, jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

8. Risiko Fluktuasi Mata Uang dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing timbul dari adanya posisi neraca dan komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet*) baik di sisi aset maupun liabilitas yang timbul melalui transaksi mata uang asing.

Perseroan mengukur risiko nilai tukar untuk melihat dampak perubahan nilai tukar pada pendapatan dan modal Perseroan. Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, pembatasan posisi secara internal ditetapkan jauh di bawah limit posisi devisa neto yang ditetapkan regulator. Perseroan juga memonitor stop loss limit untuk menjaga tingkat kerugian karena pergerakan nilai pasar tidak melebihi kisaran yang telah ditetapkan.

Risiko Tingkat Bunga

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak yang berasal dari kegiatan konvensional merupakan selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko tingkat bunga berdampak pada fluktuasi arus kas di masa mendatang baik pada aset maupun liabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan bunga Perseroan maupun nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak.

9. Batasan Pengalihan Dana Entitas Anak Kepada Perseroan

Sampai saat ini Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kebijakan internal terkait batasan pengalihan dana entitas anak kepada Perseroan. Namun apabila ada transaksi terkait hal tersebut, Perseroan akan mengacu pada POJK terkait Transaksi Afiliasi.

10. Pinjaman Perseroan

Pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 31.355.517 juta, yang terdiri atas:

	31 Desember 2023
Pihak ketiga:	
Pinjaman bank:	
PT Bank Central Asia Tbk	6.000.000
Pinjaman bukan bank:	
International Finance Corporation	6.682.950
	12.682.950
Pihak berelasi:	
Pinjaman bank:	
SMBC	18.569.798
	31.252.748

31 Desember 2023

Dikurangi:	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48.251)
Ditambah:	
Beban bunga yang masih harus dibayar	151.020
	31.355.517

Pada tanggal 31 Desember 2023, pinjaman yang diterima termasuk beban transaksi yang terkait langsung dengan pinjaman yang diterima sebesar Rp 52.745 juta.

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

Nama Bank	Fasilitas	Batas Maksimum Kredit (dalam jutaan)	Perjanjian Terakhir		Suku Bunga Kontraktual	Cicilan pokok
			Awal	Akhir	31 Desember 2023	
PT Bank Central Asia Tbk	Pinjaman <i>Revolving Term Loan I</i>	Rp500.000	15 Mei 2009	12 Mei 2022	JIBOR+0,40%	Setiap tiga bulan sekali
	Pinjaman <i>Revolving Term Loan III</i>	Rp1.000.000	1 April 2015	27 September 2023	JIBOR+0,40%	Setiap tiga bulan sekali
	Pinjaman <i>Non-Revolving Term Loan IV</i>	Rp1.000.000	10 Juni 2015	24 Mei 2023	JIBOR +0,40%	Setiap satu bulan sekali
	Pinjaman <i>Non-Revolving Term Loan II</i>	Rp2.500.000	29 April 2020	4 Mei 2023	JIBOR +0,40%	Setiap tiga bulan sekali
	Pinjaman <i>Revolving Term Loan VI</i>	Rp1.000.000	29 November 2022	-	JIBOR +0,40%	Setiap tiga bulan sekali
PT Bank UOB Indonesia	<i>Committed Term Loan I</i>	Rp1.000.000	18 Agustus 2021	-	Suku Bunga acuan 3 bulan + 0,25%	Setiap tiga bulan sekali
	<i>Committed Term Loan II</i>	Rp1.000.000	23 September 2022	-	Suku Bunga acuan 3 bulan + 0,30%	Setiap tiga bulan sekali
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Akad Mudharabah	Rp100.000	-	-	Bagi hasil setara 5%	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Cabang Singapura	<i>Revolving Long-Term Borrowings</i>	USD3.625	-	-	SMBC Cost of fund + margin tertentu	Tidak ada cicilan pokok (Pokok dibayarkan pada saat jatuh tempo)

Seluruh pinjaman yang diterima oleh Perseroan digunakan untuk modal kerja. Berdasarkan perjanjian pinjaman yang diterima oleh Perseroan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang disyaratkan.

11. Belanja Modal

Belanja modal Grup di masa lalu sebagian besar terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud. Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2023	2022
Aset tetap	218.932	207.746
Aset tak berwujud	436.590	433.840
Jumlah	655.522	641.586

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Efek biaya yang mungkin timbul dari arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga kinerja Perseroan masih dapat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Pembelian barang modal dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Tujuan dari investasi barang modal adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga pendapatan yang nantinya akan dihasilkan juga akan naik akibat dari investasi barang modal tersebut.

Perseroan tidak melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Komitmen Belanja Modal

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki komitmen belanja modal yang material.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak positif ataupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dan entitas anak dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat memengaruhi kinerja maupun harga Obligasi baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit

Risiko kredit pada Perseroan yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk dan settlement risk.

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur pada segmen korporasi dan pensiun dalam memenuhi kewajibannya. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, maka dapat menurunkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan. Kelompok kredit terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan berdasarkan sektor ekonomi adalah industri pengolahan dan rumah tangga

Risiko kredit Perseroan untuk segmen korporasi terutama diakibatkan potensi penurunan kinerja debitur antara lain karena faktor kondisi ekonomi makro maupun sebagai dampak residu dari pandemi sementara itu risiko kredit segmen Pensiun terutama diakibatkan terhambatnya penyaluran manfaat uang pensiun bulanan yang diterima oleh debitur sebagai sumber utama pembayaran cicilan sehingga kredit menjadi tidak tertagih.

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Grup

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang diperoleh dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari asetnya dengan biaya bunga kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat suku perbankan dapat berakibat negatif bagi Perseroan sebagai akibat kesenjangan aset dan kewajiban. Lebih lanjut lagi, dengan adanya peningkatan suku bunga kredit akan berdampak pada menurunnya kemampuan para debitur dalam mengembalikan pinjaman dan pembayaran bunga sehingga berdampak pada kinerja Perseroan

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dapat terjadi jika kesenjangan pendanaan meningkat, atau jika Perseroan tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan/dijual, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangannya.

Risiko likuiditas disebabkan dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang umumnya berjangka waktu pendek yang terutama berasal dari Dana Pihak Ketiga sementara kredit yang diberikan pada umumnya memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang. Selain itu ketergantungan pada deposit besar yang jumlahnya signifikan, akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang akan mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (rush) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional bank.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan Perseroan secara langsung dan tidak langsung dan kerugian potensial akan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan mengganggu pelayanan kepada nasabah. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah Perseroan yang pada akhirnya mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Hukum

Kegiatan usaha Perseroan tunduk kepada peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan, serta pengawasan antara lain oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia ("Regulator"). Dalam rangka menerapkan fungsi pengawasan, Regulator memiliki wewenang untuk menetapkan dan memberlakukan peraturan, mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan untuk memastikan integritas pasar keuangan serta kepentingan nasabah dan pihak lainnya yang bertransaksi dengan Perseroan. Kegagalan dari Perseroan untuk memenuhi ketentuan hukum dapat menyebabkan antara lain, penyelidikan, tuntutan, denda serta pembatasan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan juga kemungkinan menghadapi pihak yang berlawanan (bisa nasabah/debitur) yang mengambil tindakan hukum terhadap Perseroan atau karyawan Perseroan yang disebabkan antara lain anggapan adanya kegagalan dalam pemberian layanan atau pemasaran produk keuangan.

Paparan risiko hukum dimitigasi dengan penyusunan proses dan pengendalian internal yang tepat serta kepatuhan Perseroan secara ketat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Mengingat reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan, maka hilangnya kepercayaan nasabah tersebut dapat berdampak langsung pada menurunnya jumlah nasabah dan pendapatan, serta peningkatan biaya untuk aktivitas kehumasan.

Risiko Strategi

Risiko Strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan risiko strategi dilakukan guna mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun corporate plan dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Perseroan yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan review minimal semesteran;
2. Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk corporate plan dan business plan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul jika Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan berupa sanksi administratif yaitu denda atau sanksi administratif lainnya berupa teguran tertulis, larangan untuk menerbitkan produk baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, larangan melakukan kegiatan usaha baru, penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank serta larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Hal ini berpotensi menurunkan penilaian tata kelola bank termasuk kinerja Perseroan secara non finansial.

3. Risiko Umum

Kondisi perekonomian secara makro atau global

Kondisi perekonomian berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

Perubahan kurs valuta asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Perseroan sebagai Bank Devisa memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing yang terpengaruh oleh perubahan valuta asing. Fluktuasi nilai tukar yang tidak sesuai dengan kesenjangan aset dan kewajiban Perseroan dalam valuta asing dampak berdampak kepada risiko kerugian yang dihadapi oleh Perseroan. Pengelolaan yang baik terhadap kesenjangan antara posisi aset dan kewajiban Perseroan dalam valuta asing akan dapat meminimalisasi potensi kerugian tersebut.

Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha perusahaan terbuka

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib dan meyakini telah memenuhi seluruh perizinan dan/ atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, jika perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat menghadirkan risiko bagi Perseroan, terutama jika Perseroan tidak memahami atau tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut, maka dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha dan kinerja Perseroan.

Tuntutan atau gugatan hukum

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terkait dan/atau terlibat dalam perkara atau sengketa hukum, ataupun menghindari tuntutan dan gugatan hukum. Dalam menjalankan bisnis perseroan, tidak terdapat jaminan bahwa kedepannya Perseroan akan dapat menghindari tuntutan dan gugatan hukum yang ditujukan ke Perseroan. Apabila pada putusannya, Perseroan dinyatakan bersalah dalam tuntutan dan gugatannya, maka akan berdampak negatif terhadap Perseroan secara material.

Kebijakan Pemerintah

Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk beradaptasi dengan setiap perubahan kebijakan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha dan kinerja Perseroan.

Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional timbul ketika terdapat perubahan kebijakan negara lain atau ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi internasional yang dapat berdampak bagi strategi dan aktivitas bisnis Perseroan. Untuk hal ini termasuk dan tidak terbatas pada perubahan kebijakan suku bunga pada bank sentral negara lain, perkembangan situasi geopolitik maupun kebijakan pada aktivitas perdagangan internasional dan faktor lainnya yang dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan.

4. Risiko bagi investor

1. Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
3. Risiko penurunan nilai obligasi, risiko ini terjadi jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan.
4. Risiko peraturan dan/ atau perundang-undangan, jika ada peraturan atau perundang-undangan, misal perpajakan, yang berlaku yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN SUSUNAN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING- MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Mei 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Keterangan Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasmita, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Dedeh Ramdah Sukarna, S.H., notaris pengganti dari Komar Andasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No. 1148 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Bapemil yang telah beroperasi sejak tahun 1959. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

	Modal saham dengan nilai nominal Rp 1.040.000 per saham Seri A & Rp 1.000.000 per saham Seri B		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		1.500.000.000	
Saham Seri A	750	780.000.000	
Saham Seri B	720	720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A			
Marua Radja Laut Siahaan	90	93.600.000	13
Mochamad Abdul Fatah	30	31.200.000	4,3
Sirodjudin Soerodjo	30	31.200.000	4,3
Said Martinus Sinurat	30	31.200.000	4,3
Moehamad Junus Harahap	30	31.200.000	4,3
Soetojo	30	31.200.000	4,3
Saliman Danuwidagdo	30	31.200.000	4,3
Bambang Sutisna	30	31.200.000	4,3
Hernard Sitanggung	30	31.200.000	4,3
Ules Sutrisna	30	31.200.000	4,3
Imam Soebari	30	31.200.000	4,3
Sudaryati	30	31.200.000	4,3
Gandhi	30	31.200.000	4,3
Sri Hartini	30	31.200.000	4,3
Johannes Soedarno	30	31.200.000	4,3
Kamsijah Tjokrosoeharto	30	31.200.000	4,3
Nita	30	31.200.000	4,3
Sugiyono	30	31.200.000	4,3
Atjep Suryana	30	31.200.000	4,3
Mohamad Darwin	30	31.200.000	4,3
Laurencius Siagian	30	31.200.000	4,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	690	717.600.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	60	62.400.000	
Saham Seri B	720	720.000.000	

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 55 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0069408 tanggal 21 Maret 2024 ("Akta Perseroan No. 55/2024") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 57 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0073264 tanggal 26 Maret 2024 ("Akta Perseroan No. 57/2024").

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian hingga terakhir diubah dengan Akta Perseroan No. 55/2024 dan 57/2024 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Kegiatan usaha utama, yaitu:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

2) Kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah:
 - o Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - o Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - o Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
 - o Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - o Obligasi;
 - o Surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - o Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;
- Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali pemyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- Menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu:

- Izin Bank Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung
- Izin Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana No. 02/PM.2/STTD/APERD/2016 tanggal 29 Juni 2016.
- Izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan no. KEP-80/D.03/2015 tentang Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta asing Bagi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
- Izin Penyedia Jasa Pembayaran Kategori Izin 1, berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 23/680/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021 tentang Konversi Izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Pasca Pemberlakuan Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

2022

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	Modal saham dengan nilai nominal Rp 20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SMBC	7.532.311.297	150.646.225.940	92,431%
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1.661.048.160	1,019%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,147%
Darmadi Sutanto	311.120	6.222.400	0,004%
Merisa Darwis	220.858	4.417.160	0,003%
Henoch Munandar	172.256	3.445.120	0,002%
Hanna Tantani	146.654	2.933.080	0,002%
Dini Herdini	117.072	2.341.440	0,001%
Hikomichi Kubo	64.164	1.283.280	0,001%
Kaoru Furuya	1.500	30.000	0,000%
Kan Funakoshi	1.500	30.000	0,000%
Ongki Wanadjati Dana	860.804	17.216.080	0,011%
Publik / Public	427.377.301	8.547.546.020	5,244%
Saham Treasuri / Treasury Stock	92.462.798	1.849.255.960	1,135%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.149.106.869	162.982.137.380	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	6.850.893.131	137,017,862,620	

2023

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	Modal saham dengan nilai nominal Rp 20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SMBC	7.332.311.297	146.646.225.940	89,977%
PT Bank Negara Indonesia (perseroan) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,1475%
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1.661.048.160	1,019%
Merisa Darwis	222.358	4.447.160.	0,003%
Henoch Munandar	173.756	3.475.120.	0,002%
Hanna Tantani	148.154	2.963.080	0,002%
Dini Herdini	118.572	2.371.440	0,001%
Darmadi Sutanto	89.120	1.782.400	0,001%
Kaoru Furuya	3.000	60.000	0,000%
Ongki Wanadjati Dana	860.804	17.216.080	0,011%
Publik / Public	627.828.065	12.556.561.300	7,704%
Saham Treasuri / Treasury Stock	92.292.198	1.845.843.960	1,133%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.149.106.869	162.982.137.380	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	6.850.893.131	137.017.862.620	

2024

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir, adalah sebagai berikut:

	Modal saham dengan nilai nominal Rp 20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SMBC	9.692.826.975	193.856.539.500	91,05%
Masyarakat (masing-masing <5%)	953.118.773	19.062.375.460	8,95%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.645.945.748	212.918.914.960	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	4.354.054.252	87.081.085.040	

3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Izin Usaha Perseroan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hingga tanggal diterbitkan Prospektus ini, Perseroan memiliki izin usaha sebagai berikut

Izin usaha Umum

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	9120101411917	Badan Koordinasi Penanaman Modal/ OSS	11 April 2019	-
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.139.797.3-091.000	KPP Wajib Pajak Besar Satu	-	-
3.	Surat Keterangan Terdaftar	S-1KT/WPJ.19/KP.0103/2019	KPP Wajib Pajak Besar Satu	26 Maret 2010	-
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak	S-1PKP/WPJ.19/KP.0103/2019	KPP Wajib Pajak Besar Satu	29 Maret 2010	-

Izin Khusus

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Bandung beserta 26 kantor cabangnya di Indonesia	Kep-055/KM.17/1993	Menteri Keuangan	22 Maret 1993	-
2.	Surat Bank Indonesia perihal Izin Usaha Perseroan sebagai Bank Umum	26/5/UPBD/PBD2/Bd	Bank Indonesia	22 April 1993	-
3.	Surat Keputusan OJK perihal Persetujuan Izin Penyelenggaraan Aktivitas Layanan Perbankan Elektronik Pinjaman Laku Pandai (Pico Loan)	S-22/PB.313/2018	Otoritas Jasa Keuangan	14 Februari 2018	-
5.	Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing	KEP-80/D.03/2015	Otoritas Jasa Keuangan	21 Desember 2015	-
6.	Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksadana	02/PM.2/STTD/APERD/2016	Otoritas Jasa Keuangan	29 Juni 2016	-
7.	Surat Bank Indonesia tentang Konversi Izin penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Pasca Pemberlakuan Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran	23/680/DKSP/Srt/B	Bank Indonesia	1 Juli 2021	-

Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki total 1 Kantor Pusat Operasional, 9 Kantor Wilayah Non Operasional, 58 Kantor Cabang (KC), 197 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 1 Kantor Fungsional Operasional, 18 Payment Point, dan 214 ATM. Adapun Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memperoleh izin khusus dan/atau operasional atas masing-masing kantor cabang berupa izin pembukaan, izin perubahan status, izin pemindahan alamat dan/atau izin penutupan dari OJK.

Izin Usaha Anak Perusahaan

Hingga tanggal diterbitkan Prospektus ini, Anak Perusahaan telah memiliki izin usaha sebagai berikut:

A. PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Izin Umum

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	9120209291387	Badan Koordinasi Penanaman Modal/ OSS	18 April 2019	-
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.551.806.1-511-000	KPP Wajib Pajak Besar Satu	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-37KT/WPJ.10/KP.1003/2018	KPP Wajib Pajak Besar Satu	9 April 2007	-
5.	Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.64.92406	-	16 Juli 2019	-

Izin Khusus

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum	1060/KMK.017/1992	Menteri Keuangan	14 Oktober 1992	-
2.	Surat Bank Indonesia perihal Izin Usaha Perseroan sebagai Bank Umum	25/5/UPBD/PBD2/Sm	Bank Indonesia	2 Desember 1992	-
3.	Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Sahabat Purba Danarta	KEP-49/D-03/2014	Otoritas Jasa Keuangan	23 Mei 2014	-

B. PT BTPN Syariah Ventura

Izin Umum

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	0411210043066	Badan Koordinasi Penanaman Modal/ OSS	-	-
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	53.077.726.7-063.000	KPP Wajib Pajak Besar Satu	-	-

Izin Khusus

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan Modal Ventura Syariah	KEP- 23/0.05/2022	Otoritas Jasa Keuangan	20 Mei 2022	-

C. PT Oto Multiartha

Izin Umum

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	8120216201325	Badan Koordinasi Penanaman Modal/ OSS	12 Desember 2018	Selama menjalankan kegiatan usaha
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.615.041.0-910.000	Direktorat Jenderal Pajak	-	-

Izin Khusus

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Keputusan Menteri Keuangan No. tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Manunggal Multi Finance	556/KMK.017/1994	Kementerian Keuangan	10 November 1994	-

D. PT Summit Oto Finance

Izin Umum

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	8120216291426	Badan Koordinasi Penanaman Modal/ OSS	12 Desember 2018	Selama menjalankan kegiatan usaha
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.357.047.8-062.000	Direktorat Jenderal Pajak	-	-
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	S-PEM-101/WPJ.04/ KP.1103/2007	Direktorat Jenderal Pajak	5 April 2007	

Izin Khusus

No.	Nama Izin/Dokumen/Sertifikat	No. Izin/Dokumen/Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku
1.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Summit Sinar Mas Finance	1601/KMK.013/1990	Kementerian Keuangan	28 Desember 1990	-
2.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1601/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Summit Sinar Mas Finance	KEP-243/KM.6/2003	Kementerian Keuangan	30 Juni 2003	-

4. Perjanjian Penting

Tidak terdapat syarat-syarat tertentu (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian kredit/material sebagai berikut:

a. Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation

- 1) Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019 antara Perseroan dengan International Finance Corporation (IFC) sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Nomor 1 tanggal 2 Februari 2021 dan Amandemen Nomor 2 tanggal 22 Februari 2022 (“**Perjanjian Pinjaman IFC**”)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman IFC, IFC setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan hingga jumlah dalam Rupiah yang setara dengan USD 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman IFC adalah untuk memberikan kredit yang bersifat credit line yang akan digunakan untuk mendanai (i) Pinjaman untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang milik perempuan, (ii) pinjaman *green loan*, dan (iii) pinjaman *SCF loan*. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya setiap jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan (disbursement), yaitu tahun kelima sejak tanggal tiap disbursement. Perseroan tidak dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi.

- 2) Perjanjian Pemesanan Obligasi Hijau dan Sosial tertanggal 20 Juni 2023 (“**Obligasi IFC**”)

Berdasarkan perjanjian Obligasi IFC, IFC setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan hingga jumlah maksimum sebesar USD 500.000.000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu, Obligasi Hijau sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat), Obligasi Sosial sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat), dan Obligasi lainnya sebesar USD 100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan perjanjian Obligasi IFC adalah untuk memberikan kredit yang Pembiayaan dan pembiayaan kembali oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan membiayai UMKM yang secara mayoritas dimiliki oleh perempuan. Pembayaran kembali dilakukan pada saat tahun kelima sejak tanggal tiap disbursement. Perseroan tidak dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi.

b. Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”)

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perjanjian pinjaman dengan BCA sebagai berikut:

- 1) Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 10 Juni 2015 tentang Term Loan antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit Nomor: 176/Add-KCK/2023 antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk tanggal 24 Mei 2023 (“**BCA TL4**”).

Berdasarkan BCA TL4, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa fasilitas time loan revolving dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan Perjanjian BCA Juni 2015 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah margin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya penarikan (drawdown), yang merupakan periode yang jatuh pada 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penarikan sesuai dengan pilihan Perseroan pada setiap penarikan. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (revolving loan) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi. Perseroan telah melakukan penarikan sejumlah Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada tanggal 28 Desember 2023, yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2024.

- 2) Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 15 Mei 2009 tentang Term Loan antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk dibuat dihadapan Sri Buena Brahmna sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga Belas Atas Perjanjian Kredit Nomor: 398/Add-KCK/2023 antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk tanggal 10 November 2023 (“**BCA TL1**”).

Berdasarkan BCA TL1, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa fasilitas *committed term loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan Perjanjian BCA Mei 2009 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah margin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo yang dapat dipilih oleh Perseroan pada saat penarikan. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi. Perseroan telah melakukan penarikan sejumlah Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada tanggal 28 Desember 2023, yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2025.

- 3) Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 4 Mei 2018 tentang Term Loan Non Revolving antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit Nomor: 144/Add-KCK/2023 antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk tanggal 4 Mei 2023 (“**BCA TL2**”).

Berdasarkan BCA TL2, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa *term loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan Perjanjian BCA Mei 2018 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah margin. Pembayaran kembali dilakukan pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tersebut tidak boleh melebihi tanggal 4 November 2024. Perseroan dapat melakukan penarikan fasilitas kredit selanjutnya hanya berdasarkan persetujuan tertulis BCA dan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BCA.

- 4) Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 April 2015 tentang term loan agreement antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedelapan No. 343/Add-KCK/2023 tanggal 27 September 2023 (“**BCA TL3**”).

Berdasarkan BCA TL3, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa *time loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan BCA TL3 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah margin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tersebut tidak boleh melebihi tanggal 1 April 2025. Perseroan dapat melakukan penarikan fasilitas dengan memenuhi ketentuan-ketentuan khusus berdasarkan Perjanjian BCA TL3. Berdasarkan BCA TL3, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada BCA untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada BCA melalui Surat No. S.009/TRS/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

c. Perjanjian Pinjaman dengan SMBC Singapura

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perjanjian pinjaman dengan SMBC Singapura, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Perubahan tanggal 15 Desember 2017

Perjanjian pinjaman tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 26 November 2021 antara Perseroan dengan SMBC Singapura (“**Perjanjian Pinjaman SMBC 15 Desember**”)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMBC 15 Desember, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman 1 tahun atau lebih namun kurang dari 2 tahun, (b) 0,625% per tahun untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (c) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 3 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1% untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, (f) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Jatuh tempo terjadi pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap notice of borrowing atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu 30 November 2024, yang mana yang lebih dulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

2) Perjanjian Pinjaman tanggal 29 November 2019

Perjanjian pinjaman tanggal 29 November 2019 antara Perseroan dengan SMBC Singapura sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 30 November 2023 (“**Perjanjian Pinjaman USD 525 Juta SMBC 29 November**”)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman USD 525 Juta SMBC 29 November 2019, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,66% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (d) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari 3 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (e) 1,0% untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (f) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun; dan (g) 1,32% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Jatuh tempo terjadi pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap notice of borrowing atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu 27 November 2026, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

3) Perjanjian Pinjaman tanggal 22 Oktober 2020

Perjanjian pinjaman tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 29 November 2023 antara Perseroan dengan SMBC Singapura (“**Perjanjian Pinjaman SMBC 22 Oktober**”)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMBC 22 Oktober, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD 800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,66% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (d) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari 3 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (e) 1% untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (f) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, dan (g) 1,32% untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Jatuh

tempo terjadi pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap notice of borrowing atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu 22 Oktober 2027, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

4) Perjanjian Pinjaman USD 400 Juta tanggal 15 Maret 2022

Perjanjian pinjaman tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 21 Maret 2023 antara Perseroan dengan SMBC Singapura ("**Perjanjian Pinjaman 1 SMBC 15 Maret**")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman 1 SMBC 15 Maret, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,66% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,75% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,98% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 1,10% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1,20% untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, (f) 1,34% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Jatuh tempo terjadi pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap notice of borrowing atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu 15 Maret 2029, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

5) Perjanjian Pinjaman USD 500 Juta tanggal 15 Maret 2022

Perjanjian pinjaman tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 21 Maret 2023 antara Perseroan dengan SMBC Singapura ("**Perjanjian Pinjaman 2 SMBC 15 Maret**").

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman 2 SMBC 15 Maret, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD 500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,66% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,75% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,98% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 1,10% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1,20% untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, (f) 1,34% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Jatuh tempo terjadi pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap notice of borrowing atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu 15 Maret 2027, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

6) Perjanjian pinjaman USD 300 Juta tanggal 21 Maret 2023

Perjanjian pinjaman tanggal 29 November 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 21 Maret 2023 antara Perseroan dengan SMBC Singapura ("**Perjanjian Pinjaman USD 300 Juta SMBC 29 November**")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman USD 300 Juta SMBC 29 November, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) margin dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,66% per tahun

untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,75% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,98% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 1,10% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1,20% untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, (f) 1,34% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Jatuh tempo terjadi pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu 28 November 2025, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

d. Perjanjian Perwaliamanatan dengan PT Bank Mega Tbk (“MEGA”)

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 Nomor 24 tanggal 11 September 2019, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Nomor 9 tanggal 7 November 2019, keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“PWA PUBO IV”).

PWA PUBO IV ini adalah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Perseroan kepada masyarakat, dengan nilai emisi maksimum sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) yang diterbitkan melalui obligasi tahap 1 dan/atau tahap selanjutnya (jika ada). Obligasi Tahap 1 diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A sebesar Rp 799 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 26 November 2022 dan Seri B sebesar Rp201 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 26 November 2024. Bunga yang berlaku bagi obligasi Seri A adalah 7,55% tingkat bunga tetap dan Seri B sebesar 7,75% tingkat bunga tetap. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali amanat berakhir pada saat (i) obligasi telah dilunasi baik pokok obligasi, bunga obligasi, termasuk denda (jika ada) dan wali amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban emiten dari agen pembayaran, (ii) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan PT Bank Mega setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi atau, (iii) setelah diangkatnya wali amanat baru. Sampai dengan Tanggal Prospektus, jumlah yang terutang berdasarkan Obligasi Seri A telah dibayar lunas.

e. Perjanjian Kerjasama dengan PT Pos Indonesia

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Pos Indonesia (“PT Pos”), sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerja Sama tentang Referensi untuk Pembiayaan Kredit No. PKS.165/DIR-4/0822 dan No. PKS.023/DIR/RLBP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama referensi pembiayaan kredit bagi pensiunan yang uang pensiunnya dibayarkan oleh atau melalui PT Pos, pensiunan Aparatur Sipil Negara, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan PT Pos, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perjanjian kerja sama berlaku sejak 26 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2024.

- 2) Perjanjian Kerja Sama tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Anggaran Kredit Pensiun dan Pemeliharaan Data (*Flagging*) Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara/Pensiunan PT Pos/TNI/POLRI dan Pensiunan yang Memperoleh Kredit melalui PT Bank BTPN Tbk. No. PKS.155/DIR-4/0822 dan No. PKS.018/DIR/RLBP/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama pemotongan uang pensiun yang dibayarkan di jaringan kantor PT Pos untuk membayar angsuran fasilitas kredit yang disalurkan oleh Perseroan dan PT Pos akan mewakili Perseroan untuk mengajukan permohonan *flagging* data debitur Perseroan kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Perjanjian kerja sama berlaku sejak 26 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2024.

f. Perjanjian Kerjasama dengan PT Taspen (Persero)

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan kantor bayar Perseroan oleh PT Taspen (Persero) ("**Taspen**") sebagai perpanjangan tangan Taspen dalam melayani peserta (yaitu antara lain ASN, pejabat negara, anggota DPRD dan pegawai non-PNS) dan penerima pensiun (yaitu antara lain penerima pensiun PNS pusat, PNS daerah, pejabat negara, hakim, pensiun PNS eks pegawai, serta penerima tunjangan veteran, dana kehormatan veteran, PKRI dan KNIP yang dibayarkan oleh Taspen). Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank No. JAN-412/DIR/2022 dan No. PKS.003/DIR/RLBSRM/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui Rekening Bank No. JAN-97/DIR/2024 dan No. PKS.047/DIR/RLBP/IV/2024 tanggal 6 Mei 2024. Perjanjian kerja sama berlaku sampai dengan 30 Maret 2026.

g. Perjanjian Bancassurance Model Bisnis Referensi dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama untuk mereferensikan produk Asuransi Jiwa Kumpulan (Mortgage Redemption Insurance/MRI) yang diterbitkan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Tbk) kepada nasabah Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama *Bancassurance* Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (*Mortgage Redemption Insurance* (MRI)) No. PKS.001/RLBPM/I/2022 tanggal 12 Januari 2022. Perjanjian kerja sama berlaku sejak 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Januari 2025.

h. Perjanjian Bancassurance untuk Kegiatan Referensi dengan PT Avrist Assurance

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama untuk mereferensikan produk Asuransi Jiwa Avrist Pension Credit Life dengan PT Avrist Assurance melalui Perjanjian Kerja Sama *Bancassurance* untuk Kegiatan Referensi dalam rangka Produk Bank No. BTPN: PKS.017/RLBPM/III/2023, tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama Produk Asuransi Dalam Rangka Produk Bank Produk Asuransi Jiwa Avrist Pension Credit Life No. BTPN: PKS.018/RLBPM/III/2023, tanggal 1 Februari 2023. Perjanjian kerja sama berlaku lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2023.

i. Perjanjian Kerjasama dengan PT Avrist Assurance

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan PT Avrist Assurance sebagai penyedia produk asuransi jiwa untuk mencegah risiko tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan oleh Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama No. 19/BANCA/PKS/VII/2011 tanggal 23 Juni 2011. Perjanjian kerja sama berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 23 Juni 2011 dan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 1 (satu) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

j. Perjanjian Bancassurance Kegiatan Referensi dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dimana Perseroan dapat memperluas jasa pelayanannya dengan menyediakan informasi terkait produk asuransi tertentu dari PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("**Asuransi Generali**") serta dapat memfasilitasi nasabah Perseroan untuk mendapatkan produk asuransi tertentu yang disediakan oleh Asuransi Generali. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian *Bancassurance* Untuk Kegiatan Referensi No. PKS/077/DIR/PBCD/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Terhadap Perjanjian *Bancassurance* Untuk Kegiatan Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. BTPN: 028/PBBB/VII/2018, tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana dilengkapi dengan Perjanjian Produk Referensi Produk Asuransi Jiwa Untuk Kredit Pegawai No. PKS.077/DIR/PBCD/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Terhadap Perjanjian Produk Referensi Produk Asuransi Jiwa Untuk Kredit Pegawai No. BTPN: 029/PBBB/VII/2018, tanggal 25 Maret 2019. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 9 Oktober 2015 dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

k. Perjanjian Kerjasama dengan Asuransi Generali

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan Asuransi Generali sebagai penyedia produk asuransi jiwa untuk mencegah risiko tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan oleh Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. 004/VI/LGL/2011 tanggal 22 Juni 2011. Perjanjian kerja sama berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 22 Juni 2011 dan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 1 (satu) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

l. Perjanjian Bancassurance Kegiatan Referensi dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dimana Perseroan dapat memperluas jasa pelayanannya dengan menyediakan informasi terkait produk asuransi tertentu dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia (“**Asuransi Allianz**”) serta dapat memfasilitasi nasabah Perseroan untuk mendapatkan produk asuransi tertentu yang disediakan oleh Asuransi Allianz. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian *Bancassurance* Untuk Kegiatan Referensi No. PKS.074/DIR/PBPM/III/2013, tanggal 1 April 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Atas Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi No. BTPN: PKS.008/DIR/RLBPM/V/2022 dan dilengkapi dengan Perjanjian Produk Referensi Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan “Smartprotection BTPN Purnabakti” No. BPTN: PKS.020/RLBPM/V/2022 yang terakhir ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2022. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 1 Februari 2013 dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

m. Perjanjian Kerjasama dengan Asuransi Allianz

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan Asuransi Allianz sebagai penyedia produk asuransi jiwa untuk mencegah risiko tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada nasbaahnya, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama No. 276/LGL/AG/ALLIANZ/XI/2008, tanggal 26 November 2008. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 26 November 2008 dan dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 5 (lima) tahun, atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

n. Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT KB Finansia Multi Finance

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan fasilitas pembiayaan bersama atas multiguna barang dan/atau kendaraan untuk tujuan konsumtif dan produktif kepada *end user*, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No: PKS-JF.024/BSBSC/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 (“**Perjanjian KB Finansia**”). Berdasarkan Perjanjian KB Finansia, Perseroan akan memberi fasilitas pembiayaan bersama dengan jumlah porsi pembiayaan tidak melebihi jumlah sebesar Rp300.000.000.000. Perjanjian fasilitas pembiayaan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 28 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2025.

o. Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT Home Credit Indonesia

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama antara Perseroan dan PT Home Credit Indonesia dalam bentuk pembiayaan bersama atas barang konsumsi tahan lama (*consumer durable goods*) serta jasa yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dituangkan dalam (i) Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No: PKS.087/DIR/TFI/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum Kesembilan atas Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS.009/BSBC/II/2020, tanggal 24 February 2020, yang berlaku selama 6 (tiga) tahun sejak 23 Juni 2014 dan secara otomatis diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya, dan (ii) Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS.015/RLBJF/III/2023, tanggal 8 Maret 2023, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 8 Maret 2023 dan secara otomatis diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.

p. Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account dengan PT Summit Oto Finance

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemanfaatan layanan perbankan berupa *virtual account* milik Perseroan sebagai sistem pembayaran dan transaksi PT Summit Oto Finance, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account No. 0001/DBBP-PKS/LAN/JAN/22, tanggal 7 Januari 2022. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2022 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak atau para pihak.

q. Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account dengan PT Oto Multiartha

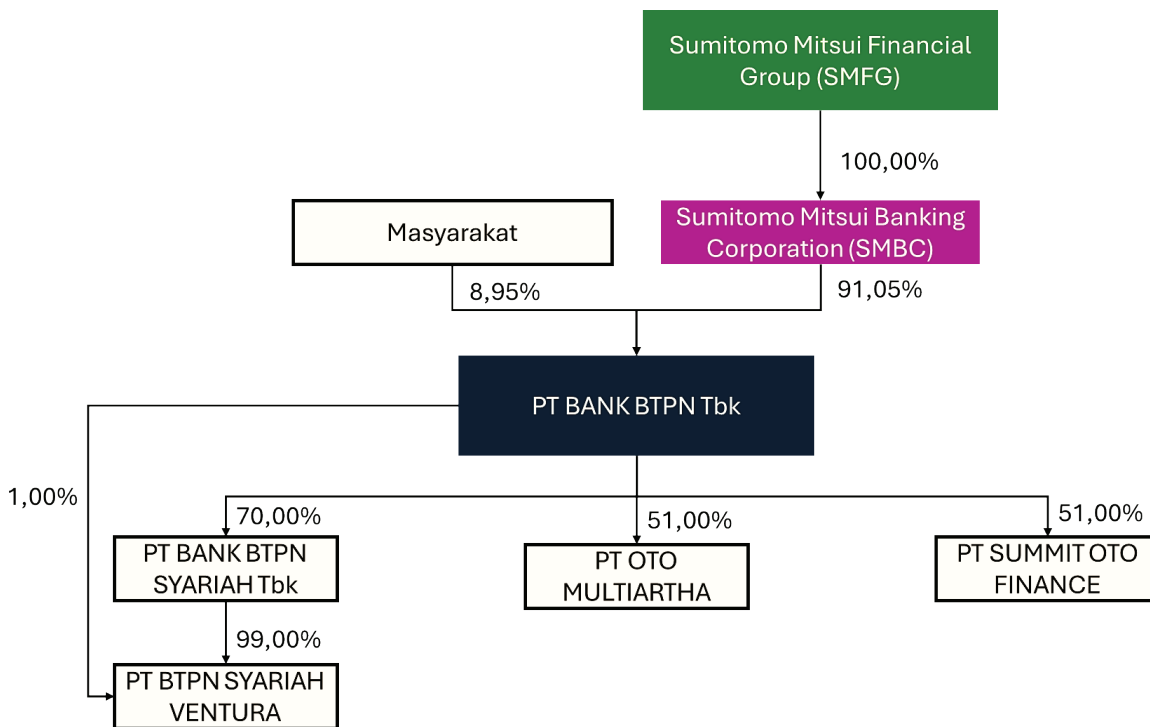
Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemanfaatan layanan perbankan berupa *virtual account* milik Perseroan sebagai sistem pembayaran dan transaksi PT Oto Multiartha, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account No. 0142/DBP-PKS-RPW/DEC/21, tanggal 7 Januari 2022. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2022 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak atau para pihak.

r. Perjanjian Turunan Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Konsumen Melalui Chanel Jenius

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama penerimaan pembayaran atas tagihan oleh kosumen PT Oto Multiartha melalui aplikasi Jenius milik Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Turunan Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan Konsumen Melalui Channel Jenius No. 0143/DBP-PKS/RPW/DEC/21 tanggal 7 Januari 2022. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2022 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak

5. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Perusahaan Anak pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 5 Februari 2024, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Tetsuro Imaeda yang ditunjuk oleh Sumitomo Mitsui Financial Group yang merupakan pemilik 100% saham dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

6. Keterangan Tentang Pemegang Saham Pengendali dan Utama

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

	Jumlah Saham	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
Pemerintah Jepang dan Pemerintah Lokal Jepang	4.774	0,04%
Institusi Keuangan	3.978.616	29,80%
Perusahaan Sekuritas	986.554	7,39%
Institusi Lainnya	1.153.709	8,64%
Institusi Asing dan lainnya	4.888.930	36,63%
Individu dan lainnya	2.337.220	17,50%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.349.803	100,00%

Pemegang Saham Akhir Perseroan adalah Sumitomo Financial Group ("SMFG") melalui 100% kepemilikan saham atau sejumlah 106.318.401 saham pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")

Alamat: 1-1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Fax/Telp: +81-3-3282-8111

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ("SMFG") yang didirikan pada 2 Desember 2002 dan merupakan induk perusahaan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") adalah Pemegang Saham Pengendali Bank BTPN. Saham SMFG terdaftar di Tokyo Stock Exchange (*First Section*) dan Nagoya Stock Exchange (*First Section*).

Misi Usaha SMFG adalah untuk tumbuh dan Sejahtera bersama nasabah dengan menyediakan Layanan yang memiliki nilai yang lebih besar bagi mereka; memaksimalkan nilai pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan; serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong dan menghargai karyawan yang tekun dan mempunyai motivasi yang tinggi.

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, SMFG bergerak dalam bidang manajemen anak perusahaan perbankan dan perusahaan lain yang dapat diperlakukan sebagai anak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang. Selain itu, melakukan fungsi-fungsi terkait (*ancillary functions*), serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan holding perbankan di bawah ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha SMFG terutama bergerak di bidang perbankan komersial melalui layanan keuangan berikut: *leasing*, sekuritas, pembiayaan konsumen, keuangan, pemrosesan data pengembangan sistem, dan manajemen asset.

Susunan Pengurus dan Pengawasan:

Chairman of the Board	:	Takeshi Kunibe
Group CEO	:	Toru Nakashima
Director and Deputy President	:	Tetsuro Imaeda
Director and Senior Managing Executive Officer	:	Teiko Kudo
Director and Senior Managing Executive Officer	:	Fumihiko Ito
Director	:	Akihiro Fukutome
Director	:	Toshihiro Isshiki
Director	:	Yoshiyuki Gono
Director	:	Yasuyuki Kawasaki
Director	:	Masayuki Matsumoto
Director	:	Charles D. Lake II
Director	:	Shozo Yamazaki
Director	:	Jenifer Rogers
Director	:	Yoshinobu Tsutsui
Director	:	Katsuyoshi Shinbo
Director	:	Eriko Sakurai

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

Alamat: 1-1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Fax/Telp: +81-3-3282-8111

Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka: The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. didirikan pada bulan Desember 2002 sebagai perusahaan induk bank melalui transfer saham, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Sumitomo Mitsui Financi Group. Pada Maret 2003, SMBC melakukan penggabungan usaha (merger) dengan The Wakashio Bank, Ltd.

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, saat ini SMBC merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dengan jaringan usaha yang telah menyebar ke beberapa wilayah di dunia, seperti Australia, Eropa, Kanada, Brasil dan Indonesia. SMBC dan kelompok perusahaannya menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan. SMBC memiliki bisnis perbankan di 16 negara selain negara asalnya Jepang. Mereka juga bergerak dalam bidang usaha leasing, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi KPR, modal ventura dan bisnis kredit terkait lainnya.

Di Indonesia, selain Bank BTPN, SMBC juga memiliki beberapa anak perusahaan lainnya yaitu PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia, PT Ina Sekuritas Indonesia (sebelumnya Bernama PT Nikko Sekuritas Indonesia), dan PT SBCS Indonesia.

Susunan Pengurus dan Pengawasan:

Chairman of the Board	:	Makoto Takashima
President and Chief Executive Officer (Representative Director)	:	Akihiro Fukutome
Deputy Chairman of the Board	:	Keiji Kakumoto
Director and Deputy President	:	Tetsuro Imaeda
Director and Senior Managing Executive Officer	:	Teiko Kudo
Director and Senior Managing Executive Officer	:	Jun Uchikawa
Director and Senior Managing Executive Officer	:	Kotaro Hagiwara
Director and Senior Managing Executive Office	:	Yoshihiro Hyakutome
Director and Senior Managing Executive Officer	:	Takashi Kobayashi
Director	:	Paul Yonamine
Director	:	Isao Teshirogi

HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Utama:

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Pemegang Saham Utama
Chow Ying Hoong ⁽¹⁾	Komisaris Utama	✓
Takeshi Kimoto ⁽²⁾	Komisaris	✓
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	-
Onny Widjanarko	Komisaris Independen	-
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	-
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	-
Henoch Munandar	Direktur Utama	-
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	-
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	-
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	-
Keishi Kobata	Direktur	-
Atsushi Hino	Direktur	-
Merisa Darwis	Direktur	-
Hanna Tantani	Direktur	-

- (1) hubungan Chow Ying Hoong dengan pemegang saham utama adalah hubungan kepegawaian dengan pemegang saham utama
(2) hubungan Takeshi Kimoto dengan pemegang saham utama adalah hubungan kepegawaian dengan pemegang saham utama

7. Keterangan Mengenai Entitas Anak

No.	Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Kontribusi Pendapatan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Tahun Operasional
1.	PT BANK BTPN SYARIAH TBK	Perbankan	70,0%	30,54%	1991	2014	Jakarta	2014
2.	PT BTPN SYARIAH VENTURA	Modal Ventura	1%	-	2021	2021	Jakarta	2022
3.	PT Oto Multiartha	Lembaga Pembiayaan	51%	-	1994	2024	Jakarta	1994
4.	PT Summit Oto Finance	Lembaga Pembiayaan	51%	-	1990	2024	Jakarta	1990

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki empat Perusahaan Anak baik langsung maupun tidak langsung, dengan keterangan sebagai berikut :

*) Pemegang saham lain dalam PT BTPN SYARIAH VENTURA adalah PT BANK BTPN SYARIAH tbk dengan kepemilikan sebesar 99%.

BTPN Syariah merupakan Perusahaan Anak dengan kontribusi yang signifikan. Adapun pengungkapan lebih lengkap terkait BTPN Syariah adalah sebagai berikut :

BTPN Syariah

a. Kegiatan Usaha dan Perizinan

BTPN Syariah, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. BTPN Syariah didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta No. 39 tanggal 25 Mei 1992 dan Akta No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 21 Juli 1992 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-839.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Juli 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang No. 206A/1992/II tanggal 30 Juli 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5020 tanggal 9 Oktober 1992 Tambahan No. 81 (“**Akta Pendirian BTPN Syariah**”).

Anggaran dasar BTPN Syariah terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah No. 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021 (“**Akta BTPN Syariah No. 35/2021**”). (Akta Pendirian BTPN Syariah, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta BTPN Syariah No. 35/2021, selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar BTPN Syariah**”).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BTPN Syariah telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum syariah melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-49/D-03/2014 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah BTPN Syariah tertanggal 22 Mei 2014 dikeluarkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan atas nama Dewan Komisiner OJK.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BTPN Syariah, tujuan dan kegiatan usaha BTPN Syariah adalah menjalankan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BTPN Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Melakukan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha penunjang

- Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, atau Hawalah;
- Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- Memberi jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;

- Melakukan kegiatan pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal;
- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

b. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Berikut ini merupakan kepemilikan saham dan struktur permodalan terakhir BTPN Syariah.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang disampaikan oleh BTPN Syariah kepada OJK melalui Surat No. S.195/DIR/CSGC/V/2024 tanggal 7 Mei 2024, susunan pemegang saham BTPN Syariah sesuai data yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek BTPN Syariah, kepemilikan saham dan struktur permodalan terakhir BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

	Nilai nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.500.000.000	2.750.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	5.392.590.000	539.259.000.000	70,000
Masyarakat	2.310.226.800	231.022.680.000	29,989
Saham Direksi	640.200	64.020.000	0,008
Saham Tresuri	243.000	24.300.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.703.700.000	770.370.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	19.796.300.000	1.979.630.000.000	

c. Pengurusan dan Pegawasan

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 27 April 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0112846 tanggal 27 April 2023, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah terakhir pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen	:	Dewie Pelitawati
Komisaris Independen	:	Mulya Effendi Siregar
Komisaris	:	Ongki Wanadjati Dana

Direksi

Direktur Utama	:	Hadi Wibowo
Direktur Kepatuhan	:	Arief Ismail
Direktur	:	Fachmy Achmad
Direktur	:	Dwiyono Bayu Winantio
Direktur	:	Dewi Nuzulianti

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin
Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz

d. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BTPN Syariah pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian BTPN Syariah tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen BTPN Syariah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212) dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 10 Februari 2023.

Laporan keuangan konsolidasian BTPN Syariah tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang disusun oleh manajemen BTPN Syariah sesuai dengan SAK dan telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212) dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 7 Februari 2024.

Laporan Posisi Keuangan

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

	2023	2022
Jumlah Aset	21.435.366	21.161.976
Jumlah Liabilitas	2.737.413	2.910.720
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	9.920.820	9.843.261
Jumlah Ekuitas	8.777.133	8.407.995

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(Dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	2023	2022
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	5.746.182	5.373.790
Laba sebelum pajak penghasilan	1.379.894	2.282.394
Laba bersih tahun berjalan	1.080.588	1.779.580
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	1.080.038	1.784.150

Ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 8,8 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp 369,1 miliar atau sebesar 4,4% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 8,4 triliun. Peningkatan ekuitas ini karena adanya pertumbuhan modal secara organik berupa penambahan laba bersih periode berjalan sebesar Rp 1,1 triliun dan pembayaran dividen gross sebesar Rp 713 miliar.

BTPN Syariah mencatatkan penurunan laba bersih tahun 2023 sebesar 39,28% menjadi Rp 1,1 triliun dari sebelumnya Rp 1,8 triliun di tahun 2022. Hal ini terjadi seiring dengan penurunan pendapatan operasional – bersih yang disebabkan adanya peningkatan di beban operasional terutama beban cadangan kerugian penurunan nilai.

8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan (i) Akta No. 46 tanggal 21 April 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0009927 (ii) Akta No. 78 tanggal 29 September 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0061871 tanggal 4 Oktober 2022, (iii) Akta No. 25 tanggal 10 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0116937 tanggal 11 Mei 2023 (iv) Akta No. 40 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0118315 tanggal 17 Mei 2023 dan (v) Akta No. 58 tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Yumna Shabrina, SH, MKn, selaku Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0145163 tanggal 27 Juli 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chow Ying Hoong
Komisaris	:	Takeshi Kimoto
Komisaris Independen	:	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen	:	Onny Widjanarko
Komisaris Independen	:	Edmund Tondobala
Komisaris	:	Ongki Wanadjati Dana

Direksi

Direktur Utama	:	Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama	:	Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama	:	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan	:	Dini Herdini
Direktur	:	Atsushi Hino
Direktur	:	Keishi Kobata
Direktur	:	Merisa Darwis
Direktur	:	Hanna Tantani

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

DEWAN KOMISARIS



Chow Ying Hoong **Komisaris Utama**

Warga Negara Singapura, lahir pada tahun 1960, berusia 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Memulai karirnya di United Overseas Bank pada tahun 1984–1987 sebagai Bank Officer, ABN Bank 1987–1989 sebagai Account Manager, Sanwa Bank 1989–1993 dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager, kemudian kembali berkarir di ABN Amro Bank pada tahun 1993–1997 sebagai dengan jabatan terakhir sebagai Group Vice President, selanjutnya di Societe Generale tahun 1997–2000 sebagai Head of Labuan Branch. Beliau kemudian bergabung ke SMBC Singapura pada tahun 2000 sampai dengan saat ini. Beliau kemudian ditugaskan sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015, lalu diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama pada tahun 2019–2020. Terhitung sejak tahun 2020 beliau menjabat sebagai Komisaris Utama dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Business Administration bidang Finance dari National University of Singapore pada tahun 1984.



Takeshi Kimoto **Komisaris**

Warga Negara Jepang, lahir pada tahun 1970, berusia 53 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karirnya di The Sumitomo Bank, Ltd pada tahun 1993–2001 menjabat sejumlah posisi dimana terakhir menjabat sebagai Vice President – International Finance Department selanjutnya di SMBC pada tahun 2001 sampai dengan saat ini, dimana beliau menjabat sebagai Executive Office & General Manager – Asia Growing Market Department sejak tahun 2021. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance. Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 2019 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Arts in Business and Commerce dari KEIO University pada tahun 1993.



Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1957, berusia 66 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karirnya sebagai Senior Auditor di Kantor Akuntan Utomo (SGV – Utomo) pada tahun 1981–1985. Selanjutnya beliau bergabung di PT Bank Central Asia pada tahun 1985-1999 dan 2000-2012 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit. Pada tahun 2013–2019 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen SMBCI lalu bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen pada Perseroan sejak tahun 2019 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1983 dan Paska Sarjana bidang Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.



Onny Widjanarko
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964, berusia 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Memulai karirnya di Komatsu Indonesia atau PT United Tractors pada tahun 1989-1990 sebagai Management Trainee dan Staf Keuangan. Selanjutnya, pada tahun 1992, beliau meneruskan karirnya di Bank Indonesia sampai dengan tahun 2022 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Perwakilan BI Jakarta. Selain itu, sejak tahun 2020-2023 beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT. Artajasa Pembayaran Elektronik. Selanjutnya, sejak tahun 2023 bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Manajemen Keuangan dari STIE Malangkececwara pada tahun 1989 dan Master of Management dari Asian Institut of Management pada tahun 1999.



Edmund Tondobala
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965, berusia 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020.

Memulai karirnya sebagai Research Assistant di Security Pacific Bank Arizona pada tahun 1988. Selanjutnya beliau bergabung di PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") pada tahun 1990 sampai dengan pensiun tahun 2020. Selama di BCA beliau juga ditugaskan sebagai Komisaris (Direktur non-Executive) di BCA Remittance Sdn Bhd, Malaysia pada tahun 2009-2011 serta sebagai Komisaris (Direktur non-Executive) di BCA Finance Hongkong pada tahun 2002-2004 dan 2011- 2020. Beliau kemudian bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2020 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Drake University, Moines, Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1987 dan Magister Manajemen Internasional dari American Graduate School of Internasional Management, Thunderbird. Glendale, Arizona pada tahun 1990.



Ongki Wanadjati Dana
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1957, berusia 66 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022.

Memulai karirnya sebagai Executive Development Program Trainee di Citibank, N.A pada tahun 1982-1983, selanjutnya beliau berkarir di Citicorp Leasing Indonesia 1984-1986 sebagai Lease Officer lalu beliau kembali bekerja di Citibank, N.A pada tahun 1986-1990 dengan jabatan terakhir sebagai Credit Cycle Manager – Consumer Banking. Setelah itu, beliau berkarir di beberapa bank ternama di Indonesia seperti, PT Bank Subentra 1990-1999 sebagai Direktur Kredit kemudian sebagai Presiden Direktur, Bank Universal 1999-2002 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur dan PT Bank Permata Tbk sebagai Direktur Wholesale Banking pada tahun 2002-2008. Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Wakil Direktur Utama pada tahun 2008-2019. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 2019-2022. Selanjutnya, melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022, beliau diangkat dan resmi menjabat sebagai Komisaris di Perseroan.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1981.

DIREKSI



Henoeh Munandar
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966, berusia 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2022.

Beliau memulai karirnya di PT Indomarco pada tahun 1989 – 1991 sebagai Management Trainee dan kemudian bergabung dengan beberapa perusahaan seperti Bank Susila Bakti pada tahun 1991 – 1993 sebagai Sub Branch Manager, PT BII pada tahun 1993 – 1994 sebagai Assistant Manager, Panin Bank pada tahun 1994 – 1995 sebagai Account Manager, PT Bogor Multifinance pada tahun 1995 sebagai Account Manager, Sanwa Bank Indonesia/Bank United Financial of Japan (UFJ) pada tahun 1995 – 2006 sebagai Local Corporate Head – Senior Manager, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ pada tahun 2006 sebagai Co-Dept Head of Corporate Banking, PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2006 – 2010 sebagai Deputy SMEC Risk & Remedial Head (Executive Vice President), PT Bank DBS Indonesia pada tahun 2010 – 2013 sebagai Deputy Head of Credit/Credit Risk Management Head SMEC (Senior Vice President). Selanjutnya, berkarir sebagai Direktur SMBCI pada tahun 2014 – 2019, kemudian menjabat di Perseroan sebagai Direktur pada tahun 2019 dan diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta, Indonesia pada tahun 1989.



Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Jepang, lahir pada tahun 1965, berusia 58 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Beliau bergabung di The Sumitomo Bank Limited – Machida Branch pada tahun 1989 sebagai Retail Banking Officer. Sejak itu, beliau telah dipercayakan dengan berbagai tanggung jawab di grup SMFG di Kantor Cabang London, Hong Kong, Manila, New York dan Singapura, dengan jabatan terakhir beliau di SMBC Singapura sebagai Senior General Manager of Asia Growing Market Departemen. Selanjutnya beliau bergabung dengan Perseroan dan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak tahun 2021 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Hosei University, Tokyo, Jepang pada tahun 1989.



Darmadi Sutanto
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964, berusia 59 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Memulai karirnya di Citibank pada tahun 1991 – 2000 sebagai National Sales Manager, kemudian di Standard Chartered Bank pada tahun 2000 – 2006 sebagai EVP Sales and Distribution, PT Bank Permata Tbk pada tahun 2007 sebagai SVP Distribution, ABN amro pada tahun 2007 – 2010 sebagai Consumer Banking Director, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2010 – 2015 sebagai Consumer Banking Director, serta pada tahun 2015 – 2018 menjabat di PT CT Corpora Bank Mega sebagai Group Director dan di PT Bank Mega Tbk, PT Trans Ice dan PT Metro Retailmart sebagai Komisaris. Beliau berperan sebagai Technical Advisor Perseroan pada tahun 2018 – 2020, sebelum bergabung dengan Perseroan sebagai Wakil Direktur Utama pada tahun 2020 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1988 dan Magister Administrasi Bisnis dari University of Western Illinois, Macomb, Amerika Serikat pada tahun 1991.



Dini Herdini
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965, berusia 58 tahun. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karirnya sebagai Pengacara Voluntair di sebuah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 1988 – 1989, kemudian bergabung dengan PT Bank Sumitomo Niaga sejak pendiriannya pada tahun 1989 – 1993 sebagai Legal Officer, lalu menjabat di sejumlah bank di Indonesia, antara lain PT ING Bank pada tahun 1993 – 1996 sebagai Legal Manager, PT Bank PDFCI Tbk pada tahun 1996 – 1999 Legal Division Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 1999 – 2000 sebagai Legal Merger Coordinator & In-house Counsel. Beliau mendirikan Herdini & Partners sebuah firma hukum pada tahun 2000 dan menjabat sebagai Partner sampai dengan tahun 2004, sebelum bergabung kembali dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2004 dimana beliau menjabat sebagai General Counsel & Corporate Secretary sampai tahun 2014. Beliau bergabung dengan SMBCI pada tahun 2014 sebagai Corporate Legal Head dan diangkat sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2019 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia pada tahun 1987.



Atsushi Hino
Direktur

Warga Negara Jepang, lahir pada tahun 1976, berusia 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Memulai karirnya di SMBC Cabang Omiya pada tahun 1999 sebagai Junior Staff, kemudian menjabat di sejumlah Kantor Cabang di Jepang sampai dengan tahun 2009 dimana beliau terakhir menjabat sebagai Vice President pada tahun 2006 sebelum menjabat di Kantor Cabang Hong Kong pada tahun 2009-2014 sebagai Vice President/ Senior Vice President. Beliau bergabung di SMBCI pada tahun 2014 dan menjabat sebagai Head of Corporate Banking Dept. sampai tahun 2018, kemudian menjabat sebagai Group Head/Joint General Manager dari Asia Growing Markets Department di SMBC Singapura pada tahun 2018-2023, sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 2023 sebagai Direktur Corporate Banking Japanese.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Business and Commerce dari Keio University, Tokyo, Jepang pada tahun 1999.



Keishi Kobata
Direktur

Warga Negara Jepang, lahir pada tahun 1973, berusia 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Memulai karir di grup SMFG di SMBC (dahulu Sumitomo Bank, Tokyo) pada tahun 1998 lalu menjabat sejumlah posisi hingga terakhir menjabat sebagai Head of Money Market & Fixed Income Group, International Treasury Departement pada tahun 2015 – 2016 dan dilanjutkan dengan menjabat di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hong Kong pada tahun 2016 – 2019 dengan terakhir menjabat sebagai Senior Vice President. Kemudian beliau menempuh karir di Perseroan dimulai dengan menjabat sebagai sebagai Technical Advisor of Treasury Directorate Perseroan pada tahun 2019 – 2022, sebagai Treasury ALM & Planning Head pada tahun 2022 – 2023 dan diangkat menjadi Direktur pada tahun 2023.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Architecture pada tahun 1996 dan Master of Information Engineering pada tahun 1998 dari University of Tokyo, Jepang.



Merisa Darwis
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967, berusia 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karir sebagai Software Engineer di WIN, Bandung tahun 1991 – 1992, lalu menjabat sebagai Programmer/Analyst di USI/IBM pada tahun 1992 – 1993, kemudian beliau bekerja sebagai pengajar Bahasa Indonesia di Berlitz, Jepang pada tahun 1994 – 1996, sebelum menempuh karir di Citibank N.A. Indonesia dari tahun 1996 – 2009 dengan terakhir menjabat sebagai Control & Reporting Head. Setelah itu, beliau menjabat di Bank Barclays Indonesia dari tahun 2009 – 2011 dengan terakhir menjabat sebagai HR & Internal Control Director, kemudian beliau bergabung dengan Perseroan sebagai Kepala Satuan Audit Internal pada tahun 2011 – 2016, Head of Operations pada tahun 2017 – 2019 dan selanjutnya diangkat sebagai Direktur Operasional sejak tahun 2019 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia pada tahun 1991.



Hanna Tantani
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967, berusia 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karir di HSBC pada tahun 1990 sebagai Staff, Credit Operations & Trade Services dan menjabat sejumlah posisi selama di HSBC dengan terakhir menjabat sebagai VP Area Finance pada tahun 2004, kemudian menjabat di sejumlah bank, antara lain di American Express Bank sebagai Market Controller dan Direktur Keuangan & Market Controller pada tahun 2004 – 2008, Standard Chartered Bank sebagai Financial Controller pada tahun 2008 – 2009, sebelum kembali ke HSBC pada tahun 2009 dan menjabat sampai tahun 2018 dengan posisi terakhir sebagai Direktur Keuangan sejak 2014. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2018 dan pada 2019 diangkat sebagai Direktur Keuangan & Perencanaan dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 1990 dan Master of Business Administration dari Australian Graduate School of Management, University of New South Wales, Australia pada tahun 1993.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014.

Tidak ada hubungan kekeluargaan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Perseroan

9. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*)

Perseroan terus meningkatkan implementasi dan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan di berbagai aspek antara lain melakukan kaji ulang atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) yang dilengkapi dengan *key management process* sebagai pedoman bagi manajemen terkait struktur tata kelola dan organisasi Perseroan secara menyeluruh, pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi, melakukan kaji ulang atas Kode Etik, dan melaksanakan *e-Refreshment* Kode Etik serta penyempurnaan aspek transparansi pada situs web Perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Perseroan berkomitmen penuh menerapkan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan GCG yang diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
- 2) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi audit intern;
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Pemberian remunerasi;
- 10) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- 11) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
- 12) Rencana strategis Bank;
- 13) Aspek pemegang saham;
- 14) Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan;
- 15) Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- 16) Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab di bidang pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, di antaranya POJK No. 33/2014 serta UUPT.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberlakuannya sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- 1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan strategis Perseroan.
- 4) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 5) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
- 6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali :
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) *Duty of care*
Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta secara profesional. Dalam hal ini Dewan Komisaris wajib antara lain:
 - Senantiasa bertindak secara jujur dan dengan itikad baik
 - Senantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
 - Tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan yang berlaku
 - Menghadiri dan terlibat secara aktif dalam Rapat Dewan Komisaris
 - Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efisien dan efektif
- 8) *Duty of loyalty*
Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan hanya untuk kepentingan Perseroan, dalam hal ini wajib mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:
 - Memiliki transaksi dengan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terlebih dahulu menyampaikan keterbukaan keterkaitannya serta mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS
 - Memanfaatkan Perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada menggunakan aset dan fasilitas Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan
 - Menyampaikan informasi yang bukan merupakan informasi publik kepada pihak ketiga

- Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
 - Menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi
- 9) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis Teknologi Informasi (TI); dan
10) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata Kelola TI.

Wewenang

- 1) Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Perseroan apabila diperlukan
- 2) Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang dianggap perlu
- 3) Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Perseroan, maka Dewan Komisaris berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan penunjukan pihak independen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajiban. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris
- 5) Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan
- 6) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPSLB tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.

Kegiatan Kerja

Selama periode untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan kerja sebagai berikut:

- 1) Persetujuan atas pemberian, perpanjangan, perubahan kondisi dan penambahan fasilitas kepada pihak terkait Perseroan
- 2) Penentuan waktu dan penetapan agenda RUPST dan RUPSLB
- 3) Persetujuan atas perpanjangan fasilitas pinjaman luar negeri jangka panjang Perseroan
- 4) Persetujuan atas hapus buku
- 5) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan, laporan pelaksanaan tata kelola, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan tahunan dan laporan berkelanjutan
- 6) Perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris
- 7) Perubahan anggaran dasar
- 8) Mengusulkan kepada RUPST mengenai penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
- 9) Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi
- 10) Penunjukan Akuntan Publik
- 11) Persetujuan atas rencana aksi korporasi
- 12) Rencana bisnis Perseroan, revisi rencana bisnis Perseroan, rencana penyelenggaraan produk Perseroan dan perubahan rencana korporasi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase (%)
Chow Ying Hoong	7	7	100
Takeshi Kimoto	7	6	86
Ninik Herlani Masli Ridhwan	7	7	100
Onny Widjanarko (1)	5	5	100
Edmund Tondobala	7	7	100
Ongki Wanadjati Dana	7	7	100
Irwan Mahjudin Habsjah (2)	1	1	100

- 1) Onny Widjanarko diangkat sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya RUPST tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 8 Mei 2023.
- 2) Irwan Mahjudin Habsjah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya RUPST tanggal 13 April 2023.

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selama periode sembilan bulan yang berakhir hingga 31 Desember 2023, keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam program-program pelatihan/ seminar/workshop adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	Chow Ying Hoong –Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Economic Outlook Update by Raden Pardede 2. Executive Risk Management Certification Refresher 3. Leadership Series: Influence for Impact 4. Political Update by Philips J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 Juni 2023 2. 26 Juli 2023 3. 5 Desember 2023 4. 8 Desember 2023
2	Takeshi Kimoto - Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Economic Outlook Update by Raden Pardede 2. Executive Risk Management Certification Refresher 3. Leadership Series: Influence for Impact 4. Political Update by Philips J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 Juni 2023 2. 26 Juli 2023 3. 5 Desember 2023 4. 8 Desember 2023
3	Ninik Herlani Masli Ridhwan – Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. Executive Risk Management Certification Refresher 4. Leadership Series: Influence for Impact 5. Political Update by Philips J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Maret 2023 2. 6 Juni 2023 3. 26 Juli 2023 4. 5 Desember 2023 5. 8 Desember 2023
4	Onny Widjanarko – Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Training Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 2. Induction 2022: BTPN Overview 3. Economic Outlook Update by Raden Pardede 4. Induction 2022 : Compliance 5. Leadership Series: Influence for Impact 6. Political Update by Philips J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 Januari 2023 2. 5 Juni 2023 3. 6 Juni 2023 4. 17 Juni 2023 5. 5 Desember 2023 6. 8 Desember 2023
5	Edmund Tondobala – Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. Executive Risk Management Certification Refresher 4. Leadership Series: Influence for Impact 5. Political Update by Philips J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Maret 2023 2. 6 Juni 2023 3. 26 Juli 2023 4. 5 Desember 2023 5. 8 Desember 2023
6	Ongki Wanadjati Dana - Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. Leadership Series : Managing Global Business Risk 4. Executive Risk Management Certification Refresher 5. Leadership Series: Influence for Impact 6. Political Update by Philips J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Maret 2023 2. 6 Juni 2023 3. 14 Juni 2023 4. 26 Juli 2023 5. 5 Desember 2023 6. 8 Desember 2023

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- 1) *External competitiveness*, yaitu perbandingan dengan pasar/*peer group*. Yang dimaksud *peer group* adalah bank-bank yang dianggap sebagai kompetitor, yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Visi Perseroan yang mencerminkan arah jangka panjang Perseroan, kompleksitas Perseroan yang tercermin dari inovasi produk, teknologi dan layanan serta jangkauan pelayanan yang sangat luas dan jauh serta jumlah tenaga kerja yang signifikan.
- 2) *Internal Equity*, yaitu kesetaraan terhadap bobot tanggung jawab pekerjaan. Perseroan membagi kategori komisaris berdasarkan bobot pekerjaan sebagai berikut:
 - Komisaris Utama
 - Komisaris
- 3) Kinerja Perseroan, yang diukur berdasarkan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
- 4) Kinerja individu, yang diukur berdasarkan hasil penilaian kinerja tahunan yang disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur/kriteria pengukuran.
- 5) Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada komisaris untuk masing-masing tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar Rp 11.522 juta dan Rp 16.642 juta

b. Direksi

Direksi merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan, yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Wewenang tersebut digunakan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Perseroan. Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh regulasi bahwa Direksi dapat mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tujuannya adalah demi mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi BTPN senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- 1) Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 2) Menindaklanjuti setiap dan seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- 3) Dalam rangka memastikan berjalannya pelaksanaan prinsip GCG, wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;
- 4) Memastikan penyediaan data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 5) Memastikan transparansi atas informasi material terkait dengan keadaan usaha Perseroan;
- 6) *Duty of care*
Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta secara profesional. Dalam hal ini, Direksi wajib antara lain:
 - Senantiasa bertindak secara jujur dan dengan itikad baik
 - Senantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
 - Tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan yang berlaku
 - Menghadiri dan terlibat secara aktif dalam rapat Direksi
 - Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efisien dan efektif
- 7) *Duty of loyalty*
Direksi dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan hanya untuk kepentingan Perseroan, dalam hal ini wajib mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Direksi tidak diperkenankan untuk:

- Memiliki transaksi dengan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terlebih dahulu menyampaikan keterbukaan keterkaitannya serta mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS
 - Memanfaatkan Perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada menggunakan aset dan fasilitas Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan
 - Menyampaikan informasi yang bukan merupakan informasi publik kepada pihak ketiga
 - Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
 - Menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi
- 8) Menetapkan rencana strategis TI;
 - 9) Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengkomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI; dan
 - 10) Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Perseroan dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI.

Kegiatan Kerja

Selama periode untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Direksi telah melakukan kegiatan kerja sebagai berikut:

- 1) Penentuan waktu dan penetapan agenda RUPS dan RUPSLB
- 2) Persetujuan atas perpanjangan fasilitas pinjaman luar negeri jangka panjang Perseroan
- 3) Persetujuan atas laporan tahunan, laporan pelaksanaan tata kelola, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan tahunan dan laporan berkelanjutan
- 4) Persetujuan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Obligasi Sosial
- 5) Perubahan atas pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
- 6) Perubahan anggaran dasar
- 7) Persetujuan atas rencana aksi korporasi
- 8) Rencana bisnis Perseroan, revisi rencana bisnis Perseroan, rencana penyelenggaraan produk Perseroan dan perubahan rencana korporasi
- 9) Persetujuan atas rencana aksi keuangan berkelanjutan
- 10) Persetujuan atas penentuan mitra bancassurance

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Kehadiran anggota Direksi dalam rapat yang diselenggarakan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase (%)
Henoch Munandar	47	40	85%
Kaoru Furuya	47	41	87%
Darmadi Sutanto	47	43	91%
Dini Herdini	47	45	96%
Keishi Kobata ⁽¹⁾	25	21	84%
Atsushi Hino ⁽²⁾	31	27	87%
Merisa Darwis	47	46	98%
Hanna Tantani	47	45	96%
Kan Funakoshi ⁽³⁾	13	13	100%
Hiromichi Kubo ⁽⁴⁾	20	20	100%

- 1) Keishi Kobata diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB tanggal 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Juli 2023.
- 2) Atsushi Hino diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2023.
- 3) Kan Funakoshi tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST tanggal 13 April 2023.
- 4) Hiromichi Kubo tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB tanggal 22 Juni 2023.

Program Pelatihan Direksi

Perseroan memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, workshop dan konferensi dalam mengembangkan kompetensi, profesionalisme dan wawasan secara berkelanjutan. Selama periode sembilan bulan yang berakhir hingga 31 Desember 2023, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, workshop dan *conference* sebagaimana berikut:

No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	Henoch Munandar - Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thriving in the age of Analytics with Digital Mindset 2. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 3. Media Training 4. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 5. Sustainable Finance Offline Seminar 6. Seminar Nasional "Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial 7. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 8. CEO Networking 2023 9. Bank BTPN Economic Outlook 2024 10. Dialog Akhir Tahun Anggota Dewan Komisiner OJK dan Industri Jasa Keuangan 11. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 12. Political Update by Philip J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 18 Januari 2023 2. 14 Maret 2023 3. 6 Juli 2023 4. 26 Juli 2023 5. 11 Agustus 2023 6. 13 September 2023 7. 12 Oktober 2023 8. 7 November 2023 9. 22 November 2023 10. 1 Desember 2023 11. 5 Desember 2023 12. 8 Desember 2023
2	Kaoru Furuya – Wakil Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. BTPN Leaders' Onboarding Program: Indonesia Professional Etiquette and HR Practices 3. Economic Outlook Update by Raden Pardede 4. X-Talk Leadership Series : "Managing Global Business Risks: A Proactive Approach" by Tantowi Yahya 5. BTPN Supply Chain Approach Workshop 6. Media Training 7. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 8. Sustainable Finance Offline Seminar 9. Bloomberg CEO Forum @ASEAN 10. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 11. Bank BTPN Economic Outlook 2024 12. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 13. Political Update by Philip J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 14 Maret 2023 2. 26 Mei 2023 3. 6 Juni 2023 4. 14 Juni 2023 5. 25 Juni 2023 6. 6 Juli 2023 7. 26 Juli 2023 8. 11 Agustus 2023 9. 6 September 2023 10. 12 Oktober 2023 11. 22 November 2023 12. 5 Desember 2023 13. 8 Desember 2023
3	Darmadi Sutanto – Wakil Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leading in Digital Era 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. Media Training 4. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 5. Sustainable Finance Offline Seminar 6. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 7. Bank BTPN Economic Outlook 2024 8. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 9. Political Update by Philip J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 16-21 April 2023 2. 6 Juni 2023 3. 6 Juli 2023 4. 26 Juli 2023 5. 11 Agustus 2023 6. 12 Oktober 2023 7. 22 November 2023 8. 5 Desember 2023 9. 8 Desember 2023

No	Nama	Pelatihan	Waktu
4	Dini Herdini – Direktur Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thriving in the age of Analytics with Digital Mindset 2. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 3. Seminar HKHPM “Undang-Undang Perkembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Implikasi Pada Sektor Pasar Modal” 4. Webinar ICOSA-OJK : Pendalaman POJK No.14/POJK.04/2019 - Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dgn memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu 5. Media Training 6. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 7. Sustainable Finance Offline Seminar 8. Deloitte Southeast Asia Financial Crime Symposium The Emerging Issue of Financial Crime 9. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 10. IMD’s Orchestrating Winning Performance, Singapore Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 11. Political Update by Philip J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 18 Januari 2023 2. 14 Maret 2023 3. 20 Maret 2023 4. 8 Juni 2023 5. 6 Juli 2023 6. 26 Juli 2023 7. 11 Agustus 2023 8. 3 Oktober 2023 9. 12 Oktober 2023 10. 20-24 November 2023 11. 8 Desember 2023
5	Atsushi Hino – Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Economic Outlook Update by Raden Pardede 2. Media Training 3. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 4. Talent Insight Discovery Training 5. Bank BTPN Economic Outlook 2024 6. Political Update by Philip J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 Juni 2023 2. 6 Juli 2023 3. 12 Oktober 2023 4. 16 Oktober 2023 5. 22 November 2023 6. 8 Desember 2023
6	Keishi Kobata – Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 2. Sustainable Finance Offline Seminar 3. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 4. Bank BTPN Economic Outlook 2024 5. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 6. Political Update by Philip J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 26 Juli 2023 2. 11 Agustus 2023 3. 12 Oktober 2023 4. 22 November 2023 5. 5 Desember 2023 6. 8 Desember 2023
7	Merisa Darwis – Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. IMD - Individual Learning Development – Orchestrating Winning Performance 4. Media Training 5. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 6. Sustainable Finance Offline Seminar 7. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 8. Bank BTPN Economic Outlook 2024 9. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 10. Political Update by Philip J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 14 Maret 2023 2. 6 Juni 2023 3. 26-30 Juni 2023 4. 6 Juli 2023 5. 26 Juli 2023 6. 11 Agustus 2023 7. 12 Oktober 2023 8. 22 November 2023 9. 5 Desember 2023 10. 8 Desember 2023

No	Nama	Pelatihan	Waktu
8	Hanna Tantani – Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJK Webinar - Tren Perbankan di Tahun 2023 2. Thriving in the age of Analytics with Digital Mindset 3. OJK Webinar - Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan 4. OJK Webinar - The Role of GRC in Supporting Financial Sector Performance 5. Webinar - PwC Indonesia Economic Update Q1 – 2023 6. Harvard yang Driving Digital Strategy 7. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 8. McKinsey session with BTPN on “AI-enabled customer service” 9. BCG and AC Ventures’ report launch: Shaping the Future of Fintech in Indonesia 10. Economic Outlook Update by Raden Pardede 11. Empowering Women <IDX> 12. Media Training 13. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 14. PwC WEBINAR: Tax Breakfast Briefing - Discussion on the new rules of Benefits In-Kinds 15. Sustainable Finance Offline Seminar 16. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 17. Bank BTPN Economic Outlook 2024 18. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 19. Political Update by Philip J. Vermonte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 17 Januari 2023 2. 18 Januari 2023 3. 2 Februari 2023 4. 23 Februari 2023 5. 9 Maret 2023 6. 12-17 Maret 2023 7. 14 Maret 2023 8. 16 Maret 2023 9. 29 Maret 2023 10. 6 Juni 2023 11. 8 Juni 2023 12. 6 Juli 2023 13. 26 Juli 2023 14. 2 Agustus 2023 15. 11 Agustus 2023 16. 12 Oktober 2023 17. 22 November 2023 18. 5 Desember 2023 19. 8 Desember 2023

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- 1) *External competitiveness*, yaitu perbandingan dengan pasar/*peer group*. Yang dimaksud *peer group* adalah bank-bank yang dianggap sebagai kompetitor, yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Visi Perseroan yang mencerminkan arah jangka panjang Perseroan, kompleksitas Perseroan yang tercermin dari inovasi produk, teknologi dan layanan serta jangkauan pelayanan yang sangat luas dan jauh serta jumlah tenaga kerja yang signifikan
- 2) *Internal Equity*, yaitu kesetaraan terhadap bobot tanggung jawab pekerjaan. Perseroan membagi kategori direksi berdasarkan bobot pekerjaan sebagai berikut:
 - Direktur Utama
 - Wakil Direktur Utama
 - Direktur
- 3) Kinerja Perseroan, yang diukur berdasarkan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
- 4) Kinerja individu, yang diukur berdasarkan hasil penilaian kinerja tahunan yang disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur/kriteria pengukuran, khususnya untuk Direksi.
- 5) Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada direksi untuk masing-masing tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar Rp 109.944 juta dan Rp 87.882 juta

c. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 55/2015 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. PS/BOC/021/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan:
 - Kebenaran proses pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal serta ketepatan dari laporan keuangan Perseroan
 - Kinerja fungsi Audit Internal Perseroan
 - Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

- 2) Memberikan rekomendasi dalam penunjukan, kompensasi dan pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka persiapan atau pembuatan laporan Audit atau pekerjaan lain yang terkait

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait dengan:

- Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.
- Pemberian pendapat profesional yang independen terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Selanjutnya, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- 1) Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2) Memantau dan mengkaji serta melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal Perseroan, serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.
- 3) Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
- 4) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit.
- 5) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
- 6) Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan OJK.
- 7) Memastikan SKAI bekerja secara independen.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
- 9) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit terkait untuk temuan yang terkait dengan Teknologi Informasi.
- 10) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- 11) Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugasnya.
- 12) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 13) Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan Perseroan.
- 14) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- 15) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
- 16) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Penyusunan rekomendasi ini didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;

- e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspective* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasi evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 17) Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
 - 18) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP
 - 19) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.
 - 20) Menyelenggarakan dan berwenang untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.
 - 21) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - 22) Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran *whistleblowing*, dan Komite dapat meminta dan/atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau Board of Management.
 - 23) Memastikan Perseroan memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK.
 - 24) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.

Komite Audit mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- 1) Komite Audit berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk melakukan kewenangan lain diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit akan bekerjasama dengan Internal Audit, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.
- 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 4) Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite Audit.

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Ninik Herlani Masli Ridhwan. Struktur dan keanggotaan Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam

Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite PT BANK BTPN Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT BANK BTPN Tbk No. SK/003/DIR/CCS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Susunan Anggota Komite Audit PT BANK BTPN Tbk. yang berlaku efektif sejak tanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

Ketua : Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Anggota : Edmund Tondobala
 Anggota : Aria Kanaka
 Anggota : Ivan Purnama Sanoesi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris:

Aria Kanaka
Anggota

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Menjadi Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Jabatan lain yang sedang dipegang saat ini :

- Komisaris Independen PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
- Anggota Komite Audit PT Merdeka Copper Gold Tbk
- Anggota Komite Audit PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
- Anggota Komite Audit PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
- Anggota Komite Audit PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk
- Anggota Komite Audit PT Sentul City Tbk
- Ketua Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Jabatan yang pernah dipegang antara lain :

- Partner pada KAP Aria Kanaka & Rekan (member firm Mazars SCRL) 2013-sekarang
- Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2000-sekarang
- Partner pada beberapa KAP 2003-2013
- Auditor pada KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (member firm Ernst & Young) – 2002
- Auditor pada KAP Prasetio Utomo & Co (member firm Andersen Worldwide) 1997-2002

Ivan Purnama Sanoesi
Anggota

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1988 dan Master Manajemen Keuangan dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM pada tahun 2004. Menjadi Komite Audit SMBCI sejak Juni 2018 dan menjadi Komite Audit Perseroan setelah penggabungan usaha (merger) pada tahun 2019.

Jabatan lain yang sedang dipegang saat ini :

- Anggota Komite Audit PT Bank Mega Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Ina Perdana Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mayora.

Jabatan yang pernah dipegang antara lain:

- Anggota Komite Audit SMBCI (Juli 2018-Februari 2019).
- Advisor PT Central Santosa Finance (September 2016-Agustus 2018).
- Wakil Kepala Divisi Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1999-Mei 2016).
- Kepala Biro Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1992-1999).
- Kepala Bagian/Urusan Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1989-1992).
- Staf Divisi Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1986-1989).

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melakukan 25 kali rapat Komite Audit di kantor pusat Perseroan.

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase (%)
Ninik Herlani Masli Ridhwan	25	25	100%
Edmund Tondobala	25	23	92%
Ivan Purnama Sanoesi	25	25	100%
Aria Kanaka	25	25	100%

d. Komite Pemantau Risiko

Tugas utama Komite adalah membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di dalam melakukan pengawasan yang aktif atas manajemen risiko Perseroan, melalui rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Menilai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
- Memantau dan menilai pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.
- Menilai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko Perseroan.

Sejalan dengan fungsi di atas, Komite harus senantiasa memantau proses perbaikan yang berkelanjutan atas kebijakan, peraturan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan, guna memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko Perseroan telah diterapkan dengan baik dan berjalan efektif di dalam mencapai tujuan penerapan manajemen risiko Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- 1) Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- 2) Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- 3) Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Melakukan investigasi terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite, serta dengan konsultan, akuntan publik atau pihak eksternal lainnya yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka memperoleh informasi sebagai dasar rekomendasi bagi Dewan Komisaris.
- 6) Apabila diminta oleh Dewan Komisaris, Komite dapat menjalankan tugas-tugas selain yang disebutkan dalam Charter Komite, yang sesuai dengan fungsi dan peran serta tugas Komite sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- 7) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerjasama dengan Risk Management, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan POJK No. 17/2023, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dengan susunan anggota terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/048/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Pemantau Risiko PT BANK BTPN Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT BANK BTPN Tbk No. SK/009/DIR/CCS/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT BANK BTPN Tbk yang berlaku efektif sejak tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

Ketua : Onny Widjanarko
Anggota : Takeshi Kimoto
Anggota : Edmund Tondobala
Anggota : Ongki Wanadjati Dana
Anggota : Ivan Purnama Sanoesi
Anggota : Sofyan Rambey

Riwayat kerja anggota komite pemantau risiko sebagai berikut :

Sofyan Rambey **Anggota**

Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar MBA Finance dari John. M. Olin School of Business, Washington University, St. Louis, USA pada tahun 1993 dan gelar profesi Financial Risk Manager (FRM®) dari Global Association of Risk Professional (“GARP”). Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) sejak 1 Februari 2019.

Jabatan yang pernah dipegang antara lain :

- Direktur Regional GARP (2005)
- EVP PT Mandiri Sekuritas (2003-2005)
- Group Head PT Bank Mandiri (2001-2003)
- Komisaris PT Exim Securities (1998-2001)
- Kepala Biro PT Bank Exim (1998-2000)
- Kepala Bagian PT Bank Exim (1994-1998)
- Kepala Seksi PT Bank Exim (1988-1991)
- Account Officer PT Bank Exim (1984-1987)

Riwayat kerja Onny Widjanarko, Takeshi Kimoto, Ongki Wanadjati Dana, dan Edmund Tondobala dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini Sub-bab Pengurusan dan Pengawasan.

Dasar Hukum Penunjukan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/048/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Pemantau Risiko PT BANK BTPN Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT BANK BTPN Tbk No. SK/009/DIR/CCS/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT BANK BTPN Tbk.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala. Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melakukan 17 kali rapat Komite Pemantau Risiko dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase (%)
Onny Wldjarnako ⁽¹⁾	14	12	85,7%
Takeshi Kimoto	17	14	82%
Edmund Tondobala	17	15	88%
Ongki Wandjati Dana	17	17	100%
Sofyan Rambey	17	17	100%
Ivan Purnama Sanoesi	7	7	100%
Irwan Mahjudin Habsjah ⁽²⁾	2	2	100%

1) Onny Widjanarko diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko efektif sejak 8 Mei 2023

2) Irwan Mahjudin Habsjah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak ditutupnya RUPST 13 April 2023.

e. Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34/2014 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. PS/BOC/021/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS;
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Prestasi kerja individual;
 - iii. Kewajaran dengan peer group di dalam dan di luar Bank; dan
 - iv. Pertimbangan sasaran strategi jangka panjang Bank.
- 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; Khususnya untuk calon anggota Direksi, Human Capital membantu memfasilitasi melalui proses *talent management & succession planning* dimana dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota, dan potensi pengembangannya dimasa depan. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite;
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris;
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja pihak independen dengan cara:
 - Menentukan faktor-faktor penilaian kinerja perorangan.
 - Menerima hasil penilaian terhadap anggota komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang diperoleh dari Ketua Komite terkait,
 - Komite menyusun rekomendasi atas dasar penilaian tersebut, untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk keperluan pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite.
 - 4) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
 - 5) Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi berwenang untuk, antara lain:

- 1) Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerjasama dengan Direktorat Human Capital, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua : Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Anggota : Chow Ying Hoong
 Anggota : Mira Fitria

Riwayat singkat anggota komite remunerasi dan nominasi sebagai berikut:

Mira Fitria **Anggota**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Beliau meraih gelar Bachelor of Arts dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, gelar Master of Arts dari Lancaster University pada tahun 2001 serta Post Graduate Research dari The London School of Economics and Political Science pada tahun 2006. Menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sejak tahun 2020.

Jabatan yang pernah dipegang antara lain :

- VP of Human Resources Danone Waters Indonesia (2019- 2020).
- CHRO - Corporate Affairs & Sustainability, Human Resources, Technology, and Strategy Management The Body Shop Indonesia (2017-2019).
- Human Resources Director Microsoft Indonesia (2014-2016).
- Senior HR Business Partner Microsoft Indonesia (2013-2014).
- HR Generalist for Retail Bank, Consumer Finance, Risk Management and Financial Control CITI Indonesia (2008- 2013).
- Leadership, Talent and Performance Management Head CITI Indonesia (2006-2008).
- Regional Management Associate: Consumer Bank Training & Development Manager Citibank Asia Pacific Consumer Bank, Singapore (2003-2004).
- Investment, Treasury and Insurance Compliance Manager Citibank Indonesia (2002-2003).
- Management Associate Citibank Indonesia (2001-2002)

Saat ini Mira Fitria menjabat sebagai Pejabat Eksekutif - Head of Human Resources PT BANK BTPN Tbk.

Riwayat kerja Ninik Herlani Masli Ridhwan dan Chow Ying Hong dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini Sub-bab Pengurusan dan Pengawasan.

Dasar Hukum Penunjukan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite Perseroan dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK/006/DIR/CCS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT BANK BTPN Tbk.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase (%)
Ninik Herlani Masli Ridhwan	4	4	100%
Chow Ying Hoong	4	4	100%
Mira Fitria	4	4	100%

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

f. Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan emiten atau perusahaan publik, Perseroan telah menunjuk Eneng Yulie Andriani sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Direksi Perseroan No. PS/BOD/001/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Korespondensi : Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Kav 5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950

Telepon : +62 21 30026200
Faksimil : +62 21 30026308
Email : corporate.secretary@btpn.com

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan emiten atau perusahaan publik.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Penyelenggara
31 Jan 2023	Sosialisasi atas SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum	BTPN Compliance
2 Feb 2023	Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute
3 Feb 2023	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan	BTPN Legal & Litigasi
16 Feb 2023	<i>Business Risk Forum</i> / Pelatihan dan Pengembangan <i>Effective Collaboration to achieve Common goal</i> oleh Hingdranata Nikolay	BTPN Risk

Tanggal	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Penyelenggara
22 Feb 2023	Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dan Penyelenggaraan Annual Report Award 2023	Komite Nasional Kebijakan Governansi
28 Feb 2023	<i>Effective Communication Training</i> by Wahyu Wiwoho (Talk Inc)	BTPN Corporate Secretary dan BTPN Learning
2 Mar 2023	CLCS Workshop (BTPN <i>Culture Initiative</i>) <i>Communication Seminar & Gathering</i>	BTPN CLCS Directorate
6 Mar 2023	<i>Senior Leaders' Briefing Q1 2023</i>	BTPN Corporate Communications
14 Mar 2023	<i>Leadership Series 1 Creating Strategy to Connect The Generation Gap</i> feat Yoris Sebastian (co founder Inspigo)	BTPN Human Resources
20 Mar 2023	Webinar UU Perkembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Implikasi Pada Sektor Pasar Modal	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
11 Apr 2023	Seminar "UU P2SK sebagai Penguatan Sektor Keuangan bagi Konsumen dan Industri Keuangan"	ICSA & Hukumonline
18 Mei 2023	LDA - <i>Cultural Intelligence Workshop</i>	SMBC Learning Development Asia
22 Mei 2023	Senior Leaders' Briefing Q2 2023	BTPN Corporate Communications
25 Mei 2023	<i>Understanding the Key Elements of Green, Social, and Sustainability Bonds</i>	IDX-UNDP
6 Jun 2023	<i>Economic Outlook Update</i> by Creco (Bapak Raden Pardede)	BTPN Corporate Secretary
8 Jun 2023	Pendalaman POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	ICSA
8 Jun 2023	<i>Digital Knowledge Sharing</i> (LCAPD-AGMD-BTPN) of Year 2023	LCAPD-AGMD-BTPN
13 Jun 2023	AEI Gathering - Diskusi Strategi dan Penerapan UU P2SK Bagi Perusahaan Terbuka	AEI
14 Jun 2023	<i>Leadership Series on Learning Festival (Offline): "Managing Global Business Risks : A Proactive</i> ft Tantowi Yahya	BTPN Learning
21 Jun 2023	Sosialisasi PLPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan	BTPN Compliance
26 Jun 2023	Sosialisasi Peraturan Nomor I-L tentang Suspensi Efek, IDX Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus, dan Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan	IDX
27 Jun 2023	Webinar Non Regulatory " <i>Strengthening the Board's Succession: A Framework for Board Performance & Evaluation</i> "	ICSA
6 Jul 2023	<i>Media Training</i>	BTPN Learning
12 Jul 2023	Sosialisasi ketentuan OJK mengenai APU dan PPT	BTPN Compliance dan BTPN AML CFT

Tanggal	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Penyelenggara
1 Ags 2023	Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	BTPN Compliance
2 Ags 2023	Strategi Ketahanan Perlindungan Data pada Perusahaan	ICSA
11 Ags 2023	Sosialisasi Refreshment Ketentuan OJK BMPK	BTPN Compliance
16 Ags 2023	Senior Leaders' Briefing Q3 2023	BTPN Corporate Communications
22 Ags 2023	<i>Compliance Refreshment</i> Emiten dan Perusahaan Publik	IDX
24 Ags 2023	Pendalaman SEOJK No. 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum	ICSA
7 Sep 2023	Sosialisasi Pelaksanaan Registrasi Informasi Sensitif Bank	BTPN Cyber Security Risk
14 Sep 2023	Musyawaharah AEI dan Seminar <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Penerapan UU Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Pengembangan Pasar Modal Indonesia- IDX Dinamika Ekonomi Global & Implikasinya Terhadap Perekonomian Nasional” by menko Dinamika Ekonomi Politik & Implikasinya Terhadap Dunia Bisnis”	AEI
20-22 Sep 2023	CLCS <i>Workshop</i> dan <i>Gathering</i>	BTPN CLCS Directorate
6 Okt 2023	Seminar <i>Free Float</i> dan Penggunaan Form E009 pada Sistem Pelaporan SPE	BEI dan AEI
7 Nov 2023	<i>Sustainability Town Hall</i>	BTPN Corporate Communications dan SMBC
9 Nov 2023	ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard Revised October 2023</i>	ICSA
10 Nov 2023	<i>Corporate Secretary Workshop</i> dan <i>Gathering</i>	BTPN Corporate Secretary
27 Nov 2023	Undangan Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	ICSA
30 Nov 2023	<i>Risk and Governance Summit 2023</i>	OJK

g. Satuan Kerja Audit Internal

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 dan No. 56/POJK.04/2015. Piagam Audit Internal Perseroan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.001/DIR/IAQA/I/2024 tanggal 30 Januari 2024. Piagam Audit Internal ini menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan audit internal. Perseroan telah mengangkat Nurhajati Soerjo Hadi sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tanggal 01 Januari 2017 dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PS/BOC/009/XII/2016, terakhir ditandatangani tanggal 27 Desember 2016.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rencana audit tahunan berbasis risiko untuk dikaji ulang dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- 2) Mengomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit jika terdapat keterbatasan sumber daya yang berdampak pada rencana Audit Intern.
- 3) Menyusun, mengkaji ulang dan menyesuaikan rencana Audit Intern, jika diperlukan, sebagai respons dari perubahan bisnis, risiko, operasional, program, sistem dan kontrol.
- 4) Mengomunikasikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit atas setiap perubahan sementara yang signifikan dalam rencana Audit Intern.
- 5) Memastikan setiap penugasan dalam rencana Audit Intern telah dilakukan, termasuk penetapan tujuan dan cakupan, penugasan yang tepat dan pengawasan yang memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, serta komunikasi terkait hasil penugasan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak yang tepat.
- 6) Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- 7) Memastikan prinsip integritas, objektivitas/independensi, kerahasiaan dan kompetensi telah diterapkan dan dijunjung tinggi.
- 8) Memastikan organisasi Audit Intern secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan termasuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan untuk memenuhi persyaratan Piagam Audit Intern.
- 9) Memilih SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Audit Intern.
- 10) Memastikan bahwa perkembangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan Perseroan telah dipertimbangkan dan dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara tepat.
- 11) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjadi panduan bagi Audit Intern.
- 12) Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Perseroan, kecuali jika kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Intern. Setiap pertentangan yang ada akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- 13) Memastikan kesesuaian antara kegiatan Audit Intern dengan standar yang ada.
- 14) Memastikan penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Audit Intern, patuh pada Piagam Audit dan alih pengetahuan dari pihak ketiga dilaksanakan dengan memadai.
- 15) Memastikan fungsi pengawasan terkait Audit Intern pada anak perusahaan.
- 16) Menyusun dan mengkaji Piagam, Kebijakan dan Prosedur Audit interim secara periodik.
 - a. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk
 - Satuan Kerja Audit internal;
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - Satuan Kerja Kepatuhan
 - b. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
 - c. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
 - d. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perseroan bersifat strategis di bidang kepegawaian
 - e. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
 - f. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Proyek bersifat khusus;
 - Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas
 - g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
 - h. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite

- i. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku
- j. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan
- k. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin n, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan Perseroan

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility atau CSR)

Misi Sosial yang Terintegrasi dalam Kegiatan Bisnis

Kegiatan sosial Perseroan didasarkan pada keyakinan bahwa kinerja jangka panjang Perseroan tidak hanya tergantung pada kinerja keuangannya tetapi juga tergantung pada relasinya dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan melihat perlunya suatu pengembangan program sosial yang terintegrasi dalam kegiatan bisnis dan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi nasabah serta dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan negeri dengan meluncurkan Program Pemberdayaan Mass Market yang terukur dan berkelanjutan yang bernama “Daya”.

Program Daya melakukan pemberdayaan nasabah mass market melalui empat pilar program yaitu:

- Literasi Keuangan
- Pengembangan Kapasitas Diri
- Peningkatan Kapasitas Usaha
- Kehidupan yang Berkelanjutan

Berbagai program Daya dirancang dengan terlebih dahulu meneliti kebutuhan masyarakat dan melihat situasi nasional bahkan global (contohnya pandemi), agar layanan yang diberikan dapat bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran. Program ini melibatkan masyarakat sebagai subjeknya, sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai kebutuhan, melalui berbagai program, kurikulum dan modul yang disediakan. Dengan demikian, tidak terdapat pengaduan yang masuk dari masyarakat terkait program-program Daya. Program ini melibatkan para pakar dan pihak yang berpengalaman, seperti universitas, korporasi dan institusi, untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam mewujudkan Indonesia yang lebih kuat.

Melalui program Daya, Perseroan meraih berbagai penghargaan seperti Bronze Global CSR Award di tahun 2016 and the Gold Global CSR Award di tahun 2017 dalam Global CSR Summit & Awards yang diselenggarakan oleh The Pinnacle Group International. Pada tahun 2023, Perseroan meraih peringkat Platinum untuk tahun ke-3 secara berturut-turut dalam ajang “Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.” Selain itu, Perseroan juga meraih rating Gold pada tahun 2020.

Daya.id

Setelah melalui riset kepada nasabah digital behavior, versi digital dari Daya yaitu daya.id, secara resmi diluncurkan di tahun 2018. Tersedia baik untuk para nasabah Perseroan dan publik, daya.id menawarkan kenyamanan akses ke berbagai manfaat platform Daya secara digital tanpa perlu datang ke kantor-kantor cabang Perseroan. Kekuatan inovasi program daya.id terletak pada:

- Menyediakan informasi tepercaya terkait pengelolaan keuangan, kewirausahaan dan gaya hidup sehat
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi dengan para ahli yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya.
- Mendukung pertumbuhan usaha nasabah melalui promosi produk mereka di daya.id
- Menyelenggarakan program pemberdayaan yang bisa diakses selama 24 jam penuh dan beroperasi 7 hari dalam seminggu

Empat Pilar Program Daya

Program Pengembangan Kapasitas Diri

Pengembangan kapasitas diri erat kaitannya dengan keberhasilan individu tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan, demi masa depan yang lebih baik. Perseroan berupaya untuk meningkatkan kesadaran, potensi, kemampuan dan keahlian seseorang dalam dunia yang terus bergerak maju. Diharapkan para penerima manfaat dapat memiliki kehidupan yang lebih tertata dan sejahtera, dan siap untuk menghadapi tantangan dunia yang kompleks ini. Salah satu program pengembangan kapasitas diri yang diberikan Perseroan adalah kepada karyawan dari nasabah korporasi dengan berbagai tema seperti; The Power of Excellence Execution, Increasing Business Performance Through Creative Problem Solving and Increasing Performance Through Creative Communication Skill.

Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Literasi keuangan memberi kemampuan bagi seseorang untuk mengelola keuangannya dengan bijak dan bertanggung jawab, melalui pembuatan anggaran dan manajemen keuangan. Literasi keuangan juga menolong masyarakat memilih produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhannya, dan terhindar dari jebakan investasi yang tidak jelas. Dalam skala nasional, literasi keuangan memiliki dampak penting untuk meluaskan inklusi keuangan dan berperan dalam pemulihan serta peningkatan ekonomi Indonesia.

Untuk itu, Perseroan mengambil tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan yang membahas topik-topik sebagai berikut:

- Pengenalan terhadap Perseroan dan mindset literasi keuangan
- Tips menjaga PIN agar rekening aman
- Bijak menggunakan layanan E-Banking
- Bahaya pinjaman online ilegal
- Kiat mengatur gaji
- Pentingnya pengelolaan keuangan (prioritas pengeluaran)
- Perencanaan keuangan untuk generasi sandwich
- Cara mencapai kebebasan finansial
- Dasar/pengenalan instrumen investasi

Peningkatan Kapasitas Usaha

Perseroan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya-upayanya dalam membangun wirausahawan baru dan meningkatkan kapasitas serta keterampilan para wirausahawan yang ada. Kegiatan wirausaha mengambil peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena mengurangi kesenjangan, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal. Terutama bagi segmen UMKM, program peningkatan kapasitas usaha ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan memajukan usaha mereka. Tidak hanya menyediakan kurikulum dan sarana online, namun Perseroan juga memberi kesempatan untuk seminar tatap muka dan tanya jawab.

Kehidupan yang Berkelanjutan

Tiga topik yang diusung dalam pilar ini adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan untuk mitigasi perubahan iklim. Hanya dalam lingkungan yang sehat dan tubuh yang kuat, masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi mereka dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Selama tahun 2022, Perseroan telah memberikan program kehidupan yang berkelanjutan kepada banyak nasabah dengan topik seputar gaya hidup sehat dan kesehatan mental.

10. Sumber Daya Manusia

Perseroan berkomitmen pada keunggulan operasional dan layanan pelanggan yang terbaik, dimana karyawan-karyawan dengan kualitas terbaik merupakan aset yang paling berharga. Perseroan menggunakan pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, merancang program dan proses untuk memaksimalkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan bisnis dan operasional. Perseroan juga memberikan penghargaan kepada karyawan untuk meraih perkembangan diri dan standar kinerja terbaik.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 20.933 karyawan.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status

	Per 31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
Tetap	6.346	6.584
Kontrak	290	388
Jumlah	6.636	6.972
Perusahaan anak		
Tetap	3.612	3.896
Kontrak	10.685	8.872
Jumlah	14.297	12.768
Total Jumlah	20.933	19.740

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang jabatan

	Per 31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
<i>Board of Management</i>	10	12
<i>Top Management</i>	178	171
<i>Senior Management</i>	743	718
<i>Management</i>	2.891	2.919
<i>Officer/Supervisor</i>	1.590	1.596
<i>Clerical</i>	1.224	1.556
Jumlah	6.636	6.972
Perusahaan anak		
<i>Board of Management</i>	3	5
<i>Top Management</i>	12	12
<i>Senior Management</i>	169	152
<i>Management</i>	556	502
<i>Officer/Supervisor</i>	1.266	1.209
<i>Clerical</i>	12.291	10.888
Jumlah	14.297	12.768
Total Jumlah	20.933	19.740

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan status pendidikan formal

	Per 31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
S2-S3/Master	325	322
S1/Sarjana	5.467	5.692
≤D1-D3/Akademi	844	958
Jumlah	6.636	6.972
Perusahaan anak		
S2-S3/Master	79	77
S1/Sarjana	5.892	5.681
≤D1-D3/Akademi	8.326	7.010
Jumlah	14.297	12.768
Total Jumlah	20.933	19.740

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan kelompok umur

	Per 31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
≥ 60 tahun	1	0
55-59 tahun	19	19
50-54 tahun	417	413
45-49 tahun	601	606
40-44 tahun	1.272	1.204
35-39 tahun	1.655	1.756
30-34 tahun	1.443	1.621
25-29 tahun	1.000	1.079
<25 tahun	228	274
Jumlah	6.636	6.972
Perusahaan anak		
≥ 60 tahun	1	0
55-59 tahun	11	13
50-54 tahun	68	62
45-49 tahun	112	101
40-44 tahun	223	215
35-39 tahun	651	581
30-34 tahun	1.708	1.756
25-29 tahun	4.455	4.599
<25 tahun	7.068	5.441
Jumlah	14.297	12.768
Total Jumlah	20.933	19.740

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan fungsinya

	Per 31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
<i>Business Banking</i>	559	600
<i>Corporate Banking – Japanese</i>	115	101
<i>Credit Risk</i>	74	71
<i>Digital Banking</i>	461	420
<i>Executive Secretary to Retail Banking Director</i>	1	
<i>Human Resources</i>	107	106
<i>Internal Audit</i>	59	50
<i>Kepatuhan & Legal</i>	119	116
<i>Keuangan & Perencanaan</i>	88	82
<i>Manajemen Risiko</i>	56	51
<i>Micro Business</i>	-	553
<i>Operations</i>	2.367	2.491
<i>Retail Banking Analytics. Planning & Process Excellence</i>	38	42
<i>Retail Banking Risk</i>	632	622
<i>Retail Lending Business</i>	935	640
<i>Secretary To Deputy President Director</i>	1	1
<i>Teknologi Informasi</i>	475	492
<i>Treasury</i>	40	35
<i>Wealth Management Business and Network & Distribution</i>	331	346
<i>Wholesale Banking</i>	178	153
Jumlah	6.636	6.972
Perusahaan anak		
<i>Compliance & Risk</i>	67	60
<i>Finance & Operations</i>	-	529
<i>Finance, Treasury & Operations</i>	540	-
<i>Financing Business</i>	13.206	11.663
<i>Funding & Fee Based Business</i>	-	243
<i>Funding & New Business</i>	227	-
<i>Human Capital, Internal Audit & Information Technology</i>	257	273
Jumlah	14.297	12.768
Total Jumlah	20.933	19.740

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi geografis

	Per 31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
Jakarta (Kantor Pusat)	2.690	2.706
Sumatera dan sekitar	805	907
Jakarta (Non Kantor Pusat)	411	331
Jawa dan Bali	2.002	2.208
Kalimantan	194	217
Sulawesi	360	412
Indonesia Bagian Timur	174	191
Jumlah	6.636	6.972

	Per 31 Desember	
	2023	2022
Perusahaan anak		
Jakarta (Kantor Pusat)	644	621
Sumatera dan sekitar	3.582	3.189
Jakarta (Non Kantor Pusat)	116	101
Jawa dan Bali	8.442	7.573
Kalimantan	489	440
Sulawesi	511	400
Indonesia Bagian Timur	513	444
Jumlah	14.297	12.768
Total Jumlah	20.933	19.740

Tenaga kerja asing

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 12 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kewarganegaraan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA/Surat Notifikasi/Pengesahan	Jabatan
1.	Hideaki Asatsu	Jepang	IM2WAN68522	10-Apr-25	51259230	Pejabat Eksekutif Corporate Banking V Head
2.	Naoki Watanabe	Jepang	J1U1VAA46300	13-Mei-25	51273961	Pejabat Eksekutif Corporate Banking Department 2
3.	Hiroaki Seguchi	Jepang	2C11JD1336-X	13-Des-24	51417249	Pejabat Eksekutif Corporate Banking 4 Head
4.	Tasuku Tanaka	Jepang	E1U1RAR60733	25-Apr-25	51223100	Pejabat Eksekutif Credit Risk Head
5.	Keisuke Heima	Jepang	J1U1SAEY26183	12-Jun-25	51290536	Pejabat Eksekutif Risk Management Planning Head
6.	Kenji Okada	Jepang	IM2VAH27145	30-Okt-24	51163871	Pejabat Eksekutif Alignment and Synergy Head
7.	Akira Kuwata	Jepang	2C21JD0368-A	18-Feb-25	51223097	Pejabat Eksekutif IT Governance Management Head
8.	Hayato Inoue	Jepang	IM2VAD51886	15-Mei-25	51286800	Pejabat Eksekutif IT Corporate Banking Enablement Head
9.	Kosuke Shimada	Jepang	2C11JD1279-X	03-Des-24	51417258	Pejabat Eksekutif Digital Banking Alignment & Synergy Head
10.	Takeshi Nishimura	Jepang	2C11JE2966-X	15 Oct 24	51377095	Pejabat Eksekutif Business Banking Cross Collaboration Head
11.	So Hirahara	Jepang	2C11JE2964-X	15 Oct 24	51377091	Pejabat Eksekutif Treasury Alm & Planning Head
12.	Yuta Ohara	Jepang	E1U1JBO82214	24-Mar-25	51230484	Tenaga Ahli Alignment & Synergy Planning

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memilih pegawai yang dengan ketidakteradannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Serikat Pekerja

Perseroan memiliki serikat pekerja yang mengakomodir aspirasi karyawan, yaitu Serikat Pekerja yang telah dicatatkan berdasarkan Surat No. 28571-1.835.2 perihal Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan Nomor Bukti Pencatatan 698/SP/JP/XI/2016 tanggal 4 November 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang bersifat material

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memilih pegawai yang dengan ketidakteradaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Pendidikan dan pelatihan

Perseroan menempatkan pentingnya peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan Perseroan, oleh karena itu Perseroan secara berkala melaksanakan program pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawan. Pelatihan dan pengembangan ini tentunya bertujuan untuk mendukung kesiapan karyawan dan daya saing perusahaan dalam menghadapi tuntutan industri perbankan dan menjawab kebutuhan pelanggan.

Program pelatihan & pengembangan SDM Perseroan meliputi pengembangan talenta, pelatihan kepemimpinan, pelatihan kompetensi teknis dan non teknis yang wajib diikuti oleh setiap insan Perseroan, mulai dari karyawan, manajer senior, hingga Direksi. Program pelatihan yang sudah berjalan pada tahun 2022 adalah:

1. Program akselerasi untuk menyiapkan calon-calon pemimpin Perseroan di masa mendatang.
2. Program pelatihan kepemimpinan bagi karyawan yang pertama kali memimpin tim kerja (LDP P1) dan para manajer yang membawahi tim kerja yang berbeda-beda (LDP P2).
3. Program pengembangan kompetensi teknis karyawan, fokus kepada program untuk reskilling dan upskilling kompetensi karyawan agar mampu menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis, khususnya proses digitalisasi di semua lini bisnis
4. Program pelatihan kompetensi non teknis karyawan untuk mempersiapkan agar karyawan dapat beradaptasi dengan cara bekerja yang baru, dengan memberikan pelatihan yang menunjang produktifitas dan kerjasama tim agar dapat beradaptasi dengan cara-cara yang baru.

Desain program pelatihan Perseroan telah terstruktur disesuaikan dengan strategi Perseroan, tren industri serta kebutuhan pengembangan karyawan. Perseroan juga telah menyediakan infrastruktur pendukung untuk mengelola pelatihan dan pengembangan karyawan melalui system Human Resources Information System (HRIS). Proses identifikasi, analisa, metode belajar dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan difasilitasi oleh system HR yang tidak hanya memudahkan proses belajar, namun membuat pemerataan pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawan dalam mengembangkan kebutuhan dan ketrampilan merata bagi semua karyawan di berbagai lokasi kerja.

Di tengah era new normal, beberapa pelatihan masih dilakukan secara daring untuk meningkatkan efisiensi waktu dan memperluas aksesibilitas. Pada tahun pelaporan, Perseroan mengadakan 420 program pelatihan yang diikuti oleh 6.805 karyawan selama total 269.756 jam, sehingga rata-rata jam pelatihan untuk setiap karyawan adalah 39 jam/tahun.

Fasilitas dan kesejahteraan karyawan

Perseroan mengapresiasi kinerja dan prestasi karyawan melalui sistem remunerasi. Kebijakan remunerasi dan tunjangan Perseroan juga merupakan strategi untuk mempertahankan SDM produktif yang dapat memaksimalkan Return on Investment (ROI) Perseroan. Pemberian gaji pokok dan remunerasi berlandaskan atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku terkait remunerasi karyawan.

Seluruh karyawan tetap Perseroan berhak mendapatkan upah entry level yang setara bahkan lebih tinggi dari UMP (Upah Minimum Provinsi) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan sehingga remunerasi dianggarkan sesuai dengan hasil usaha dan kompetensi karyawan. Perseroan tidak membedakan pemberian remunerasi dan upah entry level antara karyawan pria dan wanita, keduanya berbanding 1:1 untuk setiap kategori jabatan

11. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2024, baik Perseroan atau Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Anak, tidak sedang menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara, yang

bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan Pemerintah atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

B. Keterangan tentang Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

1. Umum

Perseroan secara resmi menjadi bank hasil penggabungan dengan SMBCI pada 1 Februari 2019 dan menawarkan layanan keuangan lebih lengkap bagi seluruh spektrum nasabah individu dan nasabah bisnis, dari korporasi besar di daerah urban utama hingga usaha-usaha menengah dan mikro dan masyarakat di pedesaan. Saat ini, Perseroan merupakan bank yang melayani komunitas prasejahtera produktif (*mass market*), UMKM, korporasi besar dan ritel yang didukung oleh teknologi digital. Saat ini Perseroan berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia.

Perseroan menawarkan berbagai layanan perbankan melalui beberapa unit bisnisnya. Pertama, adalah pinjaman korporasi (*Corporate Loan*) yang merupakan unit bisnis hasil penggabungan dengan SMBCI. Kedua, adalah BTPN Mitra Bisnis yang melayani para nasabah wirausaha kecil dan menengah. Berikutnya adalah ritel yang mencakup BTPN Purna Bakti yang fokus pada segmen pensiunan dan prapensiunan, BTPN Sinaya yang fokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dan wealth management dari segmen individu berpenghasilan menengah ke atas, dan Jenius untuk menjawab kebutuhan nasabah urban yang lebih fasih menggunakan smartphone. Unit bisnis Perseroan lainnya adalah BTPN Mikro yang melayani para nasabah wirausaha mikro.

Perseroan melaksanakan kegiatan kemasyarakatannya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perseroan mengintegrasikan program sosialnya sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya. Sehingga semboyan “Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti” tidak hanya merupakan kegiatan sosial Perseroan – tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis perbankan sehari-hari hingga ke tingkat cabang.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Usaha Utama, yaitu:
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
 - Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:
 - Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah:
 - o Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - o Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - o Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
 - o Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - o Obligasi;
 - o Surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - o Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;
- Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- Menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perseroan memiliki 6 unit bisnis dengan penjelasan sebagai berikut:

Segmen *Business Banking*

BTPN Mitra Bisnis melayani usaha menengah melalui skema pembiayaan *supply chain* dan program pembiayaan terstruktur. Selain itu BTPN Mitra Bisnis juga mengembangkan dan menerapkan *behavior scoring model* guna mempersingkat proses perpanjangan kredit dan mendukung mekanisme *early alert*. Dalam penyaluran kredit, BTPN tetap berpedoman pada asas-asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian. BTPN Mitra Bisnis juga mengembangkan *electronic channel* melalui Digital SME yang saat ini telah memiliki kemampuan digital (*digital capabilities*) pendanaan, pembayaran, transaksi dan pengelolaan kas sederhana.

Kinerja BTPN Mitra Bisnis

Sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2023, perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah BTPN Mitra Bisnis sejumlah Rp 13.255 miliar atau naik 18% dibandingkan tahun 2022 sejumlah Rp 11.257 miliar. Hingga 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 3000 lebih nasabah BTPN Mitra Bisnis, naik 19% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 2500 lebih nasabah.

Di sisi lain, nasabah BTPN Mitra Bisnis memiliki simpanan sejumlah Rp 690 miliar atau naik 47% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp 469 miliar.

Segmen Korporasi

Segmen korporasi terdiri dari segmen *Wholesale Banking Group* (WBG) dan *Corporate Banking Japanese* (CBJ) yang melayani nasabah perusahaan Indonesia di segmen Tier 1, Tier 2, Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation/MNC*), Lembaga Jasa Keuangan (FI/NBFI) dan *Commercial Banking*. Segmen korporasi terus aktif berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi khususnya proyek infrastruktur, proyek energi baru-terbarukan, pembiayaan terkait ESG (termasuk green financing) dan industri pendukung, termasuk industri pendukung ekspor, yang sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Indonesia.

Kinerja Korporasi

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan memiliki outstanding kredit kepada nasabah korporasi sejumlah Rp 104.904 miliar dan memberikan kontribusi terbesar atas total pinjaman - kotor Perseroan yaitu sebesar 67%.

Segmen Retail Banking

- *Wealth Management Business – Sinaya*

BTPN Sinaya merupakan lini bisnis ritel Bank BTPN yang fokus pada produk dan layanan untuk nasabah segmen menengah ke atas.

BTPN Sinaya fokus pada pengumpulan dana pihak ketiga dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap alternatif produk investasi selain tabungan/deposito, maka pengembangan produk dan layanan akan juga fokus pada produk *wealth management*.

Kinerja BTPN Sinaya

Hingga 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 137 ribu nasabah BTPN Sinaya, naik sebesar 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 134 ribu nasabah. Sampai dengan 31 Desember 2023, nasabah BTPN Sinaya memiliki simpanan sejumlah Rp 27,3 triliun naik 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp 27,2 triliun

- *Retail Lending*

- o *Pensiun*

Lini bisnis ini bertujuan untuk memungkinkan jutaan pensiunan untuk membentuk kehidupan yang lebih berarti dengan menghormati kontribusi mereka di masa lalu dan dengan membantu mereka untuk meneruskan hidup mereka dengan cara yang sehat, sejahtera dan bermakna. BTPN menyediakan produk pinjaman yang disesuaikan dan dikembangkan mengikuti kebutuhan nasabah pensiunan, dengan tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan nasabah pensiunan dalam pengambilan uang pensiunan.

- o *Pra Pensiun Segmen Swasta*

Produk Pra Pensiun untuk segmen pegawai swasta yang nantinya akan melakukan kemitraan dengan pihak Dana Pensiun swasta atau pihak ketiga yang memiliki akses ke dana pensiun segmen swasta tersebut.

- o *Pegawai Aktif*

Produk yang menargetkan pegawai aktif segmen PNS, BUMN dan Swasta melalui produk pinjaman pegawai dengan pembayaran angsuran bersumber dari gaji. Bank bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi nasabah korporasi dan komersial sebagai fokus utama, selain perusahaan-perusahaan lainnya yang berpotensi.

- *Kinerja BTPN Pensiun, Para Pensiun Segmen Swasta dan Pegawai Aktif*

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah BTPN Pensiun, para pensiun & pegawai aktif sejumlah Rp 22.403 miliar atau turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp 23.990 miliar. Hingga 31 Desember 2023, Perseroan memiliki nasabah BTPN Pensiun, Pra Pensiun dan Pegawai Aktif sebanyak 391.016, turun sebesar 7,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 422.173 nasabah.

- o *Mikro (Micro Business)*

BTPN Mikro berkomitmen untuk fokus pada pelayanan transaksi keuangan Perbankan dan penyaluran kredit kepada para pelaku usaha ekonomi produktif sektor mikro dan komunitasnya di Indonesia.

Sejak tahun 2008, segmen UMKM di Perseroan telah berdiri dan mengalami proses transformasi sesuai dengan perkembangan layanan perbankan dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah para pelaku usaha UMKM di Indonesia.

BTPN Mikro juga terus mengoptimalkan proses digitalisasi dengan menggunakan aplikasi digital dan sistem internal melalui konversi model transformasi menggunakan model *hybrid* (kombinasi antara tenaga penjual dan proses digital). BTPN Mikro melakukan kerjasama dengan menjalin kemitraan lokal di dalam komunitas UMKM untuk pengembangan usahanya dengan menggunakan platform digital perbankan.

- *Kinerja BTPN Mikro*

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan memiliki outstanding kredit kepada nasabah BTPN Mikro sejumlah Rp 1.306 miliar atau naik 75,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp 743 miliar. Hingga 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 13.929 nasabah BTPN Mikro, naik sebesar 16,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 11.953 nasabah.

- o *Joint Finance*

Pengembangan Bisnis *Joint Finance* dilakukan untuk pembiayaan kepada end-user melalui kerjasama dengan perusahaan pembiayaan (*Multifinance*) dengan skema Joint Financing dan kerjasama perusahaan berbasis Financial Teknologi (*Fintech*) melalui skema channelling.

- *Jenius*

Produk ini merupakan *Smart Digital Banking*, diluncurkan pada tahun 2016 yang menargetkan nasabah *digitally savvy mass-affluent individuals* di kota besar. Jenius menawarkan fitur mudah mengatur keuangan melalui *smartphone*.

Kinerja Jenius

Hingga 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 4,5 juta nasabah Jenius, naik sebesar 24% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 3,6 juta nasabah. Sampai dengan 31 Desember 2023, Jenius memiliki simpanan sejumlah Rp 25,5 triliun, naik 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp 23,7 triliun.

Perseroan dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah beberapa kejadian penting Perseroan sejak awal berdiri sampai dengan tahun 2023:

Tahun	Kejadian Penting
1985	Perseroan didirikan di Bandung, Jawa Barat dan telah sah menjadi badan hukum
1986	Bapemil resmi dibubarkan dan menyerahkan hak dan kewajiban Bapemil kepada Perseroan. Menteri Keuangan memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha Bapemil dan mencabut izin usaha bank pegawai yang diberikan kepada Bapemil pada tahun 1960.
2008	TPG Nusantara S.à.r.l. melakukan akuisisi saham Perseroan sebesar 71,6% melalui pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Perseroan menjadi bank publik dengan nilai aset Rp13,7 triliun.
2009	Perseroan meluncurkan bisnis usaha mikro dan kecil (UMK) dengan nama BTPN Mikro dengan membuka 539 kantor cabang.
2011	Perseroan meluncurkan Daya, program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis Perseroan. Bisnis pendanaan memperkenalkan brand Sinaya, yang terhubung dengan inisiatif Daya.
2013	Perseroan melakukan akuisisi atas PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang dikonversikan menjadi bank syariah sebelum Perseroan memisahkan unit syariahnya ke dalam entitas baru di 2014. SMBC memiliki 24,3% saham BTPN melalui transaksi pembelian saham yang sebelumnya dimiliki oleh TPG Nusantara S.à r.l. dan Pemegang Saham lainnya.
2014	SMBC meningkatkan kepemilikan di Perseroan menjadi 40%.

Tahun	Kejadian Penting
2015	Perseroan secara resmi meluncurkan BTPN Wow!, sebuah layanan perbankan bagi mass market yang memanfaatkan telepon seluler dan didukung jasa agen sebagai perpanjangan tangan Perseroan untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat.
2016	Perseroan meluncurkan Jenius, layanan telepon seluler menggunakan smartphone untuk menghubungkan rekening nasabah dengan Bank dan melakukan transaksi perbankan. Perseroan juga memperoleh ijin sebagai Bank Devisa
2017	Perseroan telah memperluas fitur aplikasi mobile banking BTPN Wow! dan Jenius. Selain itu, Perseroan melakukan transformasi yang disebut “Gemilang” meliputi struktur organisasi Bank, teknologi, SDM dan pengendalian risiko.
2018	Initial Public Offering (IPO) Perusahaan Anak, BTPN Syariah. Dimulainya proses Penggabungan Perseroan dengan SMBCI.
2019	Penggabungan Perseroan dengan SMBCI telah resmi dilakukan dengan Perseroan.
2020	Perseroan meluncurkan Sinaya Prioritas, layanan perbankan untuk nasabah affluent dengan total portofolio minimal Rp500 juta.
2021	Perseroan memberikan PT Kepland Investama fasilitas pinjaman hijau senilai Rp1,06 triliun sebagai bentuk perwujudan komitmen Perseroan terhadap pembiayaan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; salah satu yang pertama di pasar Indonesia.
2022	Perseroan dan SMBC sepakat untuk memberikan pembiayaan hijau senilai USD93,75 juta, atau Rp1,46 triliun, kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendukung aktivitas PLN dalam upaya transisi energi menuju energi terbarukan. Perseroan dan SMBC bersama-sama berperan sebagai coordinating mandated lead arranger and bookrunner, serta green loan coordinator.
2023	Perseroan dan International Finance Corporation (IFC) menjalin kerja sama dalam kesepakatan Obligasi Sosial Dan Berwawasan Lingkungan untuk memperkuat aksi iklim dan mendorong pembangunan inklusif di Indonesia. IFC menginvestasikan sebesar USD500 juta di Perseroan. Penerbitan obligasi tersebut akan menjadi yang pertama bagi Perseroan dan memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor UMKM di Indonesia, khususnya bisnis-bisnis yang dipimpin oleh perempuan serta aksi adaptasi terhadap perubahan iklim.

Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor cabang, 197 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional operasional, dan 214 ATM.

2. Keunggulan Kompetitif

Untuk menjalankan visi Perseroan, yaitu:

“Menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital.”

Perseroan didukung oleh keunggulan kompetitif, di antaranya:

- Jaringan global yang luas dan anggota dari grup SMBC yang merupakan perusahaan perbankan global yang kuat.
- Dukungan kuat dari Global Financial Group (pendanaan mata uang asing, pengembangan bisnis, cakupan sektor dan alih pengetahuan).
- Bisnis korporasi yang kuat dengan dukungan jaringan dari grup SMBC.
- Tim yang berpengalaman dengan pengetahuan lokal yang kuat.
- Kepemimpinan yang kuat.

- Budaya dan kemampuan *digital banking* terdepan di Indonesia dari segi *people, proses, pola pikir*, dan kemampuan teknologi informasi.
- Produk baru yang akan ditawarkan di semua segmen (Korporasi, Komersial, Ritel, UMKM) termasuk *platform digital*.
- Kontribusi keuangan inklusif melalui keuangan ultra mikro Syariah.

3. Strategi Usaha

Perseroan memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi bank kelas atas dengan dengan layanan yang lengkap di Indonesia yang menawarkan produk kompetitif dalam bidang ritel, business banking dan korporasi dengan dukungan teknologi digital.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Perseroan memiliki tiga Kebijakan Inti (*Core Policies*) yaitu:

- 1) Pertumbuhan dan Pengembangan Nilai, antara lain:
 - Mencapai skala bisnis untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan dan laba.
 - Mencapai pertumbuhan secara organik dan anorganik.
 - Memanfaatkan teknologi digital dalam menyediakan produk, layanan, pembayaran, dan kemampuan transaksi yang lengkap.
- 2) Manajemen Bank yang Sehat, antara lain:
 - Menerapkan standar global untuk Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko termasuk manajemen risiko *cyber* dan praktik SDM.
 - Menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
 - Kebijakan investasi yang menyeimbangkan pencapaian profitabilitas dengan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.
- 3) Sinergi:
 - Mengoptimalkan kerjasama di lingkungan Perseroan, dengan BTPN Syariah dan grup SMBC.
 - Terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem pasar melalui kemitraan dan penyertaan modal.

Dengan berpijak pada tiga Kebijakan Inti (*Core Policies*) ini, Perseroan mengimplementasikan fokus strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pinjaman dengan menetapkan *risk appetite* yang sejalan dengan tujuan yang diperlukan dan melalui *value chain*.
- 2) Meningkatkan basis pelanggan ritel dan pendapatan dengan meningkatkan kemampuan Jenius sebagai *platform* dan *wealth management*, mengoptimalkan saluran distribusi, kolaborasi lintas lini bisnis, dan kemitraan strategis dengan ekosistem pasar.
- 3) Meningkatkan CASA dan *fee based income* dan *foreign exchange* dengan mengembangkan proposisi nilai pelanggan, kapabilitas, produk dan layanan.
- 4) Berinvestasi pada talenta, menanamkan budaya berbasis kepercayaan yang berkinerja tinggi.
- 5) Menerapkan keunggulan operasional secara *bank wide* dengan menerapkan digitalisasi dan *process excellence*.
- 6) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan Return on Assets.
- 7) Mengembangkan proposisi nilai dan kolaborasi yang dioptimalkan ke tingkat yang diperbolehkan oleh regulator dengan Perusahaan anak SMBC lainnya di Indonesia dan jaringan global SMBC.
- 8) Membangun keunggulan operasional teknologi informasi dan terus membangun kapabilitas keamanan digital dan cyber

4. Aset tetap yang penting dan dimiliki oleh perseroan

No.	Kantor	Jenis Hak/ Nomor Hak	Luas Tanah (m ²)	Alamat/Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Nilai Aset tetap (31 Desember 2023)
1.	KC A. Yani	SHGB No. 61 tanggal 31 Agustus 2017	3.065	Jl. A. Yani No. 618-620 Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiaracondong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	10 Agustus 2037	Rp45.056.000.000

No.	Kantor	Jenis Hak/ Nomor Hak	Luas Tanah (m2)	Alamat/Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Nilai Aset tetap (31 Desember 2023)
2.	KC Bandar Lampung	SHGB No. 10 tanggal 26 Januari 1994	2.710	Jl. Wolter Monginsidi No. 15, Desa Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung	23 Desember 2043	Rp18.786.000.000
3.		SHGB No. 43 tanggal 5 Juni 2015	320	Jl. Wolter Monginsidi No. 15, Desa Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung	1 Juni 2035	
4.	KC Bandung	SHGB No. 18 tanggal 28 Januari 1997	353	Jl. Lengkong Besar No. 38, Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	30 Oktober 2036	Rp16.913.000.000
5.		SHGB No. 19 tanggal 28 Januari 1997	691	Jl. Lengkong Besar No. 38, Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	30 Oktober 2036	
6.	KC Banjarmasin	SHGB No. 3 tanggal 7 Maret 1994	1.170	Jl. A Yani No. 240 KM 3, 5, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2024	Rp23.176.000.000
7.		SHGB No. 00037 tanggal 13 Februari 1995	996	Jl. A Yani No. 240 KM 3, 5, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2024	
8.	KC Bogor	SHGB No. 245 tanggal 1 November 2017	1.988	Jl. Padjadjaran No. 63, Kel. Babakan, Kec. Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	22 Desember 2037	Rp42.742.000.000
9.	KC Cililitan	SHGB No. 52 tanggal 27 Juli 1991	1.927	Jl. Dewi Sartika No. 46 RT001/ 013, Kel. Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta timur, DKI Jakarta	5 Maret 2035	Rp22.053.000.000
10.	KC Cirebon	SHGB No. 330 tanggal 27 Januari 2017	780	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 72, Desa Sukapura, Kec. Kejaksanaan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat	25 Januari 2037	Rp6.240.000.000
11.	KC Depok	SHGB No. 504 tanggal 16 Mei 1998	255	Jl. Margonda Raya No. 77, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kab. Bogor, Jawa Barat.	23 September 2042	Rp13.464.000.000
12.		SHGB No. 503 tanggal 16 Mei 1998	510	Jl. Margonda Raya No. 77, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kab. Bogor, Jawa Barat.	23 September 2042	
13.	KC Garut	SHGB No. 4 tanggal 25 Oktober 2017	1.040	Jl. Merdeka No. 84-A Desa Haurpanggung, Kec. Tarogong, Kab. Garut, Jawa barat	13 September 2037	Rp5.616.000.000
14.	KC Jakarta (Gn. Sahari)	SHGB No. 625 tanggal 4 Juli 1988	2.258	Jl. Gunung Sahari Raya No. 87, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2 Juli 2028	Rp65.482.000.000
15.	KC Jember	SHGB No. 2068 tanggal 7 September 2015	1.165	Jl. Kalimantan No. 18 A, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur	28 Agustus 2035	Rp4.078.000.000

No.	Kantor	Jenis Hak/ Nomor Hak	Luas Tanah (m2)	Alamat/Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Nilai Aset tetap (31 Desember 2023)
16.	KC Juanda	SHGB No. 139 tanggal 5 Juni 2006	1.596	Jl. Ir. H. Juanda (Dago) No. 8, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat	24 September 2036	Rp39.102.000.000
17.	KC Kebayoran Baru	SHGB No. 1872 tanggal 29 Mei 2006	200	Jl. Petogogan II No. 6-8 Blok A, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	28 Mei 2026	Rp13.032.000.000
18.		SHGB No. 1451 tanggal 18 Mei 1995	189	Jl. Petogogan II No. 6-8 Blok A, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	16 Mei 2035	
19.	KC Kediri	SHGB No. 48 tanggal 1 Juni 2006	184	Jl. Brigjen Katamso No. 32, Kel. Kampungdalem, Kec. Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa timur	29 Mei 2026	Rp7.464.000.000
20.		SHGB No. 47 tanggal 1 Juni 2006	1.404	Jl. Brigjen Katamso No. 32, Kel. Kampungdalem, Kec. Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa timur	29 Mei 2026	
21.	KC Kudus	SHGB No. 85 tanggal 17 Juni 1994	1.365	Jl. Jend Sudirman No. 117 A, Desa Nganguk, Kec. Kota, Kab. Kudus	13 Juni 2034	Rp11.193.000.000
22.	KC Madiun	SHGB No. 164 tanggal 10 Desember 2010	768	Jl. Salak No. 65, Kel. Taman, Kec. Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur	8 Oktober 2030	Rp4.480.000.000
23.		SHGB No. 87 tanggal 22 Oktober 1992	955	Jl. Salak No. 65, Kel. Taman, Kec. Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur	20 Oktober 2032	
24.	KC Magelang	SHGB No. 247 tanggal 11 April 1997	2.418	Jl. Diponegoro No. 18, Kel. Magelang, Kec. Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Jawa Tengah	24 September 2026	Rp11.123.000.000
25.	KC Makassar	SHGB No. 153 tanggal 28 Mei 1994	1.692	Jl. Gn Bawakaraeng No. 170, Desa Lariangbangi, Kec. Makassar, Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan	28 Mei 2034	Rp34.720.000.000
26.	KC Malang	SHGB No. 49 tanggal 16 Juni 2008	81	Jl. Jaksa Agung Suprpto No 63, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kotamadya Malang, Jawa timur	10 Juni 2028	Rp13.519.000.000
27.		SHGB No. 46 tanggal 25 Juni 2004	1.148	Jl. Jaksa Agung Suprpto No 63, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kotamadya Malang, Jawa timur	25 Juni 2024	
28.	KC Manado	SHGB No. 49 tanggal 28 Maret 2014	954	Jl. Sam Ratulangi No. 100-102, Desa Tanjung Batu, Kec. Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara	28 Feb 2034	Rp19.491.00.000
29.		SHGB No. 25 tanggal 25 Agustus 1994	1.190	Jl. Sam Ratulangi No. 100-102, Desa Tanjung Batu, Kec. Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2034	
30.	KC Medan	SHGB No. 2366 tanggal 17 September 2015	2.591	Jl. Putri Hijau No. 20, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kotamadya Medan, Sumatera Utara	26 Juni 2035	Rp61.407.000.000

No.	Kantor	Jenis Hak/ Nomor Hak	Luas Tanah (m2)	Alamat/Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Nilai Aset tetap (31 Desember 2023)
31.	KC Padang	SHGB No. 26 tanggal 21 Juni 1997	1.536	Jl. Khatib Sulaiman No. 45, Kel. Belanti Barat, Kec. Padang Barat, Padang	20 Februari 2037	Rp9.216.000.000
32.	KC Palembang	SHGB No. 39 tanggal 6 November 2012	1.799	Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kel. 20 Ilir IV, Kec. Ilir Timur I, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan	28 September 2032	Rp16.911.000.000
33.	KC Pematang Siantar	SHGB No. 522 tanggal 26 September 2002	118	Jl. Sutomo No. 5/II, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kotamadya Pematangsiantar, Sumatera Utara	25 September 2042	Rp6.035.000.000
34.		SHGB No. 523 tanggal 17 Oktober 2002	115	Jl. Sutomo No. 5/II, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kotamadya Pematangsiantar, Sumatera Utara	17 October 2042	
35.	KC Purwokerto	SHGB No. 00208 tanggal 12 April 2004	930	Jl. R.A Wiriarmaja No. 16 A, Kel. Kedungwuluh, Kec. purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	12 April 2044	Rp11.705.000.000
36.		SHGB No. 00209 tanggal 12 April 2004	817	Jl. R.A Wiriarmaja No. 16 A, Kel. Kedungwuluh, Kec. purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	12 April 2044	
37.	KC Semarang	SHGB No. 1297 tanggal 17 September 2002	1.375	Jl. Mataram No.715 Desa Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kab. Semarang, Jawa Tengah	6 September 2042	Rp57.300.000.000
38.		SHGB No. 1136 tanggal 1 Februari 1995	917	Jl. Mataram No.715 Desa Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kab. Semarang, Jawa Tengah	1 Februari 2035	
39.	KC Serang	SHGB No. 72 tanggal 11 September 1993	1.070	Jl. KH. TB A. Khotib No. 43, Desa Cipare, Kec. Serang, Kab. Serang, Jawa Barat	29 Juli 2033	Rp4.708.000.000
40.	KC Sukabumi	SHGB No. 78 tanggal 25 Maret 1998	1.546	Jl. RE. Martadinata No. 53, Kel. Cikole, Kec. Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat	24 Oktober 2038	Rp8.194.000.000
41.	KC Surabaya	SHGB No. 910 tanggal 1 Desember 1998	2.434	Jl. Indrapura No. 1 EFG, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa timur	15 Oktober 2038	Rp50.276.000.000
42.		SHGB No. 636 tanggal 4 November 1996	2.495	Jl. Indrapura No. 1 EFG, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa timur	31 Oktober 2026	
43.	KC Diponegoro	SHGB No. 482 tanggal 19 April 1994	967	Jl. Ciliwung 9, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	15 Februari 2034	Rp23.595.000.000
44.	KC Surakarta	SHGB No. 00052 tanggal 5 Desember 2013	740	Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 526, Desa Kerten, Kec. Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah	5 Desember 2033	Rp13.616.000.000
45.	KC Tasikmalaya	SHGB No. 111 tanggal 23 Agustus 1994	1.050	Jl. KH. Z Mustofa No. 289, Kel. Kahuripan, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat	1 April 2034	Rp8.295.000.000

No.	Kantor	Jenis Hak/ Nomor Hak	Luas Tanah (m2)	Alamat/Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Nilai Aset tetap (31 Desember 2023)
46.	KC Tegal	SHGB No. 603 tanggal 6 April 2001	1.060	Jl. Dr. Sutomo No. 24, Desa Pakauman, Kec. Tegal Barat, Kotamadya Tegal, Jawa Tengah	6 April 2041	Rp6.996.000.000
47.	KC Yogyakarta	SHGB No. 00158 tanggal 11 Oktober 2001	1.425	Jl. Bintaran Tengah No.15, Kel. Wirogunan, Kec. Mergansan, Kota Yogyakarta, DIY	8 Oktober 2041	Rp12.113.000.000

5. Kebijakan Riset dan pengembangan perseroan

Perseroan tidak memiliki pengeluaran untuk biaya riset dan pengembangan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

6. Tingkat kesehatan perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir

Perseroan telah mengimplementasikan penilaian dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) cakupan penilaian tersebut meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings) dan Permodalan (capital) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Profil Risiko

Posisi Risiko Perseroan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mendapatkan peringkat masing- masing 2(dua) dengan skor masing-masing 2(dua).

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peringkat	2	2

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance Perseroan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mendapatkan peringkat masing-masing 2 (dua) dan 2 (dua).

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peringkat Individual	2	2
Peringkat Konsolidasi	2	2

Rentabilitas

Self Assessment atas Rentabilitas Perseroan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mendapatkan Peringkat Komposit masing-masing 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian Rentabilitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kinerja Menghasilkan laba	2	1
2	Indikator pendukung rentabilitas	2	2
3	Sustainabilitas Rentabilitas	3	3
4	Manajemen Rentabilitas	1	1
	Peringkat Komposit	2	2

Permodalan

Self Assessment atas Permodalan Perseroan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mendapatkan Peringkat Komposit secara berturut-turut 2 (dua) dan 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian Permodalan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kecukupan Modal Bank	1	1
2	Pengelolaan Permodalan	1	1
3	Manajemen Permodalan	1	1
	Peringkat Komposit	2	1

7. Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan meningkatnya penerapan teknologi digital yang terus berkembang dalam industri perbankan baik dari perusahaan fintech, bank digital maupun bank konvensional dengan layanan perbankan digital serta persaingan dari bank-bank skala besar, sementara Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar.

Pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank swasta nasional yang termasuk dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3.

Persaingan usaha antara lain dapat dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan. Berikut ini tabel pangsa pasar Perseroan di industri perbankan Indonesia per tanggal 31 Desember 2023:

(Dalam miliar Rupiah)

Kriteria	Keterangan	Per 31 Desember	
		2023	2022
Total Aset	Industri	11.765.838	11.113.321
	Perseroan	201.448	209.170
	Pangsa Pasar	1,7%	1,9%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri	8.457.929	8.153.590
	Perseroan	108.199	114.867
	Pangsa Pasar	1,3%	1,4%
Jumlah Kredit yang Disalurkan	Industri	7.090.243	6.423.564
	Perseroan	156.561	146.124
	Pangsa Pasar	2,2%	2,3%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK dan Laporan Keuangan Perseroan

8. Pemasaran dan Jaringan distribusi

Perseroan akan terus mengembangkan pangsa pasarnya di layanan keuangan. Perseroan juga menerapkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja produk dan layanan. Hal ini dilakukan bukan sekadar untuk meningkatkan kinerja usaha Perseroan, tetapi juga memberikan kepuasan maksimum terhadap nasabah.

Terkait layanan Korporasi, Perseroan terus memperluas jaringan layanan bagi nasabah Korporasi di berbagai kota besar di Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kantor Perseroan yang luas, serta berencana mendirikan kantor satelit baru di daerah industri dan daerah strategis lainnya untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan di lokasi tersebut.

Perseroan juga terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lini bisnis, seperti segmen Korporasi, Retail Banking dan Business Banking untuk meningkatkan aktifitas cross sell bagi Perseroan.

Di segmen Retail Lending, untuk melayani para pensiunan yang berada di lokasi terpencil, Perseroan terus mengembangkan jaringan payment point bekerja sama dengan PT Pos, dan juga dengan para pihak ketiga, seperti penyedia perangkat pembayaran melalui media elektronik dan pihak lain yang telah memiliki jaringan layanan/outlet yang luas.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi pada industri keuangan termasuk perbankan, Perseroan juga telah menerapkan strategi pemasaran berbasis online kepada nasabah, seperti dalam bentuk web meeting untuk menangkap setiap kebutuhan finansial yang nasabah perlukan secara cepat dan tepat. Selain itu, Perseroan juga memberikan layanan edukasi kepada nasabah secara berkala mengenai beberapa hal di luar produk perbankan, seperti: seminar, pelatihan, program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR).

Terkait Jenius, untuk mendapatkan nasabah baru dan terus meningkatkan layanan kepada nasabah, Perseroan secara terus menerus memperbaiki dan menambah fitur-fitur yang ada pada aplikasi Jenius dengan melibatkan pengguna dan calon pengguna Jenius dalam menentukan fitur yang akan dikembangkan. Di Jenius, proses ini dinamai ko-kreasi, yaitu suatu kegiatan pertemuan secara berkala untuk mendapatkan masukan dari pengguna dan calon pengguna layanan Jenius, baik secara virtual maupun tatap muka.

Jenius juga melakukan kerja sama dengan mitra strategis, di antaranya kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi untuk memperkenalkan Jenius kepada nasabah perusahaan telekomunikasi atau penawaran layanan pembayaran gaji (*payroll*) melalui Jenius, dan kerja sama dengan para pemilik lahan dan para pemilik tempat lainnya agar Jenius dapat mendirikan stan pameran sementara untuk acara loyalitas nasabah, edukasi pelanggan, atau akuisisi nasabah.

Untuk mendukung layanan yang maksimal kepada nasabah, Perseroan senantiasa mengukur Service Level Agreement (SLA). Perseroan menangani keluhan nasabah dengan baik, terutama agar dapat direspons dengan cepat dan tepat.

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor cabang, 197 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional operasional, dan 214 ATM.

Adapun pendapatan Perseroan berdasarkan pulau adalah sebagai berikut:

	Jawa	Sumatera	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan dan Sulawesi	Penyesuaian dan eliminasi	Konsolidasian
31 Desember 2023						
Pendapatan Bunga	14.762.054	2.321.058	487.220	1.245.341	-	18.815.673
Jumlah Aset	181.546.539	10.678.290	2.410.816	8.041.057	(1.228.310)	201.448.392
31 Desember 2022						
Pendapatan Bunga	11.863.972	2.261.709	491.252	1.282.713	-	15.899.646
Jumlah Aset	190.311.295	9.822.302	2.460.961	7.808.973	(1.233.827)	209.169.704

9. Pendanaan dan Likuiditas

Sumber pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anaknya naik setelah melakukan penggabungan dengan SMBCI pada 31 Desember 2023, dimana posisi sumber pendanaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp 98.457.403 juta dan Rp 105.168.911 juta.

Berikut adalah rincian simpanan nasabah berdasarkan masing-masing produk simpanan:

Giro

Berdasarkan pihak ketiga dan pihak berelasi:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pihak ketiga	26.578.680	23.708.094
Pihak berelasi	50.003	57.708
Beban bunga yang masih harus dibayar	5.960	1.489
Total Giro	26.634.643	23.767.291

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rupiah	1,64%	1,64%
Mata uang asing	1,85%	0,40%

Saldo giro yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 329.041 juta dan Rp 129.432 juta.

Tabungan

Berdasarkan Jenis:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Tabungan "Jenius"	11.414.116	9.750.254
Tabungan "Citra Pensiun"	2.155.288	2.174.755
Tabungan "Tepat Tabungan Kelompok Syariah"	2.140.799	2.109.497
Tabungan "Se To"	738.244	1.274.056
Tabungan "Pasti"	154.263	197.149
Tabungan "Tepat Tabungan"	57.010	50.451
Tabungan "Wadiah WOW iB"	-	17.540
Lain-lain	9.143	58.831
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.499	1.659
Total Tabungan	16.670.362	15.634.192

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rupiah	1,86%	1,60%
Mata uang asing lainnya	1,34%	0,17%

Deposito Berjangka

Berdasarkan jangka waktu:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Sampai dengan 1 bulan	24.720.307	50.280.859
1 - 3 bulan	11.175.601	11.510.339
3 - 6 bulan	2.601.838	2.153.881
6 - 12 bulan	2.570.983	1.557.581
Lebih dari 1 tahun	13.255	21.822
Beban bunga yang masih harus dibayar	143.663	142.423
Total Deposito Berjangka	41.225.647	65.666.905

Berdasarkan tingkat suku bunga:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Hingga 3%	679.070	5.874.336
Lebih dari 3 - 5%	25.049.460	53.118.373
Lebih dari 5 - 7%	15.353.454	6.531.773
Beban bunga yang masih harus dibayar	143.663	142.423
Total Deposito Berjangka	41.225.647	65.666.905

Deposito on call

Berdasarkan mata uang:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Deposito on call		
- Rupiah	8.669.230	100.470
- Dolar Amerika Serikat	4.862.174	-
- Yen Jepang	366.822	-
Beban bunga yang masih harus dibayar	28.525	53
Total Deposito on call	13.926.751	100.523

10. Portfolio Kredit

Portfolio kredit Perseroan meningkat pasca penggabungan dengan SMBCI. Saat ini, Perseroan memiliki nasabah yang beragam mulai dari mikro sampai dengan korporasi.

Berikut adalah nilai pinjaman yang diberikan oleh Perseroan:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pinjaman yang diberikan:		
Pihak ketiga		
- Rupiah	98.345.547	88.421.976
- Dolar Amerika Serikat	42.369.192	42.837.338
- Yen Jepang	606.229	782.342
- Euro Eropa	79.104	167.004

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pihak berelasi		
- Rupiah	79.043	856.218
- Dolar Amerika Serikat	3.694.321	1.531.175
Pembiayaan/piutang syariah:		
Pihak ketiga		
- Rupiah	11.387.861	11.527.463
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		
- Rupiah	775.589	658.255
- Dolar Amerika Serikat	320.372	218.351
- Yen Jepang	680	266
- Euro Eropa	1.155	1.662
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.618.047)	(3.579.119)
Total pinjaman yang diberikan	153.041.046	143.422.931

Jenis Kredit yang Diberikan

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rupiah		
Korporasi	56.105.566	49.991.324
Pensiunan	22.217.122	23.772.300
Usaha kecil menengah	14.712.035	12.210.504
Usaha mikro kecil	1.144.823	627.597
Pembiayaan/piutang syariah	11.387.861	11.527.463
Pegawai instansi lain	185.890	217.373
Keperluan rumah tangga	746.914	83.180
Karyawan	116.713	123.229
Umum	2.824.502	2.189.522
Kepemilikan Mobil	371.025	63.165
Mata uang asing		
Korporasi	46.748.846	45.317.859
Pendapatan bunga/margin	1.097.796	878.534
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.618.047)	(3.579.119)
Total pinjaman yang diberikan	153.041.046	143.422.931

Sektor Ekonomi

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rupiah		
Rumah Tangga	25,789,504	25.244.829
Perdagangan	24,087,831	24.633.447
Perindustrian	23,286,387	21.074.080
Jasa lainnya	17,006,636	15.106.595
Pertanian	4,670,463	3.660.102
Jasa akomodasi	184,386	127.611
Konstruksi	5,524,093	5.551.079

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Transportasi & komunikasi	7,465,186	4.380.048
Pertambangan	930,988	200.900
Lainnya	866,977	826.966
Dolar Amerika Serikat		
Perdagangan	2,456,267	2.864.387
Perindustrian	10,162,115	13.737.492
Jasa lainnya	16,495,515	12.391.394
Pertanian	1,404,117	2.652.480
Konstruksi	320,628	382.345
Transportasi & komunikasi	5,460,203	3.092.831
Pertambangan	5,097,663	5.259.690
Lainnya	4,667,005	3.987.894
Yen Jepang		
Perindustrian	363,365	440.996
Perdagangan	5,444	14.726
Jasa lainnya	2,589	8.533
Lainnya	234,831	318.087
Euro Eropa		
Perdagangan	79,104	167.004
Pendapatan buyanga / marjin	1.097.796	878.534
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.618.047)	(3.579.119)
Total pinjaman yang diberikan	153.041.046	143.422.931

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Suku bunga/margin rata-rata per tahun		
- Rupiah	9,43%	9,04%
- Dolar Amerika Serikat	6,13%	2,81%

Kualitas Kredit

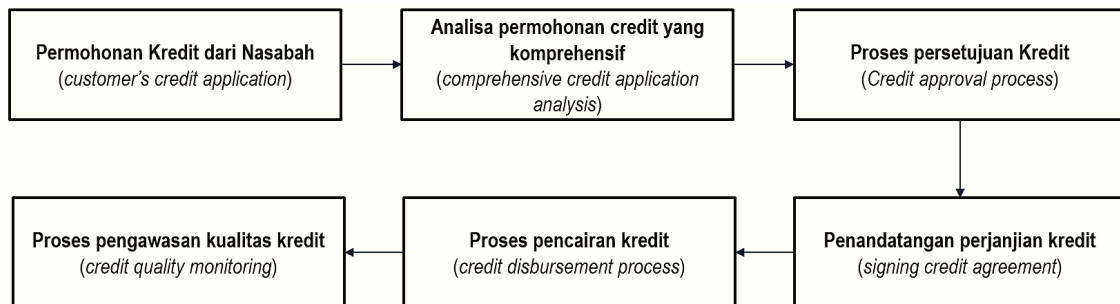
Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Saldo awal tahun	(3.579.119)	(3.953.699)
Penyisihan selama tahun berjalan	(3,029,571)	(1.754.676)
Penerimaan kembali	(88,291)	(120.194)
Penghapusbukuan	2.066.044	1.871.710
Kerugian modifikasi	-	308.911
Penjualan pinjaman yang diberikan	-	91.486
Lain-lain	12.890	(22.657)
Saldo akhir tahun	(4.618.047)	(3.579.119)
% non-performing loan (NPL) bersih	0,40%	0,44%

Proses Penyaluran Kredit

Gambaran umum proses penyaluran kredit adalah sebagai berikut:



11. Manajemen Risiko

Risiko Kredit

Dalam rangka mendukung target bisnis dan tetap menjaga kualitas portofolio, Perseroan menyusun kebijakan dan prosedur kredit sesuai dengan hierarki kebijakan. Kebijakan kredit menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses kredit dan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur dilakukan secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Perseroan terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif penerapan manajemen risiko dan terus melakukan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Selain penetapan kebijakan dan prosedur, Perseroan juga menetapkan batasan (*limit*) untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan *risk appetite* Perseroan. *Limit* tersebut antara lain meliputi *limit* untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambil keputusan dan tingkat risikonya serta mempertimbangkan agar tidak ada *conflict of interest* dalam proses kredit yang diberikan kepada nasabah, sedangkan penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dilaksanakan sesuai peraturan eksternal yang berlaku.

Perseroan mengelola, dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi – secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok dan industri serta sektor geografis.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Perseroan dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, antara lain dengan implementasi prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah secara efektif, memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi pemutus kredit.

Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar dilakukan berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam bentuk strategi, kebijakan dan prosedur Perseroan yang berkaitan dengan produk, jasa dan aktivitas yang terekspos risiko pasar. Perseroan juga mengatur dan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas *front office unit* (Treasury), *middle office unit* (Risk Management) dan *back office unit* (Treasury Operation).

Selain itu Perseroan juga menetapkan limit secara keseluruhan (*bank wide*), limit per aktivitas atau produk tertentu berdasarkan posisi, sensitivitas dan potensi kerugian agar proses pengendalian risiko dapat mendukung strategi bisnis dan ekspansi bisnis dapat optimal, terukur dan dapat mengantisipasi apabila terjadi kondisi pasar yang kurang menguntungkan.

Perseroan juga mengelola risiko pasar *banking book* dengan mengoptimalkan struktur neraca Perseroan untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai tingkat risiko yang dapat diterima Perseroan.

Untuk risiko suku bunga dalam *banking book* dilakukan pengukuran dan pemantauan berdasarkan *repricing profile* atas aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dan dapat mempengaruhi pendapatan bunga bersih maupun nilai arus kas di masa mendatang.

Pengendalian terhadap risiko pasar meliputi proses revaluasi dengan menggunakan harga pasar secara harian, melakukan simulasi dan *stress test* secara berkala terhadap semua kemungkinan perubahan faktor risiko pasar yaitu perubahan nilai tukar dan suku bunga, serta menerapkan kebijakan penentuan harga yang tepat berdasarkan proyeksi pertumbuhan kredit dan pendanaan untuk mengoptimalkan pendapatan bunga bersih.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap potensi kerugian sehingga mendukung untuk pengambilan keputusan secara tepat waktu dan sistem pengendalian internal.

Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dalam bentuk strategi, kebijakan dan prosedur Perseroan yang berkaitan dengan strategi bisnis, pendanaan internal dan eksternal dan *risk appetite*. Termasuk di dalamnya mengatur tingkat aset likuid, penetapan jenis aset likuid, diversifikasi sumber pendanaan dan proses pemantauan dan pelaporan likuiditas.

Pemantauan dilakukan secara harian atas kondisi likuiditas Perseroan melalui proyeksi arus kas, limit dan toleransi risiko likuiditas dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait dan parameter yang telah ditetapkan oleh *Assets and Liability Committee* (ALCO), termasuk menerapkan indikator peringatan dini agar potensi krisis likuiditas dapat dideteksi lebih dini.

Perseroan dengan ketat memantau perkembangan kebutuhan pendanaan, mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu, melakukan stres test secara berkala dan menyiagakan *Contingency Funding Plan* jika terjadi krisis likuiditas.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap potensi memburuknya likuiditas untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara tepat waktu dan sistem pengendalian internal.

Risiko Operasional

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan melakukan pengawasan secara aktif terhadap manajemen risiko operasional melalui berbagai komite, seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko. Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai *terms of reference* masing-masing untuk membahas risiko operasional beserta pelaksanaan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pengendalian internal atas risiko operasional dilakukan melalui penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*). Pada lini pertahanan pertama, *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu oleh *Business Risk* (Fungsi *Internal Control & Risk* – ICR) dalam melaksanakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lini pertahanan kedua, Divisi *Operational & Fraud Risk Management* (OFRM) di Direktorat Manajemen Risiko bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit secara independen bertanggung jawab memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat ditoleransi oleh Perseroan.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak bertanggung jawab atas praktik pengendalian internal Perseroan dilakukan secara berkelanjutan melalui ICR *maturity self-assessment* yang terstandarisasi dan forum-forum yang diselenggarakan oleh Divisi OFRM untuk memfasilitasi fungsi *Internal Control & Risk*.

Proses manajemen risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan secara terstruktur dan konsisten. Hal itu diterapkan berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk Perseroan serta juga mencakup *Business Continuity Management* (BCM).

Tahapan proses manajemen risiko operasional mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko operasional dilakukan atas seluruh proses, produk, sistem dan organisasi. Selain dilakukan terhadap produk, layanan dan inisiatif baru Perseroan, kajian risiko operasional juga dilakukan terhadap pengembangan ataupun perubahan. Proses identifikasi risiko operasional juga dilengkapi dengan perangkat manajemen risiko operasional di antaranya *Risk Grading Matrix* (RGM), *Process Risk Control* (PRC), *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Risk Acceptance*.
2. Proses pengukuran risiko meliputi kegiatan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara berkala melalui *Key Control Self Assessment* (KCSA), analisa kejadian dan kerugian risiko operasional, pelaksanaan aktivitas pemeriksaan oleh *Internal Control & Risk* (ICR), pengukuran KRI dan *Operational Risk Appetite* (ORA) yang dilaporkan secara bulanan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (KMR).
3. Pemantauan risiko operasional dilakukan melalui pelaporan kepada manajemen senior dan regulator, baik secara rutin ataupun *ad-hoc*, termasuk pelaporan kejadian dengan kategori signifikan melalui *Significant Incident Notification Protocol* (SINP). Hal ini diterapkan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti.
4. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan menerapkan mekanisme kontrol pencegahan, deteksi dan koreksi yang efektif dan/atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan dampak kerugian operasional bagi Perseroan. Sebagai salah satu tindakan pengendalian, Perseroan telah memiliki pedoman Manajemen Kelangsungan Bisnis yang komprehensif.

Perseroan telah menyediakan *Internal Control & Risk System* (ICRS) untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk risiko operasional yang dilakukan oleh Perseroan telah menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) sejak awal tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh OJK.

Perseroan telah menyusun pedoman serta organisasi bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha (BCM) yang komprehensif, dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem/pasokan listrik, hingga pemberitaan media maupun lingkungan bisnis yang kurang baik, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum ditujukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat kontrak. Beberapa upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk unit kerja khusus bidang hukum;
2. Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali;
3. Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah;
4. Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
5. Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif

Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Beberapa upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholders;
2. Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;
3. Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
4. Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif.

Risiko Strategi

Pengelolaan risiko strategi dilakukan guna mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun *corporate plan* dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Perseroan yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan *review* minimal semesteran;
2. Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk *corporate plan* dan *business plan*.

Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan ditujukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Beberapa upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik;
2. Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab dan review kepatuhan secara berkala;
3. Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional;
4. Melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan atau aktivitas perusahaan termasuk usulan pemberian kredit pada limit tertentu;
5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala berkenaan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator;
6. Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan;
7. Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

12. Asuransi

Perseroan telah melakukan penutupan asuransi dengan menunjuk beberapa pihak perusahaan asuransi yang menanggung risiko-risiko antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian/Polis/ Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Masa Berlaku
1.	PT Asuransi MSIG Indonesia No. Ref 9318/CBS3/2470/11/2023	<i>Money Insurance</i>	Rp647.250.000.000	1 tahun	20 November 2023 s.d. 20 November 2024
2.	PT Asuransi MSIG Indonesia No. 126/ CBS3/29/01/2024	<i>Motor Total Loss Only</i>	Rp235.633.200	1 tahun	31 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2024
3	PT Asuransi MSIG Indonesia No. 123/ CBS3/27/01/24	<i>Property All Risk & Earthquake</i>	Rp903.041.386.704	1 tahun	31 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2024
4.	PT Asuransi MSIG Indonesia No. 128/ CBS3/30/01/2024	<i>Public Liability</i>	Rp3.039.200.000	1 tahun	31 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2024




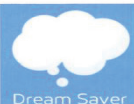



No.	Perjanjian/Polis/ Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Masa Berlaku
5.	PT Asuransi MSIG Indonesia No. 124/ CBS3/28/01/202	<i>Terrorism and Sabotage (Head Office – Menara BTPN dan KCP – Menara BTPN)</i>	Rp434.179.152.737	1 Tahun	31 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2024
6.	PT Asuransi Wahana Tata No. 098.4050.503.2023.000102.00	<i>Directors and Officers Liability and Company Reimbursement</i>	USD50.000.000	1 Tahun	14 Agustus 2023 s.d. 14 Agustus 2024

Manajemen menilai asuransi diatas telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dapat terjadi

13. Hak Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan juga memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek dan hak cipta yang telah memperoleh sertifikat merek dan sertifikat hak cipta, yaitu sebagai berikut:

a. Sertifikat Merek

No	MERK	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	TEMPAT TERDAFTAR
1.		IDM000641785	6 Agustus 2025	Indonesia
2.		IDM000795577	15 Agustus 2026	Indonesia
3.		IDM000795575	15 Agustus 2026	Indonesia
4.		IDM000795570	15 Agustus 2026	Indonesia
5.		IDM000867537	6 Desember 2029	Indonesia
6.		IDM000867538	6 Desember 2029	Indonesia
7.		IDM000867539	6 Desember 2029	Indonesia

No	MERK	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	TEMPAT TERDAFTAR
8.		IDM000867542	6 Desember 2029	Indonesia
9.		IDM000858339	20 Desember 2029	Indonesia
10.		IDM000858354	20 Desember 2029	Indonesia
11.		IDM000858377	20 Desember 2029	Indonesia
12.		IDM000858377	20 Desember 2029	Indonesia
13.		IDM000867543	6 Desember 2029	Indonesia
14.		IDM000867544	6 Desember 2029	Indonesia
15.		IDM000982010	20 Desember 2029	Indonesia
16.		IDM000858326	20 Desember 2029	Indonesia
17.	 Dream Saver	IDM000845344	30 September 2029	Indonesia
18.	 Dream Saver	IDM000845344	30 September 2029	Indonesia

No	MERK	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	TEMPAT TERDAFTAR
19.	 Split Bill	IDM000845745	1 Oktober 2029	Indonesia
20.	 Split Bill	IDM000845741	1 Oktober 2029	Indonesia
21.	 Pay Me	IDM000845741	1 Oktober 2029	Indonesia
22.	 Moneymoji	IDM000845738	1 Oktober 2029	Indonesia
23.	 Moneymoji	IDM000845740	1 Oktober 2029	Indonesia
24.	 Momoji	IDM000845735	1 Oktober 2029	Indonesia
25.	 Maxi Saver	IDM000845467	1 Oktober 2029	Indonesia
26.	 Maxi Saver	IDM000926159	1 Oktober 2029	Indonesia
27.		IDM000846103	1 Oktober 2029	Indonesia
28.		IDM000845717	1 Oktober 2029	Indonesia

No	MEREK	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	TEMPAT TERDAFTAR
29.	 Flexi Saver	IDM000845306	1 Oktober 2029	Indonesia
30.	 Flexi Saver	IDM000846000	1 Oktober 2029	Indonesia
31.	 Flexi Cash	IDM000845352	30 September 2029	Indonesia
32.	 Flexi Cash	IDM000845424	30 September 2029	Indonesia
33.	Jenius QR 	IDM000931591	18 Oktober 2030	Indonesia
34.	Jenius QR 	IDM000931596	18 Oktober 2030	Indonesia
35.	MoneyTory 	IDM000997088	18 Oktober 2030	Indonesia
36.	MoneyTory 	IDM000931605	18 Oktober 2030	Indonesia
37.		IDM000925063	31 Desember 2030	Indonesia
38.		IDM000925552	31 Desember 2030	Indonesia
39.		IDM000373131	10 Maret 2031	Indonesia

No	MERKE	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	TEMPAT TERDAFTAR
40.		IDM000530439	2 April 2034	Indonesia
41.	TOUCHBIZ	IDM000948299	26 Januari 2031	Indonesia
42.	TOUCHBIZ	IDM000948130	26 Januari 2031	Indonesia
43.		IDM000747881	30 Agustus 2027	Indonesia
44.		IDM000373135	10 Maret 2031	Indonesia
45.		IDM000677667	8 Juni 2026	Indonesia
46.		IDM000677662	8 Juni 2026	Indonesia
47.		IDM000677671	8 Juni 2026	Indonesia
48.		IDM000867546	6 Desember 2029	Indonesia
49.		IDM000518803	9 Desember 2033	Indonesia
50.	bank btpn	IDM000796474	8 Juni 2026	Indonesia
51.		IDM000960321	17 Maret 2031	Indonesia

No	MEREK	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL BERAKHIRNYA HAK	TEMPAT TERDAFTAR
52.		IDM000959240	17 Maret 2031	Indonesia
53.		IDM000964800	5 Maret 2030	Indonesia
54.		IDM000964801	5 Maret 2030	Indonesia
55.		IDM000965046	5 Maret 2030	Indonesia
56.		IDM000965047	5 Maret 2030	Indonesia
57.		IDM001091601	21 September 2032	Indonesia
58.		IDM001091600	21 September 2032	Indonesia
59.		IDM001095360	09 Agustus 2032	Indonesia
60.		IDM001093226	09 Agustus 2032	Indonesia
61.		521009	16 Oktober 2033	Filipina
62.		521010	16 Oktober 2033	Filipina
63.		40202318153R	17 Agustus 2033	Singapura

b. Hak Cipta

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Nomor Permohonan	Masa Berlaku
1.	Daya.id	Program Komputer	EC00202112795	8 Desember 2067
2.	Tumbuh dan Menjadi Inspirasi	Lagu	C00201404417	2 Juli 2064
3.	Jenius Life Finance App & Microservices Source Code	Program Komputer	EC00201982851	1 April 2068
4.	BTPN Wow Core	Program Komputer	EC00201982862	30 Maret 2065

14. Kecenderungan usaha

Selanjutnya, sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan di masa datang.

15. Uraian transaksi afiliasi

Berikut adalah Transaksi material dan Afiliasi selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilaporkan dan dipublikasikan:

Pada tanggal 27 Maret 2024, Perseroan dan PT Summit Auto Group serta Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) telah memasuki dan menandatangani Perjanjian pengambilalihan saham-saham yang termasuk dalam kategori Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi (“Transaksi”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Kejadian : 27 Maret 2024

- Obyek Transaksi :
1. Pengambilalihan atas saham PT Oto Multiartha oleh Perseroan dari:
 - a. SAG yang merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation (Grup SC), sebanyak 147.664.464 saham seri B yang merupakan 15,9% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada PT Oto Multiartha;
 - b. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, sebanyak 325.976.271 saham seri B yang merupakan 35,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada PT Oto Multiartha.
 2. Pengambilalihan atas saham PT Summit Oto Finance oleh Perseroan dari:
 - a. PT Summit Oto Finance yang merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation (Grup SC), sebanyak 776.575 saham seri B yang merupakan 15,9% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada PT Summit Oto Finance;
 - b. SMBC, sebanyak 1.714.326 saham seri B yang merupakan 35,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada PT Summit Oto Finance.

<p>Nilai Transaksi</p>	<p>: Nilai Transaksi yang merupakan gabungan dari nilai Pengambilalihan PT Oto Multiartha dan Pengambilalihan PT Summit Oto Finance seperti yang dijelaskan di atas, adalah sebesar Rp6.550.743.411.334 yang merupakan 15,87% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan per 31 Desember 2023.</p>
<p>Pihak yang Melakukan Transaksi</p>	<p>: PT BANK BTPN TBK PT Summit Auto Group Sumitomo Mitsui Banking Corporation</p>
<p>Hubungan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan</p>	<p>: Perusahaan terafiliasi</p>
<p>Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi</p>	<p>: SMBC adalah pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 91.047%, dan SMBC saat ini merupakan pemegang saham pada PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance.</p>
<p>Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi</p>	<p>: Setelah mempertimbangkan latar belakang Transaksi, Perseroan yakin bahwa dengan melakukan Transaksi dengan Afiliasi, proses pelaksanaan Transaksi dapat dilaksanakan secara lebih efisien dibandingkan dengan apabila Rencana Transaksi dilakukan dengan non-Afiliasi.</p> <p>Diharapkan dengan dilakukannya Transaksi ini akan berdampak positif untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan baik secara organik dan non organik, serta meningkatkan nilai bagi para pemegang saham serta pemangku kepentingan.</p>

Selanjutnya, untuk Transaksi Afiliasi yang terkait Kegiatan Perseroan telah dimuat dalam catatan 36 Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023 terlampir pada prospektus ini.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) atau non-interest bearing debt securities sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT OCBC Sekuritas Indonesia

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (Rp)			%
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT BCA Sekuritas	23.500.000.000	116.800.000.000	140.300.000.000	39,51%
2.	PT Indo Premier Sekuritas	81.255.000.000	123.505.000.000	204.760.000.000	57,67%
3.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	10.000.000.000	-	10.000.000.000	2,82%
Jumlah		114.755.000.000	240.305.000.000	355.060.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*) pada 10Juni 2024 – 20 Juni 2024, kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

HWMA Law Firm

Graha Binakarsa Lantai 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
 Telp.: +6221 2279 1209
 Fax.: +6221 2279 1209

Nama Rekan : Dr. Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn
 STTD : STTD.KH-20/PJ-1/PM.02/2023
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 200815
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

KAP Siddharta Widjaja & Rekan (“KPMG”)

Jakarta Mori Tower Lt. 35
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41
 Jakarta 10210, Indonesia

Nama Rekan : Novie, S.E., CPA
 STTD : STTD.AP-368/PM.22/2018 tanggal 13 Februari 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank BTPN berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Kantor Ashoya Ratam, SH., MKn,

Jl. Suryo No.54, Kebayoran Baru Jakarta 12180
Telp.: +6221 2923 6060

STTD : STTD.N-54/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Ashoya Ratam
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0782519730317 atas nama Ashoya Ratam
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14A Jakarta 12790
Telp.: +6221 7917 5000
Fax.: +6221 7990 720

STTD : Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 20 Agustus 2000
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Pernyataan dari Bank mega No. 0873/CAMS-WA/24, Wali Amanat menyatakan antara lain tidak memiliki hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("POJK No. 19/2020") sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Equity Tower Lt.30
Sudirman Central Business District, Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kiav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Umum

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024, No. 4 tanggal 2 April 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat. Dengan demikian, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Mega Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Bank Mega**") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang OJK) dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No. 0873/CAMS-WA/24 tanggal 28 Maret 2024, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) Mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat;
 - (ii) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan.
- Surat Pernyataan No. 0874/CAMS-WA/24 tanggal 28 Maret 2024, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat Pernyataan No. 0910/CAMS-WA/24 tanggal 2 April 2024, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan telah melakukan Due Dilligence terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C- 682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 01 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Bank Mega per 29 Februari 2024 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No.DE/III/2024-0849 tanggal 2 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500,- per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,02
- Publik (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chairul Tanjung
Komisaris Independen	:	Achjadi Ranuwisastra
Komisaris Independen	:	Lambock V. Nahattands
Komisaris Independen	:	Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	:	Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	:	Indivara Erni
Wakil Direktur Utama	:	Lay Diza Larentie
Direktur	:	Yuni Lastianto
Direktur	:	Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	:	Martin Mulwanto
Direktur	:	Ir.C. Guntur Triyudianto
Direktur	:	YB Hariantono

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, di antaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan Operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2023, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 378 Cabang.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (Mega Smart Mobile) yang memberikan customer experience selayaknya layanan cabang dalam genggaman.

5. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamanatan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut :

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
 - (i) Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - (iii) Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - (iv) Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - (v) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - (vi) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - (vii) Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - (viii) Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (ix) Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - (x) Atas permintaan para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020.
 - (xi) Dalam hal EMITEN tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada EMITEN, atau dalam hal EMITEN melakukan kelalaian / cidera janji sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan,

- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- (i) Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - (ii) Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - (iii) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - (iv) setelah diangkatnya wali amanat baru.

7. Pengalaman Bank Mega selaku Wali Amanat di Pasar Modal (5 tahun terakhir)

- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020

- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Th. 2024

8. Ikhtisar Data Keuangan Penting Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 30 Desember 2023 (audited) dan 2022.

Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2022 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KNMTR") (firma anggota Crowe Global) dengan partner penanggung jawab adalah Denny Susanto, CPA, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

NERACA

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas	855.222	901.616
Giro pada Bank Indonesia	6.822.433	8.691.986
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	104	101
Pihak ketiga	645.772	758.672
Total	645.876	758.773
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.203)	(1.153)
Giro pada bank lain – neto	644.673	757.620
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	3.352.627	9.164.176
Efek-efek		
Pihak berelasi	198.288	192.200
Pihak ketiga	37.426.300	38.985.741
Total	37.624.588	39.177.941
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(915)
Efek-efek – neto	37.624.588	39.177.026
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	7.215.441	3.254.705
Total	7.215.441	3.254.705
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	20.974	10.119
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	1.318.592	880.897
Pihak ketiga	64.986.127	69.430.406
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(11.823)	(21.946)
Total Kredit yang diberikan	66.292.896	70.289.357
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(604.816)	(572.030)
Kredit yang diberikan – neto	65.688.080	69.717.327
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	-	53.031
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(66)
Tagihan akseptasi – neto	-	52.965
Aset tetap	8.121.885	7.999.048
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.924.127)	(1.632.305)
Aset tetap – neto	6.197.758	6.366.743
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	15.751	13.848
Pihak ketiga	3.612.044	3.642.318
TOTAL ASET	132.049.591	141.750.449

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
LIABILITAS		
Liabilitas segera	296.179	245.593
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	482.783	470.942
Pihak ketiga	9.642.942	12.347.900
Tabungan		
Pihak berelasi	113.643	145.624
Pihak ketiga	15.548.598	14.585.937
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	1.717.317	1.827.590
Pihak ketiga	61.930.467	73.571.674
Simpanan dari bank lain		
Pihak ketiga	2.670.514	977.958
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.573.231	13.263.387
Liabilitas derivatif	18.931	66.818
Utang pajak penghasilan	59.596	143.076
Utang akseptasi	-	53.031
Pinjaman yang diterima	2.909.228	1.856.213
Liabilitas pajak tangguhan	156.812	48.996
Liabilitas imbalan pasca kerja	277.530	241.747
Obligasi Subordinasi – neto		
Pihak berelasi	48.000	38.000
Pihak ketiga	2.000	
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	4.703	5.547
Pihak ketiga	639.592	645.998
TOTAL LIABILITAS	110.294.148	121.116.769
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.462
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.716	1.639
Saldo laba	6.221.696	5.272.162
Penghasilan komprehensif lain	3.314.078	3.141.926
TOTAL EKUITAS	21.755.443	19.144.464
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132.049.591	132.879.390

LAPORAN LABA RUGI

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	10.217.532	9.069.057
Beban bunga	(4.685.387)	(3.199.931)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	5.532.145	5.869.126

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.671.911	1.925.229
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	535.366	430.738
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	55.255	128.506
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	14.794	1.466
Lain-lain	10.704	11.339
Total pendapatan operasional lainnya	2.288.030	2.497.278
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(11.427)	(11.749)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(195.318)	(147.840)
Beban umum dan administrasi	(1.817.565)	(1.846.500)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.463.387)	(1.358.753)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	4.332.478	5.001.562
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	10.251	26.508
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.342.729	5.028.070
BEBAN PAJAK - NETO	(832.059)	(975.392)
LABA TAHUN BERJALAN	3.510.670	4.052.678
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(48.533)	(39.105)
Surplus revaluasi aset	-	589.592
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai atas instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	496.444	(313.949)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.958.581	
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	299	345

9. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
 Menara Bank Mega, Lt. 16
 Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
 Jakarta 12790
 Telepon : (62 21) 79175000 ext. 16210
 Situs web : www.bankmega.com
 e-mail: waliamanat@bankmega.com
 Untuk Perhatian : *Capital Market Services*

XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO

diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Awal Obligasi

Masa Penawaran Awal Obligasi dilakukan pada tanggal 10 sampai 20 Juni 2024 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

6. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2024 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

7. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XVI dalam Prospektus ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

8. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

9. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 3 Juli 2024.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

10. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2024 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701528093
A/n : PT Indo Premier Sekuritas

PT BCA Sekuritas

Bank Central Asia
Cabang Thamrin
No. Rekening : 2063199222
A/n PT BCA Sekuritas

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Bank OCBC NISP Tbk
Cabang Wisma Presisi Jakarta
No. Rekening : 576810018191
A/n: PT OCBC Sekuritas Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2024.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu :
 - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i);
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
 - (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulkannya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan

kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Ruang lingkup tugas KSEI sebagai Agen Pembayaran adalah melakukan pembayaran kembali Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 2 Juli 2024, dengan cara mengirimkan email kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: (62 21) 5088 7168
Faks: (62 21) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41
Jl.M.H Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telp: (62 21) 2358 7222
Faks: (62 21) 2358 7300
E-mail : cf@bcasekuritas.co.id
www.bcasekuritas.co.id

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower2
Lt29 Suite 2901.Jl. Jendral Sudirman
Jakarta 12190
Tel : (62 21) 2970 9300
Fax : (62 21) 2970 9378
E-mail : gib_indonesia@ocbcsekuritas.com
www.ocbcsekuritas.com

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 247/HWMA-KKO/0624

Jakarta, 24 Juni 2024

Kepada Yth.

PT BANK BTPN, Tbk.,Menara BTPN – CBD Mega Kuningan, Lt. 29,
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 5.5-5.6,
Jakarta Selatan 12950Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP I TAHUN 2024 PT BANK BTPN
Tbk.**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Dr. Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **HWMA Law Firm**, beralamat kantor di Graha Binakarsa Lantai 10, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, yang terdaftar sebagai Advokat dengan No. 02.1751 dan juga terdaftar (i) sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah No. STTD.KH-20/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 13 Maret 2023; dan (ii) sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal di bawah No. 200815, telah ditunjuk oleh **PT Bank BTPN Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang berkantor pusat di Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950 (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukkan No. S.235/DIR/LG/IV/2024 tanggal 1 April 2024 untuk memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan/atau menawarkan surat utang atau obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 ("**Obligasi Berkelanjutan**") dengan jumlah pokok sebesar Rp355.060.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta Rupiah), dengan rincian Obligasi Seri A sebesar Rp114.755.000.000,- (seratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol persen) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, serta Obligasi Seri B sebesar Rp240.305.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi (selanjutnya disebut "**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024**"), yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Perseroan dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahun 2024**").

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini menggantikan seluruh pendapat dari segi hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana terakhir kali tercantum dalam Pendapat Hukum No. 231/HWMA-KKO/0624 tanggal 7 Juni 2024, dengan demikian Pendapat Hukum tersebut tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 dimaksud, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari OJK (pengawas perbankan) melalui

addressMenara Binakarsa 10th Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-18, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia**telephone**

+62 21 252 7868 (Hunting)

email:

info@hwmalaw.co.id

website

www.hwmalaw.co.id

surat OJK No. S-38/PB.311/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 PT Bank BTPN, Tbk.

Dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.

Penawaran atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT OCBC Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sesuai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 6 tanggal 2 April 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan Bank BTPN Tahun I Tahun 2024 Nomor 9 tanggal 7 Mei 2024, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan Bank BTPN Tahun I Tahun 2024 Nomor 2 tanggal 3 Juni 2024, dan Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan Bank BTPN Tahun I Tahun 2024 Nomor 62 tanggal 24 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selanjutnya, sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat sesuai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 5 tanggal 2 April 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 8 tanggal 7 Mei 2024, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 3 tanggal 3 Juni 2024, dan Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 61 tanggal 24 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Perseroan juga telah menandatangani dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Bank BTPN, Tbk. Nomor 4, tanggal 2 April 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 7 tanggal 7 Mei 2024, Akta Perubahan II (Kedua) Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 1 tanggal 3 Juni 2024, dan Akta Perubahan III (Ketiga) Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 60 tanggal 24 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 7 tanggal 3 April 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 63 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 tersebut di atas tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Penjamin Pelaksana Emisi, Wali Amanat, maupun perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) untuk mencatatkan seluruh Obligasi pada BEI berdasarkan Surat No. S-04310/BEI.PP1/05-2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 PT Bank BTPN Tbk. (BTPN).

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (selanjutnya disebut “**POJK No. 30/2015**”), Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (selanjutnya disebut “**LRPD**”) hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkannya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

LRPD sebagaimana tersebut di atas akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”) dan akan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal LRPD sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 telah direalisasikan.

Sebelum PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahun 2024 ini, Perseroan sebelumnya telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp799.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Pembayaran Obligasi telah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 26 November 2022, yang mana Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran atas Obligasi Seri A ini sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. S.114/CCS/XI/2022 perihal Keterbukaan Informasi Pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi tanggal 28 November 2022; dan
- b. Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp201.000.000.000,- (dua ratus satu miliar rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) pertahun. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 26 November 2024.

Dalam Pendapat Hukum ini, referensi terhadap “**Perusahaan Anak**” berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) saham perusahaan tersebut dan/atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Untuk memberikan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang telah kami terima dari Perseroan dalam rangka memberikan Pendapat Hukum yang diungkapkan

secara rinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Perseroan yang disiapkan dan ditujukan kepada Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, dengan tembusan kepada OJK (Laporan Pemeriksaan Hukum beserta tambahan maupun perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut “LPH”).

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. PERSEROAN

- 1.1. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985, yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, S.H., sebagai pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1148.

Perseroan merupakan kelanjutan dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (“BAPEMIL”) yang telah beroperasi sejak tahun 1959. BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No. 203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No. 53 tanggal 7 November 1960, ketiganya dibuat di hadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung, Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 November 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14 Februari 1961, Tambahan No. 5 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No. 51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan/kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No. 36 tanggal 25 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta No. 37 tanggal 26 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Perseroan menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-1335/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 ("**SK Menkeu No. Kep-135**"), Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum ("**SK Menkeu No. Kep-055**").

Dengan diterbitkannya SK Menkeu No. Kep-055 tersebut, maka SK Menkeu No. KEP-135 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- 1.2. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 57 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0073264 tanggal 26 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 57/2024**").

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.3. Perseroan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1.3.1 Kegiatan Usaha Utama

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan.

1.3.2 Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah;

- i. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 - iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- c. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
 - h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;
 - i. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhinya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - k. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
 - l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;

- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- p. Menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Akta No. 55/2024 dan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S.050/CCS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp212.918.914.960,- (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) yang terdiri dari 10.645.945.748 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) lembar saham.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	9.692.826.975	193.856.593.500	91,047
PT Bank Central Asia, Tbk.	109.742.058	2.194.841.160	1,031
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	12.007.137	240.142.740	0,113

Publik (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	831.369.587	16.627.391.560	7,809
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	10.645.945.748	212.918.914.960	100,00
Saham Dalam Portepel	4.354.054.252	87.081.085.040	

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”) dan telah menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Februari 2024, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Tetsuro Imaeda yang ditunjuk oleh Sumitomo Mitsui Financial Group yang merupakan pemilik 100% (seratus persen) saham dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00104/BEI/07-2023 tentang Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar di Papan Akselerasi tanggal 31 Juli 2023, mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama (*free float*).

Struktur permodalan Perseroan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Pasal 39 POJK No. 41/2019 yang mempersyaratkan minimal sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, di mana saham yang tidak dicatatkan tersebut adalah sejumlah 109.742.058 lembar saham atau senilai Rp2.194.841.160,- milik PT Bank Central Asia Tbk., yang keseluruhannya merupakan 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

- 1.5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 58 tanggal 27 Juli 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor No. AHU-AH.01.09-0145163 tanggal 27 Juli 2023 (selanjutnya disebut “**Akta No. 58/2023**”), susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Henoeh Munandar
Wakil Direktur Utama	: Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama	: Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Dini Herdini
Direktur	: Atsushi Hino
Direktur	: Keishi Kobata

Direktur : Merisa Darwis
 Direktur : Hana Tantani

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 10 Mei 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0116937 tanggal 11 Mei 2023 (selanjutnya disebut “**Akta No. 25/2023**”), susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
 Wakil Komisaris Utama : Takeshi Kimoto
 Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Masli Ridhwan
 Komisaris (Independen) : Onny Widjanarko
 Komisaris (Independen) : Edmund Tondobala
 Komisaris : Ongki Wanadjati Dana

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”). Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), (3) jo Pasal 31 ayat (1), (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjabat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Penetapan atas masa jabatan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

- 1.6. Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi Perseroan Nomor PS/BOD/001/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, Perseroan telah mengangkat Sdri. Eneng Yulie Andriani sebagai Sekretaris Perusahaan yang akan melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, termasuk namun tidak terbatas pada menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, melakukan penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan memberikan masukan serta membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan termasuk keterbukaan informasi melalui *website* resmi Perseroan.

- 1.7. Perseroan telah membentuk Komite Audit yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan

Komisaris Perseroan No. PS/BOC/021/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit dan Surat Keputusan Direksi PT Bank BTPN Tbk No. SK/003/DIR/CCS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank BTPN Tbk. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan anggota dari Komite Audit, adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Ninik Herlani Masli Ridhwan
Anggota Komite Audit : Edmund Tondobala
Anggota Komite Audit : Aria Tanaka
Anggota Komite Audit : Ivan Purnama Sanoesi

Perseroan telah menyusun pedoman dan tata tertib Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit tanggal 24 November 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit.

- 1.8. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. PS/BOC/021/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris Perseroan PT Bank BTPN, Tbk., dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK/006/DIR/CCS/IV/2022 Tanggal 22 April 2022 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank BTPN Tbk. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan anggota dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Ninik Herlani Masli Ridhwan
Anggota : Chow Ying Hong
Pejabat Eksekutif : Mira Fitria

Perseroan telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimuat dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 29 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum (selanjutnya disebut "**POJK 17/2023**").

- 1.9. Perseroan telah menetapkan Nurhajati Seorjo Hadi sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PS/BOC/009/XII/2016 tentang Persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan Penggantian Internal Audit Head PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Perseroan telah menyusun pedoman kerja bagi Unit Audit Internal sebagaimana dimuat dalam Piagam Unit Audit Internal tanggal 30 Januari 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- 1.10. Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. PS/BOC/048/IX/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank BTPN Tbk. Selanjutnya, Komite Pemantau Risiko disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/009/DIR/CCS/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank BTPN Tbk., dengan susunan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Ketua Komite : Onny Widjanarko
 Anggota : Takeshi Kimoto
 Anggota : Edmund Tondobala
 Anggota : Ongki Wanadjati Dana
 Anggota : Ivan Purnama Sanoesi
 Anggota : Sofyan Rambey

Perseroan juga telah menyusun pedoman dan tata tertib Komite Pemantau Risiko sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko tanggal 20 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 17/2023.

- 1.11. Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Perseroan tanggal 20 Juni 2023, sebagai berikut:

Ketua : Sendiaty Sondy

Anggota Tetap dengan Hak Suara : Henoeh Munandar;
 Kaoru Furuya;
 Darmadi Sutanto;
 Dini Herdini;
 Hiromichi Kubo;
 Keishi Kobata;
 Merisa Darwis;
 Hanna Tantani;
 Kan Funakoshi;
 Atsushi Hino;
 Jeffrey Cheanandro Tjoeng;
 Jeny Mustopha;
 Purnomo B. Soetadi;
 Helena;
 Irwan Sutjipto Tisnabudi;
 Mira Fitria;
 Ir Nathan Christianto;
 Wiwig Wahyu Santoso.

Anggota Tetap Tanpa Hak Suara : Nurhajati Soerjo Hadi;
 Wahyu Nugroho.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 17/2023.

- 1.12. Perseroan telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liabilities Committee*) dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman Kerja Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liabilities Committee*) Perseroan tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

Ketua : Hiromichi Kubo

Anggota : Henoeh Munandar;
Kaoru Furuya;
Darmadi Sutanto;
Sendiaty SONDY;
Hanna Tantani.

Sekretaris : Wiwig Santoso

- 1.13. Perseroan telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman Kerja Komite Kebijakan Kredit Perseroan tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

Ketua : Henoeh Munandar

Anggota : Kaoru Furuya
Darmadi Sutanto
Hiromichi Kubo
Dini Herdini
Atsushi Hino
Keishi Kobata
Ir. Nathan Christianto
Irwan Sutjipto Trisnabudi
Jeffrey C. Tjoeng
Sendiaty SONDY
Nurhajati Soerjo Hadi
Tasuku Tanaka
Sidik Waskito
Adil Pamungkas
Argo Wibowo
Butet Sondang Sitepu
Wahyu Nugroho

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 17/2023.

- 1.14. Perseroan telah membentuk Komite Kredit dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Panduan Tata Tertib Komite Kredit Perseroan tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

Ketua : Henoeh Munandar

Anggota : Kaoru Furuya
Nathan Furuya
Kan Funakoshi
Atsushi Hino
Takane Shiomi

Tasuku Tanaka
Moses Supardi
Warni Chai
Naoki Watanabe
Karinda Rachmana
Hiroaki Seguchi
Hideaki Asatsu
Wibowo Kurniawan
Husan Mahjudi
Sendiaty SONDY

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 17/2023.

- 1.15. Perseroan telah menerapkan Pedoman Tata Kelola dan mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola di dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka *jo* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 1.16. Perseroan telah memenuhi penilaian tingkat kesehatan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan melakukan Penilaian Sendiri (self-assessment) tingkat kesehatan bank yang wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan juni 2023 dan akhir bulan Desember 2023. Adapun Perseroan telah melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Perseroan periode Juni 2023 kepada OJK melalui Surat No. S.390/DIR/RMMP/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 28 Juli 2023, yang menyatakan bahwa Perseroan dikategorikan sebagai Peringkat Komposit 2;
 - b. menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Perseroan periode Desember 2023 kepada OJK melalui Surat No. S.002/BOMRM/RMMP/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 30 Januari 2024, yang menyatakan bahwa Perseroan dikategorikan sebagai Peringkat Komposit 2.
- 1.17. Perseroan telah melaporkan Laporan Profil Risiko Posisi i) bulan September 2023 kepada OJK melalui Surat No. S.009/BOMRM/RMMP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan telah diterima OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 20 Oktober 2023, dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*; ii) bulan Desember 2023 kepada OJK melalui Surat No. S.001/BOMRM/RMMP/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 dan telah diterima OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 22 Januari 2024, dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*; dan iii) bulan Maret 2024 kepada OJK melalui Surat No. S.004/BOMRM/RMMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dan telah diterima OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 29 Januari 2024, dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*.
- 1.18. Perseroan memiliki total 1 Kantor Pusat Operasional, 9 Kantor Wilayah Non Operasional, 58 Kantor Cabang (KC), 197 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 1 Kantor Fungsional Operasional, 18 Payment Point, dan 214 ATM.

Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan

usaha utama Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.

- 1.19. Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120101411917, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 11 April 2019.
- 1.20. Perseroan memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang telah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Atas tanah dan bangunan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijaminakan kepada pihak manapun. Perseroan mempunyai aset benda bergerak berupa kendaraan bermotor, kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap hak intelektual berupa merek-merek yang dimiliki oleh Perseroan, saat ini telah terdaftar dan memperoleh Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 mengenai Merek, terkecuali untuk beberapa merek yang sedang dalam proses pendaftaran. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU 20/2016**"), Hak Eksklusif atas suatu Merek diberikan kepada pemilik merek ketika merek tersebut telah terdaftar. Dalam hal pendaftaran merek ditolak oleh instansi yang berwenang, maka merek tersebut belum terdaftar, sehingga Perseroan belum mendapatkan Hak Eksklusif Merek dan juga belum mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut.

Terhadap seluruh harta kekayaan Perseroan tersebut di atas, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset milik Perseroan yang bersifat material bagi kegiatan usaha Perseroan dan seluruh jumlah pertanggungan telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, sebagaimana kami ungkapkan dalam LPH.

- 1.21. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah (i) memiliki Perjanjian Kerja Bersama; (ii) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (iii) memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk Tenaga Kerja Asing yang menetap di Indonesia; (iv) telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sektoral; dan (v) memiliki LKS Biparit.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1981 mengenai Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**UU No. 7/1981**"), Perseroan tidak memenuhi kewajibannya terhadap beberapa jaringan kantor Perseroan, yang telah melewati kewajiban masa pelaporan kembali.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 7/1981, perusahaan wajib melakukan wajib laport ketenagakerjaan. Kelalaian atau kesengajaan penanggung jawab Perseroan untuk tidak melaporkan tenaga kerja Perseroan dapat menyebabkan penanggung jawab Perseroan dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

- 1.22. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari Perseroan, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tahun 2024 beserta penggunaan dananya.
- 1.23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki i) 70% atau sebanyak 5.392.590.000 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bank BTPN Syariah Tbk. ("**BTPN Syariah**") dan ii) 1% atau sebanyak 30.000.000 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT BTPN Syariah Ventura ("**BTPN SV**"). BTPN Syariah memiliki 99% atau sebanyak 2.970.000.000 lembar saham pada BTPN SV, sehingga dengan demikian Laporan keuangan BTPN Syariah dan BTPN SV dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Berdasarkan Surat No. S.057/CCS/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang disampaikan dari Perseroan kepada OJK, Perseroan telah melakukan akuisisi terhadap PT Oto Multiartha ("**OTO**") dan PT Summit Oto Finance ("**SOF**") sehingga Perseroan memiliki i) 51% (lima puluh satu persen) atau sebanyak 473.640.735 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada OTO dan ii) 51% (lima puluh satu persen) atau sebanyak 2.490.901 lembar saham pada SOF. Dikarenakan akuisisi oleh Perseroan dilakukan pada akhir bulan Maret 2024, maka Laporan Keuangan OTO dan SOF belum dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Penyertaan saham yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, saham Perseroan dalam BTPN Syariah, BTPN SV, OTO, dan SOF tersebut di atas tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga dan tidak terdapat sengketa/perkara apapun atas kepemilikan saham Perseroan dalam BTPN Syariah, BTPN SV, OTO, dan SOF tersebut.

- 1.24. Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU No. 37/2004**") dan UUPT.
- 1.25. Informasi yang bersifat material terkait dengan aspek hukum yang diungkapkan di dalam Prospektus yang digunakan sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 telah memuat informasi yang diungkapkan dalam LPH dan Pendapat Hukum.
- 1.26. Berdasarkan hasil pemeringkatan awal yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**PEFINDO**") melalui Surat Nomor RC-320/PEF-DIR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V BTPN Tahun 2024 Periode 20 Maret

2024 sampai dengan 1 Maret 2025, PEFINDO menetapkan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tahun 2024 Perseroan dengan peringkat 'AAA' (*triple A*). Selanjutnya, Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 April 2024. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan efek dan kriteria pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut "**POJK No. 36/2014**").

- 1.27. Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- 1.28. Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dan/atau pembiayaan serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Wali Amanat sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan PT Bank Mega Tbk. No. 0873/CAMS-WA/24 tanggal 28 Maret 2024 dan Surat Pernyataan PT Bank Mega Tbk. No. 0874/CAMS-WA/24 tanggal 28 Maret 2024, yang mana telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

2. BTPN SYARIAH

- 2.1. Pendirian BTPN Syariah berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5020 ("**Akta Pendirian**")

Anggaran dasar BTPN Syariah telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah No. 46 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0089433 tanggal 19 April 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan.

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.2. Struktur Permodalan BTPN Syariah pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 178 tanggal 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.750.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp770.370.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus dan Modal Disetor : Rp770.370.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang disampaikan oleh BTPN Syariah kepada OJK melalui Surat No. S.091/DIR/CSGC/III/2024 tanggal 6 Maret 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTPN Syariah serta komposisi kepemilikan saham dalam BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	27.500.000.000	2.750.000.000.000,	
Modal Ditempatkan dan			
Perseroan	5.392.590.000	539.259.000.000,-	70%
Masyarakat	2.311.110.000	231.111.000.000,-	30%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	7.703.700.000	770.370.000.000,-	100%

2.3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah, Nomor 46 tanggal 27 April 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0112846 tanggal 27 April 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Umum dan Independen) : Kemal Aziz Stamboel
 Komisaris (Independen) : Dewie Pelitawati
 Komisaris (Independen) : Mulya Effendi Siregar
 Komisaris : Ongki Wanadjati Dana

DIREKSI

Direktur Utama/ Direktur Independen : Hadi Wibowo
 Direktur Kepatuhan (*Compliance*) : Arief Ismail
 Direktur : Dwiyono Bayu Winantio
 Direktur : Fachmy Achmad
 Direktur Pendanaan dan Bisnis Baru : Dewi Nuzulianti

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Ikhwan Abidin
 Anggota : Muhamad Faiz

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan di atas terhitung sejak RUPS Tahunan 2023 sampai dengan tahun 2026.

Pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah mendapat persetujuan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan dan karenanya sah dan bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah.

- 2.4. Berdasarkan Surat Direksi Nomor SK.009/DIR/CSGC/IV/2023, BTPN Syariah telah mengangkat Sdr. Arief Ismail sebagai Sekretaris Perusahaan yang akan melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- 2.5. BTPN Syariah telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023, yang menyetujui susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Mulya Effendi Siregar
Anggota Komite : Tika Arundina
Anggota Komite : Rena Mutia

BTPN Syariah telah memiliki piagam Komite Audit No. 02/PedomanKerja/CSGC/XI/2023 tertanggal 3 November 2023.

- 2.6. Dewan Komisaris BTPN Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi BTPN Syariah No. SK.014/DIR/CSGC/VII/2023 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank BTPN Syariah, Tbk. tanggal 18 Juli 2023. Susunan Anggota Komite Pemantau Resiko adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Dewie Pelitawati
Anggota Komite : Kemal Aziz Stamboel
Anggota Komite : Mulyadi Effendi Siregar
Anggota Komite : Ongki Wanadjati Dana
Anggota Komite : Tika Arundina
Anggota Komite : Rena Mutia Indriani

- 2.7. Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditetapkan dan disahkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023. Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Kemal Aziz Stamboel
Anggota Komite : Dewie Pelitawati
Anggota Komite : Mulyadi Effendi Siregar
Anggota Komite : Ongki Wanadjati Dana
Anggota Komite : Ibnu Agung Mulyanto

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi di atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

- 2.8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BTPN Syariah telah memperoleh izin-izin pokok dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.9. BTPN Syariah telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120209291387 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 18 Februari 2019.
- 2.10. BTPN Syariah memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang telah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Atas tanah dan bangunan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijaminakan kepada pihak manapun. BTPN Syariah juga telah mengasuransikan aset-aset milik Perseroan yang bersifat material bagi kegiatan usaha Perseroan.

Terhadap hak cipta yang dimiliki oleh BTPN Syariah, saat ini telah terdaftar dan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

- 2.11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, (i) memiliki Peraturan Perusahaan; (ii) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; dan (iii) telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sektoral.

Perseroan telah melakukan pelaporan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1981 mengenai Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**UU No.7/1981**") untuk periode tahun 2023, terkecuali untuk beberapa jaringan kantor Perseroan sebagaimana dilampirkan, yang telah melewati kewajiban masa pelaporan kembali. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU WLTK, perusahaan wajib melakukan wajib laport ketenagakerjaan. Kelalaian atau kesengajaan penanggung jawab Perseroan untuk tidak melaporkan tenaga kerja Perseroan dapat menyebabkan penanggung jawab Perseroan dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Sehubungan dengan kewajiban untuk memiliki LKS Bipartit berdasarkan UU Ketenagakerjaan, BTPN Syariah tidak memiliki LKS Bipartit dimaksud. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) pekerja atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit. Apabila BTPN Syariah melanggar kewajiban tersebut di atas, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

- 2.12. Dalam menjalankan usahanya, BTPN Syariah telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari BTPN Syariah, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tahun 2024 beserta penggunaan dananya.

- 2.13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan dari BTPN Syariah, BTPN Syariah maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 dan UUPT yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN Syariah.

3. BTPN SV

- 3.1. Pendirian BTPN SV berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0066702.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura tanggal 22 Oktober 2021 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian BTPN SV**").

Anggaran dasar BTPN SV telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali berubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor No. AHU-0037057.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor No. AHU-AH.01.03-0244677 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BTPN Syariah Ventura ("**Akta BTPN SV No. 2/2022**").

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar BTPN SV telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perseroan terbatas.

- 3.2. Struktur Permodalan BTPN SV pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta BTPN SV No. 2/2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)

Berdasarkan Akta BTPN SV No. 2/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTPN SV serta komposisi kepemilikan saham dalam BTPN SV adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Nominal (Rp,-)	Persentase Kepemilikan
PT Bank BTPN Tbk.	30.000.000	30.000.000.000	1%

PT Bank BTPN Syariah Tbk.	2.970.000.000	297.000.000.000	99%
Jumlah	3.000.000.000	300.000.000.000	100%

Struktur permodalan BTPN SV dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3.3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BTPN SV No. 40 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.09-0181484 tanggal 3 November 2023, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Fachmy Achmad
 Komisaris : Dharma Putera

DIREKSI

Direktur Utama : Gatot Adhi Prasetyo
 Direktur : Antonius Basukesti Priyadi

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : H. Cecep Maskanul Hakim, B.Sc., M.Ec.
 Anggota : Ir. Noor Choliz, M.Si

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris BTPN SV tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN SV dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah mendapat persetujuan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, terkecuali untuk Antonius Basukesti Priyadi yang belum mendapat persetujuan (*fit and proper*) dari OJK, sehingga Antonius Basukesti Priyadi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

- 3.4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BTPN SV telah memperoleh izin-izin pokok dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.5. BTPN SV telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 0411210043066 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 4 November 2021.
- 3.6. BTPN SV memiliki harta kekayaan berupa deposito pada beberapa bank sebagaimana diungkap di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum. Atas deposito tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijaminan kepada pihak manapun.
- 3.7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BTPN SV telah (i) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; dan (ii) telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sektoral.

Hingga diterbitkannya Pendapat Hukum ini, BTPN SV tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelaporan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan UU No. 7/1981 untuk periode tahun 2023. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU WLTK, perusahaan wajib melakukan wajib lapor ketenagakerjaan. Kelalaian atau kesengajaan penanggung jawab BTPN SV untuk tidak melaporkan tenaga kerja BTPN SV dapat menyebabkan penanggung jawab BTPN SV dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Hingga diterbitkannya Pendapat hukum ini, BTPN SV tidak diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama mengingat jumlah pekerja/karyawan BTPN SV tidak lebih dari 10 (sepuluh) tenaga kerja sehingga berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**").

- 3.8. Dalam menjalankan usahanya, BTPN SV telah mengikat diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN SV. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari BTPN SV, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tahun 2024 beserta penggunaan dananya.
- 3.9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan konfirmasi dari BTPN SV, BTPN SV maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 dan UUPT yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN SV.

4. OTO

- 4.1. OTO, didirikan dengan nama PT Manunggal Multi Finance sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Manunggal Multi Finance Nomor 245 tanggal 28 Maret 1994, dibuat di hadapan Wiwiek Widjajanti, S.H., Notaris Pengganti dari Erly Soehandjojo, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor 02.6033.HT.01.01-TH.94 tanggal 16 April 1994, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 718 tanggal 3 Mei 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 tanggal 29 Juli 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4902 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian OTO**").

Anggaran dasar OTO telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali berubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 27 Maret 2024 akta mana telah diberitahukan kepada dan

diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat No. AHU.AH.01.03-0075020 tanggal 27 Maret 2024 (“**Akta No. 23/2024**”).

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar OTO telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perseroan terbatas.

- 4.2. Struktur Permodalan OTO pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta OTO No. 39/2016 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp928.707.324.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta OTO No. 23/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham OTO serta komposisi kepemilikan saham dalam OTO adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan
PT Sinar Mas Multiartha Tbk.	139.306.099 Seri A	15%
PT Summit Auto Group	315.760.490 Seri B	33,9%
Perseroan	473.640.735 Seri B	50,9%
Jumlah	139.306.099 Seri A 789.401.225 Seri B	100%

Struktur permodalan OTO dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4.3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BTPN SV No. 40 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.09-0181484 tanggal 3 November 2023, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Koichiro Nakayama
 Komisaris : Muliawan Gunadi
 Komisaris : Murniaty Santoso
 Komisaris : Keishi Iwamoto
 Komisaris : Nugroho Triko Pramono

DIREKSI

Direktur Utama : Akinori Otsu
 Direktur : Ronny
 Direktur : Nobuhiro Moroo

Direktur : Pieter Maruli Panjaitan

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris OTO tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar OTO dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah mendapat persetujuan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

- 4.4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, OTO telah memperoleh izin-izin pokok dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.5. OTO telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 8120216201325 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 12 Desember 2018.
- 4.6. OTO memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang telah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Atas tanah dan bangunan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijamin kepada pihak manapun. OTO juga telah mengasuransikan aset-aset milik OTO yang bersifat material bagi kegiatan usaha OTO.

Terhadap hak cipta yang dimiliki oleh OTO, saat ini telah terdaftar dan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

- 4.7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, OTO telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, (i) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; (ii) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (iii) memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk Tenaga Kerja Asing yang menetap di Indonesia; (iv) pelaporan WLTK oleh OTO; dan (v) telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sektoral.
- 4.8. Dalam menjalankan usahanya, OTO telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar OTO. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari OTO, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tahun 2024 beserta penggunaan dananya.
- 4.9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan konfirmasi dari OTO, OTO maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris OTO tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau

pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 dan UUPT yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha OTO.

5. SOF

- 5.1. SOF, didirikan dengan nama PT Summit Sinar Mas Finance sesuai Akta Pendirian No. 214 tanggal 20 September 1990 sebagaimana diubah dengan Akta No. 194 tanggal 22 Oktober 1990, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H. Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6214 HT.01.01.Th.90 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 30 Oktober 1990, dan telah diumumkan dalam BNRI tanggal 11 Desember 1990 dan TBNRI No. 5041 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian SOF**”).

Anggaran Dasar SOF sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian SOF, telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar SOF No. 22 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor No. AHU-AH.01.03-0075025 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas SOF (“**Akta SOF No. 22/2024**”).

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar SOF telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perseroan terbatas.

- 5.2. Struktur Permodalan SOF pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta SOF No. 40/2016 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp2.442.060.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar enam puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Akta SOF No. 22/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SOF serta komposisi kepemilikan saham dalam SOF adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Rp,-)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan
Perseroan	1.245.450.500.000	2.490.901 seri B	51%
PT Summit Auto Group	830.300.500.000	1.660.601 seri B	34%
PT Sinar Mas Multiartha Tbk.	366.309.000.000	732.618 seri A	15%
Jumlah	2.442.060.000.000	732.618 seri A 4.151.502 seri B	100%

Struktur permodalan SOF dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.3. Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 8 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0102304 tanggal 14 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SOF adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Yosuke Unigame
Komisaris : Doddy Susanto
Komisaris : Murniaty Santoso

DIREKSI

Presiden Direktur : Rusna
Direktur : Krisna Suswandi
Direktur : Kemaludin Fajar

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris SOF tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SOF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah mendapat persetujuan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

- 5.4. SOF telah memperoleh izin-izin umum dan izin khusus dari pihak yang berwenang sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
- 5.5. SOF telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 8120216291426 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 12 Desember 2018.
- 5.6. SOF memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang telah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Atas tanah dan bangunan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun, sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan SOF tanggal 3 April 2024. SOF juga telah mengasuransikan aset-aset milik SOF yang bersifat material bagi kegiatan usaha SOF.

Terhadap hak cipta yang dimiliki oleh SOF, saat ini telah terdaftar dan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

- 5.7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SOF telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, (i) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; (ii) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (iii) memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk Tenaga Kerja Asing yang menetap di Indonesia; (iv) pelaporan WLTK; dan (v) telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sektoral.

- 5.8. Dalam menjalankan usahanya, SOF telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SOF. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari SOF, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tahun 2024 beserta penggunaan dananya.
- 5.9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan konfirmasi dari SOF, SOF maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris SOF tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 dan UUPT yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha SOF.

6. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain LPH:

- 6.1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam LPH dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
- 6.2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam LPH dan Pendapat Hukum, maka LPH dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan dan tanggal ditandatanganinya LPH dan Pendapat Hukum; (2) aspek hukum PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan (b) Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar HKHPM**").
- 6.3. LPH dan Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya LPH dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
- 6.4. Di dalam melakukan LPH dan pembuatan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan LPH, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;

- b. dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan LPH.
- 6.5. Dengan mengingat poin-poin di atas, LPH kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
- a. Anggaran Dasar Pendirian Perseroan dan Anggaran Dasar terakhirnya, termasuk:
 - i. Struktur permodalan yang mencakup jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, serta saham dalam portepel;
 - ii. Persetujuan yang diperlukan Perseroan untuk menerbitkan dan atau menawarkan surat utang atau obligasi kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024;
 - b. Kelengkapan perijinan dan persetujuan terkini yang kami anggap penting dan material yang diberikan kepada Perseroan dan pendaftaran yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan, perizinan dan persetujuan terkini terhadap harta kekayaan Perseroan, termasuk perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material, serta persetujuan korporasi yang diperlukan untuk melaksanakan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024;
 - c. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang ketenagakerjaan, dan (iii) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perijinan usaha Perseroan;
 - d. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga;
 - e. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024;
 - f. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- 6.6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 sehubungan dengan LPH dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Standar HKHPM yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal melalui Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku terhadap kami.
- 6.7. Di dalam melakukan LPH, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam LPH.
- 6.8. Walaupun angka 4.7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam LPH serta Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai

komersil atau finansial dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan hukum Perseroan dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.

- 6.9. Di dalam LPH serta Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu (i) pengawasan menengah yang dilakukan oleh asisten atau staf pelaksana dan (ii) pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh *Senior Associate* dan *Associate* sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.
- 6.10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas dan keterbukaan. Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilaksanakan dengan meneliti dan menganalisa seluruh dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi PUB V Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2024. Jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada pemeriksaan melalui tanya jawab dengan Perseroan, dan/atau konfirmasi (*cross checking*) dengan profesi lainnya yang terkait di dalam transaksi PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, dan/atau pada fakta-fakta yang sepengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.
- 6.11. Pendapat Hukum ini didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sejak tanggal Pendapat Hukum sebelumnya sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**").

7. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

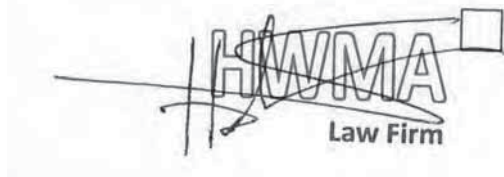
- 7.1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga lainnya kepada kami adalah asli dan atau sesuai aslinya, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya;
- 7.2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga lainnya kepada kami adalah benar, akurat, lengkap,

tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;

- 7.3. Pendapat yang memuat kata-kata “berdasarkan pernyataan Perseroan”, telah kami buat berdasarkan pernyataan Perseroan dan/atau keterangan lisan yang diberikan oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil dan/atau pegawai Perseroan;
- 7.4. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai Konsultan Hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,
HWMA Law Firm



Dr. Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn

STTD.KH-20/PJ-1/PM.02/2023

Anggota HKHPPM Nomor: 200815

Tembusan:

1. Yth. Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. PT Indo Premier Sekuritas;
3. Yth. PT BCA Sekuritas;
4. Yth. PT OCBC Sekuritas;
5. Yth. PT Bursa Efek Indonesia; dan
6. Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan auditor independen dan laporan keuangan konsolidasian Bank BTPN.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
PT BANK BTPN TBK DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Henoeh Munandar
Alamat Kantor : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Alamat Rumah : Puri Permai I Blok W 1 No. 7
RT 009/RW 002
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Nomor Telepon : (021) 30026200
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Hanna Tantani
Alamat Kantor : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Alamat Rumah : Jl. Pegangsaan Indah Barat A1/40
Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara
Nomor Telepon : (021) 30026200
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
PT BANK BTPN TBK AND SUBSIDIARIES**

We, the undersigned,

1. Name : Henoeh Munandar
Office address : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Residential address : Puri Permai I Blok W 1 No. 7
RT 009/RW 002
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Telephone : (021) 30026200
Title : President Director
2. Name : Hanna Tantani
Office address : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Residential address : Jl. Pegangsaan Indah Barat A1/40
Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara
Telephone : (021) 30026200
Title : Director

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries;
2. The consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner; and
b. The consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries' internal control system.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta,
8 Mei/May 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors


SEFULUH DAN RUPIAH
PTN METERAL
FEMPEL
C98AJX947693983
btpn
A MEMBER OF
SMBC Group
KANTOR PUSAT - JAKARTA

Henoeh Munandar
Direktur Utama/
President Director

Hanna Tantani
Direktur/
Director

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2023	2022	
ASET				ASSETS
Kas	2h, 4	1,428,683	1,747,461	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2h, 2j, 5	9,276,598	10,215,350	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain:				Current accounts with other banks
- Pihak ketiga		500,326	1,549,854	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	462,061	639,707	Related parties -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(158)	(415)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2j, 6	<u>962,229</u>	<u>2,189,146</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain		8,961,654	21,885,214	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		2,624	2,851	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	-	(171)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2k, 7	<u>8,964,278</u>	<u>21,887,894</u>	
Efek-efek				Securities
- Pihak ketiga		17,038,501	18,650,367	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	-	185,510	Related parties -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		225,855	214,812	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(799)	(999)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2l, 8	<u>17,263,557</u>	<u>19,049,690</u>	
Tagihan derivatif				Derivative receivables
- Pihak ketiga		636,924	1,131,664	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	496,225	615,160	Related parties -
	2h, 2m, 9	<u>1,133,149</u>	<u>1,746,824</u>	
Tagihan akseptasi		3,289,757	3,069,854	Acceptance receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(8,637)	(4,495)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2n, 10	<u>3,281,120</u>	<u>3,065,359</u>	
Pinjaman yang diberikan:				Loans:
- Pihak ketiga		141,400,072	132,208,660	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	3,773,364	2,387,393	Related parties -
Pembiayaan/piutang syariah:				Sharia financing/receivables:
- Pihak ketiga		11,387,861	11,527,463	Third parties -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		1,097,796	878,534	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(4,618,047)	(3,579,119)	Less: Allowance for impairment losses
	2h, 2o, 11	<u>153,041,046</u>	<u>143,422,931</u>	
Penyertaan saham				Investment in shares
- Pihak ketiga		80,086	80,973	Third parties -
- Pihak berelasi	2g	22,500	22,500	Related parties -
	2h, 2p	<u>102,586</u>	<u>103,473</u>	
Beban dibayar dimuka	2q, 2ah, 12	1,184,067	1,465,142	Prepayments
Klaim pengembalian pajak	2ac, 13a	67,337	50,357	Claims for tax refund
Aset pajak tangguhan	2ac, 13f	715,152	545,029	Deferred tax assets
Aset tetap		5,040,250	5,109,182	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(2,992,438)	(2,990,677)	Less: Accumulated depreciation
	2r, 2ah, 14	<u>2,047,812</u>	<u>2,118,505</u>	
Dipindahkan		199,467,614	207,607,161	Carry forward

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2023	2022	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
Pindahan		199,467,614	207,607,161	Carried forward
Aset takberwujud dan <i>goodwill</i>		3,541,155	3,237,937	Intangible assets and goodwill
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(2,451,771)	(2,161,199)	Less: Accumulated amortization
	2s, 15	<u>1,089,384</u>	<u>1,076,738</u>	
Aset lain-lain		996,966	538,312	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(105,572)	(52,507)	Less: Allowance for impairment losses
	2i	<u>891,394</u>	<u>485,805</u>	
	2h, 2t, 16			
JUMLAH ASET		<u>201,448,392</u>	<u>209,169,704</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2h, 17	71,606	59,045	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	2z	21,951	18,996	Undistributed revenue sharing
Simpanan nasabah				Deposits from customers
- Pihak ketiga		97,793,480	103,942,403	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	484,276	1,080,884	Related parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar		179,647	145,624	Accrued interest expenses
	2h, 2u, 18	<u>98,457,403</u>	<u>105,168,911</u>	
Simpanan dari bank-bank lain				Deposits from other banks
- Pihak ketiga		1,253,579	18,779	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	9,561,059	147,352	Related parties -
Beban bunga yang masih harus dibayar		7,483	-	Accrued interest expenses
	2h, 2u, 19	<u>10,822,121</u>	<u>166,131</u>	
Liabilitas derivatif				Derivative payables
- Pihak ketiga		1,014,819	1,323,645	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	57,285	124,091	Related parties -
	2h, 2m, 9	<u>1,072,104</u>	<u>1,447,736</u>	
Liabilitas akseptasi				Acceptance payables
- Pihak ketiga		2,160,250	2,157,596	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	163,383	199,232	Related parties -
	2h, 2n, 10	<u>2,323,633</u>	<u>2,356,828</u>	
Utang pajak:				Taxes payables:
- Pajak penghasilan badan		107,880	44,342	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain		130,038	128,934	Other taxes -
	2ac, 13b	<u>237,918</u>	<u>173,276</u>	
Efek-efek yang diterbitkan:				Securities issued:
- Utang obligasi	20	200,569	200,134	Bonds payable -
Beban bunga yang masih harus dibayar		1,514	1,514	Accrued interest expenses
	1d, 2h, 2v	<u>202,083</u>	<u>201,648</u>	
Dipindahkan		113,208,819	109,592,571	Carry forward

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2023	2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
LIABILITAS (lanjutan)				LIABILITIES (continued)
Pindahan		113,208,819	109,592,571	Carried forward
Pinjaman yang diterima:				Borrowings:
- Pihak ketiga		12,682,950	7,663,850	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	18,569,798	37,257,744	Related parties -
Biaya transaksi yang belum diamortisasi		(48,251)	(9,988)	Unamortized transaction costs
Beban bunga yang masih harus dibayar		151,020	155,802	Accrued interest expenses
	2h, 2w, 21	<u>31,355,517</u>	<u>45,067,408</u>	
Akrual	2h, 22	478,981	453,992	Accruals
Pinjaman subordinasi		3,079,400	3,113,500	Subordinated loans
Beban bunga yang masih harus dibayar		10,960	12,078	Accrued interest expenses
	2g, 2h, 2y, 24, 36	<u>3,090,360</u>	<u>3,125,578</u>	
Liabilitas imbalan kerja karyawan:				Employee benefits liabilities:
- Imbalan kerja jangka pendek		511,188	443,476	Short-term employee benefits -
- Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya		170,105	64,228	Post-employment benefits and other long-term employee benefits
	2x, 23	<u>681,293</u>	<u>507,704</u>	
Liabilitas sewa	2ah	353,990	425,887	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	2h, 2i, 25	1,075,508	740,279	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>150,244,468</u>	<u>159,913,419</u>	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank				Non-bank
Tabungan mudharabah:				Mudharabah saving deposits
- Pihak ketiga		887,890	763,070	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	2,064	596	Related parties -
		<u>889,954</u>	<u>763,666</u>	
Deposito mudharabah:				Mudharabah time deposits
- Pihak ketiga		8,997,932	9,043,060	Third parties -
- Pihak berelasi	2g, 36	32,934	36,535	Related parties -
		<u>9,030,866</u>	<u>9,079,595</u>	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	2z, 26	<u>9,920,820</u>	<u>9,843,261</u>	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2023	2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
EKUITAS				SHAREHOLDERS' EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham:				Share capital:
Modal dasar Rp 300.000 terdiri dari: 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham				Authorized capital of Rp 300,000 consists of: 15,000,000,000 shares with par value of Rp 20 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.149.106.869 saham (31 Desember 2022: 8.149.106.869 saham)	2aa, 27	162,982	162,982	Issued and fully paid-up capital of 8,149,106,869 shares (31 December 2022: 8,149,106,869 shares)
Tambahan modal disetor	1b	11,162,238	11,160,647	Additional paid-in capital
Cadangan revaluasi aset tetap	2r	954,224	874,452	Reserve on revaluation of fixed assets
Cadangan nilai wajar - bersih	2l	2,906	(7,704)	Fair value reserve - net
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	1f	(24,267)	(24,267)	Transaction with non-controlling interest
Saldo laba				Retained earnings
- Dicadangkan		32,596	32,596	Appropriated -
- Belum dicadangkan		26,369,641	24,702,316	Unappropriated -
		<u>26,402,237</u>	<u>24,734,912</u>	
Komponen ekuitas lainnya	2ab	260,801	260,801	Other equity components
Saham tresuri	1c, 2aa	(254,695)	(255,147)	Treasury shares
		<u>38,666,426</u>	<u>36,906,676</u>	
Kepentingan non-pengendali	2f	2,616,678	2,506,348	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		41,283,104	39,413,024	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		201,448,392	209,169,704	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR

31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED

31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
		2023	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan bunga		13,069,491	10,525,856	Interest income
Pendapatan syariah		5,746,182	5,373,790	Sharia income
	2g, 2ad, 29, 36	18,815,673	15,899,646	
Beban bunga		(6,285,177)	(3,876,891)	Interest expenses
Beban syariah		(486,433)	(344,440)	Sharia expenses
	2g, 2ad, 30, 36	(6,771,610)	(4,221,331)	
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH		12,044,063	11,678,315	NET INTEREST AND SHARIA INCOME
Pendapatan operasional lainnya:				Other operating income:
Pendapatan operasional lainnya	2ae, 31	1,423,949	1,228,130	Other operating income
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	2e, 2m	649,494	784,485	Net gains on foreign exchange and derivative transactions
		2,073,443	2,012,615	
Beban operasional lainnya:				Other operating expenses:
Beban kepegawaian	2g, 2x, 32, 36	(3,756,478)	(3,403,319)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	33	(3,273,766)	(3,272,015)	General and administrative expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	2i, 34	(3,049,919)	(1,840,167)	Provision for impairment losses
Beban operasional lainnya	35	(576,308)	(517,753)	Other operating expenses
		(10,656,471)	(9,033,254)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH		3,461,035	4,657,676	NET OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional		10,053	10,020	Non-operating income
Beban non-operasional		(13,406)	(10,377)	Non-operating expenses
		(3,353)	(357)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		3,457,682	4,657,319	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2ac, 13c	(775,198)	(1,027,755)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH		2,682,484	3,629,564	NET INCOME

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
		2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	2r, 14	79,772	-	Gain on revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2x, 23	(92,262)	(37,209)	Remeasurements of employee benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	13f	20,204	8,186	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss
		7,714	(29,023)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	13,633	(160,999)	Unrealized gains (losses) on fair value changes of securities measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2ac, 13f	(2,999)	35,420	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss
		10,634	(125,579)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
		18,348	(154,602)	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
		2,700,832	3,474,962	
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		2,358,334	3,095,701	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		324,150	533,863	Non-controlling interest
		2,682,484	3,629,564	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		2,376,847	2,939,728	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		323,985	535,234	Non-controlling interest
		2,700,832	3,474,962	
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)				EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)
	2af, 39			
Dasar		293	384	Basic
Dilusian		293	384	Diluted

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Atributable to owners of the parent										
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan/atau penyusutan Penyusutan Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal diseror/ Additional paid-in capital	Cadangan nilai aset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Cadangan nilai wajar - bersih/ Fair value reserve - net	Transaksi keuangan non-pengendali/ Transaction with non-controlling interest	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaan/ Appropriated earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaan/ Unappropriated earnings	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saham treasury shares	Jumlah/ Total	Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah/ Total equity
	162,982	11,158,962	874,452	117,867	(24,267)	81,596	21,588,017	260,801	(255,147)	33,965,263	2,113,664	36,078,927
Saldo tanggal 1 Januari 2022												Balance as of 1 January 2022
Laba bersih tahun berjalan							3,095,701			3,095,701	533,863	3,629,564
Penghasilan komprehensif lainnya: Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	21			(160,989)						(160,989)	(10)	(160,989)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	21			35,418			(38,977)			(38,977)	1,768	(37,209)
Efektif pajak terkait	2ac, 13f						8,575			8,575	(387)	43,606
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan				(125,571)			3,065,299			2,939,728	535,234	3,474,962
Reklasifikasi cadangan umum						(49,000)				-		-
Pembayaran dividen Entitas Anak	1f									-	(142,633)	(142,633)
Pembayaran kompensasi dari saham treasury	1c, 2ba									1,685		1,768
Entitas Anak										-	83	83
Saldo tanggal 31 Desember 2022		162,982	11,160,647	874,452	(7,704)	32,596	24,702,316	260,801	(255,147)	36,906,676	2,506,348	39,413,024
												Balance as of 31 December 2022

Net profit for the year
Other comprehensive income:
measured at fair value
through other comprehensive
income
Remeasurement of employee
benefits liabilities
Related tax effect
Total comprehensive
income during the year
Reclassification of general appropriation
Payments of Subsidiary's dividend
Payments of compensation from treasury
shares
Subsidiary

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED

31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	Catatan/ Notes	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		12,876,098	10,253,185
Penerimaan dari pendapatan syariah		5,709,497	5,343,253
Pembayaran beban bunga		(7,016,441)	(3,782,757)
Pembayaran hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer		(483,478)	(339,201)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		1,713,128	2,024,702
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan		429,855	363,903
Pembayaran beban kepegawaian		(3,675,151)	(3,440,912)
Pembayaran beban operasional lainnya		(2,541,605)	(2,695,092)
Penerimaan lain-lain		6,649	10,185
Pembayaran pajak penghasilan badan		(889,965)	(1,163,421)
		6,128,587	6,573,845
Arus kas sebelum perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer			Cash flows before changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi, dan dana syirkah temporer:			Changes in operating assets, operating liabilities, and temporary syirkah funds:
(Kenaikan) penurunan aset operasi:			(Increase) decrease in operating assets:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain – jatuh tempo lebih dari 3 bulan		-	150,000
Tagihan derivatif		613,675	(1,178,125)
Tagihan akseptasi		(219,903)	(1,307,292)
Pinjaman yang diberikan		(11,142,017)	(10,762,631)
Pembayaan/piutang syariah		(1,361,808)	(2,034,218)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			Sharia financing/receivables
Liabilitas segera		12,561	25,790
Simpanan nasabah		(6,745,531)	4,549,060
Simpanan dari bank-bank lain		10,648,507	(3,711,720)
Liabilitas derivatif		(375,632)	945,245
Liabilitas akseptasi		(33,195)	1,396,620
Kenaikan dana syirkah temporer		77,559	937,358
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		(2,397,197)	(4,416,068)
			Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek		(10,501,020)	(9,444,754)
Penjualan efek-efek		11,544,675	13,232,763
Pembelian aset tetap		(215,390)	(194,386)
Perolehan aset hak guna		(3,542)	(13,360)
Perolehan aset takberwujud	15	(436,590)	(433,840)
Hasil dari penjualan aset tetap	14	5,877	5,569
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi		394,010	3,151,992
			Net cash flows provided from investing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED

31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December			
	2023	2022		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES	
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan	-	(799,000)	<i>Payments of securities issued</i>	
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	27,232,047	16,145,873	<i>Proceeds from borrowings</i>	
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima	(40,171,851)	(6,002,777)	<i>Installment payments and settlement of borrowings</i>	
Penjualan saham tresuri ke publik	2,108	1,768	<i>Sales of treasury shares to public</i>	
Pembayaran dividen	(832,860)	(142,633)	<i>Payments of dividend</i>	
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(116,558)	(146,455)	<i>Payments of lease liabilities principals</i>	
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(13,887,114)	9,056,776	Net cash flows (used in) provided from financing activities	
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(15,890,301)	7,792,700	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(14,462)	3,376	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS	
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	39,377,753	31,581,677	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR	
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	23,472,990	39,377,753	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR	
Kas dan setara kas terdiri dari:			<i>Cash and cash equivalents consist of:</i>	
Kas	4	1,428,683	1,747,461	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	5	9,276,598	10,215,350	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank-bank lain	6	962,387	2,189,561	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	7a	8,961,654	21,885,214	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek-efek	8i	2,843,668	3,340,167	<i>Securities</i>
		23,472,990	39,377,753	
INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS			SUPPLEMENTAL CASH FLOWS INFORMATION	
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS			ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS	
Pembelian aset tetap yang masih terutang	(1,248)	(790)	<i>Purchases of fixed assets which are still payable</i>	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT BANK BTPN Tbk (secara individu disebut "BTPN" atau "Bank") yang berdomisili di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 dari Notaris Komar Andasasmita, S.H. Akta ini telah diubah dengan akta notaris No. 12 tanggal 13 Juli 1985 dari Notaris Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1148 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985.

Bank diberikan izin untuk melanjutkan usaha bank sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") yang telah beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Februari 1959. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 dan surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan Unit Usaha Syariah melalui surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008 yang telah dipindahkan ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (anak perusahaan Bank) setelah pemisahan pada tanggal 14 Juli 2014.

Bank memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 382/PB.12/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberian izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Bank mulai melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa pada tanggal 16 Februari 2016.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar secara lengkap dituangkan dalam Akta Nomor 22 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, di mana Bank resmi mengubah namanya menjadi PT BANK BTPN Tbk.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT BANK BTPN Tbk (individually referred to as "BTPN" or the "Bank") domiciled in South Jakarta formerly under the name of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional based on notarial deed No. 31 dated 16 February 1985 of Notary Komar Andasasmita, S.H. The deed was amended by notarial deed No. 12 dated 13 July 1985 of Notary Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-4583HT01.01TH.85 dated 25 July 1985 and published in Supplement No. 1148 to State Gazette No. 76 dated 20 September 1985.

The Bank was given permission to carry on the bank business as a continuity from Association of Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") which commenced its commercial operations on 16 February 1959. The Bank obtained its license to operate as a commercial bank based on the Decree of Ministry of Finance of the Republic Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 dated 22 March 1993 and the letter of Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd dated 22 April 1993. The Bank also obtained a license to operate its Sharia Business Unit by the letter of Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd dated 17 January 2008 which has been transferred to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (the Bank's subsidiary) after a spin-off on 14 July 2014.

The Bank obtained its license to conduct foreign exchange activities based on the Decree of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 382/PB.12/2015 dated 22 December 2015 regarding approval in conducting foreign exchange activities. The Bank started to operate as a foreign exchange bank on 16 February 2016.

The Bank's Articles of Association have been amended several times. The complete amendment as specified into the Deed Number 22 dated 21 January 2019 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Letter Number AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 dated 22 January 2019, where the Bank formally changed its name to PT BANK BTPN Tbk.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Bank dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0410879 tanggal 23 November 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk.

Perubahan Anggaran Dasar Bank dalam rangka Peningkatan Modal Disetor/ Ditempatkan Bank sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Bank ("Program ESOP") sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 21 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0133128 tanggal 1 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk.

Perubahan Anggaran Dasar Bank dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 45 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BANK BTPN Tbk.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

Amendment of Articles of Association of the Bank was made in order to adjust with the OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding the Amendments to the OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding the Capital Increase of Public Listed Companies by Granting Pre-emptive Rights, OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Conducting a General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies, and OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding Conducting General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies electronically, as specified in the Deed Number 31 dated 18 November 2020 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0410879 dated 23 November 2020 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT BANK BTPN Tbk.

Articles of Association of the Bank in relation with the Increase of the Issued/Paid Up Capital regarding exercise of Employee Stock Option Program to the Employees of the Bank ("ESOP Program") as specified in the Deed Number 21 dated 26 February 2021 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human right of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0133128 dated 1 March 2021 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT BANK BTPN Tbk.

The amendment of Articles of Association of the Bank was made in order to adjust the Company's Business Activities in accordance with Government Regulation Number 5 Year 2021 regarding the Implementation of Risk Based Business Licensing as specified in the Deed Number 45 dated 21 April 2022 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022 dated 27 April 2022 regarding Approval on Amendment of Articles of Association of the Limited Liability Company of PT BANK BTPN Tbk.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir dituangkan dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Yumna Shabrina, SH, MKn, selaku Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0086163 tanggal 3 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk.

Susunan Dewan Komisaris terakhir Bank sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Nomor 25 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0116937 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN Tbk.

Susunan Direksi terakhir Bank sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Nomor 58 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat oleh Yumna Shabrina, SH, MKn, selaku Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0145163 tanggal 27 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN Tbk.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan serta kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan dalam jasa bank umum termasuk melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pemegang Saham Utama Bank adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). SMBC didirikan pada bulan April 2001. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ("SMFG") didirikan pada bulan Desember 2002 dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. SMFG merupakan pemegang saham pengendali dan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder*) dari BTPN.

SMBC berkantor pusat di Tokyo, Jepang dan saat ini merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dengan jaringan usaha yang telah menyebar ke beberapa wilayah di dunia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The latest amendment of Articles of Association of the Bank as specified into the Deed Number 28 dated 22 June 2023 made by Yumna Shabrina, SH, MKn, as Substitute Notary of Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human right of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0086163 dated 3 July 2023 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT BANK BTPN Tbk.

The latest composition of the Board of Commissioners of the Bank as specified into the Deed Number 25 dated 10 May 2023 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.09-0116937 dated 11 May 2023 regarding Acceptance of Notification of the Company's Data Changes of PT BANK BTPN Tbk.

The latest composition of the Board of Directors of the Bank as specified into the Deed Number 58 dated 27 July 2023 made by Yumna Shabrina, SH, MKn, as Substitute Notary of Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.09-0145163 dated 27 July 2023 regarding Acceptance of Notification of the Company's Data Changes of PT BANK BTPN Tbk.

In accordance with Article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services including capital investment in bank conducting business based on sharia principles, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Majority Shareholder's of the Bank is Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). SMBC was established in April 2001. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ("SMFG") was established in December 2002 and SMBC became a subsidiary fully owned by SMFG. SMFG is the controlling shareholder and ultimate shareholder of BTPN.

SMBC's Head Office is in Tokyo, Japan and currently one of the biggest banks in Japan with a business network vastly spread throughout the world.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, SMFG bergerak dalam bidang manajemen anak perusahaan perbankan dan perusahaan lain yang dapat diperlakukan sebagai anak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang. Selain itu, melakukan fungsi-fungsi terkait (ancillary functions), serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan holding perbankan di bawah ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha SMFG terutama bergerak di bidang perbankan komersial melalui layanan keuangan berikut: *leasing*, sekuritas, pembiayaan konsumen, keuangan, pemrosesan data pengembangan sistem, dan manajemen aset.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

Jaringan distribusi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Kantor Cabang	73	73
Kantor Cabang Pembantu	215	234
ATM dan TCR	228	221
Kantor Fungsional	45	51
	561	579

Jumlah karyawan PT BANK BTPN Tbk dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup") pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah 20.933 dan 19.740 karyawan (tidak diaudit).

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 09 tertanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah disetujui Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") dengan Bank, dimana SMBCI bertindak sebagai bank yang menggabungkan diri dan Bank bertindak sebagai bank penerima penggabungan, yang berlaku sejak seluruh persetujuan yang disyaratkan diperoleh ("Tanggal Efektif Penggabungan").

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

With the Head Office in Tokyo, SMFG operates in the management of banking subsidiaries and other companies that can be treated as subsidiaries based on the provisions of Japanese Banking Laws. In addition, SMFG carries out ancillary functions, as well as functions that can be executed by banking holding companies under the regulations of the Japanese Banking Laws.

Companies within the SMFG business group are mainly operating in commercial banking through such financial services as follows: leasing, securities, consumer financing, finance, system development data processing and asset management.

The Bank's head office is located at Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

The Bank's distribution network as of 31 December 2023 and 2022 (unaudited) was as follows:

31 Desember/December	
2023	2022
73	73
215	234
228	221
45	51
561	579

As of 31 December 2023 and 2022 PT BANK BTPN Tbk and its subsidiaries (together referred to as "the Group") had 20,933 and 19,740 employees, respectively (unaudited).

b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Based on the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 5 October 2018 as stipulated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 09 dated 5 October 2018 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, it has approved the Proposed Merger of PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") and the Bank whereby SMBCI acted as the Merging Bank and the Bank acted as the Merger-Recipient Bank or surviving bank, effective as of all the required approval being obtained ("Effective Merger Date").

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (lanjutan)

Penggabungan menjadi efektif pada tanggal 1 Februari 2019, setelah diperolehnya persetujuan dari (i) OJK melalui surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 35/KDK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) SMBCI ke dalam Bank; (ii) Japan Financial Services Agency (JFSA) melalui surat Pengawas Perbankan No. 1788 dan No. 1789 tertanggal 18 Januari 2019 perihal Persetujuan *Subsidiarization*; dan (iii) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-0006169.AH.01.10. Tahun 2019 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BANK BTPN Tbk dan surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0044411 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN Tbk serta surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-AH.01.10-0006176 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT BANK BTPN Tbk.

Sehubungan dengan penggabungan usaha antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI"), penggabungan usaha dilakukan melalui penerbitan instrumen ekuitas BTPN kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation (pemegang saham BTPN dan SMBCI) sebesar 2.296.846.112 lembar saham biasa disetor penuh dengan nilai nominal sebesar Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Nilai wajar saham BTPN pada tanggal 1 Februari 2019 adalah Rp 4.282 (nilai penuh) per lembar saham. Rasio konversi atas konversi saham SMBCI menjadi saham BTPN adalah sebesar 799,1971.

Penggabungan usaha antara BTPN dan SMBCI merupakan transaksi penggabungan usaha entitas sepengendali. Pada tanggal efektif merger, baik BTPN dan SMBCI merupakan entitas sepengendalian dan hubungan sepengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok yang sama dan bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi. Oleh karena itu, transaksi ini diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*).

Selisih nilai transfer entitas sepengendali di atas dicatat sebagai tambahan modal disetor. Atas transaksi ini, Bank mencatat tambahan modal disetor dan agio saham masing-masing sebesar Rp 45.937 dan Rp 9.708.197.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (continued)

The Merger became effective on 1 February 2019, after obtaining the approval from (i) OJK through Decree of Board of Commissioners of OJK Number 35/KDK.03/2018 dated 20 December 2018 regarding the Merger Approval of SMBCI into the Bank; (ii) Japan Financial Services Agency (JFSA) through the Banking Supervisory letter No. 1788 and No. 1789 dated 18 January 2019 regarding the approval of *Subsidiarization*; and (iii) Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate of Administration of General Law by letter dated 22 January 2019 Number AHU-0006169.AH.01.10. Year 2019 regarding the Approval of Amendment of Articles of Association of Limited Liability Company PT BANK BTPN Tbk and letter dated 22 January 2019 Number AHU-AH.01.03-0044411 regarding the Acceptance of Notification of Company Data Submission of PT BANK BTPN Tbk as well as letter dated 22 January 2019 Number AHU-AH.01.10-0006176 regarding Acceptance on Notification of Merger of PT BANK BTPN Tbk.

In relation with merger between PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI"), the merger was conducted through the issuance of equity instrument of BTPN to Sumitomo Mitsui Banking Corporation (the shareholder of both BTPN and SMBCI) of 2,296,846,112 fully paid ordinary shares of BTPN with nominal value amounting to Rp 20 (full amount) per share.

The fair value of BTPN's shares as of 1 February 2019 was Rp 4,282 (full amount) per share. Conversion ratio of the conversion of SMBCI's share into BTPN's share was 799.1971.

The merger between BTPN and SMBCI is a business combination under common control transaction. As at the effective date of merger, both BTPN and SMBCI are entities under common control and the common control relationship is not transitory. Business combination transaction between entities under common control is done in the event of reorganisation of entities under the same group which does not constitute change in ownership by economic substance. Therefore, the transaction is recognized at carrying amount under pooling of interest method.

Net transfer under common control entities above was recorded as additional paid-in capital. As a result of this transaction, the Bank recorded additional share capital and paid-in capital amounting to Rp 45,937 and Rp 9,708,197, respectively.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 8 Juni 2007, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia.

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 267.960.220 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 2.850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Maret 2008.

Persetujuan atas Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Surat dari Bapepam No. S-1253/BL/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Pemberitahuan Efektifnya Penyataan Pendaftaran.

Penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 November 2010, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("HMETD I"), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel Bank.

Pada tanggal 10 Desember 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 188.787.238 saham baru atas nama dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 943.936.190 saham menjadi sejumlah 1.132.723.428 saham.

Persetujuan atas Penerbitan HMETD I berdasarkan Surat dari Bapepam No.S-10615/BL/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Penyataan Pendaftaran.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 18.878 dan agio saham sebesar Rp 1.293.458.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Changes in Capital Due to Corporate Actions

Initial Public Offering

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 8 June 2007, the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares at Indonesia Stock Exchange.

The Bank undertook an initial public offering of 267,960,220 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 2,850 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at Indonesia Stock Exchange on 12 March 2008.

Approval of the Initial Public Offering based on Letter from Bapepam No.S-1253/BL/2008 dated 29 February 2008 regarding Notification of the Effectiveness of the Registration Statement.

Increase of capital through Pre-Emptive Right ("HMETD")

Based on the EGMS dated 25 November 2010, the shareholders approved the Bank's plan to increase the Bank's share capital through the issuance of Pre-Emptive Right I ("HMETD I"), by issuing shares from the Bank's portfolio shares.

On 10 December 2010, the Bank's shares were listed at the Indonesia Stock Exchange with 188,787,238 new registered shares with value of Rp 100 (full amount) per share; accordingly, the number of shares issued and fully paid changed from 943,936,190 shares to 1,132,723,428 shares.

Approval of the Issuance of HMETD I based on Letter from Bapepam No.S-10615/BL/2010 dated 24 November 2010 regarding Notification of the Effectiveness of the Registration Statement.

The Bank obtained Rp 18,878 additional share capital and Rp 1,293,458 additional paid-in capital.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi
(lanjutan)

Penawaran Umum Perdana Saham (lanjutan)

Pemecahan saham

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 Februari 2011, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 20 (nilai penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 1.132.723.428 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham akan menjadi sejumlah 5.663.617.140 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 28 Maret 2011, saham Bank dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 5.606.980.970 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Peningkatan modal melalui *Convertible Loan*

Pada tanggal 14 Maret 2012, Bank telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan mengeluarkan 176.670.117 saham baru dari portepel kepada International Finance Corporation ("IFC") sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*. Setelah itu, saham tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Total modal disetor dan ditempatkan Bank setelah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi 5.840.287.257 saham.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 3.533 dan agio saham sebesar Rp 135.927.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Changes in Capital Due to Corporate Actions (continued)

Initial Public Offering (continued)

Stock split

Based on EGSM dated 25 February 2011, the shareholders approved the Bank's plan to split share from nominal value of Rp 100 (full amount) per share to Rp 20 (full amount) per share; accordingly, it changed the number of shares issued and fully paid from 1,132,723,428 shares with nominal value of Rp 100 (full amount) per share to 5,663,617,140 shares with nominal value of Rp 20 (full amount) per share.

On 28 March 2011, the Bank's shares were listed at the Indonesia Stock Exchange for 5,606,980,970 shares with nominal value of Rp 20 (full amount) per share.

Capital increase through Convertible Loan

On 14 March 2012, the Bank obtained an approval to increase issued and paid-up capital by issuing 176,670,117 shares from the Bank's unissued shares to International Finance Corporation ("IFC") in accordance with terms and condition in the *Convertible Loan Agreement*. Afterwards, those Bank's shares were listed at Indonesia Stock Exchange. Total issued and paid-up capital of the Bank after the *Capital Increases without Pre-Emptive Rights* was 5,840,287,257 shares.

The Bank obtained Rp 3,533 additional share capital and Rp 135,927 additional paid-in capital.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi
(lanjutan)**

Pembelian kembali saham

Melalui surat OJK No. S-20/PB.31/2016 tanggal 18 Februari 2016, Bank telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham. Dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Bank, jumlah alokasi dana tidak melebihi Rp 535.500 untuk membeli sebanyak-banyaknya 150.000.000 saham atau 2,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Bank, yang akan dilakukan dalam periode dari tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 23 Mei 2016. Sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, Bank telah membeli kembali saham Bank sebanyak 95.198.900 lembar saham dengan total dana pembelian sebesar Rp 262.874.

Tujuan dari pembelian kembali saham adalah untuk memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan memungkinkan untuk menurunkan keseluruhan biaya modal, meningkatkan laba per saham (*EPS*), serta *Return on Equity (ROE)* secara berkelanjutan.

Pengalihan Saham Tresuri

Di dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 mengenai Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara signifikan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 April 2021 atas agenda keenam mengenai pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham tresuri untuk pemberian remunerasi yang bersifat *variable*, maka pada tanggal 31 Agustus 2021, Bank telah mengalihkan sebanyak 2.633.202 saham yang dicatat sebagai saham tresuri kepada para *Material Risk Takers*. Sementara itu, sebanyak 92.565.698 sisa saham yang dicatat sebagai saham tresuri akan dijual kembali ke pasar melalui Bursa Efek mulai tanggal 14 Oktober 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Desember 2023 telah menyetujui penarikan 92.292.198 saham tresuri dan karenanya akan mengurangi modal Diterbitkan serta Modal Disetor Bank dan menambah Modal Dalam Portepel, apabila Kreditor tidak keberatan dengan rencana ini dalam batas jangka waktu tertentu sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**c. Changes in Capital Due to Corporate
Actions (continued)**

Shares buyback

The Bank was approved by OJK to conduct shares buyback by letter No. S-20/PB.31/2016 dated 18 February 2016. In the implementation of shares buyback by the Bank, the allocated fund up to Rp 535,500 to buy up to 150,000,000 shares or 2.57% of the Bank's issued and fully paid-up capital shall be done between 23 February 2016 and 23 May 2016. Up to 23 May 2016, the Bank had repurchased 95,198,900 shares using total purchasing fund amounting to Rp 262,874.

The objective of conducting shares buyback is to provide flexibility to achieve an efficient capital structure and enable the Bank to lower the overall cost of capital, increasing the Earnings per Share (EPS) and Return on Equity (ROE) on an on-going basis.

Transfer of Treasury Shares

In compliance with OJK Regulation No.02/POJK.04/2013 dated 26 August 2013 regarding the Buyback of Issued Shares by Issuers or Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions and the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated 22 April 2021 on the sixth agenda regarding the transfer of shares resulted from the buy back which are retained as treasury shares to be utilized for variable remuneration, hence on 31 August 2021, the Bank has transferred 2,633,202 shares registered under treasury shares to Material Risk Takers. While the remaining 92,565,698 shares registered under treasury shares will be sold back to the market through Stock Exchange starting 14 October 2021.

Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 7 December 2023 approved the withdrawal of 92,292,198 treasury shares and therefore will reduce the Issued as well as Paid-up Capital and increase the Portfolio Capital, subject to the Creditor's objection within particular time limit according to the Law of Republic of Indonesia on Limited Liability Company No.40 year 2007.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Efek-efek yang diterbitkan

d. Securities issued

Utang obligasi

Bonds payable

Nama/Name	Pernyataan efektif/ Effective registration	Persetujuan/ Approval	Jumlah pokok/ Nominal value	Jangka waktu/ Tenor	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga setahun/ Interest rate per annum
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I")/ Bank BTPN Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds IV Phase I")	27 November/ November 2019	Dinyatakan efektif oleh OJK, melalui suratnya No. S-168/D.04/2019 tanggal 15 November 2019/ Became effective by OJK through its letter No. S-168/D.04/2019 dated 15 November 2019	Seri/Series A: 799.000	Seri/Series A: 3 tahun/years	26 November/ November 2022	7.55%
			Seri/Series B: 201.000	Seri/Series B: 5 tahun/years	26 November/ November 2024	7.75%

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan Bank dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dananya dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

All bonds issued by the Bank were listed at the Indonesia Stock Exchange and the funds are used for business growth in form of credit expansion.

PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

PT Bank Mega Tbk acts as the Trustee for Continuing Bonds IV Phase I.

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2023 and 2022, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors was as follows:

31 Desember/December		31 Desember/December			
2023		2022			
Dewan Komisaris				Board of Commissioners	
Komisaris Utama	Chow Ying Hoong		Chow Ying Hoong	President Commissioner	
Komisaris	Takeshi Kimoto		Takeshi Kimoto	Commissioner	
Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan		Ninik Herlani Masli Ridhwan	Independent Commissioner	
Komisaris Independen	Onny Widjanarko*)		Irwan Mahjudin Habsjah	Independent Commissioner	
Komisaris Independen	Edmund Tondobala		Edmund Tondobala	Independent Commissioner	
Komisaris	Ongki Wanadjati Dana		Ongki Wanadjati Dana	Commissioner	
Direksi				Board of Directors	
Direktur Utama	Henoah Munandar		Henoah Munandar	President Director	
Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya		Kaoru Furuya	Deputy President Director	
Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto		Darmadi Sutanto	Deputy President Director	
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini		Dini Herdini	Compliance Director	
Direktur	Atsushi Hino**)		Kan Funakoshi	Director	
Direktur	Keishi Kobata***)		Hiromichi Kubo	Director	
Direktur	Merisa Darwis		Merisa Darwis	Director	
Direktur	Hanna Tantani		Hanna Tantani	Director	

*) Onny Widjanarko diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 8 Mei 2023.

*) Onny Widjanarko was appointed as Independent Commissioner at Annual GMS on 13 April 2023 and has been effective assume the office on 8 May 2023.

***) Atsushi Hino diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2023.

***) Atsushi Hino was appointed as Director at Annual GMS on 13 April 2023 and has been effective assume the office on 15 May 2023.

****) Keishi Kobata diangkat sebagai Direktur pada RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Juli 2023.

****) Keishi Kobata was appointed as Director at Extraordinary GMS on 22 June 2023 and has been effective assume the office on 25 July 2023.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

The composition of the Audit Committee as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

31 Desember/December		31 Desember/December			
2023		2022			
Ketua	Ninik Herlani Masli Ridhwan		Ninik Herlani Masli Ridhwan	Chairman	
Anggota	Edmund Tondobala		Edmund Tondobala	Member	
Anggota	Aria Kanaka		Aria Kanaka	Member	
Anggota	Ivan Purnama Sanoesi		Ivan Purnama Sanoesi	Member	

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Eneng Yulie Andriani.

Satuan Kerja Audit Internal

Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Nurhajati Soerjo Hadi.

f. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan pada entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Bidang usaha/ Business activities	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Tahun mulai operasi komersial/ year of starting commercial operations	Jumlah aset/ Total assets	
			30 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022		31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk	Jakarta	Perbankan/ Banking	70.0%	70.0%	2014	21,435,366	21,161,976
PT BTPN SYARIAH VENTURA*	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	70.3%	70.3%	2022	320,596	313,497

* Kepemilikan tidak langsung melalui PT BANK BTPN SYARIAH Tbk sebesar 69,3% dan kepemilikan langsung sebesar 1,0%.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit (continued)

Corporate Secretary

The Corporate Secretary as of 31 December 2023 and 2022 was Eneng Yulie Andriani.

Internal Audit Unit

Head of Internal Audit as of 31 December 2023 and 2022 was Nurhajati Soerjo Hadi.

f. Subsidiaries

The Bank has ownership in the following subsidiaries:

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk berkantor pusat di Menara BTPN, lantai 12, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia menyetujui rencana Bank untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") melalui suratnya No. 15/10/DPBI/PBI-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Akta Notaris No. 26 dan No. 27 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, Bank telah melakukan akuisisi atas Entitas Anak dan menjadi pemegang saham mayoritas. Hal ini telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.10-04338 tertanggal 12 Februari 2014.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk's head office is located at Menara BTPN 12th floor, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

On 19 July 2013, Bank Indonesia approved the Bank's plan to acquire 70% shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") through its letter No. 15/10/DPBI/PBI-5/rahasia which is subject to the change of BSPD's business activities from a conventional bank into a commercial bank under sharia principles.

Based on Notarial Deed No. 26 and No. 27 dated 30 January 2014 before Hadijah S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Bank has acquired the Subsidiary and has become the majority shareholder. It was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.10-04338 dated 12 February 2014.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

Pemisahan Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 Juli 2014 di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"). Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

Proses Konversi Izin Usaha

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi BSPD berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. Izin tersebut mengubah kegiatan usaha Entitas Anak dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Entitas Anak memperoleh izin pemisahan dari OJK berdasarkan Surat No: S-17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan Entitas Anak memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

Perubahan Nama Entitas Anak

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., BSPD mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiaries (continued)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (continued)

Spin off of Sharia Business Unit

On 20 January 2014, the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders which was notarised by Notarial Deed No. 8 dated 4 July 2014 before Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"). The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, i.e. the approval of the conversion permit and spin-off permit.

Conversion of business license

On 22 May 2014, the Subsidiary received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of BSPD based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. The permit changed the Subsidiary's business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conducts business activities based on sharia principles.

On 23 June 2014, the Subsidiary received its spin-off permit from OJK based on the Letter No: S - 17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTPN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. Furthermore, the spin-off became effective on 14 July 2014 and the Subsidiary started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Sharia Commercial Bank Resulting from the Spin-Off.

Subsidiary's Change of Name

Pursuant to the Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013 before Hadijah, S.H., M.Kn., BSPD changed its name to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. The above change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-50529.AH.01.02 Year 2013 dated 1 October 2013 and has been published in State Gazette No.94 year 2013, in supplement of the State Gazette No. 124084 dated 22 November 2013.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

Perubahan Nama Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak mengubah kembali namanya menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk sebagaimana didasarkan pada Akta No. 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0034666.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Mei 2020, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020, dan telah mendapatkan persetujuan Perubahan Nama ini berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena Perubahan Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020.

Anggaran Dasar

Setelah menjadi Bank Umum Syariah, Entitas Anak telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Entitas Anak sebagaimana tercantum dalam Akta No. 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021.

Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Susunan terkini Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Entitas anak sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor No. AHU-AH.01.09-0112846 tanggal 27 April 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiaries (continued)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (continued)

Subsidiary's Change of Name (continued)

The Subsidiary further changed its name to PT BANK BTPN SYARIAH Tbk pursuant to the Notarial Deed No. 26 dated 16 April 2020, before Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0034666.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 8 May 2020 and the Letter of Acceptance of the amendment to the Articles of Association No. No. AHU-AH.01.03-0214020 dated 8 May 2020. The change of name of the BTPNS has been approved based on the letter from the Financial Services Authority ("OJK") number S-66/PB.101/2020 dated 4 June 2020 concerning the determination of the use of Business License on behalf PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk into PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and the Copy of Approval of Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Number KEP-99/PB.1/2020 dated 4 June 2020.

Articles of Association

The Subsidiary's Articles of Association have been amended several times, after becoming Sharia Commercial Bank. The latest amendment to the Articles of Association of the Subsidiary was stated in deed No. 35 dated 21 April 2021, which was notarised by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta adjustment to OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019, No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Letter of Acceptance of the amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0309443 dated 17 May 2021.

Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

The latest composition of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Subsidiary as specified in the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk Number 46 dated 27 April 2023 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0112846 dated 27 April 2023 regarding Receipt of Notification on the Change of Data of Company of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Anak, maksud dan tujuan serta kegiatan Entitas Anak adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Entitas Anak yang dilakukan melalui surat edaran resolusi pemegang saham pada tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 25 April 2018, Entitas Anak memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan surat No. S-36/D-04/2018 untuk penawaran umum saham perdana tersebut.

Entitas Anak melakukan penawaran umum perdana atas 770.370.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 975 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Dana yang diterima oleh Entitas Anak atas penawaran umum perdana adalah sebesar Rp 735.020 (setelah biaya emisi dan pajak).

Atas tambahan saham yang diterbitkan sehubungan dengan penawaran umum perdana Entitas Anak kepada publik, jumlah kepemilikan Bank atas Entitas Anak menurun dari 70% menjadi 63%.

Akuisisi dari kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak

Pada tanggal 11 Mei 2018, Bank mengakuisisi 7% saham atas Entitas Anak dengan imbalan pembelian sebesar Rp 550.045. Kepentingan non-pengendali Entitas Anak pada tanggal akuisisi adalah Rp 525.778. Dengan demikian, kepemilikan Bank atas Entitas Anak kembali menjadi 70%. Dampak perubahan atas kepemilikan saham Entitas Anak adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiaries (continued)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (continued)

The Objectives and Scope of Activities

In accordance with article 3 of the Subsidiary's Articles of Association, the Subsidiary's objective and scope of activities is to engage in banking industry based on sharia principles.

Initial Public Offering

Pursuant to the Subsidiary's Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 16 November 2017, the shareholders approved the plan to conduct Initial Public Offering of Ordinary Shares to public through capital market and listing of the Subsidiary's shares at the Indonesia Stock Exchange. On 25 April 2018, the Subsidiary obtained the effective notification from OJK through letter No. S-36/D-04/2018 for this initial public offering.

The Subsidiary undertook an initial public offering of 770,370,000 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 975 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at the Indonesia Stock Exchange on 8 May 2018. The funds received by the Subsidiary from the initial public offering amounting to Rp 735,020 (net of issuance costs and tax).

In relation to the additional shares issued in connection with the initial public offering of the Subsidiary to the public, the Bank's ownership in the Subsidiary decreased from 70% to 63%.

Acquisition of non-controlling interest of Subsidiary

On 11 May 2018, the Bank acquired 7% shares of Subsidiary for a purchase consideration of Rp 550,045. The non-controlling interest in Subsidiary on the date of acquisition was Rp 525,778. Therefore, the Bank's ownership in the Subsidiary became 70%. The effect of changes in the ownership interest of Subsidiary was as follows:

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

Akuisisi dari kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak (lanjutan)

	2018
Kepentingan non-pengendali yang diakuisisi	525,778
Imbalan yang dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali	(550,045)
Selisih lebih imbalan uang dibayarkan yang diakui pada ekuitas Bank	(24,267)

Dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali pada ekuitas adalah sebagai berikut:

	2018
Perubahan pada ekuitas:	
- Dampak atas penawaran umum Perdana	209,242
- Akuisisi saham tambahan pada Entitas Anak	(24,267)
Dampak bersih pada ekuitas	184,975

Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak

Entitas Anak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2022 kepada para pemegang saham berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023. Adapun jumlah dividen tunai yang dibagikan sebesar Rp 712.535 atau Rp 92,50 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 12 Mei 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada pemegang saham (pemilik warkat *scriptless*) sesuai daftar pemegang saham pada tanggal 2 Mei 2023.

Entitas Anak telah pula melaksanakan pembagian dividen tunai (warkat *non-scriptless*) kepada PT BANK BTPN Tbk selaku pemegang saham pengendali, atas kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Mei 2023.

Adapun *pay-out ratio* atas pembagian dividen tunai keempat adalah maksimal sebesar 40%.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiaries (continued)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (continued)

Acquisition of non-controlling interest of Subsidiary (continued)

	2018
Non-controlling interest acquired	525,778
Consideration paid to non-controlling interest	(550,045)
Excess of consideration paid as recorded in the Bank's equity	(24,267)

Effects of transactions with non-controlling interests on the equity was as follows:

	2018
Changes in equity:	
Effect on initial public offering - Acquisition of additional interest in - Subsidiary	209,242
	(24,267)
Net effect in equity	184,975

Cash dividend distribution by Subsidiary

The Subsidiary distributed the third cash dividend to its shareholders based on the approval of its Annual General Meeting of Shareholders held on 12 April 2023. The amount of cash dividends distributed was Rp 712,535 or Rp 92.50 (full amount) per share.

On 12 May 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia distributed the Subsidiary's cash dividend to shareholders (*scriptless Shareholders*) according to list of shareholders as of 2 May 2023.

The Subsidiary had also carried out the distribution of cash dividend for non-scriptless shareholders to PT BANK BTPN Tbk as controlling shareholders, for 1% shares ownership that was not registered in the Indonesian Stock Exchange on 12 May 2023.

The pay-out ratio of the fourth distribution of cash dividend is the maximum of 40%.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

**Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak
(lanjutan)**

Entitas Anak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021 kepada para pemegang saham berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022. Adapun jumlah dividen tunai yang dibagikan sebesar Rp 475.625 juta atau Rp 61,75 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 20 Mei 2022, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada pemegang saham (pemilik warkat *scriptless*) sesuai daftar pemegang saham pada tanggal 11 Mei 2022.

Entitas Anak telah pula melaksanakan pembagian dividen tunai (warkat *non-scriptless*) kepada PT BANK BTPN Tbk selaku pemegang saham pengendali, atas kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Mei 2022.

Adapun *pay-out ratio* atas pembagian dividen tunai ketiga adalah maksimal sebesar 32,5%.

PT BTPN SYARIAH VENTURA

PT BTPN SYARIAH VENTURA (BTPNS Ventura) berkantor di Jl. Radio Dalam No.100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0066702.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021, telah dibentuk entitas anak dari PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

Susunan Pemegang Saham terakhir BTPNS Ventura adalah sebagaimana dituangkan ke dalam Akta No. 10 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0158924 tanggal 10 Maret 2022.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiaries (continued)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (continued)

**Cash dividend distribution by Subsidiary
(continued)**

The Subsidiary distributed the third cash dividend to its shareholders based on the approval of its Annual General Meeting of Shareholders held on 21 April 2022. The amount of cash dividends distributed was Rp 475,625 or Rp 61.75 (full amount) per share.

On 20 May 2022, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia distributed the Subsidiary's cash dividend to shareholders (scriptless Shareholders) according to list of shareholders as of 11 May 2022.

The Subsidiary had also carried out the distribution of cash dividend for non-scriptless shareholders to PT BANK BTPN Tbk as controlling shareholders, for 1% shares ownership that was not registered in the Indonesian Stock Exchange on 20 May 2022.

The pay-out ratio of the third distribution of cash dividend is the maximum of 32.5%.

PT BTPN SYARIAH VENTURA

PT BTPN SYARIAH VENTURA (BTPNS Ventura)'s office is located at Jl. Radio Dalam No.100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

Based on the Deed of Establishment Number 36 dated 21 October 2021, drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., Mkn, Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0066702.AH.01.01.Year 2021 dated 22 October 2021, a subsidiary of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

The latest composition of the Shareholders of BTPNS Ventura is as specified in the Deed No. 10 dated 10 March 2022 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.03-0158924 dated 10 March 2022.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BTPN SYARIAH VENTURA (lanjutan)

Sedangkan Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BTPNS Ventura terakhir adalah sebagaimana dituangkan kedalam akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham nomor 40 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0181484 tanggal 3 November 2023.

BTPNS Ventura telah mendapatkan perijinan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Nomor KEP-23/D.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah kepada PT BTPN SYARIAH VENTURA dan efektif menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Mei 2022.

Tujuan pendirian BTPNS Ventura adalah untuk menunjang kegiatan usaha dan aspirasi Entitas Anak dalam mewujudkan digital ekosistem bagi segmen yang dilayaninya.

BTPNS Ventura merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas terkait yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang material, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup") pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Subsidiaries (continued)

PT BTPN SYARIAH VENTURA (continued)

Whereas the latest composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of BTPNS Ventura is as specified in the in the Deed of Circular Resolution of the General Meeting of Shareholders number 40 dated 30 October 2023, made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.09-0181484 dated 3 November 2023.

BTPNS Ventura has obtained operational permits from the Financial Services Authority by means of letter Number KEP-23/D.05/2022 dated 20 May 2022, regarding the Granting of Business Permit of Sharia Venture Capital Company to PT BTPN SYARIAH VENTURA and effectively carried out its operational activities on 30 May 2022.

The purpose of establishing BTPNS Ventura is to support the business activities and aspiration of the Subsidiary in realizing a digital ecosystem for the segment it served.

BTPNS Ventura is a company that carries out the sharia venture capital business activities, venture fund management, and other business activities upon approval from relevant authorities, all of which are carried out based on sharia principles.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The material accounting policies, applied in the preparation of the consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries (together referred to as the "Group") as of and for the years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

a. Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

a. Statement of Compliance (continued)

Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK" yang fungsinya dialihkan kepada OJK sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No. KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

These consolidated financial statements have also been prepared and presented in accordance with Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK", whose function has been transferred to OJK starting 1 January 2013) rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

Laporan keuangan konsolidasian ini yang merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Grup telah disetujui untuk diterbitkan kembali oleh direksi pada tanggal 8 Mei 2024.

These consolidated financial statements which represent the consolidation of the financial statements of the Group, were authorized for reissuance by the Board of Directors on 8 May 2024.

Laporan keuangan konsolidasi ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dalam Bahasa Indonesia.

These consolidated financial statements are presented in Indonesian and English languages. Should there be any difference in interpretation due to translation, the Indonesian version shall prevail.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

b. Basis for Preparation of Consolidated Financial Statements

Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Kecuali dinyatakan secara khusus, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah terdekat.

Figures in these consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Group's functional currency. Unless otherwise stated, financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million.

Laporan keuangan konsolidasian disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, dan efek-efek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

The consolidated statements of cash flows present the changes in cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities. The statements of cash flows are prepared using the direct method. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and securities that mature within three months from the date of acquisition, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Penggunaan pertimbangan dan estimasi

c. Use of judgments and estimates

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires management to make judgments and estimates that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the periods in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di Catatan 3.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognized in the consolidated financial statements are described in Note 3.

d. Perubahan kebijakan akuntansi

d. Changes in accounting policies

Berikut ini adalah standar dan interpretasi standar yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023, memiliki pengaruh atas laporan keuangan konsolidasian Grup, dan mungkin akan membutuhkan penerapan secara retrospektif sebagaimana diatur dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan":

The following standards and interpretation of standards became effective on 1 January 2023, have an effect on the Group's consolidated financial statements, and may require retrospective application under PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors":

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait: Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang: Pajak Tangguhan: Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang: Reformasi Pajak Internasional - Model Pilar Dua"

- *Amendments to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies"*
- *Amendments to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definition of Accounting Estimates"*
- *Amendments to PSAK 46 "Income Tax: Deferred Tax: Assets and Liabilities from Single Transaction"*
- *Amendments to PSAK 46 "Income Tax: International Tax Reform - Pillar Two Model Rules"*

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

d. Changes in accounting policies (continued)

Penerapan standar akuntansi yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The implementation of the above-mentioned accounting standards did not have significant impacts to the consolidated financial statements.

Terkait Amandemen PSAK 46 "Pajak Tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal", Bank mengakui aset pajak tangguhan tersendiri sehubungan dengan liabilitas sewa dan kewajiban pajak tangguhan sehubungan dengan aset hak guna nya. Namun, tidak ada dampak pada laporan posisi keuangan konsolidasian karena saldo memenuhi syarat untuk saling hapus sesuai PSAK 46. Lihat catatan 13f untuk mengetahui dampak penerapan amandemen tersebut.

With regards to Amendments to PSAK 46 "Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a single transaction", the Bank has recognised a separate deferred tax asset in relation to its lease liabilities and deferred tax liability in relation to its right-of-use assets. However, there was no impact on the consolidated statement of financial position because the balances qualify for offset under PSAK 46. See note 13f for the impact of adopting the amendments.

e. Penjabaran Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing

e. Foreign Currency Transactions and Balances Translation

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup, dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah, the Group's functional currency, at the exchange rates prevailing at the transaction date.

Saldo akhir tahun aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB.

Year-end balances monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using exchange rate as of the reporting date (closing) as determined by Bank Indonesia, i.e. middle rates which are the average of buying rates and selling rates per Reuters at 16.00 WIB.

Kurs valuta asing utama yang digunakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

The major exchange rates used as of the reporting date were as follows (full amount):

	31 Desember/December		
	2023	2022	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15,397.00	15,567.50	1 United States Dollar (USD)
1 Dolar Australia (AUD)	10,520.77	10,557.88	1 Australian Dollar (AUD)
1 Dolar Singapura (SGD)	11,676.34	11,592.88	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Dolar Hong Kong (HKD)	1,970.73	1,996.55	1 Hong Kong Dollar (HKD)
1 Poundsterling Inggris (GBP)	19,626.56	18,786.09	1 British Poundsterling (GBP)
1 Yen Jepang (JPY)	108.88	117.81	1 Japanese Yen (JPY)
1 Euro (EUR)	17,038.32	16,581.72	1 Euro (EUR)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam valuta asing dan dari penjabaran aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing diakui pada laba rugi.

The exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of monetary assets and monetary liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**e. Penjabaran Transaksi dan Saldo dalam Valuta
Asing** (lanjutan)

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

f. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan entitas anak.

Suatu pengendalian atas entitas anak dianggap ada bilamana Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Bank akan menilai kembali apakah memiliki kendali jika ada perubahan atas satu atau lebih unsur pengendalian. Ini termasuk situasi dimana hak protektif yang dimiliki (seperti yang dihasilkan dari hubungan pinjaman) menjadi substantif dan mengakibatkan Bank memiliki kekuasaan atas entitas anak.

Laporan keuangan dari entitas anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

Ketika Bank kehilangan kendali atas entitas anak, Bank menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, dan kepentingan non-pengendali terkait dan komponen ekuitas lainnya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi. Kepentingan yang dipertahankan di entitas anak sebelumnya diukur sebesar nilai wajar ketika pengendalian hilang.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

**e. Foreign Currency Transactions and
Balances Translation** (continued)

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

f. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Bank and its subsidiaries.

Control over a subsidiary is presumed to exist if the Bank is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries. The Bank reassesses whether it has control if there are changes to one or more of the elements of the control. This includes circumstances in which protective rights held (e.g. those resulting from a lending relationship) become substantive and lead to the Bank having power over a subsidiary.

The financial statements of the subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date on which control commences until the date when control ceases.

When the Bank loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value when the control is lost.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

f. Basis of Consolidation (continued)

Seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

All inter-company transactions and balances are eliminated in the consolidated financial statements; accordingly, the consolidated financial statements include only transactions and balances with other parties.

Akuisisi entitas anak oleh Bank dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan akuisisi diukur pada nilai wajar aset yang diberikan, instrumen ekuitas yang diterbitkan, liabilitas yang terjadi atau diambil dan penyesuaian harga beli kontinjensi, jika ada, pada tanggal transaksi. *Goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas anak diuji penurunan nilainya minimal secara tahunan. Keuntungan yang dihasilkan atas pembelian dengan diskon diakui langsung pada laba rugi. Biaya-biaya transaksi yang timbul dari akuisisi entitas anak dibebankan langsung pada laba rugi tahun berjalan.

The acquisition method is used to account for the acquisition of subsidiary by the Bank. The cost of acquisition is measured at the fair value of the assets given, equity instruments issued, liabilities incurred or assumed and contingent consideration, if any, at the transaction date. Goodwill arising from the acquisition of subsidiary is tested at least annually for impairment. Any gain on bargain purchase is recognized in profit or loss immediately. Transaction costs incurred in the acquisition of Subsidiary are directly expensed in the current year profit or loss.

Kepentingan non-pengendali diakui pada tanggal kombinasi bisnis dan selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan aset bersih teridentifikasi entitas anak.

Non-controlling interest is recognized at the date of initial business combination and subsequently adjusted by proportion of change in identifiable net assets of subsidiaries.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Bank pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi antara pemegang ekuitas dan dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Changes in ownership interest in subsidiary that do not result in a loss of control are treated as transaction between equity holders and are accounted for as equity transactions.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas entitas anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham non-pengendali pada entitas anak tersebut.

Non-controlling interest is presented as part of equity in the consolidated statements of financial position and represents the non-controlling shareholders' proportionate share in the net income for the year and equity of the subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling shareholders in the subsidiary.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

g. Transactions with Related Parties

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

In these consolidated financial statements, the term related parties is used as defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures".

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Grup terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, pinjaman yang diberikan, pembiayaan/piutang syariah, penyertaan saham dan tagihan lainnya (yang disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain).

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank-bank lain, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, akrual, liabilitas sewa, pinjaman subordinasi, dan liabilitas lain-lain.

h.1. Klasifikasi

Aset keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI");
- iii. Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari kategori ini pada saat pengakuan awal berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki serta karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*hold to collect*); dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

h. Financial Assets and Financial Liabilities

The Group's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, derivative receivables, acceptance receivables, loans, sharia financing/receivables, investment in shares and other receivables (presented as part of other assets).

The Group's financial liabilities consist of obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, derivative payables, acceptance payables, securities issued, borrowings, accruals, lease liabilities, subordinated loans, and other liabilities.

h.1. Classification

Financial assets

The Bank classified its financial assets into the following categories on initial recognition:

- i. At amortized cost;
- ii. Fair value through other comprehensive income ("FVOCI");
- iii. Fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial asset is classified into one of these categories on initial recognition based on the business model within which it is held, and its contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (*hold to collect*); and
- Its contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)

h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

Aset keuangan diukur pada FVOCI hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

A financial asset is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*hold to collect and sell*); dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (hold to collect and sell); and*
- *Its contractual terms of financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal, kecuali dalam periode setelah Bank mengubah model bisnis yang mengelola aset keuangan.

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after the Bank changes its business model for managing financial assets.

Penilaian model bisnis

Business model assessment

Model bisnis Bank ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Model bisnis Bank tidak bergantung pada intensi manajemen untuk instrumen individu. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini bukan merupakan pendekatan instrumen-per-instrumen untuk klasifikasi dan ditentukan pada level agregasi yang lebih tinggi yaitu pada level portfolio.

The Bank's business model is defined at a level that reflects how group of financial assets are managed together to achieve certain business objectives. The Bank's model does not depend on management's intention for individual instruments. Accordingly, this condition is not an instrument-by-instrument approach to classification and is determined at a higher level of aggregation, which is at portfolio level.

Model bisnis Bank mengacu pada pengelolaan aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Penilaian ini tidak dilakukan atas dasar skenario bahwa Bank tidak mengharapkan terjadinya skenario "kondisi terburuk" atau skenario "kondisi stres". Dalam kondisi Bank menjual portofolio aset keuangan tertentu dalam skenario kondisi terburuk, skenario itu tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap model bisnis untuk aset tersebut jika Bank secara wajar mengharapkan bahwa skenario seperti itu tidak akan terjadi.

The Bank's business model refers to managing financial assets to generate cash flows. Cash flows will result from obtaining contractual cash flows, selling financial assets or both. This assessment is not made based on a scenario where the Bank does not expect a "worst condition" scenario or a "stress condition" scenario to occur. In a situation where the Bank sells certain portfolios of financial assets in a worst-case scenario, that scenario will not affect the assessment of the business model for that asset if the Bank reasonably expects that such a scenario will not occur.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)

h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Business model assessment (continued)

Akan tetapi, ketika Bank menilai model bisnis untuk aset keuangan yang baru diterbitkan atau baru dibeli, Bank harus mempertimbangkan informasi tentang bagaimana arus kas direalisasikan di masa lalu, bersama dengan semua informasi yang relevan lainnya.

However, when the Bank assesses the business model for newly issued or recently purchased financial assets, it must consider information about how cash flows were realized in the past, along with all other relevant information.

Model bisnis untuk mengelola aset keuangan adalah kenyataan dan bukan hanya sebuah asersi. Hal ini biasanya diobservasi melalui aktivitas yang dilakukan Bank untuk mencapai tujuan dari model bisnis. Bank mempertimbangkan semua bukti yang relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Bukti yang relevan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

The business model for managing financial assets is a reality and not just an assertion. This is usually observed through the activities the entity carries out to achieve the objectives of the business model. The Bank considers all relevant evidence available at the valuation date. The relevant evidence includes, but is not limited to:

- kebijakan dan tujuan yang dinyatakan untuk portofolio dan pengoperasian kebijakan tersebut dalam praktiknya. Secara khusus, apakah strategi manajemen berfokus pada menghasilkan pendapatan bunga kontraktual, mempertahankan profil suku bunga tertentu, mencocokkan durasi aset keuangan dengan durasi liabilitas yang mendanai aset tersebut atau mewujudkan arus kas melalui penjualan aset;
- bagaimana kinerja portofolio dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;
- risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan strategi mengenai bagaimana risiko tersebut dikelola; dan
- bagaimana manajer bisnis dikompensasi (sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

- the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. In particular, whether management's strategy focusses on earning contractual interest income, maintaining a particular interest rate profile, matching the duration of the financial assets to the duration of the liabilities that are funding those assets or realising cash flows through sale of the assets;
- how the performance of the portfolio is evaluated and reported to key management personnel of the Bank;
- the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and its strategy for how those risks are managed; and
- how the business manager is compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of assets under management or the contractual cash flows obtained).

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)

h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI)

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI)

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Ketentuan percepatan pelunasan dan perpanjangan;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

Financial liabilities are classified into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities classified as held for trading;
- ii. Financial liabilities measured at amortized cost.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)

h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

h.1. Classification (continued)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Financial liabilities (continued)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit-taking*) yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai instrumen diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivatives are also categorised as held for trading instrument unless they are designated and effective as hedging instruments.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities are recognized in current year profit or loss.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan non-derivatif yang tidak dimiliki Bank untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial liabilities measured at amortized cost consist of non-derivative financial liabilities that are not held for trading purpose and not designated at fair value through profit or loss.

h.2. Pengakuan

h.2. Recognition

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)

h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)

h.2. Pengakuan (lanjutan)

h.2. Recognition (continued)

Grup pada awalnya mengakui pinjaman/pembiayaan yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

The Group initially recognizes loans/financing and deposits on the date of origination.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Group commits to purchase or sell those assets.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

h.3. Biaya perolehan diamortisasi dan nilai tercatat bruto

h.3. Amortized cost and gross carrying amount

'Biaya perolehan diamortisasi' aset keuangan atau liabilitas keuangan merupakan suatu nilai dimana aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan cadangan kerugian penurunan nilai. 'Nilai tercatat bruto aset keuangan' merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The 'amortized cost' of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any allowance for impairment losses. The 'gross carrying amount of financial asset' is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any allowance for impairment losses.

h.4. Penghentian pengakuan

h.4. Derecognition

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Group transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Group is recognized as a separate asset or liability.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

The Group derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
(lanjutan)

h. Financial Assets and Financial Liabilities
(continued)

h.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

h.4. Derecognition (continued)

Dalam transaksi dimana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Grup menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Grup dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

In transactions in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Group derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Group continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

Grup menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Grup menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

The Group writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Group determines that the financial asset is uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the credit exposure.

h.5. Saling hapus

h.5. Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi**

i.1. Financial assets carried at amortized cost

Dalam mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, Bank telah menerapkan PSAK 71 sejak tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian ("KKE") 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (KKE *lifetime*). KKE *lifetime* adalah kerugian ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan KKE 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

To estimate impairment loss allowance on financial assets, the Bank has implemented PSAK 71 since 1 January 2020. PSAK 71 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month Expected Credit Losses ("ECL") or lifetime ECL. Lifetime ECL is the ECL that results from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECL is the portion of ECL that results from default events that are possible within the 12-month after reporting date.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas. Karena kerugian kredit ekspektasian mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap timbul meskipun entitas mengharapkan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo kontraktual.

Expected credit losses are a probability-weighted estimate of credit losses (i.e the present value of all cash shortfalls) over the expected life of the financial instrument. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and the cash flows that the entity expects to receive. Because expected credit losses consider the amount and timing of payments, a credit loss arises even if the entity expects to be paid in full but later than when contractually due.

KKE diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect* atau *hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. KKE tidak diakui untuk instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL dan instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

ECL are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect or hold to collect and sell and have SPPI cash flows. ECL is not recognized for financial instruments designated as FVTPL and equity instruments designated as FVOCI.

Sesuai dengan ISAK 102, khusus untuk transaksi berbasis syariah, pengukuran penurunan nilai dari aset keuangan tidak mengadopsi PSAK 71.

In accordance to ISAK 102, particularly for sharia-based transactions, the allowance for impairment losses of financial assets does not adopt PSAK 71.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**i.1. Financial assets carried at amortized cost
(continued)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sebesar kerugian kredit sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian yang akan diakui sebesar KKE 12 bulan:

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, except in the following condition, for which the amount recognized will be 12-month ECL:

- instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah; dan
- instrumen keuangan dengan risiko kredit yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

- *financial instruments with low credit risk; and*
- *financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan membutuhkan penggunaan model, dikarenakan eksposur yang bervariasi terkait dengan perubahan kondisi pasar, arus kas yang diharapkan dan berjalannya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait dan korelasi gagal bayar antar pihak. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default (PD)*, *Exposure at Default (EAD)*, *Loss Given Default (LGD)* dan variabel makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

The estimation of credit exposure for risk management purpose is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank measures credit risk using Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD), Loss Given Default (LGD) and macroeconomic variables for forward looking perspective.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian (KKE), komponen-komponen tersebut akan diperhitungkan bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif. Dasar input, asumsi dan teknik estimasi diungkapkan di Catatan 3.

To determine the expected credit loss (ECL), these components are multiplied together and discounted to the reporting date using the effective interest rate. The basis of inputs, assumptions and the estimation technique are disclosed in Note 3.

Untuk portofolio korporasi, risiko kredit diukur berdasarkan pada pengelompokan tingkat peringkat internal.

For corporate portfolio, credit risk is measured based on grouping grade of internal grading.

Untuk portofolio tresuri, risiko kredit diukur berdasarkan pada pengelompokan tingkat peringkat internal. Apabila tidak terdapat informasi peringkat internal untuk pihak lawan, pengelompokan didasarkan pada peringkat kredit dari pihak lawan. Untuk perhitungan PD, Bank menggunakan struktur jangka waktu (*term structure*) PD yang dikeluarkan oleh peringkat eksternal.

For the treasury portfolio, credit risk is measured based on grouping grade of internal grading. If there is no information of internal grading for counterparty, the categorizing is based on credit rating from counterparty issuer. For PD calculation, the Bank uses PD term structure issued by external rating.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**i.1. Financial assets carried at amortized cost
(continued)**

Untuk kategori portofolio ritel, risiko kredit diukur berdasarkan pada kelompok hari tunggakan untuk membentuk *term structure* PD yang akan digunakan untuk menghitung perhitungan KKE dengan pendekatan model statistik.

For retail portfolio category, the credit risk is measured based on days past due buckets to create PD term structure used to compute ECL calculation by statistical model approach.

Bank menganggap efek-efek investasi yang diterbitkan oleh pemerintah (seperti obligasi pemerintah) dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga efek-efek pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah atas instrumen keuangan lainnya.

The Bank considers a Rupiah denominated government investment securities (such as government bonds) and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government investment securities are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

**Pengukuran kerugian kredit
ekspektasian**

Expected credit loss measurement

Sesuai PSAK 71, Bank menerapkan model "Tiga-Tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti dirangkum di bawah ini:

In accordance with PSAK 71, the Bank applied "Three-Stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai kredit sejak pengakuan awal diklasifikasikan dalam "Tahap 1".
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit ("SICR") sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum dianggap mengalami penurunan nilai kredit.
- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai kredit/memburuk, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3"

- *A financial instrument that is not credit-impaired since initial recognition is classified in "Stage 1".*
- *If a significant increase in credit risk ("SICR") since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to "Stage 2" but is not yet deemed to be credit-impaired.*
- *If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3".*

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

**Pengukuran kerugian kredit
ekspektasian (lanjutan)**

Instrumen keuangan - Tahap 1

Kerugian kredit ekspektasian instrumen keuangan Tahap 1 diakui sebesar kekurangan kas yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa depan dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit dimana kerugian kredit ekspektasian akan dihitung berdasarkan basis *lifetime*. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR) - Tahap 2

Bank menganggap instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika kriteria di bawah ini telah dipenuhi:

- Untuk segmen korporasi menggunakan parameter daftar pantauan (*watchlist*) dan perubahan nilai PD 12 bulan sebesar 100% sebagai akibat perpindahan peringkat internal sejak pengakuan awal.
- Untuk instrumen keuangan di treasury menggunakan pergerakan 3 titik (*notch*) dari peringkat pada saat pengakuan awal.
- Untuk segmen ritel menggunakan informasi jumlah hari tunggakan dalam sebulan dalam kelompok tunggakan. SICR terjadi ketika jumlah hari tunggakan mencapai lebih dari 30 hari.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit/memburuk (gagal bayar) - Tahap 3

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)**

**i.1. Financial assets carried at amortized cost
(continued)**

**Expected credit loss measurement
(continued)**

Financial instruments - Stage 1

Stage 1 expected credit losses are recognized at the amount of cash shortfalls arising from possible default events up to 12 months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired where the expected credit losses will be determined based on lifetime. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a 12-month basis.

Significant increase in credit risk (SICR) -
Stage 2

The Bank considers a financial instrument to have experienced a significant increase in credit risk when the below criteria have been met:

- For corporate segments use watchlist parameters and 12-month PD change by 100% resulted from internal grading movement from its initial recognition.
- For treasury financial instruments use 3 notch movements from origination rating at its initial recognition.
- For retail segment use days past due information in month in arrears grouping. SICR incurred if the days past due reached more than 30 days.

Credit-impaired (or defaulted) exposures -
Stage 3

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan** (lanjutan)

**i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi** (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian
(lanjutan)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai
kredit/memburuk (gagal bayar) - Tahap 3
(lanjutan)

Pinjaman korporasi

Pinjaman korporasi yang dikategorikan mengalami penurunan nilai adalah pinjaman dari debitur dengan peringkat internal 7R atau lebih rendah.

Pinjaman non-korporasi

Pinjaman non-korporasi yang dikategorikan mengalami penurunan nilai adalah pinjaman yang memenuhi setidaknya satu dari kriteria berikut:

- a. Hari tunggakan lebih dari 90 hari
- b. Kolektibilitas OJK 3, 4 dan 5

Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario dengan probabilitas tertimbang, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Pengukuran KKE di seluruh tahapan aset diperlukan untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi menggunakan informasi yang wajar dan didukung dengan peristiwa masa lampau, kondisi saat ini, dan proyeksi terkait dengan kondisi ekonomi di masa depan.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur KKE adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan, Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portfolio *revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit, bukan sepanjang periode kontrak.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets** (continued)

i.1. Financial assets carried at amortized cost
(continued)

Expected credit loss measurement
(continued)

Credit-impaired (or defaulted) exposures -
Stage 3 (continued)

Corporate loans

Corporate loans that are categorised as impaired are loans from debtors with internal grading at 7R or lower.

Non-corporate loans

Non-corporate loans that are categorised as impaired are loans that satisfy at least one of the following criteria:

- a. Days past due over 90 days
- b. OJK Grading 3, 4 and 5

Loss provisions against credit-impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios with weighted probabilities, including the realisation of any collateral held where appropriate. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

The measurement of ECL across all stages is required to reflect an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of reasonably possible outcomes using reasonable and supportable information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The period considered when measuring ECL is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk, not the contractual term of contract.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)

i. Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)

i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)

i.1. Financial assets carried at amortized cost
(continued)

Pengukuran kerugian kredit
ekspektasian (lanjutan)

Expected credit loss measurement
(continued)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai
kredit/memburuk (gagal bayar) - Tahap 3
(lanjutan)

Credit-impaired (or defaulted) exposures -
Stage 3 (continued)

KKE atas komitmen pinjaman dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi KKE pada komponen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik, Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai liabilitas lain-lain.

ECL on loan commitments and financial guarantees is recognized as other liabilities. Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component, the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as other liabilities.

Penyajian kerugian kredit ekspektasian

Presentation of expected credit losses

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di laporan posisi keuangan konsolidasian mencerminkan nilai tercatat bruto dikurangi KKE. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi tahun berjalan.

For financial assets measured at amortized cost, the balance at consolidated statement of financial position reflects the gross carrying amount less ECL. Changes in expected credit losses are recognized in the current year profit or loss.

i.2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

i.2. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

Pengukuran KKE untuk aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) menggunakan pendekatan dan model perhitungan yang sama dengan pengukuran KKE untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Untuk aset keuangan instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di laporan posisi keuangan konsolidasian mencerminkan nilai wajar instrumen, dengan KKE dibukukan terpisah sebagai cadangan pada penghasilan komprehensif lain. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi tahun berjalan.

The ECL measurement for debt instrument financial assets measured at fair value through other comprehensive income uses the same approach and calculation model in measuring ECL for financial assets carried at amortized cost. For debt instrument financial assets in FVOCI category, the balance in consolidated statement of financial position reflects the instrument's fair value, with the ECL held as a separate reserve within other comprehensive income. Changes in expected credit losses are recognized in the current year profit or loss.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan** (lanjutan)

i.3. Piutang murabahah

Entitas Anak melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif karena seluruh piutang murabahah memiliki nilai tidak signifikan secara individu.

Untuk penurunan nilai secara kolektif ini, Bank mengelompokkan portofolio piutang berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu antara nasabah yang diberikan restrukturisasi dan nasabah yang tidak direstrukturisasi, dimana metode yang digunakan mengikuti *incurred loss* atau *regulatory reporting*.

Entitas Anak menggunakan model analisa statistik dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, yaitu metode *migration analysis* dan metode *vintage analysis*.

Metode *migration analysis* digunakan untuk menentukan kerugian penurunan nilai dari nasabah yang tidak direstrukturisasi dan nasabah yang direstrukturisasi karena usaha menurun (non-Covid). Pada metode *migration analysis*, Entitas Anak menentukan tingkat kerugian dari portofolio selama periode antara terjadinya peristiwa gagal bayar dengan saat kerugian teridentifikasi untuk setiap portofolio yang teridentifikasi dalam jangka waktu 12 bulan. Kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah diukur sebesar selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang.

Metode *vintage analysis* digunakan untuk menentukan kerugian penurunan nilai dari nasabah yang telah direstrukturisasi COVID-19. Pada metode *vintage analysis*, Entitas Anak menentukan tingkat kerugian berdasarkan pengalaman Entitas Anak atas kondisi nasabah yang direstrukturisasi sebelumnya dari tanggal restrukturisasi sampai dengan piutang pembiayaan tersebut lunas atau dihapusbukukan dan mempertimbangkan tren pembayaran nasabah di periode restrukturisasi juga.

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, pembiayaan tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah terpenuhi dan jumlah kerugian telah ditentukan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets** (continued)

i.3. Murabahah receivables

The Subsidiary performs impairment evaluation collectively as all murabahah receivables have individually insignificant value.

For this collective impairment, the Bank classifies the receivables portfolio based on the similarity of credit risk characteristics, that is between customers who were given restructuring and customers who were not restructured, where the method used follows the incurred losses or reporting regulations.

The Subsidiary uses statistical analysis models in determining the collective impairment loss allowance, that is the migration analysis method and the vintage analysis method.

The migration analysis method is used for determining the impairment loss for non-restructuring customers and customers who were restructured due to declining business (non-Covid). In the migration analysis method, the Subsidiary determines the loss rate of the portfolio from the period between the occurrence of a default event and the identification of a loss for each identified portfolio within 12 months. Impairment losses on murabahah receivables are measured at the difference between the carrying amount of the murabahah receivables and present value of estimated future cash flows.

The vintage analysis method is used to determine the impairment loss of COVID-19 restructured customers. In the vintage analysis method, the Subsidiary uses the loss rate based on the Subsidiary's experience of the condition of previous restructured customers from the restructuring date until the financing receivables were paid-off or written-off. And consider customer payment trends in the restructuring period as well.

When a financing is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses. Such financing is written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

**i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan** (lanjutan)

**i. Allowance for impairment losses of financial
assets** (continued)

i.3. Piutang murabahah (lanjutan)

i.3. Murabahah receivables (continued)

Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

Subsequent recoveries of financing written off in the current year are credited to the provision for allowance for impairment losses account. Subsequent recoveries of financing written off in previous year are recognized as other operating income.

**j. Giro pada Bank Indonesia dan bank-bank
lain**

**j. Current accounts with Bank Indonesia and
other banks**

Setelah pengakuan awal, giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, current accounts with Bank Indonesia and other banks are measured at amortized cost using the effective interest method.

Giro pada Bank Indonesia termasuk giro wadiah Entitas Anak yang disajikan sebesar biaya perolehan. Giro pada bank-bank lain termasuk giro pada bank-bank lain Entitas Anak yang dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Current accounts with Bank Indonesia include the Subsidiary's wadiah current accounts which are stated at acquisition cost. Current accounts with other banks include the Subsidiary's current accounts with other banks which are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

**k. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-
bank lain**

**k. Placements with Bank Indonesia and other
banks**

Setelah pengakuan awal, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method.

Penempatan pada Bank Indonesia termasuk penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI"), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), Deposito Berjangka Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan *call money*. FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad masing-masing adalah wadiah dan jualah. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain dari Entitas Anak disajikan sebesar biaya perolehan.

Placements with Bank Indonesia include placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Deposit Facilities ("FASBI"), Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), Bank Indonesia Term Deposit, Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and *call money*. FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short-term fund deposits under wadiah and jualah agreements, respectively. Placements with Bank Indonesia and other banks of the Subsidiary are stated at acquisition cost.

l. Efek-efek

l. Securities

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank ("SIMA"), Sukuk Bank Indonesia, sukuk korporasi, Surat Berharga Syariah Negara, reksa dana syariah, obligasi pemerintah yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal, dan wesel ekspor.

Securities consist of Certificate of Interbank Mudharabah Investment ("SIMA"), Bank Indonesia Sukuk, corporate sukuk, Sovereign Sharia Securities, sharia mutual funds, government bonds traded in the money market and capital market, and export bills.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

I. Efek-efek (lanjutan)

Efek-efek (selain sukuk, SIMA, reksa dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah) pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah dengan (untuk efek-efek yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan pengukuran selanjutnya tergantung pada klasifikasinya. Lihat Catatan 2h.3 untuk kebijakan akuntansi aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Untuk efek-efek yang diukur dengan FVOCI, keuntungan dan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk beberapa hal di bawah ini yang diakui dalam laba rugi sama seperti aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi:

- pendapatan bunga menggunakan metode suku bunga efektif;
- kerugian kredit ekspektasian dan pemulihan; dan
- keuntungan dan kerugian selisih kurs.

Ketika efek-efek yang diukur pada FVOCI dihentikan pengakuannya, keuntungan dan kerugian yang terakumulasi yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain di reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi.

Efek-efek yang diukur dengan FVTPL saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal diakui dan diukur pada nilai wajar di laporan posisi keuangan, dengan biaya transaksi yang terjadi diakui langsung pada laba rugi.

Seluruh perubahan nilai wajar diakui sebagai bagian dari pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi pada saat penjualan atau penyelesaian efek-efek yang diukur dengan FVTPL diakui pada laba rugi.

Premi dan/atau diskonto diamortisasi dan dilaporkan sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk), SIMA, reksa dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

I. Securities (continued)

Securities (other than sukuk, SIMA, sharia mutual funds and other securities based on sharia principles) are initially measured at fair value plus (for securities not subsequently measured at fair value through profit or loss) directly attributable transaction costs and subsequent measurement will depend on their classification. Refer to Note 2h.3 for the accounting policy of financial assets measured at amortized cost.

For securities measured at FVOCI, gains and losses are recognized in other comprehensive income, except for the following, which are recognized in profit or loss in the same manner as for financial asset measured at amortized costs:

- *interest amount using effective interest rate method;*
- *expected credit losses and reversal; and*
- *foreign exchange gain and losses.*

When securities measured at FVOCI are derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss.

Securities measured at FVTPL are initially recognized and subsequently measured at fair value in the statement of financial position, with transaction costs recognized directly in profit or loss.

All changes in fair value are recognized as part of other operational income in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains or losses which are realized when the securities measured at FVTPL are sold or settled are recognized in profit or loss.

Premium and/or discount is amortized and reported as interest income using the effective interest method.

Sharia securities are proof of investments based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk), SIMA, sharia mutual funds and other securities based on sharia principles.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

I. Efek-efek (lanjutan)

Grup menentukan klasifikasi investasi pada sukuk dan efek lain berprinsip syariah yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk, sesuai dengan PSAK No. 110 (Revisi 2015) dan penyesuaian tahun 2020 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.
- 2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dipindahkan ke laba rugi.

- 3) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi. Biaya transaksi langsung diakui pada laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

I. Securities (continued)

The Group determines the classification of investments in sukuk and other securities under sharia principles which have similar characteristic with sukuk, in accordance with PSAK No.110 (2015 Revision) and its amendments in 2020 regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) Measured at acquisition cost. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to collect contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the margin. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at acquisition cost, plus unamortized portion of transaction costs that are amortized using straight-line method, minus allowance for impairment losses, if any.
- 2) Measured at fair value through other comprehensive income. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and/or the results.

At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

- 3) Measured at fair value through profit or loss. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value excluding transaction costs. Transaction costs are directly recognized in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in the current year profit or loss.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

l. Efek-efek (lanjutan)

Investasi dalam unit reksa dana syariah dinyatakan sebesar nilai wajar yang ditentukan berdasarkan nilai aset bersih dari reksa dana pada tanggal pelaporan. Seluruh perubahan nilai aset bersih diakui pada penghasilan komprehensif lain. Investasi dalam unit reksa dana syariah terproteksi dinyatakan sebesar biaya perolehan.

l. Securities (continued)

Investment in sharia mutual funds are presented at fair value which is measured based on net asset value of mutual funds at reporting date. All changes in net asset value are recognized in other comprehensive income. Investment in protected sharia mutual funds are presented at acquisition cost.

m. Tagihan dan liabilitas derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti *swap* mata uang asing, *cross currency swap*, dan *swap* suku bunga.

m. Derivative receivables and payables

In the normal course of business, the Bank enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency swap, cross currency swap, and interest rate swap.

Instrumen keuangan derivatif diakui pada nilai wajar, dengan biaya transaksi yang terjadi diakui langsung pada laba rugi. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Derivative financial instruments are recognized at their fair value, with transaction costs recognized directly in profit or loss. Derivative are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

Gains or losses as a result of fair value changes are recognized as current year profit or loss.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

n. Acceptance receivables and payables

Acceptance receivables are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses, where appropriate.

Liabilitas akseptasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Acceptance payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi mengenai biaya perolehan diamortisasi.

Acceptance receivables are classified as amortized cost. Refer to Note 2h for the accounting policy of amortized cost.

**o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah**

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

o. Loans and sharia financing/receivables

Loans represent disbursement of cash or cash equivalent based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period.

Pembiayaan bersama dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank, dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Joint financing is recorded according to the proportion of risks borne by the Bank and stated at amortized cost.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi mengenai biaya perolehan diamortisasi.

Loans are classified as amortized cost. Refer to Note 2h for the accounting policy of amortized cost.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah** (lanjutan)

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang terdiri dari piutang murabahah, pembiayaan musyarakah dan pinjaman qardh.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Entitas Anak, dimana Entitas Anak membiayai kebutuhan barang untuk konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah, yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan margin yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh piutang murabahah tersebut. Setelah pengakuan awal, piutang murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode imbal hasil efektif dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Entitas Anak menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad qardh.

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Entitas Anak yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

o. Loans and sharia financing/receivables
(continued)

Included in the loans are sharia financing/receivables which consist of murabahah receivables, musyarakah financing and funds of qardh.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Subsidiary, whereby the Subsidiary finances the goods for consumption, investment and working capital needs of the customer, sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus directly attributable transaction costs and additional costs to obtain the respective murabahah receivables. Subsequent to the initial recognition, they are measured at amortized cost using the effective rate of return method less deferred margin income and allowance for impairment losses.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds with the terms that profits are shared according to the agreement, while losses are borne by each party proportionate to the amount of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Subsidiary provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh agreement.

Funds of qardh represent funds provided or similar claims based on an agreement or contract between the borrower and the Subsidiary, wherein the borrower should repay the loan after a specified period of time.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah (lanjutan)**

**o. Loans and sharia financing/receivables
(continued)**

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Entitas Anak dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima.

A funds of qardh is recognized in the amount lent at the transaction date. The Subsidiary may receive a fee, however, this should not be stated in the agreement. The fee is recognized upon receipt.

Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for impairment losses.

Modifikasi pinjaman yang diberikan

Modification of loans

Skema modifikasi pinjaman yang diberikan dapat berupa penyesuaian pada suku bunga, pokok bunga dan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, penjadwalan kembali pembayaran angsuran serta modifikasi persyaratan kredit lainnya.

Modification schemes for loans can be in the form of adjustment on interest rate, loan principal and past due interest, extension of repayment period, rescheduling of installments and other modification of the terms of the loans.

Jika persyaratan perjanjian suatu pinjaman dimodifikasi, maka Bank mengevaluasi apakah arus kas kontraktual dari pinjaman yang termodifikasi berbeda secara signifikan.

If the terms of a loan are modified, then the Bank evaluates whether the contractual cash flows of the modified asset are substantially different.

Jika arus kas berbeda secara signifikan, maka hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan yang original sebenarnya telah kadaluarsa. Dalam hal ini, aset keuangan yang original dihentikan pengakuannya dan aset keuangan yang baru diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang memenuhi syarat. Imbalan yang diterima sebagai bagian dari modifikasi diperhitungkan sebagai berikut:

If the cash flows are substantially different, then the contractual rights to cash flows from the original financial asset are deemed to have expired. In this case the original financial asset is derecognized and a new financial asset is recognized at fair value plus any eligible transaction costs. Any fees received as part of the modification are accounted for as follows:

- imbalan yang dipertimbangkan sewaktu menentukan nilai wajar dari aset baru dan imbalan yang merupakan pembayaran kembali (*reimbursement*) dari biaya transaksi yang memenuhi syarat akan dimasukkan sebagai pengakuan awal aset; dan
- imbalan lainnya dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan.

- *fees that are considered in determining that fair value of the new asset and fees represent reimbursement of eligible transaction costs are included in the initial measurement of the asset; and*
- *other fees are included in profit or loss as part of the gain or loss derecognition.*

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah (lanjutan)**

**o. Loans and sharia financing/receivables
(continued)**

Modifikasi pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Modification of loans (continued)

Jika modifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan, maka Bank terlebih dahulu menghitung kembali nilai tercatat bruto aset keuangan menggunakan suku bunga efektif awal aset tersebut dan mengakui selisih penyesuaian sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi di dalam laba rugi. Biaya atau imbalan yang terjadi dan imbalan modifikasi yang diterima disesuaikan ke nilai tercatat bruto dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan yang dimodifikasi.

If the modification of a financial asset measured at amortized cost does not result in derecognition of the financial asset, then the Bank first recalculates the gross carrying amount of the financial asset using the original effective interest rate of the asset and recognizes the resulting adjustment as modification gain or loss in profit or loss. Any costs or fees incurred and modification fees received are adjusted to the gross carrying amount of the modified financial asset and are amortized over the remaining term of the modified financial asset.

Jika modifikasi dilakukan karena alasan risiko kredit, maka keuntungan atau kerugian disajikan sebagai kerugian penurunan nilai. Selain karena alasan ini, keuntungan atau kerugian disajikan sebagai pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif.

If a modification is carried out because of credit-risk reason, then the gain or loss is presented together with impairment losses. In other cases, it is presented as interest income calculated using the effective interest method.

Dalam keadaan yang tidak biasa, setelah perubahan atau modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin terdapat bukti bahwa aset modifikasian memburuk pada pengakuan awal. Dengan demikian, aset keuangan tersebut diakui sebagai aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal.

In some unusual circumstances, after changes or modifications that result in de-recognition of the original financial asset, there may be evidence that the modified asset is credit-impaired at initial recognition. Accordingly, the financial asset should be recognized as an originated credit-impaired financial asset.

Perubahan atau modifikasi yang dilakukan karena resiko kredit, dapat dipertimbangkan sebagai indikasi aset keuangan yang berasal dari aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal. Sedangkan perubahan atau modifikasi yang dilakukan dengan dasar pertimbangan bisnis, mungkin tidak diakui sebagai aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal. Namun, penilaian ini perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan apakah pengakuan awal aset keuangan telah memburuk pada saat pengakuan awal.

Changes or modifications that were made on the basis of credit risk reason can be considered as an indication of originated credit-impaired financial assets. Meanwhile changes or modifications that were made on the basis of business' considerations, may not be recognized as originated credit-impaired financial assets. However, comprehensive valuation should be performed to determine whether initial recognition of financial assets has deteriorated at initial recognition.

p. Penyertaan saham

p. Investment in shares

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investment in shares with an ownership interest below 20% and have no significant influence is initially recognized at fair value and subsequently measured at fair value through profit or loss.

Dividen kas yang diterima dari penyertaan saham diakui sebagai pendapatan.

Cash dividend received from investment in shares is recognized as income.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

q. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Beban dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

r. Aset tetap

Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala dan apabila terdapat perubahan nilai wajar yang signifikan untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada "cadangan revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset tetap yang sama dibebankan terhadap "cadangan revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Tanah tidak disusutkan. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap selain tanah diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Prepayments

Prepayments are expenses which have been paid but not yet recognized as an expense in the related period. Prepayments are recognized as expenses in the profit or loss when it is amortized in accordance with the expected period of benefit.

r. Fixed assets

Land is presented at fair value based on valuations performed by certified external independent valuers which are registered with OJK. Valuations are performed on a regular basis and if there is significant change in fair value to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

The increases in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to the "reserve on revaluation of fixed assets" as part of other comprehensive income. The decreases that offset the previous increases are debited against "reserve on revaluation of fixed assets" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to the current year profit or loss.

Land is not depreciated. When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Fixed assets other than land are recognized at cost less accumulated depreciation.

Acquisition cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the assets.

Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at cost less accumulated depreciation.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Aset tetap (lanjutan)

r. Fixed assets (continued)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

The expected useful lives of fixed assets are as follows:

	Tahun/Years	
Gedung	20	Buildings
Golongan I:		Class I:
Kendaraan bermotor	4	Vehicles
Perlengkapan kantor	4 & 8	Office equipment
Golongan II:		Class II:
Kendaraan bermotor	3	Vehicles
Perlengkapan kantor	5 & 8	Office equipment
Leasehold improvement	sesuai masa sewa/according to lease period	Leasehold improvement

Kendaraan bermotor yang termasuk dalam golongan I adalah sepeda motor sedangkan kendaraan operasional dan kendaraan dinas untuk direktur atau komisaris termasuk dalam golongan II.

Motor vehicles classified in class I are motorcycles whilst operational vehicles and office vehicles for directors or commissioners are classified in class II.

Perlengkapan kantor yang termasuk dalam golongan I adalah mebel dan peralatan dari kayu dan rotan, mesin kantor seperti mesin tik, mesin fotokopi, komputer, laptop, alat komunikasi, alat dapur dan perlengkapan lain seperti CCTV. Sedangkan yang termasuk dalam golongan II adalah mebel dan peralatan dari logam seperti brankas, pendingin ruangan, dan generator listrik.

Office equipment classified as class I are furniture and office equipment made from wood, office machine such as typing machine, photocopy machine, computer, laptop, communication tools, kitchen set and other equipment such as CCTV. Whilst office equipment classified as class II are furniture and office equipment made from metal such as safes, air conditioning and electrical generator.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi tahun berjalan.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. Repairs and maintenance costs are charged to the current year profit or loss.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

When fixed assets are no longer in use or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are written off in the consolidated financial statements. Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognized in the current year profit or loss.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

r. Aset tetap (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi bangunan serta pemasangan peralatan kantor, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi sebesar jumlah yang dapat dipulihkan ketika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

s. Aset takberwujud dan goodwill

Goodwill

Goodwill dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Peninjauan atas penurunan nilai pada *goodwill* dilakukan setahun sekali atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai.

Piranti lunak

Piranti lunak memiliki masa manfaat yang terbatas dan diakui sebesar harga perolehan, selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi piranti lunak dan mempersiapkan piranti lunak tersebut siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Fixed assets (continued)

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of office equipment are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets accounts when the construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

The asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount when the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

s. Intangible assets and goodwill

Goodwill

Goodwill is carried at cost less accumulated impairment losses. Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment.

Software

Software have a finite useful life and recognized at acquisition cost, subsequently carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

The costs incurred to acquire software license and bring that software to use are capitalized.

Costs associated with maintaining software programs are recognized as expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group is recognized as intangible assets.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Aset takberwujud dan goodwill (lanjutan)

s. Intangible assets and goodwill (continued)

Piranti lunak (lanjutan)

Software (continued)

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Directly attributable costs that are capitalized as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Pengeluaran pengembangan lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognized as expense when incurred. Development costs previously recognized as expense are not recognized as asset in a subsequent period.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat piranti lunak tersebut, sejak tanggal piranti tersebut siap untuk dipakai. Estimasi masa manfaat dari piranti lunak adalah 4-8 tahun.

Amortization is recognized in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful life of the software, from the date it is ready for use. The estimated useful life of software is 4-8 years.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya atau dilepas ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Intangible assets shall be derecognized or disposed when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

t. Aset lain-lain

t. Other assets

Aset lain-lain sebagian besar terdiri dari jaminan kontrak, uang muka, transaksi ATM dan transfer, tagihan kredit lainnya, agunan yang diambil alih, persediaan keperluan kantor, properti terbengkalai dan tagihan kepada asuransi.

Other assets mainly consists of security deposits, advance payment, ATM transaction and transfer, other credit receivables, foreclosed collateral, office supplies, abandoned property and receivables from insurance company.

Grup mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi pada saat terjadinya.

The Group recognizes impairment losses of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At each reporting date, the Group evaluates the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. Reversal of impairment losses is recognized as gain in the profit or loss when incurred.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**u. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank-
bank lain**

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Grup berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk didalamnya adalah giro, tabungan, deposito berjangka, deposito *on call* dan simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari giro dan tabungan wadiah. Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh-dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Entitas Anak. Giro wadiah dicatat sebesar saldo titipan pemegang giro wadiah. Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaya') sukarela dari Entitas Anak.

Simpanan dari bank-bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, dalam bentuk *call money*, giro, *bank acceptance finance*, dan tabungan.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain.

Simpanan dari bank-bank lain disajikan sebesar jumlah liabilitas terhadap bank-bank lain.

v. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan terdiri dari utang obligasi.

Utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan utang obligasi, diakui sebagai beban yang ditangguhkan dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu utang obligasi tersebut dengan menggunakan metode bunga efektif.

**u. Deposits from customers and deposits from
other banks**

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Group based on fund deposits agreements. Included in these accounts are current accounts, saving deposits, time deposits, deposits on call and sharia deposits from customers.

Sharia deposits consist of wadiah demand deposits and saving deposits. Wadiah demand deposits are wadiah yadh-dhamanah demand deposits in which the funds owner will get a bonus based on the Subsidiary's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors. Wadiah saving deposits represent third party funds which can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of voluntary bonus ('Athaya') on the part of the Subsidiary.

Deposits from other banks represent liabilities to other domestic banks, in the form of call money, current accounts, bank acceptance finance, and saving deposits.

Deposits from customers and deposits from other banks are classified as financial liabilities measured at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks.

Deposits from other banks are stated at the amounts due to other banks.

v. Securities issued

Securities issued consist of bonds payable.

Bonds payable are stated at nominal value net of unamortized bond issuance cost. Costs incurred in connection with the bonds payable, are recognized as a deferred expense and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the bonds payable using the effective interest method.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

w. Pinjaman yang diterima

w. Borrowings

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman yang diterima diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Borrowings are initially recognized at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

x. Imbalan kerja karyawan

x. Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Short-term employee benefits are recognized when they are payable to the employees.

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari taksiran jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit-credit*.

The post-employment benefits liabilities are calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan pasti neto diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika manfaat suatu program diubah atau terjadi kurtailmen, perubahan manfaat yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

Gains or losses arising from actuarial remeasurements of the net defined benefit liability are recognized immediately in other comprehensive income. When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, liabilitas imbalan pasca-kerja untuk karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Entitas Anak dihitung secara internal dengan metode *historical stay rate*.

As of 31 December 2023 and 2022, Specific Time Employment Agreements (PKWT) employee post-employment benefit obligations of the Subsidiary are calculated internally using the historical stay rate method.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

x. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya berupa cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

y. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

z. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh Entitas Anak.

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Entitas Anak) dalam pengelolaan investasinya sesuai prinsip syariah dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Entitas Anak.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Entitas Anak. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Entitas Anak.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Entitas Anak tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Entitas Anak merugi kecuali kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

x. Employee benefits (continued)

Other long-term benefits

Other long-term benefits such as long service leave are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumption are recognized to the current year profit or loss.

y. Subordinated loans

Subordinated loans are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

z. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by Subsidiary.

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Subsidiary) in the management of their investments according to sharia principle with profit distributed based on the agreement. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving accounts and mudharabah time deposits.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (*on call*) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer's savings deposit balance at the Subsidiary.

Mudharabah time deposits represent investment which can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Subsidiary. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Subsidiary.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability, because the Subsidiary does not have any obligation to return the initial funds to the owners if the Subsidiary experiences losses, except for losses caused by the Subsidiary's management negligence or default. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

z. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

aa. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham biasa atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang, sebesar jumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak.

Saham tresuri

Ketika Bank membeli modal saham ekuitas (saham tresuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan kepada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank.

ab. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang dibayar, atau terutang atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Temporary syirkah funds (continued)

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

aa. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

Incremental costs directly attributable to the issuance of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Treasury shares

When the Bank purchases the equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Bank's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Bank's equity holders.

ab. Taxation

Income tax expense consists of current and deferred tax. Income tax expenses are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax expense is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

ab. Perpajakan (lanjutan)

ab. Taxation (continued)

Beban pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak, seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi, yang timbul dari periode berjalan yang diharapkan akan direalisasi pada masa mendatang, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carryforwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Aset pajak tangguhan merupakan saldo bersih atas manfaat pajak tangguhan yang timbul dan dipergunakan sampai dengan tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan yang tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

Deferred tax assets represent the net remaining balance of deferred tax benefits that have been originated and utilized through the reporting date. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when the probability of their realisation through future taxable profits improves.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will be available against which they can be used.

Grup telah menentukan bahwa bunga dan penalti sehubungan dengan pajak penghasilan, termasuk yang mungkin diterima dalam kaitannya dengan posisi pajak yang mengandung ketidakpastian, tidak memenuhi definisi pajak penghasilan, dan dengan demikian diperlakukan sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

The Group has determined that interest and penalties related to income taxes, including those that may materialize in connection with uncertain tax positions, do not meet the definition of income taxes, and therefore are accounted for in accordance with PSAK 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan atau banding itu diterima.

Amendments to tax obligations are recognized when an assessment is received, or if objection and or appeal is applied, when the results of the objection or the appeal are received.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

**ac. Pendapatan dan beban bunga dan
pendapatan syariah dan hak pihak ketiga
atas bagi hasil dana syirkah temporer**

**ac. Interest income and expense and sharia
income and third parties' shares on return of
temporary syirkah funds**

(i). Pendapatan dan beban bunga

(i). Interest income and expense

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi, dan beban bunga atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income on financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortized cost, and interest expense on financial liabilities held at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest method.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan sepanjang umur yang diperkirakan atas instrumen keuangan, pada nilai tercatat bruto dari aset keuangan atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Saat menghitung suku bunga efektif instrumen keuangan selain aset yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, Bank melakukan estimasi arus kas masa depan dengan mempertimbangkan seluruh perjanjian kontraktual atas instrumen keuangan tapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan estimasi arus kas masa depan termasuk kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan suku bunga efektif termasuk biaya transaksi dan imbalan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or liability and of allocating the interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate for financial instruments other than purchased or originated credit-impaired assets, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not expected credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including expected credit losses. The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)

ac. Pendapatan dan beban bunga dan
pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas
bagi hasil dana syirkah temporer (lanjutan)

(i). Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Suku bunga efektif aset atau liabilitas keuangan dihitung pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas keuangan tersebut. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diterapkan atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau atas biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan. Suku bunga efektif direvisi sebagai hasil dari perhitungan ulang estimasi arus kas dari instrumen dengan suku bunga mengambang secara berkala untuk merefleksikan perubahan suku bunga pasar. Untuk aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi mengalami penurunan nilai, maka perhitungan pendapatan bunga kembali menggunakan nilai tercatat bruto.

(ii). Pendapatan syariah

Pendapatan pengelolaan dana oleh Entitas Anak sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual beli-margin murabahah, pendapatan bagi hasil-pembiayaan musyarakah, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

ac. Interest income and expense and sharia
income and third parties' shares on return of
temporary syirkah funds (continued)

(i). Interest income and expense (continued)

The effective interest rate of a financial asset or financial liability is calculated on initial recognition of a financial asset or financial liability. In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. The effective interest rate is revised as a result of periodic re-estimation of cash flows of floating-rate instruments to reflect movements in market rates of interest. For financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income reverts to the gross carrying amount.

(ii). Sharia income

Income from fund management by Subsidiary as mudharib consist of income from sales and purchases-murabahah margin, income from profit sharing-musyarakah financing and other main operating income.

The revenue recognition of murabahah receivables, which do not have significant risk in relation with the ownership of inventory, are recognized in profit or loss using the effective rate of return method.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**ac. Pendapatan dan beban bunga dan
pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas
bagi hasil dana syirkah temporer** (lanjutan)

(ii). Pendapatan syariah (lanjutan)

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh nilai tercatat piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Entitas Anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Untuk pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang telah direstrukturisasi dengan *payment holiday* atau skema penundaan pembayaran cicilan, Bank hanya mengakui pendapatan margin apabila Bank cukup yakin bahwa pembayaran angsuran akan diterima sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah.

Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

(iii). Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Entitas Anak. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

**ac. Interest income and expense and sharia
income and third parties' shares on return of
temporary syirkah funds** (continued)

(ii). Sharia income (continued)

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate which exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivables to obtain the carrying amount of murabahah receivables. When calculating the effective rate of return, the Subsidiary estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivables, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provisions and other forms received by the parties in a contract which are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.

For the recognition of income on restructured murabahah receivables with payment holidays or scheme to postpone installment payments, the Bank will only recognise margin income if the Bank has a reasonable certainty that an installment payment will be received in accordance with the agreement with the customers.

Income from profit sharing - musyarakah financing is recognized during the period of profit sharing in accordance with the pre-determined ratio.

(iii). Third parties' shares on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Subsidiary's income derived from the management of their funds by the Subsidiary under mudharabah principles. Distributable income will be distributed from the cash received (cash basis).

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

ac. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (lanjutan)

ac. Interest income and expense and sharia income and third parties' shares on return of temporary syirkah funds (continued)

(iii). Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (lanjutan)

(iii). Third parties' shares on return of temporary syirkah funds (continued)

Pendapatan margin atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya (penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga) akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana dan Entitas Anak sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan margin yang tersedia tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah pemilik dana sebagai shahibul maal dan Entitas Anak sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Margin income on financing facilities and other earning assets (placements with Bank Indonesia, placements with other banks and investments in securities) are distributed to fund owners and the Subsidiary based on proportion of funds used in the financing and other earning assets. Likewise, the available margin income is then distributed to fund owners as shahibul maal and the Subsidiary as mudharib based on a pre-determined ratio (nisbah).

Pendapatan margin dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Entitas Anak, seluruhnya menjadi milik Entitas Anak, termasuk pendapatan dari transaksi Entitas Anak berbasis imbalan.

Margin income from financing facilities and other earning assets using the Subsidiary's funds, are entirely shared for the Subsidiary, including income from the Subsidiary's fee-based transactions.

ad. Pendapatan provisi dan komisi

ad. Fee and commission income

Pendapatan provisi dan komisi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aktivitas peminjaman diakui sebagai pengurang biaya pinjaman dan nilai tercatat atas pinjaman tersebut akan diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode bunga efektif.

Fees and commissions income directly attributable to lending activity are recognized as a deduction of lending cost and will be recognized as interest income by amortizing the carrying value of loan using effective interest method.

Pada umumnya pendapatan provisi dan komisi diakui menggunakan basis akrual pada saat jasa telah diberikan. Pendapatan provisi atas komitmen memberikan pinjaman yang kemungkinan besar akan dicairkan (bersama-sama dengan biaya transaksi lain yang terkait langsung) diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan.

Fees and commissions income are generally recognized on an accrual basis when the service has been provided. Loan commitment fees for loans that are likely to be drawn down are (together with related direct costs) recognized as an adjustment to the effective interest rate on the loan.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional lainnya.

Fees and commissions income which are not related to lending activities are recognized as revenue on the transaction date and classified under other operating income.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

ae. Laba per saham

Labanya bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Labanya bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Bank, yaitu opsi saham.

Ketika opsi dieksekusi, Bank menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham treasurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan agio saham.

af. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Grup yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Grup, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar.

ag. Transaksi sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

ae. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by Bank, which is stock option.

When the options are exercised, the Bank issues new shares or reissues its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share capital (nominal value) and share premium.

af. Operating segment

An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Group's other components, whose operating results are reviewed regularly by the operating decision makers to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the operating decision makers include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

ag. Lease transaction

The Group as a lessee

At inception of a contract, the Group determines if a contract is, or contains, a lease by considering whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for a consideration.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

ag. Transaksi sewa (lanjutan)

ag. Lease transaction (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as a lessee (continued)

Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian jika semua kondisi di bawah dipenuhi:

A contract conveys the right to control the use of an identified asset if all of the following conditions are met:

- kontrak tersebut melibatkan penggunaan secara substansial seluruh kapasitas dari aset identifikasian yang secara fisik berbeda (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap dapat diidentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset: yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan.

- *the contract involves the use of substantially all of the capacity of an identified asset that is physically distinct (as specified explicitly or implicitly in the contract). If the supplier has a substantive substitution right, then the asset cannot be considered as identifiable;*
- *the Group have the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and*
- *the Group have the right to direct the use of the asset: i.e. they have decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.*

Pada saat inepsi atau penilaian kembali sebuah kontrak yang berisi komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak tersebut kepada setiap komponen sewa atas dasar harga relatif yang berdiri sendiri.

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ag. Transaksi sewa (lanjutan)

ag. Lease transaction (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as a lessee (continued)

Setelah tanggal permulaan, aset hak guna diukur dengan model biaya. Aset hak guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the Group's incremental borrowing rate. Generally, the Group uses their incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

Lease payments included in the measurement of the lease liability consist of:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi, dikurangi insentif sewa yang belum diterima;
- pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Grup cukup pasti untuk melaksanakan opsi perpanjangan, dan denda untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Grup yakin tidak menghentikan lebih awal.

- fixed payments, including in-substance fixed payments, less lease incentives receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise, lease payments in an option renewal period if the Group is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Bank mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Bank changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension, or termination option.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

ag. Transaksi sewa (lanjutan)

ag. Lease transaction (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as a lessee (continued)

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Grup menyajikan aset hak guna dalam aset tetap.

The Group presents right-of-use assets in fixed assets.

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Nilai tercatat aset hak guna segera diturunkan menjadi sebesar jumlah yang dapat dipulihkan ketika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term. The right-of-use asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount when the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Modifikasi sewa

Lease modification

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;

- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ag. Transaksi sewa (lanjutan)

ag. Lease transaction (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as a lessee (continued)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Lease modification (continued)

- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian pada tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau seluruh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau seluruh sewa tersebut dalam laba rugi; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognizes any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease in profit or loss; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

ah. Pengukuran nilai wajar

ah. Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

When available, the Group measures the fair value in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ah. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

ah. Fair value measurement (continued)

Bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Grup menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguluhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

The best evidence of the fair value at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Group determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Grup mengukur aset dan liabilitas berdasarkan harga tengahnya.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Group measures assets and liabilities at its mid price.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Grup berdasarkan eksposur netonya, baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam kelompok.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Group on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities based on the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Key sources of estimation uncertainty

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan-catatan di bawah ini:

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following notes:

- Catatan 23 – pengukuran liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya: asumsi-asumsi aktuarial.

- *Note 23 – measurement of post-employment benefits liabilities and other long-term benefits: actuarial assumptions.*

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

- Allowance for impairment losses of financial assets

Bank

Bank

Grup melakukan peninjauan kembali atas aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan untuk melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat. Pertimbangan manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

The Group reviews their financial assets at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgement is applied in determining the level of allowance required.

Sesuai dengan PSAK 71, Bank mengestimasi kerugian kredit ekspektasian ("KKE") atas pinjaman yang diberikan. Estimasi KKE melibatkan penggunaan model dan asumsi yang merupakan sumber utama ketidakpastian dalam estimasi.

In accordance with PSAK 71, the Bank estimated the expected credit losses ("ECL") on loans. The ECL estimation involves use of models and assumptions which are the key sources of estimation uncertainty.

Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait dan korelasi gagal bayar antarpihak. Bank menggunakan model yang kompleks yaitu menggunakan matriks *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD), dan variabel makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

The assessment of credit risk of an asset portfolio entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) and *Exposure at Default* (EAD), and macroeconomic variables for forward looking perspective, which are discounted using the effective interest rate, as described as follows:

- PD merupakan kemungkinan pada suatu waktu (*point in time*) dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal pelaporan (Tahap 1) atau sepanjang umur aset (Tahap 2) dan memperhitungkan dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki dampak terhadap risiko kredit. PD diestimasi pada suatu waktu yang berarti PD akan berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

- PD represents the probability at a point in time that debtor will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the asset (Stage 2) and incorporating the impact of forward looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bank (lanjutan)

- LGD merupakan kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang gagal bayar dengan memperhitungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan, yaitu perbedaan antara arus kas kontraktual yang seharusnya diterima dengan arus kas yang diharapkan Bank untuk diterima. Bank mengestimasi LGD berdasarkan data historis tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pinjaman yang diberikan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan yang relevan.
- EAD merupakan perkiraan nilai eksposur pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan perubahan eksposur yang diharapkan selama masa eksposur. EAD memperhitungkan dampak penarikan fasilitas kredit (*committed*) yang dilakukan, pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dimuka, serta dampak dari asumsi ekonomi di masa depan yang relevan, yang dipilih berdasarkan pengumpulan data makroekonomi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, namun tidak terbatas pada, regulator, pemerintah serta organisasi penelitian independen.

Variabel makroekonomi yang digunakan terdiri dari tingkat pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB), tingkat inflasi, nilai valuta asing, tingkat bunga antarbank, dan tingkat pengangguran. Untuk perhitungan KKE pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank menggunakan variabel makroekonomi sebagai berikut:

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Bank (continued)

- LGD represents the loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of forward looking economic assumptions where relevant, which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the history of recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the loans, taking into account forward looking economic assumptions where relevant.
- EAD represents the expected exposure at the time of default, taking into account the expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principals and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant, which are chosen based on the collation of macroeconomics data obtained from various sources such as, but not limited to, regulators, government as well as independent research organisation.

The macroeconomic variables used, among others, consisted of gross domestic product (GDP) growth rate, inflation rate, foreign exchange rates, interbank rate, and unemployment rate. In the calculation of ECL as of 31 December 2023 and 2022, the Bank used macroeconomic variables as follows:

31 Desember/December 2023

Skenario/ Scenario	Tingkat pertumbuhan PDB per tahun/ GDP growth rate per annum	Tingkat inflasi per tahun/ Inflation rate per annum	Tingkat bunga antarbank per tahun/ Interbank rate per annum	Nilai tukar Rupiah per 1 USD/ Exchange rate of Rupiah per 1 USD	Tingkat pengangguran/ Unemployment rate
Terbaik/Best	5.5%	3.1%	4.5%	15,344	4.9%
Dasar/Base	5.2%	3.3%	4.8%	16,152	5.2%
Terburuk/Worst	4.9%	3.5%	5.0%	16,960	5.5%

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

31 Desember/December 2022

Skenario/ Scenario	Tingkat pertumbuhan PDB per tahun/ GDP growth rate per annum	Tingkat inflasi per tahun/ Inflation rate per annum	Tingkat bunga antarbank per tahun/ Interbank rate per annum	Nilai tukar Rupiah per 1 USD/ Exchange rate of Rupiah per 1 USD	Tingkat pengangguran/ Unemployment rate
Terbaik/Best	6.3%	2.9%	4.0%	14,986	5.3%
Dasar/Base	6.0%	3.0%	4.3%	15,775	5.6%
Terburuk/Worst	5.7%	3.2%	4.5%	16,564	5.9%

Dalam menentukan probabilitas tertimbang dari skenario yang akan terjadi di masa depan, Bank telah melakukan analisis berdasarkan informasi historis PDB yang meliputi insiden besar yang terjadi pada rentang waktu 42 tahun terakhir.

In determining the probability weighted of each scenario that will occur in the future, the Bank has conducted an analysis based on historical GDP information which includes the major incident that happened in the last 42 years.

Bank menerapkan tiga skenario makroekonomi berikut untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi dalam mengestimasi KKE:

The Bank applied the following three macroeconomic scenarios to reflect an unbiased probability-weighted range of possible future outcomes in estimating ECL:

- Skenario Dasar: Skenario ini mencerminkan bahwa kondisi makroekonomi saat ini terus berlanjut; dan
- Skenario Terbaik dan Terburuk: Skenario ini ditetapkan relatif terhadap skenario dasar; mencerminkan kondisi makroekonomi terbaik dan terburuk berdasarkan kombinasi pendekatan statistik dan penilaian dari *subject matter expert* berdasarkan kondisi ekonomi saat ini.

- *Base scenario: This scenario reflects that current macroeconomic condition continues to prevail; and*
- *Best and Worst scenarios: These scenarios are set relative to the base scenario; reflecting best and worst case macroeconomic conditions based on combination of statistical approach and subject matter expert's assessment from current economic conditions.*

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bank (lanjutan)

Pemodelan dilakukan dengan mengelompokkan portofolio kredit ke dalam 8 kategori untuk pinjaman ritel dan 1 kategori untuk pinjaman korporasi.

Asumsi yang mendasari pemodelan akan dipantau dan ditinjau setiap tahun. Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi yang dibuat selama periode pelaporan.

Khusus untuk pinjaman korporasi dan mitra bisnis tertentu yang material, ketika pinjaman yang diberikan mengalami penurunan nilai, cadangan kerugian kredit dihitung secara individu. Dalam penilaian individu, kondisi spesifik debitur dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Evaluasi penilaian individu atas arus kas yang diharapkan akan diterima ditentukan berdasarkan probabilitas tertimbang beberapa skenario.

Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan mengenai situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan yang ada. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan keadaan dan strategi penyelesaian masing-masing. Estimasi arus kas ekspektasian dari skenario-skenario estimasi disetujui secara independen oleh *Business Risk* masing-masing segmen bisnis.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty (continued)

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Bank (continued)

Modelling is done by segmenting the credit portfolio into 8 categories for retail loans and 1 category for corporate loans.

The assumptions underlying modelling is monitored and reviewed on an annual basis. There have been no significant changes on estimation techniques made during the reporting period.

Specifically for corporate and certain material business banking loans, when the loans have been impaired, the allowance for credit losses is calculated individually. In individual assessment, the specific debtors' conditions are evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. Evaluation over the individual assessment is determined based on probability weighted of multiple scenarios.

Probability-weighted estimation is performed by taking into account weighting for each scenario and uses minimum of 2 (two) scenarios to reflect at least normal scenario and worst scenario. In estimating these cash flows, management makes judgments about the debtors' financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits and the workout strategy. The estimated expected cash flows from estimation scenarios are independently approved by the Business Risk from each business segment.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Entitas Anak

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah Entitas Anak. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan penurunan nilai kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas pembiayaan, karakteristik produk dan apakah pembiayaan tersebut telah direstrukturisasi.

Dalam mengestimasi cadangan yang diperlukan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan yang dihitung ini tergantung pada seberapa tepat estimasi dan asumsi pada model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Basis evaluasi atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan piutang murabahah dijelaskan pada Catatan 2i.

- Penentuan nilai wajar

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Grup harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 2ai. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang obyektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga, dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tersebut.

Kebijakan akuntansi pengukuran nilai wajar Grup dibahas pada Catatan 2ai.

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup

- Nilai wajar atas instrumen keuangan

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengukuran nilai wajar dibahas di Catatan 2ai.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty (continued)

- Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Subsidiary

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of the Subsidiary's murabahah receivables. In assessing the need for collective impairment allowances, management considers factors such as financing quality, characteristic of products and whether the financing has been restructured.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the calculated allowances depends on how well the estimates and assumptions on the model and parameters used in determining collective allowances.

Basis of evaluation of impairment for financial assets and murabahah receivables is described in Note 2i.

- Determining fair values

The determination of fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Group has to use valuation techniques as described in Note 2ai. For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and therefore, it requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The Group's accounting policy on fair value measurement is discussed in Note 2ai.

Critical accounting judgments in applying the Group's accounting policies

- Fair value of financial instruments

The Group's accounting policy on fair value measurements is discussed in Note 2ai.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**Pertimbangan akuntansi yang penting dalam
menerapkan kebijakan akuntansi Grup (lanjutan)**

- Nilai wajar atas instrumen keuangan (lanjutan)

Informasi mengenai penentuan nilai wajar dari instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 41.

- Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan serta efek-efek syariah

Kebijakan akuntansi Grup memberikan pilihan untuk mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan ke dalam berbagai kategori pada saat pengakuan awal berdasarkan kondisi tertentu yang membutuhkan pertimbangan manajemen.

Dalam menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan, Bank telah menetapkan bahwa aset dan liabilitas keuangan telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2h.

Dalam mengklasifikasikan investasi pada efek-efek syariah sebagai "diukur pada biaya perolehan" dan "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain", Entitas Anak telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2l.

- Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**Critical accounting judgments in applying the
Group's accounting policies (continued)**

- Fair value of financial instruments (continued)

Information about the determination of fair value of financial instruments is disclosed in Note 41.

- Financial assets and liabilities as well as sharia securities classification

The Group's accounting policies provides choices to classify financial assets and liabilities into different categories at initial recognition based on certain circumstances requiring management's judgement.

In determining the classification of financial assets and liabilities, the Bank has determined that financial assets and liabilities have already met the requirements of such classification as set out in Note 2h.

In classifying investment in sharia securities as "measured at acquisition cost" and "measured at fair value through other comprehensive income", the Subsidiary has determined that the investment in sharia securities have already met the requirements of such classification as set out in Note 2l.

- Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

**Pertimbangan akuntansi yang penting dalam
menerapkan kebijakan akuntansi Grup (lanjutan)**

- Sewa (lanjutan)

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama sebagai berikut; risiko kredit Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya dimasukkan dalam jangka waktu sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**Critical accounting judgments in applying the
Group's accounting policies (continued)**

- Leases (continued)

There are several factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need quantification in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors; the Group's credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

4. KAS

	31 Desember/December	
	2023	2022
Rupiah	1,369,417	1,707,213
Dolar Amerika Serikat	54,843	37,029
Yen Jepang	3,821	3,219
Dolar Singapura	602	-
	<u>1,428,683</u>	<u>1,747,461</u>

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 62.968 dan Rp 74.196.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kas telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga (disajikan sebesar nilai pertanggungan):

	31 Desember/December	
	2023	2022
PT Asuransi MSIG Indonesia	386,750	743,555
PT Zurich General Takaful Indonesia	76,250	76,250
Jumlah	<u>463,000</u>	<u>819,805</u>

4. CASH

Rupiah
United States Dollar
Japanese Yen
Singapore Dollar

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) as of 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 62,968 and Rp 74,196, respectively.

As of 31 December 2023 and 2022, cash has been insured by the third-party insurance companies (presented at sum insured):

PT Asuransi MSIG Indonesia
PT Zurich General Takaful
Indonesia
Total

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS (lanjutan)

Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tersebut.

4. CASH (continued)

The Group believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the assets.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah	6,963,876	7,710,064	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2,312,722	2,505,286	United States Dollar
	9,276,598	10,215,350	

Termasuk dalam saldo giro pada Bank Indonesia adalah giro berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah masing-masing sebesar Rp 663.443 dan Rp 694.427 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Included in the balance of current accounts with Bank Indonesia are current accounts based on sharia principles under wadiah contract amounting to Rp 663,443 and Rp 694,427 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2023 and 2022, the statutory reserves were as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
<u>Bank</u>			<u>Bank</u>
Rupiah			Rupiah
- GWM (Bank Konvensional)	8.30%	8.20%	Statutory Reserves (Conventional Bank) -
- GWM Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM")	9.49%	10.91%	Statutory Reserve Macroprudential - Liquidity Buffer ("PLM")
- GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM")*	-	-	Statutory Reserve Macroprudential - Intermediation Ratio ("RIM")*
Mata uang asing			Foreign currencies
- GWM mata uang asing	4.02%	4.02%	Foreign currencies reserve -
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiary</u>
Rupiah			Rupiah
- GWM Total (Bank Syariah)	5.54%	5.77%	Total Statutory Reserves (Sharia Bank) -

*) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio RIM Bank berada di atas batas yang ditentukan. Walaupun demikian, Bank tidak dikenakan GWM RIM dikarenakan rasio KPMM Bank berada di atas 14%.

*) As of 31 December 2023 and 2022, the Bank's RIM ratio is above the specified limit. Nevertheless the Bank is not subject to the Statutory Reserves RIM as the Bank's CAR is above 14%.

Grup memenuhi ketentuan BI yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Group fulfilled BI's regulations regarding Statutory Reserve Requirements as of 31 December 2023 and 2022.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK-BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah	117,727	92,222	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	446,607	1,453,587	United States Dollar
Yen Jepang	153,105	390,933	Japanese Yen
Euro Eropa	62,471	89,866	European Euro
Dolar Australia	54,675	38,734	Australian Dollar
Dolar Singapura	52,601	2,234	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	42,308	35,593	British Poundsterling
Baht Thailand	18,448	84,304	Thailand Baht
Mata uang asing lainnya	14,445	2,088	Other foreign currencies
	<u>844,660</u>	<u>2,097,339</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)	Allowance for impairment losses
	<u>962,229</u>	<u>2,189,146</u>	

b. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan

b. By relationship with counterparties

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	117,727	92,222	Rupiah
Mata uang asing	382,599	1,457,632	Foreign currencies
	<u>500,326</u>	<u>1,549,854</u>	
Pihak berelasi			Related party
Mata uang asing	462,061	639,707	Foreign currencies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)	Allowance for impairment losses
	<u>962,229</u>	<u>2,189,146</u>	

c. Berdasarkan pihak lawan

c. By counterparties

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Wells Fargo Bank N.A., New York	277,571	1,333,299	Wells Fargo Bank N.A., New York
PT Bank Central Asia Tbk	119,367	96,905	PT Bank Central Asia Tbk
National Australia Bank, Singapura	54,675	38,734	National Australia Bank, Singapore
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24,109	34,899	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13,395	5,645	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Citibank N.A., New York	8,091	37,953	Citibank N.A., New York
Lain-lain	3,118	2,419	Others
	<u>500,326</u>	<u>1,549,854</u>	
Pihak berelasi			Related party
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	462,061	639,707	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)	Allowance for impairment losses
	<u>962,229</u>	<u>2,189,146</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK-BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(continued)

c. Berdasarkan pihak lawan (lanjutan)

c. By counterparties (continued)

Giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas OJK. Tidak terdapat saldo giro pada bank-bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

As of 31 December 2023 and 2022, current accounts with other banks were classified as current based on OJK collectibility. There were no current accounts with other banks which were blocked or used as collateral as of those dates.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas giro pada bank-bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average interest rates per annum of current accounts with other banks for year ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah	0.63%	1.78%	Rupiah
Mata uang asing	0.53%	0.12%	Foreign currencies

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses was as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Saldo awal	(415)	(460)	Beginning balance
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	256	44	Reversal during the year (Note 34)
Lainnya	1	1	Others
Saldo akhir	<u>(158)</u>	<u>(415)</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai atas giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that the allowance for impairment losses was adequate to cover impairment losses for current accounts with other banks as of 31 December 2023 and 2022.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain ditempatkan pada pihak ketiga.

As of 31 December 2023 and 2022, all placements with Bank Indonesia and other banks were placed at third parties.

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah	3,064,603	11,307,098	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	5,897,051	10,578,116	United States Dollar
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	Allowance for impairment losses
	<u>8,964,278</u>	<u>21,887,894</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 8.961.654 dan Rp 21.885.214.

As of 31 December 2023 and 2022, total placements with Bank Indonesia and other banks that were classified as cash equivalents amounted to Rp 8,961,654 and Rp 21,885,214, respectively.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan jenis

b. By type

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Deposito berjangka	6,135,051	21,111,655	<i>Time deposits</i>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI"), bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	2,826,603	298,965	<i>Bank Indonesia's Deposit Facilities ("FASBI"), net of unamortized discount</i>
Call money	-	474,594	<i>Call money</i>
	<u>8,961,654</u>	<u>21,885,214</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	<i>Accrued interest income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u><u>8,964,278</u></u>	<u><u>21,887,894</u></u>	

c. Berdasarkan pihak lawan

c. By counterparties

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Deposito berjangka:			<i>Time deposits:</i>
Bank Indonesia	5,897,051	20,881,155	<i>Bank Indonesia</i>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	180,500	186,000	<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>
PT Bank Aceh Syariah	50,000	-	<i>PT Bank Aceh Syariah</i>
PT Bank Mega Syariah	7,500	44,500	<i>PT Bank Mega Syariah</i>
	<u>6,135,051</u>	<u>21,111,655</u>	
Penempatan lain:			<i>Other placements:</i>
Bank Indonesia - bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	2,826,603	298,965	<i>Bank Indonesia - net of unamortized discount</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	250,000	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Mega Tbk	-	155,675	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	-	38,919	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	30,000	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>
	<u>8,961,654</u>	<u>21,885,214</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	<i>Accrued interest income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u><u>8,964,278</u></u>	<u><u>21,887,894</u></u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Hingga 1 bulan	8,723,654	21,795,214	<i>Up to 1 month</i>
Lebih dari 1 - 3 bulan	238,000	90,000	<i>More than 1 - 3 months</i>
	<u>8,961,654</u>	<u>21,885,214</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	<i>Accrued interest income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>8,964,278</u>	<u>21,887,894</u>	

e. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

e. By remaining period to maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

f. Tingkat suku bunga

f. Interest rate

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average interest rates per annum of placements with Bank Indonesia and other banks for the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah	5.35%	3.20%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	4.87%	2.53%	<i>Foreign currencies</i>

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses was as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Saldo awal	(171)	(206)	<i>Beginning balance</i>
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	167	42	<i>Reversal during the year (Note 34)</i>
Lainnya	4	(7)	<i>Others</i>
	<u> </u>	<u> </u>	
Saldo akhir	<u>-</u>	<u>(171)</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2022.

Management believes that no allowance for impairment losses was needed as of 31 December 2023 and allowance for impairment losses was adequate to cover impairment losses for placement with Bank Indonesia and other banks as of 31 December 2022.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK

8. SECURITIES

a. Berdasarkan jenis mata uang dan penerbit

a. By currency and issuer

31 Desember/ December 2023			
Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ <i>Unrealized gains (losses)</i>	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ <i>Unamortized premium (discount)</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>
Rupiah			
<u>Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Measured at fair value through profit or loss</i></u>			
Obligasi pemerintah/ <i>Government bonds</i>	121,755	1,181	-
	121,755	1,181	122,936
<u>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Measured at fair value through other comprehensive income</i></u>			
Obligasi pemerintah/ <i>Government bonds</i>	7,292,834	3,595	33,663
Reksa dana syariah/ <i>Sharia mutual funds</i>	205,000	183	-
	7,497,834	3,778	33,663
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Measured at amortized cost</i></u>			
Wesel ekspor/ <i>Export bills</i>	137,352	-	(1,991)
	137,352	-	(1,991)
<u>Diukur pada biaya perolehan/ <i>Measured at acquisition cost</i></u>			
Sukuk Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia sukuk</i>	3,550,643	-	-
Surat Berharga Syariah Negara/ <i>Sovereign Sharia Securities</i>	3,905,633	-	1,551
Reksa dana syariah/ <i>Sharia mutual funds</i>	250,000	-	-
Sukuk korporasi/ <i>Corporate sukuk</i>	28,000	-	170
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)/ <i>Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)</i>	550,000	-	-
	8,284,276	-	1,721
	16,041,217	4,959	33,393
Mata uang asing/<i>Foreign currency</i>			
<u>Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Measured at fair value through profit or loss</i></u>			
Obligasi pemerintah/ <i>Government bonds</i>	8,345	104	-
	8,345	104	8,449
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Measured at amortized cost</i></u>			
Wesel ekspor/ <i>Export bills</i>	957,722	-	(7,239)
	966,067	104	(7,239)
Jumlah/ <i>Total</i>			17,038,501
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima/ <i>Accrued interest/margin income</i>			225,855
Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>			(799)
Jumlah/ <i>Total</i>			17,263,557

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan penerbit (lanjutan)

a. By currency and issuer (continued)

31 Desember/December 2022				
	Nilai nominal/ Nominal value	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gains (losses)	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah				
<u>Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Measured at fair value through profit or loss</u>				
Obligasi pemerintah/ <i>Government bonds</i>	40,367	228	(483)	40,112
	<u>40,367</u>	<u>228</u>	<u>(483)</u>	<u>40,112</u>
<u>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Measured at fair value through other comprehensive income</u>				
Obligasi pemerintah/ <i>Government bonds</i>	9,070,522	(9,936)	126,792	9,187,378
Reksa dana syariah/ <i>Sharia mutual funds</i>	205,000	81	-	205,081
	<u>9,275,522</u>	<u>(9,855)</u>	<u>126,792</u>	<u>9,392,459</u>
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Measured at amortized cost</u>				
Wesel ekspor/ <i>Export bills</i>	849,454	-	(232)	849,222
	<u>849,454</u>	<u>-</u>	<u>(232)</u>	<u>849,222</u>
<u>Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost</u>				
Surat Berharga Syariah Negara/ <i>Sovereign Sharia Securities</i>	3,413,975	-	27,353	3,441,328
Sukuk Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia sukuk</i>	3,306,884	-	-	3,306,884
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)/ <i>Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)</i>	323,000	-	-	323,000
Reksa dana syariah/ <i>Sharia mutual funds</i>	150,000	-	-	150,000
Sukuk korporasi/ <i>Corporate sukuk</i>	107,000	-	1,545	108,545
	<u>7,300,859</u>	<u>-</u>	<u>28,898</u>	<u>7,329,757</u>
	<u>17,466,202</u>	<u>(9,627)</u>	<u>154,975</u>	<u>17,611,550</u>
Mata uang asing/<i>Foreign currency</i>				
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Measured at amortized cost</u>				
Wesel ekspor/ <i>Export bills</i>	1,232,035	-	(7,708)	1,224,327
	<u>1,232,035</u>	<u>-</u>	<u>(7,708)</u>	<u>1,224,327</u>
Jumlah/ <i>Total</i>				18,835,877
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima/ <i>Accrued interest/margin income</i>				214,812
Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>				(999)
Jumlah/ <i>Total</i>				<u>19,049,690</u>

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan penerbit (lanjutan)

Perubahan atas keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Saldo awal, sebelum pajak penghasilan (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi selama tahun berjalan - bersih	(9,855)	151,144
Jumlah sebelum pajak penghasilan	13,633	(160,999)
Efek pajak penghasilan (Catatan 13f)	3,778	(9,855)
Kepentingan non-pengendali	(830)	2,169
Saldo akhir, bersih	2,948	(7,686)
	(42)	(18)
Saldo akhir, bersih	2,906	(7,704)

b. Berdasarkan akad

Termasuk di dalam efek-efek adalah efek-efek dengan akad syariah:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Ijarah	3,907,184	3,441,328
Musarakah muntahiyah bittamlik	3,550,643	3,306,884
Mudharabah	578,169	431,545
Wakalah	455,184	355,081
	8,491,180	7,534,838
Pendapatan yang masih akan diterima	75,512	64,941
Saldo akhir, bersih	8,566,692	7,599,779

c. Berdasarkan hubungan lawan

	31 Desember/December	
	2023	2022
Pihak ketiga	17,038,501	18,650,367
Pihak berelasi	-	185,510
	17,038,501	18,835,877
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	225,855	214,812
Cadangan kerugian penurunan nilai	(799)	(999)
Saldo akhir, bersih	17,263,557	19,049,690

8. SECURITIES (continued)

a. By currency and issuer (continued)

The movement of unrealized gains from changes in fair value of securities measured at fair value through other comprehensive income during the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

31 Desember/December	
Beginning balance, before income tax	151,144
Unrealized (losses) gains during the year - net	(160,999)
Total before income tax	(9,855)
Income tax effect (Note 13f)	2,169
Non-controlling interest	(18)
Ending balance, net	(7,704)

b. By contract

Included in securities are securities under sharia contracts:

31 Desember/December	
Ijarah	3,441,328
Musarakah muntahiyah bittamlik	3,306,884
Mudharabah	431,545
Wakalah	355,081
Accrued income	64,941
Saldo akhir, bersih	7,599,779

c. By relationship

31 Desember/December	
Third parties	18,650,367
Related parties	185,510
Accrued interest/margin income	214,812
Allowance for impairment losses	(999)
Saldo akhir, bersih	19,049,690

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Sampai dengan 1 bulan	2,550,000	3,056,827	<i>Up to 1 month</i>
Lebih dari 1 - 3 bulan	293,770	283,340	<i>More than 1 - 3 months</i>
Lebih dari 3 - 6 bulan	1,400,295	2,568,347	<i>More than 3 - 6 months</i>
Lebih dari 6 - 9 bulan	532,591	-	<i>More than 6 - 9 months</i>
Lebih dari 9 - 12 bulan	474,881	-	<i>More than 9 - 12 months</i>
Lebih dari 12 bulan	11,786,964	12,927,363	<i>More than 12 months</i>
	17,038,501	18,835,877	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	225,855	214,812	<i>Accrued interest/margin income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(799)	(999)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	17,263,557	19,049,690	

e. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

e. By remaining period of maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

f. Tingkat suku bunga/margin rata-rata per tahun

f. Average interest rate/margin per annum

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Obligasi pemerintah	5.34%	4.51%	<i>Government bonds</i>
Surat Berharga Syariah Negara	5.53%	5.14%	<i>Sovereign Sharia Securities</i>
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	6.07%	4.03%	<i>Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)</i>
Reksa dana syariah	5.44%	5.22%	<i>Sharia mutual funds</i>
Sukuk korporasi	7.22%	6.83%	<i>Corporate sukuk</i>
Sukuk Bank Indonesia	6.05%	3.77%	<i>Bank Indonesia sukuk</i>

g. Berdasarkan peringkat

g. By rating

Peringkat penerbit sukuk korporasi adalah sebagai berikut:

Rating of issuers of corporate sukuk was as follows:

	31 Desember/December 2023		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying amount
PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Usaha Syariah	Pefindo	id AAA	18,169
PT BPD Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah	Fitch	A idn	10,000
	31 Desember/December 2022		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying amount
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	id AA	80,428
PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Usaha Syariah	Pefindo	id AAA	18,117
PT BPD Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah	Fitch	A idn	10,000

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat atas seluruh efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah BBB berdasarkan pemeringkat *Fitch Ratings* Indonesia.

As of 31 December 2023 and 2022, the rating of all securities issued by Republic of Indonesia was BBB based on Fitch Ratings Indonesia agency.

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

h. Cadangan kerugian penurunan nilai

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai atas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Saldo awal	(999)	(483)
Pemulihan/(Penyisihan) selama tahun berjalan (Catatan 34)	365	(481)
Lainnya	(165)	(35)
Saldo akhir	<u>(799)</u>	<u>(999)</u>

i. Informasi penting lainnya sehubungan dengan efek-efek

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank tidak melakukan penjualan atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, sehingga tidak ada pemindahan keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah efek-efek yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 2.843.668 dan Rp 3.340.167.

8. SECURITIES (continued)

h. Allowance for impairment losses

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses for securities as of 31 December 2023 and 2022.

The movement of the allowance for impairment losses for securities was as follows:

31 Desember/December		
2023	2022	
(999)	(483)	Beginning balance
365	(481)	Recovery/(Provision) during the year (Note 34)
(165)	(35)	Others
<u>(799)</u>	<u>(999)</u>	Ending balance

i. Other significant information relating to securities

During the year ended 31 December 2023 and 2022, the Bank did not sell securities measured at fair value through other comprehensive income, so there were no gains or losses transferred from equity to profit or loss.

As of 31 December 2023 and 2022, total securities that were classified as cash equivalents amounted to Rp 2,843,668 and Rp 3,340,167, respectively.

9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

a. Berdasarkan jenis dan hubungan

Instrumen/Instruments	31 Desember/December 2023				
	Nilai kontrak/nominal/ Contract/notional amount	Nilai wajar/Fair value			
		Tagihan derivatif/ Derivative receivables		Liabilitas derivatif/ Derivative payables	
		Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties
Kontrak tunai mata uang asing/Foreign currency spot	2,249,277	94	1,574	78	3,157
Kontrak berjangka mata uang asing/Foreign currency forward	2,941,835	17,783	24,926	169	5,892
Swap mata uang asing/Foreign currency swap	23,756,959	6,691	100,966	28,361	137,311
Cross currency swap	29,796,948	54,603	509,458	28,677	464,447
Swap suku bunga/Interest rate swap	9,741,599	417,054	-	-	404,012
	<u>68,486,618</u>	<u>496,225</u>	<u>636,924</u>	<u>57,285</u>	<u>1,014,819</u>

9. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

a. By type and relationship

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

9. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

a. Berdasarkan jenis dan hubungan (lanjutan)

a. By type and relationship (continued)

Instrumen/ <i>Instruments</i>	31 Desember/December 2022				
	Nilai kontrak/nosional/ <i>Contract/notional amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>			
		Tagihan derivatif/ <i>Derivative receivables</i>		Liabilitas derivatif/ <i>Derivative payables</i>	
		Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>
Kontrak tunai mata uang asing/ <i>Foreign currency spot</i>	1,728,020	522	1,171	-	4,500
Kontrak berjangka mata uang asing/ <i>Foreign currency forward</i>	1,982,247	778	19,821	22,594	11,169
Swap mata uang asing/ <i>Foreign currency swap</i>	7,947,185	26,897	84,077	1,103	15,791
Cross currency swap	25,881,208	25,776	984,782	100,394	746,883
Swap suku bunga/ <i>Interest rate swap</i>	13,837,808	561,187	41,813	-	545,302
	<u>51,376,468</u>	<u>615,160</u>	<u>1,131,664</u>	<u>124,091</u>	<u>1,323,645</u>

Bank menyediakan produk derivatif untuk nasabahnya seperti kontrak pembelian atau penjualan berjangka mata uang asing, perjanjian swap mata uang asing dan perjanjian *swap/cap* tingkat suku bunga yang memungkinkan nasabahnya untuk memindahkan, memodifikasi atau mengurangi risiko atas kurs nilai tukar dan/atau risiko tingkat suku bunga. Sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, Bank melindungi sebagian besar transaksi derivatif dengan nasabahnya dengan membuat transaksi derivatif timbal balik dengan jumlah dan waktu jatuh tempo yang sama dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan bank lain. Bank juga menggunakan instrumen derivatif sebagai sarana sehubungan dengan kegiatan manajemen risiko. Derivatif digunakan oleh Bank terutama untuk mengatasi risiko kurs nilai tukar atas aset dan liabilitas dalam mata uang asing, dan untuk mengatasi risiko tingkat suku bunga yang berhubungan dengan aset dan liabilitas tertentu di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Bank provides derivative products to its customers such as forward exchange contracts, cross-currency swap agreements and interest rate swap/cap agreements to enable its customers to transfer, modify or reduce their foreign exchange and/or interest rate risks. As part of its risk management policy, the Bank covers most of these derivative contracts with customers with back-to-back derivative contracts with the same notional amount and maturity with its foreign affiliates and other banks. Also, the Bank uses derivative instruments as an end-user in connection with its risk management activities. Derivatives are used by the Bank mainly to manage foreign exchange risk on its foreign currency denominated assets and liabilities and to manage interest rate risk relating to specific groups of assets and liabilities in the consolidated statement of financial position.

b. Berdasarkan kolektibilitas

b. By collectibility

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Lancar	1,130,701	1,740,508	Current Special Mention
Dalam Perhatian Khusus	2,448	6,316	
	<u>1,133,149</u>	<u>1,746,824</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

9. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES
(continued)

c. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

c. By remaining period to maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

10. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES

Tagihan akseptasi

Acceptance receivables

Semua tagihan akseptasi adalah transaksi dengan pihak ketiga.

All acceptance receivables transactions were with third parties.

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah	1,783,724	1,898,383	Rupiah
Mata uang asing	1,506,033	1,171,471	Foreign currencies
	<u>3,289,757</u>	<u>3,069,854</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,637)	(4,495)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>3,281,120</u>	<u>3,065,359</u>	

b. Berdasarkan jangka waktu

b. By time period

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
Hingga 1 bulan	1,707	6,619	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	27,150	24,509	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	1,754,867	1,843,668	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 bulan	-	23,587	More than 6 months
	<u>1,783,724</u>	<u>1,898,383</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Hingga 1 bulan	-	3,411	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	82,388	131,357	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	685,208	907,601	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 bulan	738,437	129,102	More than 6 months
	<u>1,506,033</u>	<u>1,171,471</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,637)	(4,495)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>3,281,120</u>	<u>3,065,359</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI
(lanjutan)

10. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

c. Berdasarkan kolektabilitas

c. By collectability

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Lancar	3,289,757	3,069,854	Current
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,637)	(4,495)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>3,281,120</u>	<u>3,065,359</u>	

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

d. Allowance for impairment losses

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses for acceptance receivables was as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Saldo awal (Penyisihan)/Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	(4,495)	(5,633)	Beginning balance (Provision)/Recovery during the year (Note 34)
Lainnya	(4,217) 75	1,576 (438)	Others
Saldo akhir	<u>(8,637)</u>	<u>(4,495)</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on acceptance receivables as of 31 December 2023 and 2022.

Liabilitas akseptasi

Acceptance payables

a. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan dan mata uang

a. By relationship with counterparties and currency

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
- Pihak ketiga	1,783,724	1,873,299	Third parties -
Mata uang asing			Foreign currencies
- Pihak ketiga	376,526	284,297	Third parties -
- Pihak berelasi	163,383	199,232	Related parties -
	<u>539,909</u>	<u>483,529</u>	
	<u>2,323,633</u>	<u>2,356,828</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI
(lanjutan)

10. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES
(continued)

Liabilitas akseptasi (lanjutan)

Acceptance payables (continued)

b. Berdasarkan jangka waktu

b. By time period

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
Hingga 1 bulan	1,707	6,619	<i>Up to 1 month</i>
Lebih dari 1 - 3 bulan	27,150	24,509	<i>More than 1 - 3 months</i>
Lebih dari 3 - 6 bulan	1,754,867	1,842,171	<i>More than 3 - 6 months</i>
	<u>1,783,724</u>	<u>1,873,299</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Hingga 1 bulan	-	3,411	<i>Up to 1 month</i>
Lebih dari 1 - 3 bulan	82,388	131,357	<i>More than 1 - 3 months</i>
Lebih dari 3 - 6 bulan	271,587	293,413	<i>More than 3 - 6 months</i>
Lebih dari 6 bulan	185,934	55,348	<i>More than 6 months</i>
	<u>539,909</u>	<u>483,529</u>	
	<u><u>2,323,633</u></u>	<u><u>2,356,828</u></u>	

c. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

c. By remaining period to maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pinjaman yang diberikan:			<i>Loans:</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
- Rupiah	98,345,547	88,421,976	<i>Rupiah -</i>
- Dolar Amerika Serikat	42,369,192	42,837,338	<i>United States Dollar -</i>
- Yen Jepang	606,229	782,342	<i>Japanese Yen -</i>
- Euro Eropa	79,104	167,004	<i>European Euro -</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
- Rupiah	79,043	856,218	<i>Rupiah -</i>
- Dolar Amerika Serikat	3,694,321	1,531,175	<i>United States Dollar -</i>
Pembiayaan/piutang syariah:			<i>Sharia financing/receivables:</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
- Rupiah	11,387,861	11,527,463	<i>Rupiah -</i>
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima			<i>Accrued interest/margin income</i>
- Rupiah	775,589	658,255	<i>Rupiah -</i>
- Dolar Amerika Serikat	320,372	218,351	<i>United States Dollar -</i>
- Yen Jepang	680	266	<i>Japanese Yen -</i>
- Euro Eropa	1,155	1,662	<i>European Euro -</i>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4,618,047)</u>	<u>(3,579,119)</u>	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
	<u><u>153,041,046</u></u>	<u><u>143,422,931</u></u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas OJK

a. Based on type, currency and OJK grading

31 Desember/December 2023							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Korporasi	50,815,025	4,782,889	-	-	507,652	56,105,566	Corporates
Pensiunan	21,691,457	363,678	30,979	36,467	94,541	22,217,122	Pensioners
Usaha Kecil Menengah	13,651,641	170,977	35,734	25,775	827,908	14,712,035	Small Medium Enterprises
Usaha Mikro Kecil	1,098,101	25,702	4,324	4,570	12,126	1,144,823	Micro business
Pembiayaan/piutang syariah	10,593,668	459,676	272,637	17,559	44,321	11,387,861	Sharia financing/ Receivables
Pegawai instansi lain	168,964	8,678	1,862	2,049	4,337	185,890	Other institutions' employees
Keperluan rumah tangga	705,280	34,456	4,762	2,048	368	746,914	Household goods
Karyawan	116,249	74	48	138	204	116,713	Employee loans
Umum	2,687,078	82,107	18,353	27,954	9,010	2,824,502	General purpose
Kredit kepemilikan mobil	328,134	39,827	1,200	1,609	255	371,025	Car loans
	<u>101,855,597</u>	<u>5,968,064</u>	<u>369,899</u>	<u>118,169</u>	<u>1,500,722</u>	<u>109,812,451</u>	
Mata uang asing							Foreign Currencies
Korporasi	45,758,641	882,426	107,779	-	-	46,748,846	Corporates
	<u>147,614,238</u>	<u>6,850,490</u>	<u>477,678</u>	<u>118,169</u>	<u>1,500,722</u>	<u>156,561,297</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	838,560	259,236	-	-	-	1,097,796	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,373,376)	(1,764,839)	(295,641)	(70,563)	(1,113,628)	(4,618,047)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>147,079,422</u>	<u>5,344,887</u>	<u>182,037</u>	<u>47,606</u>	<u>387,094</u>	<u>153,041,046</u>	
31 Desember/December 2022							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Korporasi	48,133,482	1,342,381	-	-	515,461	49,991,324	Corporates
Pensiunan	23,137,597	483,528	37,161	42,812	71,202	23,772,300	Pensioners
Usaha Kecil Menengah	11,312,771	120,626	215,051	30,083	531,973	12,210,504	Small Medium Enterprises
Usaha Mikro Kecil	604,486	18,449	1,195	1,538	1,929	627,597	Micro business
Pembiayaan/piutang syariah	10,949,316	272,820	187,571	24,707	93,049	11,527,463	Sharia financing/ receivables
Pegawai instansi lain	201,016	9,995	2,126	2,135	2,101	217,373	Other institutions' employees
Keperluan rumah tangga	77,333	3,505	632	1,185	525	83,180	Household goods
Karyawan	123,040	135	-	54	-	123,229	Employee loans
Umum	1,950,614	43,003	7,395	13,688	174,822	2,189,522	General purpose
Kredit kepemilikan mobil	61,136	1,771	66	168	24	63,165	Car loans
	<u>96,550,791</u>	<u>2,296,213</u>	<u>451,197</u>	<u>116,370</u>	<u>1,391,086</u>	<u>100,805,657</u>	
Mata uang asing							Foreign currencies
Korporasi	42,063,947	3,137,156	116,756	-	-	45,317,859	Corporates
	<u>138,614,738</u>	<u>5,433,369</u>	<u>567,953</u>	<u>116,370</u>	<u>1,391,086</u>	<u>146,123,516</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	817,968	60,566	-	-	-	878,534	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,733,503)	(411,626)	(340,947)	(79,938)	(1,013,105)	(3,579,119)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>137,699,203</u>	<u>5,082,309</u>	<u>227,006</u>	<u>36,432</u>	<u>377,981</u>	<u>143,422,931</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas OJK (lanjutan)

Pembiayaan/piutang syariah terdiri atas piutang murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pinjaman qardh masing-masing sebesar Rp 11.367.662, Rp 19.669, dan Rp 530 pada tanggal 31 Desember 2023 dan masing-masing sebesar Rp 11.463.672, Rp 60.275, dan Rp 3.516 pada tanggal 31 Desember 2022.

Rasio pinjaman yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM") terhadap jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 11,21% dan 11,94%. Rasio tersebut dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

b. Berdasarkan sektor ekonomi

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

a. Based on type, currency and OJK grading (continued)

Sharia financing/receivables consists of murabahah receivables, musyarakah financing, and funds of qardh amounted to Rp 11,367,662, Rp 19,669, and Rp 530, respectively, as of 31 December 2023 and Rp 11,463,672, Rp 60,275, and Rp 3,516, respectively, as of 31 December 2022.

Ratios of loans extended to Micro, Small and Medium Enterprises ("UMKM") to total loans as of 31 December 2023 and 2022 were 11.21% and 11.94%, respectively. These ratios were calculated based on the prevailing Bank Indonesia regulations.

b. By economic sector

31 Desember/December 2023							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Rumah tangga	25,035,594	518,206	56,882	70,159	108,663	25,789,504	Household
Perdagangan	22,547,759	448,241	225,416	31,769	834,646	24,087,831	Trading
Perindustrian	22,463,627	593,988	38,863	4,648	185,261	23,286,387	Manufacturing
Jasa lainnya	16,188,859	556,813	395	2,448	258,121	17,006,636	Other services
Pertanian	4,565,125	59,412	31,936	1,299	12,691	4,670,463	Agriculture
Jasa akomodasi	158,156	72	142	-	26,016	184,386	Accommodation services
Konstruksi	1,695,078	3,760,473	-	4,058	64,484	5,524,093	Construction
Transportasi & komunikasi	7,446,509	8,890	83	2,776	6,928	7,465,186	Transportation & communication
Pertambangan	926,328	-	3,563	-	1,097	930,988	Mining
Lainnya	828,562	21,969	12,619	1,012	2,815	866,977	Others
	<u>101,855,597</u>	<u>5,968,064</u>	<u>369,899</u>	<u>118,169</u>	<u>1,500,722</u>	<u>109,812,451</u>	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollar
Perdagangan	2,456,267	-	-	-	-	2,456,267	Trading
Perindustrian	9,182,867	871,469	107,779	-	-	10,162,115	Manufacturing
Jasa lainnya	16,489,869	5,646	-	-	-	16,495,515	Other services
Pertanian	1,404,117	-	-	-	-	1,404,117	Agriculture
Konstruksi	320,628	-	-	-	-	320,628	Construction
Transportasi & komunikasi	5,460,203	-	-	-	-	5,460,203	Transportation & communication
Pertambangan	5,097,663	-	-	-	-	5,097,663	Mining
Lainnya	4,667,005	-	-	-	-	4,667,005	Others
	<u>45,078,619</u>	<u>877,115</u>	<u>107,779</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>46,063,513</u>	
Yen Jepang							Japanese Yen
Perdagangan	5,444	-	-	-	-	5,444	Trading
Perindustrian	360,643	2,722	-	-	-	363,365	Manufacturing
Jasa lainnya	-	2,589	-	-	-	2,589	Other services
Lainnya	234,831	-	-	-	-	234,831	Others
	<u>600,918</u>	<u>5,311</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>606,229</u>	
Euro Eropa							European Euro
Perdagangan	79,104	-	-	-	-	79,104	Trading
	<u>147,614,238</u>	<u>6,850,490</u>	<u>477,678</u>	<u>118,169</u>	<u>1,500,722</u>	<u>156,561,297</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	838,560	259,236	-	-	-	1,097,796	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,373,376)	(1,764,839)	(295,641)	(70,563)	(1,113,628)	(4,618,047)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>147,079,422</u>	<u>5,344,887</u>	<u>182,037</u>	<u>47,606</u>	<u>387,094</u>	<u>153,041,046</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector (continued)

31 Desember/December 2022							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Rumah tangga	24,518,478	541,542	47,330	59,980	77,499	25,244,829	Household
Perdagangan	23,158,792	447,912	382,947	40,933	602,863	24,633,447	Trading
Perindustrian	20,220,675	671,592	5,522	8,735	167,556	21,074,080	Manufacturing
Jasa lainnya	14,060,442	593,476	1,186	218	451,273	15,106,595	Other services
Pertanian	3,625,257	10,326	3,074	1,056	20,389	3,660,102	Agriculture
							Accommodation services
Jasa akomodasi	97,763	1,457	73	-	28,318	127,611	
Konstruksi	5,493,870	15,623	-	4,355	37,231	5,551,079	Construction
Transportasi & komunikasi	4,377,026	341	1,942	-	739	4,380,048	Transportation & communication
Pertambangan	200,892	1	1	-	6	200,900	Mining
Lainnya	797,596	13,943	9,122	1,093	5,212	826,966	Others
	96,550,791	2,296,213	451,197	116,370	1,391,086	100,805,657	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollar
Perdagangan	2,864,387	-	-	-	-	2,864,387	Trading
Perindustrian	10,777,022	2,843,714	116,756	-	-	13,737,492	Manufacturing
Jasa lainnya	12,379,459	11,935	-	-	-	12,391,394	Other services
Pertanian	2,652,480	-	-	-	-	2,652,480	Agriculture
Konstruksi	382,345	-	-	-	-	382,345	Construction
Transportasi & komunikasi	3,092,831	-	-	-	-	3,092,831	Transportation & communication
Pertambangan	5,259,690	-	-	-	-	5,259,690	Mining
Lainnya	3,987,894	-	-	-	-	3,987,894	Others
	41,396,108	2,855,649	116,756	-	-	44,368,513	
Yen Jepang							Japanese Yen
Perindustrian	165,346	275,650	-	-	-	440,996	Manufacturing
Perdagangan	14,726	-	-	-	-	14,726	Trading
Jasa lainnya	2,676	5,857	-	-	-	8,533	Other services
Lainnya	318,087	-	-	-	-	318,087	Others
	500,835	281,507	-	-	-	782,342	
Euro Eropa							European Euro
Perdagangan	167,004	-	-	-	-	167,004	Trading
	138,614,738	5,433,369	567,953	116,370	1,391,086	146,123,516	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	817,968	60,566	-	-	-	878,534	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,733,503)	(411,626)	(340,947)	(79,938)	(1,013,105)	(3,579,119)	Less: Allowance for impairment losses
	137,699,203	5,082,309	227,006	36,432	377,981	143,422,931	

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By time period

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Hingga 1 tahun	67,842,273	61,644,137	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	15,290,577	14,844,877	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 3 tahun	12,145,179	11,394,722	More than 2 - 3 years
Lebih dari 3 - 4 tahun	8,986,657	7,596,787	More than 3 - 4 years
Lebih dari 4 - 5 tahun	17,732,394	17,631,424	More than 4 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	34,564,217	33,011,569	More than 5 years
	156,561,297	146,123,516	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	1,097,796	878,534	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,618,047)	(3,579,119)	Less: Allowance for impairment losses
	153,041,046	143,422,931	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

d. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

d. By remaining period to maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

e. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan/debitur

e. By relationship with counterparties/debtors

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pihak ketiga	152,787,933	143,736,123	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	3,773,364	2,387,393	<i>Related parties</i>
	<u>156,561,297</u>	<u>146,123,516</u>	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	1,097,796	878,534	<i>Accrued interest/margin income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,618,047)	(3,579,119)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>153,041,046</u>	<u>143,422,931</u>	

f. Tingkat suku bunga/margin rata-rata per tahun

f. Average interest/margin rate per annum

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:			<i>Average interest rate per annum:</i>
Rupiah	9.43%	9.04%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	6.13%	2.81%	<i>Foreign currencies</i>

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Tingkat margin rata-rata per tahun:			<i>Average margin rate per annum:</i>
Piutang murabahah	25%-30%	25%-30%	<i>Murabahah receivables</i>
Tingkat imbal hasil per tahun:			<i>Rate of return per annum:</i>
Pembiayaan musyarakah	8.75%-11.00%	8.75%-10.50%	<i>Musyarakah financing</i>

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses for loans and sharia financing/receivables was as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Saldo awal	(3,579,119)	(3,953,699)	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	(3,029,571)	(1,754,676)	<i>Provision during the year (Note 34)</i>
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	(88,291)	(120,194)	<i>Recoveries from loans written-off</i>
Penghapusbukuan	2,066,044	1,871,710	<i>Write-off</i>
Kerugian modifikasi	-	308,911	<i>Modification loss</i>
Penjualan pinjaman yang diberikan	-	91,486	<i>Sale of loan</i>
Lain-lain	12,890	(22,657)	<i>Others</i>
	<u>12,890</u>	<u>(22,657)</u>	
Saldo akhir	<u>(4,618,047)</u>	<u>(3,579,119)</u>	<i>Ending balance</i>

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

g. Allowance for impairment losses (continued)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan Bank berdasarkan Tahap (Stage) adalah sebagai berikut:

The movement of the Bank's allowance for impairment losses for loans based on Stages was as follows:

Tahun berakhir 31 Desember 2023/ Year ended 31 December 2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	(698,596)	(272,613)	(1,838,985)	(2,810,194)	Beginning balance
Transfer (ke)/dari Tahap 1	(113,376)	91,804	21,572	-	Transfer (to)/from Stage 1
Transfer (ke)/dari Tahap 2	227,654	(281,368)	53,714	-	Transfer (to)/from Stage 2
Transfer (ke)/dari Tahap 3	1,336	559,675	(561,011)	-	Transfer (to)/from Stage 3
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	379,086	(334,157)	(800,109)	(755,180)	Net change in exposures and remeasurements
Pinjaman yang baru diperoleh	(889,467)	(201,976)	(329,629)	(1,421,072)	New originated loans
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	-	-	(40,007)	(40,007)	Recoveries from loans written-off
Penghapusbukuan selama periode berjalan	-	-	564,634	564,634	Write-off during the period
Pinjaman yang telah dilunasi	251,294	256,083	291,299	798,676	Loans which have been repaid
Perubahan parameter model	210,587	13,605	21,930	246,122	Changes in model parameter
Lain-lain	-	-	12,890	12,890	Others
Saldo akhir - kerugian kredit ekspektasian Bank	(631,482)	(168,947)	(2,603,702)	(3,404,131)	Ending balance – expected credit losses Bank
Cadangan kerugian penurunan nilai – pembiayaan/piutang syariah				(1,213,916)	Allowance for impairment losses – sharia financing/receivables
Saldo akhir				(4,618,047)	Ending balance
Tahun berakhir 31 Desember 2022/ Year ended 31 December 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	(533,068)	(350,053)	(2,371,313)	(3,254,434)	Beginning balance
Transfer (ke)/dari Tahap 1	(274,449)	86,368	188,081	-	Transfer (to)/from Stage 1
Transfer (ke)/dari Tahap 2	185,002	(218,461)	33,459	-	Transfer (to)/from Stage 2
Transfer (ke)/dari Tahap 3	166,582	445,053	(611,635)	-	Transfer (to)/from Stage 3
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	55,989	(267,101)	(553,730)	(764,842)	Net change in exposures and remeasurements
Pinjaman yang baru diperoleh	(413,024)	(155,684)	(228,370)	(797,078)	New originated loans
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	-	-	(45,362)	(45,362)	Recoveries from loans written-off
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	921,486	921,486	Write-off during the year
Penjualan pinjaman	-	-	91,486	91,486	Sale of loan
Pinjaman yang telah dilunasi	218,775	207,342	464,058	890,175	Loans which have been repaid
Perubahan parameter model	(104,403)	(20,077)	(13,399)	(137,879)	Changes in model parameter
Kerugian modifikasi	-	-	308,911	308,911	Modification loss
Lain-lain	-	-	(22,657)	(22,657)	Others
Saldo akhir - kerugian kredit ekspektasian Bank	(698,596)	(272,613)	(1,838,985)	(2,810,194)	Ending balance – expected credit losses Bank
Cadangan kerugian penurunan nilai – pembiayaan/piutang syariah				(768,925)	Allowance for impairment losses – sharia financing/receivables
Saldo akhir				(3,579,119)	Ending balance

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

g. Allowance for impairment losses (continued)

Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Bank dari Rp 2.810.194 posisi 31 Desember 2022 menjadi Rp 3.404.131 posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai dampak dari beberapa kejadian berikut ini:

Movement in the Bank's allowance for impairment losses (CKPN) from Rp 2,810,194 as of 31 December 2022 to Rp 3,404,131 as of 31 December 2023 was due to the impact of following events:

- Penambahan CKPN yang dibentuk pada segmen korporasi sebesar Rp 728.964.
- Nilai CKPN yang dibentuk sebagai bagian prinsip kehati-hatian bank terhadap debitur-debitur restruktur Covid-19 yang dinilai dapat bertahan dan tidak dapat bertahan dengan portfolio yang cenderung menurun baik untuk debitur KDK 34 ataupun debitur Non KDK 34 dengan realisasi sebesar Rp 117.729, yang tetap mempertimbangkan cakupan CKPN yang tetap stabil.
- Terdapat *reversal* sebesar Rp 246.122 dari proses review tahunan atas model CKPN.
- Realisasi atas nilai CKPN yang dibentuk sehingga menyebabkan penurunan nilai CKPN bersih di segmen retail sebesar Rp 17.309.

- *Additional of CKPN booked for corporate segment amounted to Rp 728,964.*
- *CKPN booked as part of the implementation of prudential principle towards Covid-19 restructured debtors which are considered to be able to survive and not be able to survive with a declining trend portfolio for both for KDK 34 debtors and non-KDK 34 debtors with realization amounting Rp 117,729 which have taken into account CKPN coverage to remain stable.*
- *There was reversal amounting to Rp 246,122 due to the annual review process of CKPN model.*
- *Realization of CKPN booked which caused decrement in net value of CKPN at retail segment amounted to Rp 17,309.*

Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai Entitas Anak dari Rp 768.259 posisi 31 Desember 2022 menjadi Rp 1.213.542 posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai bagian prinsip kehati-hatian Entitas Anak terhadap tantangan yang dihadapi oleh segmen nasabah yang dilayaninya dalam periode pasca pandemi Covid-19, termasuk didalamnya nasabah-nasabah restruktur Covid-19.

The movement of the Subsidiary's allowance for impairment losses from Rp 768,259 as of 31 December 2022 to Rp 1,213,542 as of 31 December 2023 is part of the Subsidiary's prudential principle as challenges faced by the customer segment served in the post Covid-19 pandemic period, including Covid-19 restructuring customers.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on loans and sharia financing/receivables as of 31 December 2023 and 2022.

h. Pembiayaan bersama

h. Joint financing

Bank mengadakan perjanjian pembiayaan bersama, antara lain dengan PT KB Finansia Multi Finance (FMF), PT Home Credit Indonesia (HCI) dan PT Mandiri Utama Finance (MUF) (Catatan 40).

The bank has entered into joint financing agreements, among others with PT KB Finansia Multi Finance (FMF), PT Home Credit Indonesia (HCI), and PT Mandiri Utama Finance (MUF) (Note 40).

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK")

i. Legal Lending Limit ("LLL")

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Grup yang disampaikan kepada OJK, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan BMPK kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan OJK.

Based on the Group's Legal Lending Limit (LLL) report to OJK, as of 31 December 2023 and 2022 there was no violation or excess of LLL to both third parties and related parties in compliance with OJK's regulation.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

j. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah

j. Non-performing loans and sharia financing/receivables

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, rasio bruto pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah setinggi-tingginya adalah 5% dari jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah. Rasio kredit bermasalah bruto dan bersih Grup adalah sebagai berikut:

Based on prevailing OJK regulations, the maximum gross non-performing loans and sharia financing/receivables ratio for a bank is 5% from total loans and sharia financing/receivables given. The gross and net non-performing loan ratios of the Group was as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Kurang lancar	477,678	567,953	Substandard
Diragukan	118,169	116,370	Doubtful
Macet	1,500,722	1,391,086	Loss
Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - kotor	2,096,569	2,075,409	Total non-performing loans and sharia financing/receivables - gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,479,832)	(1,433,990)	Allowance for impairment losses
Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - bersih	616,737	641,419	Total non-performing loans and sharia financing/receivables - net
Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan	156,561,297	146,123,516	Total loans and sharia financing/receivables
Jumlah pinjaman kepada Bank lain	(2,183,624)	(638,152)	Total loans to other banks
	154,377,673	145,485,364	
Rasio pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - kotor	1.36%	1.43%	Non-performing loans and sharia financing/receivables ratio - gross
Rasio pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - bersih	0.40%	0.44%	Non-performing loans and sharia financing/receivables ratio - net

Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Grup (persentase cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 134,49% dan 114,08%.

The Group's ratio of allowance for impairment losses on financial assets (percentage of allowance for impairment losses on financial assets recorded to the minimum allowance for impairment losses on financial assets as required by Bank Indonesia) as of 31 December 2023 and 2022 were 134.49% and 114.08%, respectively.

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lainnya.

Loans are generally collateralised by registered mortgages, mortgages or powers of attorney to sell and other guarantees.

Pada tanggal 31 Desember 2023, pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan uang tunai adalah Rp 28.587.601 (31 Desember 2022: Rp 28.186.840).

As of 31 December 2023, loans secured by cash collateral were Rp 28,587,601 (31 December 2022: Rp 28,186,840).

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

k. Kredit penerusan

Bank juga menyalurkan fasilitas kredit yang dananya bersumber dari Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia melalui kredit penerusan (*channeling loan*) dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM).

Saldo dari kredit penerusan tidak diakui pada laporan keuangan konsolidasian. Rincian saldo kredit penerusan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Kredit Penerusan KUT	24,687	24,687
Kredit Penerusan KPKM	16,061	9,830
	<u>40,748</u>	<u>34,517</u>

l. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain dan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Dalam kredit sindikasi, Bank dapat bertindak sebagai anggota dan/atau *arranger* dan/atau Agen Fasilitas dan/atau Agen Jaminan. Sindikasi dilakukan dengan bank-bank di Indonesia dan/atau luar negeri.

Keikutsertaan Bank sebagai anggota dan/atau *arranger* dalam kredit sindikasi berkisar antara 1,77% sampai dengan 80% dari fasilitas kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1,77% sampai dengan 80% dari fasilitas kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2022.

m. Perjanjian dengan perusahaan asuransi

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Pada tanggal 26 November 2008, Bank melakukan perjanjian ("PKS") dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dan mikro dengan asuransi jiwa. Perjanjian Kerjasama ini mencakup 3 bagian (asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sebelum tanggal 1 Desember 2008, asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sejak tanggal 1 Desember 2008, dan asuransi untuk debitur kredit mikro) dan berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian, dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 5 (lima) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

k. Channeling loans

The Bank also provides loan facilities funded by the Government of Indonesia or Bank Indonesia through channeling loans in the form of Kredit Usaha Tani (KUT) and Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM).

These channeling loans are not recognized in the consolidated financial statements. The balances were as follows:

l. Syndicated loans

Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks and are generally used to support the working capital needs and investment. In syndicated loans, the Bank may act as a member and/or arranger and/or Facility Agent and/or Security Agent. Syndication is done with several banks in Indonesia and/or offshore.

Total participation of the Bank in syndicated loans, in which the Bank acted as a member and/or arranger, ranged from 1.77% up to 80% of syndicated loan facility as of 31 December 2023 and ranged from 1.77% up to 80% of syndicated loan facility as of 31 December 2022.

m. Agreements with insurance companies

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

On 26 November 2008, the Bank entered into an agreement ("PKS") with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension and micro loans with life insurance. The insurance agreement consists of 3 sections (insurance for pension loan debtors before 1 December 2008, insurance for pension loan debtors since 1 December 2008 onwards, and insurance for micro loan debtors) and is effective for 5 (five) years since the date of the agreement, and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of 5 (five) years or as mutually agreed by both parties.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

m. Perjanjian dengan perusahaan asuransi (lanjutan)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 1 April 2013 dilakukan perubahan atas PKS yang dibuat dalam bentuk PKS Induk (Perjanjian *Bancassurance* untuk Kegiatan Referensi) dan PKS turunan yang dibuat untuk masing-masing produk Kredit Pensiun dan Kredit Pegawai.

Sesuai Perjanjian Kerja Sama No.020/RLBPM/V/2022 pada tanggal 20 Juni 2022 Bank dan Allianz mulai memberlakukan skema produk asuransi yang baru untuk Kredit Pensiun.

Dengan mulai berlakunya produk asuransi Kredit Pensiun ini pemberian referensi produk asuransi Kredit Pensiun yang lama sudah tidak dilakukan lagi sejak tanggal 1 Juli 2022, namun masih digunakan untuk perlindungan debitur yang sudah ada sebelum 1 Juli 2022.

PT Avrist Assurance

Pada tanggal 23 Juni 2011 Bank melakukan perjanjian dengan PT Avrist Assurance ("Avrist"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 17 September 2015, Bank dan Avrist sepakat untuk memperluas kerja sama untuk Kredit Pegawai Aktif dan kerja sama tersebut ditegaskan terakhir pada 17 September 2019.

Sesuai Perjanjian Kerja Sama No.017/RLBPM/III/2023 dan No.018/RLBPM/III/2023 pada tanggal 1 Februari 2023 Bank dan Avrist mulai memberlakukan skema produk Asuransi yang baru untuk Kredit Pensiun.

Dengan mulai berlakunya produk asuransi Kredit Pensiun ini pemberian referensi produk asuransi Kredit Pensiun yang lama sudah tidak dilakukan lagi sejak tanggal 1 Februari 2023, namun masih digunakan untuk perlindungan debitur yang sudah ada sebelum 1 Februari 2023.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

m. Agreements with insurance companies (continued)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (continued)

On 1 April 2013, the PKS has been amended in the form of Master Agreement (Bancassurance Agreement for Referral Activities) and Sub PKS which were provided for each product of Pension Loan and Employee Loan.

As per Agreement No.020/RLBPM/V/2022 dated 20 June 2022 Bank and Allianz started new scheme insurance product for Pension Loan.

With the implementation of this Pension Loan insurance product, referencing existing Pension Loan insurance product will be discontinued starting from 1 July 2022. Existing Pension Loan insurance still cover the debtors existed before 1 July 2022.

PT Avrist Assurance

On 23 June 2011, the Bank entered an agreement with PT Avrist Assurance ("Avrist"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

On 17 September 2015, Bank and Avrist agreed to expand the agreement for Active Employee Loan and this agreement was last emphasized on 17 September 2019.

As per Agreement No.017/RLBPM/III/2023 and No.018/RLBPM/III/2023 dated 1 February 2023 Bank and Avrist started new scheme insurance product for Pension Loan..

With the implementation of this Pension Loan insurance product, referencing existing Pension Loan insurance product will be discontinued starting from 1 February 2023. Existing Pension Loan insurance still cover the debtors existed before 1 February 2023.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES
(continued)**

**m. Perjanjian dengan perusahaan asuransi
(lanjutan)**

**m. Agreements with insurance companies
(continued)**

PT Heksa Solution Insurance

PT Heksa Solution Insurance

Pada tanggal 22 Juni 2023, Bank melakukan perjanjian dengan PT Heksa Solution Insurance ("Heksa") sesuai Perjanjian Kerja Sama No.037/RLBSA/VI/2023, pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dan kredit pegawai. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai salah satu pihak menghendaki sebaliknya atau dikehendaki sesuai ketentuan yang berlaku.

On 22 June 2023, the Bank entered an agreement with PT Heksa Solution Insurance ("Heksa") as per agreement No.037/RLBSA/VI/2023, a non-related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension loan and employee loan. The agreement is effective until either party wishes otherwise or required by the regulation.

PT Asuransi Jiwa Generali

PT Asuransi Jiwa Generali

Pada tanggal 22 Juni 2011, Bank melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 22 June 2011, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension loans. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

Pada tanggal 9 Oktober 2015, Bank juga melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kredit dari pinjaman pegawai aktif.

On 9 October 2015, the Bank also entered into an agreement with PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), a third party, to cover the Bank from the credit risk of active employee loans.

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun dan kemudian secara otomatis akan diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya atau dapat dihentikan lebih awal sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama ini diperpanjang secara otomatis pada tanggal 9 Oktober 2021 untuk 5 tahun berikutnya sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025.

The agreement is effective for five years and will be automatically extended for the next five years or may be terminated earlier as agreed by both parties. The agreement was automatically extended on 9 October 2021 for the next 5 years until 9 October 2025.

PT Proteksi Antar Nusa

PT Proteksi Antar Nusa

Pada tanggal 1 Maret 2017, Bank melakukan perjanjian dengan PT Proteksi Antar Nusa ("PAN"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini telah diperpanjang pada tanggal 17 Mei 2021 selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

On 1 March 2017, the Bank entered an agreement with PT Proteksi Antar Nusa ("PAN"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan. The agreement has been extended on 17 May 2021 for another three years and can be extended as mutually agreed by both parties.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

m. Perjanjian dengan perusahaan asuransi (lanjutan)

m. Agreements with insurance companies (continued)

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

Pada tanggal 12 Januari 2022, Bank melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk ("Sinarmas MSIG"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kredit dari Kredit Pemilikan Rumah. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh masing-masing pihak. Perjanjian kerja sama ini mulai diimplementasikan pada tanggal 24 Maret 2022.

On 12 January 2022, the Bank entered an agreement with PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk ("Sinarmas MSIG"), a non-related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible mortgage loan. The agreement is effective for three years and can be reviewed whenever necessary by both parties. The agreement was launched at 24 March 2022.

n. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi

n. Restructured loans and sharia financing/receivables

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas OJK adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2023 and 2022, total restructured loans and sharia financing/receivables based on OJK grading was as follows:

31 Desember/December 2023							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Korporasi	167,867	2,526,064	-	-	507,652	3,201,583	Corporates
Pensiunan	236	-	-	-	-	236	Pensioners
Kredit keperluan rumah tangga	-	2	2	3	7	14	Household goods
Kredit kepemilikan mobil	14	126	-	-	-	140	Car loans
Umum	265	54	41	-	1	361	General purpose
Usaha kecil menengah	924,482	62,403	16,081	12,210	611,426	1,626,602	Small medium enterprises
Usaha mikro kecil	28,747	2,962	737	1,311	855	34,612	Micro business
Pembiayaan/piutang syariah	610,501	39,794	15,809	5,674	18,005	689,783	Sharia financing/receivables
	<u>1,732,112</u>	<u>2,631,405</u>	<u>32,670</u>	<u>19,198</u>	<u>1,137,946</u>	<u>5,553,331</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

n. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi (lanjutan)

n. Restructured loans and sharia financing/receivables (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas OJK adalah sebagai berikut: (lanjutan)

As of 31 December 2023 and 2022, total restructured loans and sharia financing/receivables based on OJK grading was as follows: (continued)

31 Desember/December 2022

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Korporasi	3,853,177	648,050	-	-	515,461	5,016,688	Corporates
Pensiunan	257	-	-	-	-	257	Pensioners
Kredit keperluan rumah tangga	290	44	42	40	9	425	Household goods
Kredit kepemilikan mobil	723	138	15	78	-	954	Car loans
Umum	23,103	36	8	18	171,188	194,353	General purpose
Usaha kecil menengah	1,372,194	36,798	205,380	28,184	469,658	2,112,214	Small medium enterprises
Usaha mikro kecil	77,307	10,076	625	771	670	89,449	Micro business
Pembiayaan/piutang syariah	1,049,108	190,762	116,849	11,960	76,427	1,445,106	Sharia financing/receivables
	<u>6,376,159</u>	<u>885,904</u>	<u>322,919</u>	<u>41,051</u>	<u>1,233,413</u>	<u>8,859,446</u>	

Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020, sejumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah telah direstrukturisasi berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020, yang dilanjutkan di periode pasca-pandemi sesuai dengan POJK No. 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana yang berlaku serta KDK No. 34/KDK 03/2022 mengenai Penetapan Daerah dan/atau Sektor Ekonomi yang Terdampak Bencana yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank (sektor ekonomi dan daerah tersebut adalah sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau daerah Provinsi Bali).

As the impacts of the COVID-19 pandemic which has been spread to Indonesia since March 2020, certain amount of loans and sharia financing/receivables have been restructured based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 dated 16 March 2020 concerning National Economic Stimulus as a *Countercyclical* Policy on the Impacts of the Spread of *Coronavirus Disease* 2019 and OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 dated 1 December 2020 concerning Amendments to OJK Regulation No.11/POJK.03/2020 and OJK Regulation No.17/POJK.03/2021 concerning the Second Amendment to OJK Regulation No.11/POJK.03/2020, continued to the post-pandemic period in accordance to OJK Regulation No. 19/2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Specific Regions and Sectors in Indonesia Impacted by a Disaster and OJK Board of Commissioners Decree No. 34/KDK 03/2022 concerning Stipulation of Region and/or Sector Which Require Special Treatment regarding Bank Financing (the sectors and/or regions include accommodation and food and drink provision sector, the textile and textile products and footwear sectors, the micro, small and medium enterprises Segment, and/or Bali Province).

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

12. PREPAYMENTS

	31 Desember/ December		
	2023	2022	
Asuransi kredit	959,005	1,247,475	<i>Loans insurance</i>
Pemeliharaan dan pembaharuan TI	107,022	119,918	<i>IT maintenance and renewal</i>
Promosi	43,279	37,341	<i>Promotion</i>
Beban lisensi dibayar dimuka	30,923	35,880	<i>Prepaid license fee</i>
Sewa bangunan	11,531	12,003	<i>Building rental</i>
Tunjangan perumahan	7,333	5,856	<i>Housing allowance</i>
Lainnya	24,974	6,669	<i>Others</i>
	<u>1,184,067</u>	<u>1,465,142</u>	

Beban dibayar dimuka lainnya termasuk beban dibayar dimuka untuk asuransi jiwa, asuransi uang tunai dan asuransi gedung.

Other prepayments primarily includes prepayments for life insurance, cash insurance and building insurance.

13. PERPAJAKAN

13. TAXATION

a. Klaim pengembalian pajak

a. Claims for tax refund

	31 Desember/ December		
	2023	2022	
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan - 2022	31,804	31,804	<i>Corporate income tax overpayment - 2022</i>
Pengembalian pajak - 2002	16,972	-	<i>Refundable tax - 2002</i>
Klaim pengembalian pajak - 2016	10,358	10,358	<i>Claim for tax refund - 2016</i>
Klaim pengembalian pajak - 2017	8,008	8,008	<i>Claim for tax refund - 2017</i>
Pajak lainnya	195	187	<i>Other taxes</i>
	<u>67,337</u>	<u>50,357</u>	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ December		
	2023	2022	
Pajak penghasilan badan:			<i>Corporate income taxes:</i>
<u>Bank</u>			<u>Bank</u>
- Pasal 25	13,861	-	<i>Article 25 -</i>
- Pasal 29	59,168	-	<i>Article 29 -</i>
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiary</u>
- Pasal 25	29,385	34,044	<i>Article 25 -</i>
- Pasal 29	5,466	10,298	<i>Article 29 -</i>
	<u>107,880</u>	<u>44,342</u>	
Pajak lainnya:			<i>Other taxes:</i>
<u>Bank</u>			<u>Bank</u>
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	83,080	72,976	<i>Article 23, 26 and 4(2) -</i>
- Pasal 21	27,421	35,679	<i>Article 21 -</i>
- Pajak pertambahan nilai	3,487	5,328	<i>Value added tax -</i>
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiary</u>
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	9,183	7,061	<i>Article 23, 26 and 4(2) -</i>
- Pasal 21	6,832	7,761	<i>Article 21 -</i>
- Pajak pertambahan nilai	35	129	<i>Value added tax -</i>
	<u>130,038</u>	<u>128,934</u>	
	<u>237,918</u>	<u>173,276</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Pajak penghasilan:			<i>Income taxes:</i>
- Kini			<i>Current -</i>
Bank	515,697	503,801	<i>Bank</i>
Entitas anak	411,468	510,165	<i>Subsidiary</i>
- Penyesuaian terhadap beban pajak tahun-tahun sebelumnya			<i>Adjustment to prior years' tax -</i>
Bank	18,304	634	<i>expense</i>
			<i>Bank</i>
- Tanggahan – Pembentukan perbedaan temporer			<i>Deferred – Origination of temporary -</i>
Bank	(58,109)	20,506	<i>differences</i>
Entitas anak	(112,162)	(7,351)	<i>Bank</i>
			<i>Subsidiary</i>
Jumlah beban pajak penghasilan	<u>775,198</u>	<u>1,027,755</u>	<i>Total income tax expenses</i>

Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan dikali tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated accounting profit before income tax multiplied by the prevailing tax rate and consolidated income tax expense was:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	3,457,682	4,657,319	<i>Consolidated accounting profit before income tax</i>
Ditambah:			<i>Add:</i>
Pendapatan dividen dari Entitas Anak	498,815	332,992	<i>Dividend income from Subsidiary</i>
	<u>3,956,497</u>	<u>4,990,311</u>	
Tarif pajak	22%	22%	<i>Tax rate</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak	870,430	1,097,868	<i>Tax calculated at tax rate</i>
Perbedaan permanen dengan tarif pajak			<i>Permanent differences at tax rate:</i>
- Bank	(109,265)	(71,434)	<i>Bank -</i>
- Entitas anak	(4,271)	687	<i>Subsidiary -</i>
Penyesuaian terhadap beban pajak tahun-tahun sebelumnya	18,304	634	<i>Adjustments to prior year's tax expense</i>
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>775,198</u>	<u>1,027,755</u>	<i>Consolidated income tax expense</i>

Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan penghasilan kena pajak Bank adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated accounting profit before income tax and taxable income of the Bank was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	3,457,682	4,657,319	<i>Consolidated accounting profit before income tax</i>
Ditambah (dikurangi):			<i>Add (less):</i>
Pendapatan dividen dari Entitas Anak	498,815	332,992	<i>Dividend income from Subsidiary</i>
Laba Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	(1,379,894)	(2,282,394)	<i>Subsidiary's profit before income tax</i>
Laba akuntansi sebelum pajak penghasilan (Bank saja)	<u>2,576,603</u>	<u>2,707,917</u>	<i>Accounting profit before income tax (Bank only)</i>
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Penyisihan kerugian aset produktif - pinjaman yang diberikan	382,098	(419,667)	<i>Allowance for impairment losses on earning assets - loans</i>
Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan	(14,003)	308,911	<i>Modification of loans contractual cash flows</i>
Beban penyusutan	(110,481)	47,640	<i>Depreciation expenses</i>
Bonus direksi	6,426	(9,307)	<i>Bonus for directors</i>
Beban atas imbalan pascakerja	(10,404)	(40,592)	<i>Post-employment benefit expenses</i>
Akrua, bonus, tantiem dan imbalan jangka panjang lainnya	10,496	19,804	<i>Accruals, bonus, tantiem and other long-term - employee benefits</i>
Jumlah perbedaan temporer	<u>264,132</u>	<u>(93,211)</u>	<i>Total temporary differences</i>
Perbedaan permanen:			Permanent differences:
Beban/(penghasilan) yang tidak dapat dikurangkan/dikenakan - pajak - bersih	(496,659)	(324,700)	<i>Non-deductible/(non-taxable) expenses/incomes - net</i>
Penghasilan kena pajak Bank	<u>2,344,076</u>	<u>2,290,006</u>	<i>Taxable income of the Bank</i>

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

d. Perhitungan beban pajak kini dan kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

d. The computation of current tax expense and corporate income tax underpayment was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Penghasilan kena pajak:			Taxable income:
Bank	2,344,076	2,290,006	Bank
Entitas Anak	1,870,310	2,318,931	Subsidiary
	<u>4,214,386</u>	<u>4,608,937</u>	
Beban pajak kini:			Current tax expense:
Bank	515,697	503,801	Bank
Entitas Anak	411,468	510,165	Subsidiary
	<u>927,165</u>	<u>1,013,966</u>	
Dikurangi:			Less:
Pajak dibayar dimuka pasal 25:			Prepaid taxes article 25:
Bank	(456,529)	(535,605)	Bank
Entitas Anak	(406,002)	(499,867)	Subsidiary
	<u>(862,531)</u>	<u>(1,035,472)</u>	
(Kelebihan) kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan pasal (28) 29:			Corporate income tax (over) under payment article (28) 29:
Bank	59,168	(31,804)	Bank
Entitas anak	5,466	10,298	Subsidiary
	<u>64,634</u>	<u>(21,506)</u>	

e. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Grup menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah (pelaporan pajak penghasilan konsolidasian tidak diperbolehkan) berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

e. Under the taxation laws of Indonesia, the Group calculates and submits individual company tax returns (submission of consolidated income tax computation is not allowed) on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

Manajemen mempertahankan posisi perpajakan Grup yang diyakini berdasarkan pada teknik dasar yang kuat, sesuai dengan peraturan perpajakan dan upaya manajemen dalam mengantisipasi kemungkinan risiko timbulnya pajak di masa depan.

Management vigorously defends the Group's tax positions which are believed to be grounded on sound technical basis, in compliance with the tax regulations and management's efforts to anticipate possible future tax exposure.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi.

The above calculation of income tax for the period ended 31 December 2023 was a preliminary estimate made for accounting purposes.

Laba kena pajak yang diperoleh dari laba sebelum pajak secara komersial setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku akan menjadi dasar dalam perhitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Bank dan Entitas Anak.

Taxable income which was obtained from commercial profit before tax after fiscal correction in accordance with applicable tax regulation will be the basis for calculating and preparing the Bank's and Subsidiaries' Annual Corporate Income Tax Returns (SPT).

Bank masih menunggu peraturan implementasi pajak mengenai penghitungan pajak terkait biaya cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini dibuat belum dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Perubahan signifikan atas penghitungan pajak penghasilan badan mungkin akan terjadi jika peraturan implementasi baru mengatur lain dibandingkan dengan peraturan yang saat ini berlaku.

The Bank is still awaiting for the tax implementing regulation regarding allowance for impairment losses of loans that has not yet been issued by the Indonesian Government until the date of the issuance of this consolidated financial statements. Significant changes may affect the corporate income tax calculation if the new implementing regulation regulates differently as compared with the prevailing tax regulation.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan perpajakan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sesuai dengan SPT tahunan Bank.

Pada bulan Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengubah pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, sehingga tarif pajak 22% berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Bank

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ Year ended 31 December 2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi/ Credited (Charged) to profit or loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke ekuitas/ Credited (Charged) to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan	183,836	84,062	-	267,898	Allowance for impairment losses on loans
Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan	67,960	(3,080)	-	64,880	Modification of loans contractual cash flows
Imbalan kerja jangka pendek	62,480	8,567	-	71,047	Short-term employee benefits
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang	9,522	(1,490)	20,146	28,178	Post-employment benefits and other long-term employee benefits
(Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,187	-	(2,977)	(790)	Unrealized (gains) losses on securities measured at fair value through other comprehensive income
Aset tetap (termasuk aset hak guna) ^(a)	(30,265)	(29,683)	-	(59,948)	Fixed assets (including right-of-use assets) ^(a)
Liabilitas sewa ^(a)	78,791	(12,748)	-	66,043	Lease liabilities ^(a)
Lain-lain	9,896	(5,644)	-	4,252	Others
Aset (liabilitas) pajak tangguhan – bersih	384,407	39,984	17,169	441,560	Deferred tax assets (liabilities)- net

(a): Bank menetapkan pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal (Amandemen PSAK 46) mulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan menyajikan kembali komparasi 31 Desember 2022. Setelah amandemen tersebut, Bank mengakui aset pajak tangguhan tersendiri sehubungan dengan liabilitas sewa dan kewajiban pajak tangguhan sehubungan dengan aset hak guna nya.

13. TAXATION (continued)

- e. Tax calculation for the year ended 31 December 2022 is in accordance with Bank's annual tax return (SPT).

In October 2021, Law No. 7 of 2021 amended the provision of Law No. 2 of 2020, in that the statutory tax rate of 22% applies for fiscal year 2022 and onwards.

f. Deferred tax assets (liabilities)

Details of deferred tax assets (liabilities) of the Group was as follows:

Bank

(a): The Bank applied deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction (Amendments to PSAK 46) starting from 1 January 2023 and restate the comparative as of 31 December 2022. Following the amendment, the Bank has recognized a separate deferred tax asset in relation to its lease liabilities and a deferred tax liability in relation to its right-of-use assets.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

f. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ Year ended 31 December 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi/ Credited (Charged) to profit or loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke ekuitas/ Credited (Charged) to equity		Saldo akhir/ Ending balance
Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan	276,162	(92,326)	-	183,836	Allowance for impairment losses on loans
Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan	-	67,960	-	67,960	Modification of loans contractual cash flows
Imbalan kerja jangka pendek	63,208	(728)	-	62,480	Short-term employee benefits
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang	9,033	(8,993)	9,482	9,522	Post-employment benefits and other long-term employee benefits
(Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(33,226)	-	35,413	2,187	Unrealized (gains) losses on securities measured at fair value through other comprehensive income
Aset tetap (termasuk aset hak guna) ^(a)	(59,414)	29,149	-	(30,265)	Fixed assets (including right-of-use assets) ^(a)
Liabilitas sewa ^(a)	92,464	(13,673)	-	78,791	Lease liabilities ^(a)
Lain-lain	11,791	(1,895)	-	9,896	Others
Aset (liabilitas) pajak tangguhan – bersih	360,018	(20,506)	44,895	384,407	Deferred tax assets (liabilities)- net

(a): Bank menetapkan pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari satu transaksi (Amandemen PSAK 46) mulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan menyajikan kembali komparasi 31 Desember 2022. Setelah amandemen tersebut, Bank mengakui aset pajak tangguhan tersendiri sehubungan dengan liabilitas sewa dan kewajiban pajak tangguhan sehubungan dengan aset hak gunanya.

(a): The Bank applied deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction (Amendments to PSAK 46) starting from 1 January 2023 and restate the comparative as of 31 December 2022. Following the amendment, the Bank has recognized a separate deferred tax asset in relation to its lease liabilities and a deferred tax liability in relation to its right-of-use assets.

Entitas Anak

Subsidiary

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ Year ended 31 December 2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (Charged) to profit or loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke ekuitas/ Credited (Charged) to equity		Saldo akhir/ Ending balance
Imbalan kerja jangka pendek	35,579	4,955	-	40,534	Short-term employee benefits
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	2,057	7,007	58	9,122	Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Aset tetap	(586)	(2,430)	-	(3,016)	Fixed assets
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	112,696	105,324	-	218,020	Allowance for impairment losses on murabahah receivables
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek-efek	(18)	-	(22)	(40)	Unrealized gains from securities
Keuntungan yang belum direalisasi dari investasi pada efek ekuitas	(842)	196	-	(646)	Unrealized gain from investment in equity securities
Lainnya	11,736	(2,118)	-	9,618	Others
Aset pajak tangguhan - bersih	160,622	112,934	36	273,592	Deferred tax assets - net

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

f. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ Year ended 31 December 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (Charged) to profit or loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke ekuitas/ Credited (Charged) to equity	Saldo akhir/ Ending balance	
Imbalan kerja jangka pendek	30,098	5,481	-	35,579	Short-term employee benefits
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	7,738	(4,385)	(1,296)	2,057	Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Aset tetap	2,590	(3,176)	-	(586)	Fixed assets
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	98,386	14,310	-	112,696	Allowance for impairment losses on murabahah receivables
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek-efek	(25)	-	7	(18)	Unrealized gains from securities
Keuntungan yang belum direalisasi dari investasi pada efek ekuitas	-	(842)	-	(842)	Unrealized gain from investment in equity securities
Lainnya	15,773	(4,037)	-	11,736	Others
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>154,560</u>	<u>7,351</u>	<u>(1,289)</u>	<u>160,622</u>	Deferred tax assets - net

g. Surat ketetapan pajak

g. Tax assessment letters

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments:

Tahun pajak 2002

Fiscal year 2002

Pada bulan Februari 2011, SMBCI mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Pajak untuk memperoleh kompensasi bunga terkait pemeriksaan pajak tahun 2002 yang dimenangkan oleh SMBCI. Pada tanggal 22 September 2011, SMBCI memenangkan gugatan ke Pengadilan Pajak tersebut.

In February 2011, SMBCI filed an appeal to the Tax Court to get interest compensation related with 2002 tax assessment which was won by SMBCI. On 22 September 2011, SMBCI won its appeal to the Tax Court.

Pada bulan Januari 2012, DJP mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan dari Pengadilan Pajak atas imbalan bunga tersebut.

In January 2012, DGT filed a judicial review to the Supreme Court to revoke the decision of the Tax Court for interest compensation.

Sehubungan dengan proses tersebut, pada tanggal 31 Mei 2023 Majelis Mahkamah Agung mengumumkan keputusan menolak Peninjauan Kembali dari DJP. Pada tanggal 12 Juli 2023, Bank telah menerima putusan formal Mahkamah Agung tersebut. Atas putusan ini, pada tanggal 13 November 2023, Bank mengajukan surat permohonan pengembalian imbalan bunga ke kantor pajak.

In relation to this process, on 31 May 2023, the Assembly of the Supreme Court has announced the decision to reject the DGT Judicial Review. On 12 July 2023, the Bank has received the written formal Supreme Court decision letter. Upon the issuance of the decision, on 13 November 2023, the Bank submitted request letter for interest compensation to tax office.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut: (lanjutan)

Tahun pajak 2002 (lanjutan)

Pada tanggal 11 Desember 2023, Bank menerima surat dari kantor pajak tentang pemberian imbalan bunga sebesar Rp 16.972 yang telah diakui dalam klaim pengembalian pajak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Bank belum menerima imbalan bunga tersebut dari kantor pajak.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 4 Februari 2021, Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2017. Pada tanggal 9 Agustus 2022, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk seluruh jenis pajak dengan jumlah sebesar Rp 8.074, dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp 1,5. Atas SKPKB tersebut Bank telah melakukan pembayaran seluruhnya pada tanggal 7 September 2022. Bank telah mengajukan permohonan surat keberatan pajak pada tanggal 7 November 2022 dengan jumlah Rp 8.008.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, DJP telah mengeluarkan surat keputusan penolakan keberatan. Pada tanggal 29 November 2023 Bank mengajukan surat banding atas keputusan keberatan tersebut ke pengadilan pajak. Sampai saat ini proses banding tersebut masih berlangsung.

Tahun pajak 2018

Pada tanggal 5 Oktober 2022, Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2018.

Pada tanggal 28 Juli 2023, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk seluruh jenis pajak meliputi PPh Badan, Pajak pemotongan dan PPN sebesar Rp 365. Bank tidak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut.

Dengan di SKPKB tersebut, maka proses pemeriksaan pajak telah selesai.

13. TAXATION (continued)

g. Tax assessment letters (continued)

Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments: (continued)

Fiscal year 2002 (continued)

On 11 December 2023, the Bank received letter from tax office concerning the interest compensation provision amounting to Rp 16,972 which has been recognised in claims for tax refund. As of 31 December 2023, the Bank has not received the interest compensation from tax office.

Fiscal year 2017

On 4 February 2021, the Bank received tax audit notice for fiscal year 2017. On 9 August 2022, the Directorate General of Taxes issued Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) amounting to Rp 8,074 along with Tax Collection Letter (STP) amounting to Rp 1.5. The Bank has paid the amount on 7 September 2022. The Bank has submitted tax objection letter on 7 November 2022 amounting to Rp 8,008.

On 31 August 2023, DJP has issued objection decision letter which rejected Bank's objection. On 29 November 2023, the Bank has submitted appeal letter against such decision letter to the tax court. Until now the appeal process is still on going.

Fiscal year 2018

On 5 October 2022, the Bank received tax audit notice for fiscal year 2018.

On 28 July 2023, the Bank received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for all taxes which include corporate income tax, withholding tax and value added tax amounting to Rp 365. Bank will not go for the objections against the SKPKB.

With the issuance of the SKPKB, the tax audit has been completed.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), BTPN memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Tahun pajak 2016

Pada tanggal 28 Januari 2021, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 13.155. Pada tanggal 26 April 2021, Bank mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut kepada DJP.

Pada tanggal 10 Maret 2022, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan 2 (dua) putusan sehubungan dengan keberatan atas SKPKB yang diajukan sebelumnya, adapun hasil keputusan mengabulkan sebagian keberatan sehingga pajak yang terhutang yang sebelumnya Rp 13.155 menjadi Rp 10.358, atas keputusan ini, Bank mengajukan proses banding pada pengadilan pajak yang telah disampaikan pada tanggal 8 Juni 2022. Sampai saat ini, Bank belum menerima putusan dari pengadilan pajak.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 29 April 2019, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp 48.017 dari total lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp 53.308. Atas selisih sebesar Rp 5.237, Bank mengajukan keberatan dengan surat pengajuan tertanggal 23 Juli 2019.

Pada bulan Juni 2020, Bank menerima surat keputusan keberatan dari DJP yang menerima sebagian permintaan keberatan Bank. Pada tanggal 11 September 2020, Bank telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak untuk PPh Badan dan pajak lainnya masing-masing sebesar Rp 5.017 dan Rp 5.822.

Pada tanggal 25 Agustus 2022, Bank menerima putusan dari Pengadilan Pajak dengan total putusan yang dikabulkan sebesar Rp 4.554 untuk PPh Badan dan Rp 419 untuk PPN. Atas putusan tersebut, Bank sudah menerima pengembalian atas sebagian besar pajak yang disetujui pada tanggal 25 September 2022. Atas jumlah yang telah ditolak sebesar Rp 5.874, Bank telah membebaskan dalam biaya tahun 2022. Baik Bank atau DJP tidak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, kasus pajak untuk Tahun Pajak 2017 telah selesai.

13. TAXATION (continued)

g. Tax assessments letters (continued)

Before the merger (Note 1.b), BTPN had the following tax assessments:

Fiscal year 2016

On 28 January 2021, DGT issued an underpayment tax assessment (SKPKB) amounting to Rp 13,155. On 26 April 2021, the Bank submitted an objection letter on the SKPKB to the DGT.

On 10 March 2022, the Directorate General of Taxes has issued 2 (two) decision regarding tax objection of tax assessment letter (SKPKB) which the Bank has applied, the result of the decision grants part of the objection therefore the amount of tax payable is reduced from Rp 13,155 to Rp 10,358, with regards to the objection decision, the Bank has applied for appeal process in tax court on 8 June 2022. Until now, the Bank has not yet received the decision from tax court.

Fiscal year 2017

On 29 April 2019, the Bank received Tax Overpayment Letter ("SKPLB") amounting to Rp 48,017 from the total overpayment in annual tax return amounting to Rp 53,308. The Bank filed an objection letter on 23 July 2019 for the difference of Rp 5,237.

In June 2020, the Bank received an objection decision letter from DGT which partially accepted the Bank's objection request. On 11 September 2020, the Bank submitted a request to the tax court for appeal of income tax and other taxes amounting to Rp 5,017 and Rp 5,822, respectively.

On 25 August 2022, the Bank has received Tax Court Decision with total amount granted of Rp 4,554 for corporate income tax and Rp 419 for VAT. The Bank has received most of the agreed refund amount on 25 September 2022. For the rejected amount of Rp 5,874, Bank has booked as expense in 2022. Both of Bank and DGT did not submit further appeal to Supreme Court. Therefore, the tax litigation for Fiscal Year 2017 are considered completed.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Setelah penggabungan usaha (Catatan 1.b), BTPN memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Tahun pajak 2019

Pada tanggal 14 April 2021, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp 178.984 dari total lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 sebesar Rp 197.290. Pada tanggal 2 Juni 2021, Bank telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 178.019 setelah dikurangi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diperhitungkan sebesar Rp 965.

Pada tanggal 12 Juli 2021, Bank menyampaikan surat keberatan kepada DJP atas sebagian jumlah dalam Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 9.345. Jumlah pajak yang tidak diajukan keberatan sebesar Rp 9.926, dibebankan ke dalam laba-rugi Bank. Pada tanggal 30 Juni 2022, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan, adapun hasilnya adalah DJP menerima Keberatan Bank senilai Rp 9.345, atas nilai tersebut Bank sudah mengajukan pengembalian kelebihan bayar kepada DJP. Bank telah menerima pengembalian kelebihan bayar dari DJP, maka per 31 Desember 2022 kasus pajak untuk tahun pajak 2019 telah selesai.

Tahun Pajak 2022

Pada tanggal 18 Juli 2023, Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2022. Sampai saat ini, pemeriksaan masih sedang berlangsung.

13. TAXATION (continued)

g. Tax assessments letters (continued)

After the merger (Note 1.b), BTPN had the following tax assessments:

Fiscal year 2019

On 14 April 2021, the Bank received Tax Overpayment Letter ("SKPLB") amounting to Rp 178,984 from the total overpayment in annual tax return amounting to Rp 197,290. On 2 June 2021, the Bank received the tax overpayment amounting to Rp 178,019 after being deducted with the underpayment tax assessment (SKPKB) amounting to Rp 965.

On 12 July 2021, the Bank submitted an Objection Letter partial to the amount of the Tax Assessment Letter to DGT amounting to Rp 9,345. The remaining tax which was not objected amounting to Rp 9,926 was charged to the Bank's profit or loss. On 30 June 2022, DGT has issued Objection Decision in favour of the Bank with an amount of Rp 9,345, the Bank has requested a refund for the amount mentioned to DGT. The Bank has received the overpayment refund from the DGT, then as of 31 December 2022 the tax case for fiscal year 2019 has been completed.

Fiscal Year 2022

On 18 July 2023, the Bank received tax audit notification letter for fiscal year 2022. Until now, the tax audit process is still on going.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

14. FIXED ASSETS

Fixed assets consist of the following:

Tahun berakhir 31 Desember 2023/ Year ended 31 December 2023							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
Model revaluasi							Revaluation model
Kepemilikan langsung							Direct ownership
Tanah	981,703	-	(20,278)	-	79,772	1,041,197	Land
Model biaya							Cost model
Kepemilikan langsung							Direct ownership
Gedung	425,296	526	(10,599)	3,678	-	418,901	Buildings
Kendaraan bermotor	216,400	58,421	(20,515)	-	-	254,306	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	1,489,714	45,350	(143,278)	84,562	-	1,476,348	Office equipments
Leasehold improvement	646,603	20,582	(86,560)	9,289	-	589,914	Leasehold improvement
Aset dalam pembangunan	56,150	90,969	(8,536)	(94,708)	-	43,875	Construction in progress
	2,834,163	215,848	(269,488)	2,821	-	2,783,344	
Aset hak guna	1,293,316	157,827	(235,434)	-	-	1,215,709	Right-of-use assets
	5,109,182	373,675	(525,200)	2,821	79,772	5,040,250	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Gedung	(276,916)	(19,095)	8,696	-	-	(287,315)	Buildings
Kendaraan bermotor	(148,497)	(38,180)	19,368	-	-	(167,309)	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	(1,220,918)	(140,535)	142,376	2,591	-	(1,216,486)	Office equipments
Leasehold improvement	(579,699)	(40,441)	77,071	-	-	(543,069)	Leasehold improvement
	(2,226,030)	(238,251)	247,511	2,591	-	(2,214,179)	
Aset hak guna	(764,647)	(211,586)	197,974	-	-	(778,259)	Right-of-use assets
	(2,990,677)	(449,837)	445,485	2,591	-	(2,992,438)	
Nilai buku bersih	2,118,505					2,047,812	Net book value

Tahun berakhir 31 Desember 2022/ Year ended 31 December 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Model revaluasi						Revaluation model
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	981,703	-	-	-	981,703	Land
Model biaya						Cost model
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Gedung	423,329	732	-	1,235	425,296	Buildings
Kendaraan bermotor	209,980	32,867	(26,551)	104	216,400	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	1,432,828	30,850	(73,123)	99,159	1,489,714	Office equipments
Leasehold improvement	814,732	9,916	(187,329)	9,284	646,603	Leasehold improvement
Aset dalam pembangunan	42,527	119,329	(4,294)	(101,412)	56,150	Construction in progress
	2,923,396	193,694	(291,297)	8,370	2,834,163	
Aset hak guna	1,247,902	164,257	(118,843)	-	1,293,316	Right-of-use assets
	5,153,001	357,951	(410,140)	8,370	5,109,182	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Gedung	(250,502)	(26,414)	-	-	(276,916)	Buildings
Kendaraan bermotor	(133,825)	(39,564)	24,892	-	(148,497)	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	(1,145,047)	(147,033)	71,162	-	(1,220,918)	Office equipments
Leasehold improvement	(722,065)	(44,946)	187,312	-	(579,699)	Leasehold improvement
	(2,251,439)	(257,957)	283,366	-	(2,226,030)	
Aset hak guna	(657,772)	(225,718)	118,843	-	(764,647)	Right-of-use assets
	(2,909,211)	(483,675)	402,209	-	(2,990,677)	
Nilai buku bersih	2,243,790				2,118,505	Net book value

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Detail of the gain on sale of fixed assets was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Hasil atas penjualan aset tetap	5,877	5,569	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Nilai buku bersih	(1,233)	(1,959)	<i>Net book value</i>
Keuntungan penjualan aset tetap	<u>4,644</u>	<u>3,610</u>	<i>Gains on sale of fixed assets</i>

Aset hak-guna meliputi transaksi sewa yang dilakukan Bank dimana Bank menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 3 - 10 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa dengan tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir. Bank juga menyewa kendaraan dan peralatan dengan periode kontrak 2 - 5 tahun, apartemen dan rumah dinas dengan periode kontrak 2 tahun, dan peralatan IT dan mesin dengan periode kontrak 3 - 5 tahun.

The right-of-use assets include the Bank's lease transactions whereby the Bank leases buildings for its office. The leases of office space typically run for a period of 3 - 10 years. Some leases include an option to renew the lease for an additional period of the same duration after the end of the contract term. The Bank also leases vehicles and equipment with contract terms of 2 - 5 years, apartments, and employee residences with contract terms of 2 years and IT equipment and machinery with contract terms of 3 - 5 years.

Aset hak-guna juga meliputi transaksi sewa yang dilakukan Entitas Anak dimana Entitas Anak menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 3 - 10 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa dengan tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir. Entitas Anak juga menyewa kendaraan dan peralatan dengan periode kontrak 3 - 5 tahun dan peralatan IT dan mesin dengan periode kontrak 3 - 5 tahun.

The right-of-use assets also include the Subsidiary's lease transactions whereby the Subsidiary leases buildings for its office. The leases of office space typically run for a period of 3 - 10 years. Some leases include an option to renew the lease for an additional period of the same duration after the end of the contract term. The Subsidiary also leases vehicles and equipment with contract terms of 3 - 5 years and IT equipment and machinery with contract terms of 3 - 5 years.

Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 43.875 dan Rp 56.150 merupakan gedung yang disewa dari pihak ketiga dan masih dalam tahap renovasi dan perlengkapan kantor yang masih dalam tahap konstruksi. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2023 dengan persentase penyelesaian adalah antara 45% - 55% pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: 4% - 96%).

Assets under construction as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 43,875 and Rp 56,150, respectively, related to buildings that were rented from third parties but was still in the renovation progress and office equipments that were still under construction. Those constructions are estimated to be completed in 2023 with current percentages of completion between 45% - 55% as of 31 December 2023 (31 December 2022: 4% - 96%).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga (disajikan sebesar nilai pertanggungan):

As of 31 December 2023 and 2022, fixed assets, except for land, have been insured by the third party insurance companies (presented at sum insured):

	31 Desember/December		
	2023	2022	
PT Asuransi MSIG Indonesia	1,091,423	1,067,112	<i>PT Asuransi MSIG Indonesia</i>
PT Zurich General Takaful Indonesia (sebelumnya PT Asuransi Adira Dinamika Syariah)	178,786	153,391	<i>PT Zurich General Takaful Indonesia (before PT Asuransi Adira Dinamika Syariah)</i>
Jumlah	<u>1,270,209</u>	<u>1,220,503</u>	<i>Total</i>

Nilai buku untuk aset yang diasuransikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 767.559 dan Rp 933.949.

The book value of the assets insured as of 31 December 2023 and 2022 is Rp 767,559 and Rp 933,949.

Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

The Group believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the fixed assets.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak diperlukan perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

Penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 238.251 dan Rp 257.957 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 33).

Penyusutan aset hak guna untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 211.586 dan Rp 225.718 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 33).

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Grup adalah sebesar Rp 1.414.538 (31 Desember 2022: Rp 1.248.960).

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan dan semua aset tetap tidak dibatasi kepemilikannya.

Revaluasi tanah

Penilaian atas tanah terakhir dilakukan untuk periode berakhir 30 September 2023 oleh KJPP Susan Widjojo dan Rekan, penilai properti independen eksternal yang telah terdaftar di OJK, yang memenuhi kualifikasi profesional dan berpengalaman di lokasi dan kategori aset yang dinilai, dengan nomor laporan 00341/2.0068-00/PI/07/0525/1/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023.

Penilaian dilakukan berdasarkan POJKRI No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, serta Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII tahun 2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018). Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

- a) Jenis dan hak yang melekat pada properti
- b) Karakteristik tanah
- c) Kondisi pasar
- d) Kondisi ekonomi
- e) Letak dan waktu

14. FIXED ASSETS (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, the Group performed a review on useful life, depreciation method and residual value of fixed assets and concluded that no change in these method and assumptions was necessary.

The depreciation of fixed assets for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 238,251 and Rp 257,957, was charged to general and administrative expenses (Note 33).

The depreciation of right-of-use asset for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 211,586 and Rp 225,718, respectively, was charged to general and administrative expenses (Note 33).

As of 31 December 2023, fixed assets that have been fully depreciated but were still in use to support the Group's operational activities amounted to Rp 1,414,538 (31 December 2022: Rp 1,248,960).

The Group's management believes that there was no indication of impairment in the value of fixed assets as of 31 December 2023 and 2022.

As of 31 December 2023 and 2022, there was no fixed asset pledged as collateral and no limitation on the ownership of fixed assets.

Revaluation of land

The valuations of land were last performed for period ended 30 September 2023 by KJPP Susan Widjojo dan Rekan, an external independent property appraiser which are registered with OJK, who fulfills the professional qualifications and experience in the location and category of the assets being valued, with report number 00341/2.0068-00/PI/07/0525/1/XII/2023 dated 7 December 2023.

Valuations were performed based on POJKRI No. 28/POJK.04/2021 about Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market, as well as the Indonesian Appraisal Code of Ethics and Indonesian Valuation Standards VII Edition 2018 (KEPI & SPI VII Edition-2018). The valuation method used was market value approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets, among others were as follows:

- a) Types and rights attached to the property
- b) Land characteristics
- c) Market condition
- d) Economy condition
- e) Location and time

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi tanah (lanjutan)

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset non-keuangan:

- *Level 1*: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik.
- *Level 2*: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- *Level 3*: Input yang tidak dapat diobservasi.

Pengukuran nilai wajar diatas dikategorikan sebagai nilai wajar *Level 2* berdasarkan input-input dalam teknik penilaian yang digunakan.

Selisih penilaian kembali tanah pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat sebagai keuntungan revaluasi aset tetap dan disajikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 79.772 (31 Desember 2022: nihil).

Jumlah harga perolehan tanah Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 80.254 dan Rp 81.352.

14. FIXED ASSETS (continued)

Revaluation of land (continued)

Fair values are determined using the following hierarchy of input used in the valuation techniques for non-financial assets:

- *Level 1*: Inputs that are derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets.
- *Level 2*: Inputs other than quoted market price included in level 1 that are observable either directly or indirectly.
- *Level 3*: Inputs that are unobservable

The above fair value measurement has been categorized as *Level 2* fair value based on the inputs to the valuation technique used.

The differences arising on land of revaluation as of 31 December 2023 were recorded as gain on revaluation of fixed assets and presented in other comprehensive income amounting to Rp 79,772 (31 December 2022: nil).

The acquisition cost of the Group's land as of 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 80,254 and Rp 81,352, respectively.

15. ASET TAKBERWUJUD DAN GOODWILL

15. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL

Tahun berakhir 31 Desember 2023/
Year ended 31 December 2023

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Cost
Piranti lunak	2,799,890	63,154	(31,036)	400,006	3,232,014	Software
Pengembangan piranti lunak	376,931	273,921	-	(402,827)	248,025	Software development
Goodwill	61,116	-	-	-	61,116	Goodwill
	<u>3,237,937</u>	<u>337,075</u>	<u>(31,036)</u>	<u>(2,821)</u>	<u>3,541,155</u>	
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Piranti lunak	(2,161,199)	(316,310)	28,329	(2,591)	(2,451,771)	Software
Nilai buku bersih	<u>1,076,738</u>				<u>1,089,384</u>	Net book value

Tahun berakhir 31 Desember 2022/
Year ended 31 December 2022

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Cost
Piranti lunak	2,439,241	33,680	-	326,969	2,799,890	Software
Pengembangan piranti lunak	346,409	400,160	(34,299)	(335,339)	376,931	Software development
Goodwill	61,116	-	-	-	61,116	Goodwill
	<u>2,846,766</u>	<u>433,840</u>	<u>(34,299)</u>	<u>(8,370)</u>	<u>3,237,937</u>	
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Piranti lunak	(1,810,085)	(351,114)	-	-	(2,161,199)	Software
Nilai buku bersih	<u>1,036,681</u>				<u>1,076,738</u>	Net book value

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TAKBERWUJUD DAN GOODWILL
(lanjutan)

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak adalah 1 sampai dengan 8 tahun.

Goodwill merupakan selisih antara nilai perolehan dengan nilai wajar dari aset Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun 2014 dimana Bank mengakuisisi 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang PT BANK BTPN SYARIAH Tbk).

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset takberwujud dan *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Amortisasi aset takberwujud untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 316.310 dan Rp 351.114 dan dibebankan sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 33).

15. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL
(continued)

The remaining amortization period of software is 1 to 8 years.

Goodwill represents the difference between the cost of acquisition and the fair value of Subsidiary's assets acquired in 2014 where the Bank acquired 70% of PT Bank Sahabat Purba Danarta's shares (now PT BANK BTPN SYARIAH Tbk).

The Group's management believes that there was no impairment in the value of intangible assets and goodwill as of 31 December 2023 and 2022.

The amortization of intangible assets for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 316,310 and Rp 351,114, respectively, and was charged to general and administrative expenses (Note 33).

16. ASET LAIN-LAIN – BERSIH

16. OTHER ASSETS – NET

	31 Desember/December		
	2023	2022	
<i>Term Deposit</i> DHE	250,201	-	<i>DHE Term Deposit</i>
Jaminan kontrak	244,939	198,481	<i>Security deposits</i>
Transaksi ATM dan transfer	105,978	102,013	<i>ATM transaction and transfer</i>
Tagihan kredit lainnya	97,385	68,099	<i>Other credit receivables</i>
Agunan yang diambil alih	91,459	11,031	<i>Foreclosed collaterals</i>
Wesel ekspor lainnya	35,578	-	<i>Other export bills</i>
Tagihan penyelesaian surat berharga	33,286	6,471	<i>Receivables from sales of securities</i>
Properti terbengkalai	21,099	-	<i>Abandoned property</i>
Uang muka	14,834	114,943	<i>Advance payment</i>
Persediaan keperluan kantor	7,176	10,882	<i>Office supplies</i>
Tagihan kepada asuransi	7,145	10,134	<i>Receivables from insurance company</i>
Lain-lain	87,886	16,258	<i>Others</i>
	<u>996,966</u>	<u>538,312</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(105,572)</u>	<u>(52,507)</u>	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
	<u><u>891,394</u></u>	<u><u>485,805</u></u>	

Term Deposit DHE adalah instrumen untuk memfasilitasi penempatan Dana Hasil Ekspor (DHE) oleh eksportir di Bank Indonesia, dengan mekanisme *pass on* transaksi bank dengan nasabah (eksportir) kepada Bank Indonesia. Bank mencatat *Term Deposit* DHE tersebut pada akun aset lain-lain dan kewajiban kepada nasabah (eksportir) pada akun liabilitas lain-lain dengan nilai yang sama.

Jaminan kontrak merupakan pembayaran atas uang jaminan sewa gedung, sewa IT dan setoran jaminan lembaga *switching* untuk transaksi *real time transfer*.

Transaksi ATM dan transfer terdiri dari piutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya.

Tagihan kredit lainnya terdiri dari tagihan bunga yang masih tertunggak dari debitur sebelum restrukturisasi dan penalti keterlambatan bayar untuk pinjaman yang diberikan.

DHE Term Deposit is an instrument to facilitate the placement of Dana Hasil Ekspor (DHE) by exporters at Bank Indonesia, with a pass-on mechanism for bank transactions with customers (exporters) to Bank Indonesia. The Bank records DHE Term Deposit in the other assets account and liabilities to customers (exporters) in the other liabilities account with same amount.

Security deposits represent security deposits payment on building rent, IT rent and switching agent pre-fund deposits for real time transfer transactions.

ATM transaction and transfer consists of receivables from ATM transaction and transfer from other banks that will be settled on the following working day.

Other credit receivables consist of overdue interest receivables from debtors prior to restructuring and penalty for late payments of loans.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET LAIN-LAIN – BERSIH (lanjutan)

Wesel ekspor lainnya adalah tagihan yang timbul dari negosiasi dokumen wesel ekspor dalam transaksi *usance L/C* yang belum diakseptasi.

Tagihan penyelesaian surat berharga merupakan tagihan yang akan diterima dari pihak ketiga atas penjualan surat berharga yang belum diselesaikan pada akhir hari.

Uang muka merupakan uang muka pembelian inventaris, beban perjalanan dinas dan uang muka operasional lainnya.

Persediaan keperluan kantor merupakan persediaan atas formulir aplikasi, materai, kartu ATM dan cek.

Tagihan kepada asuransi adalah klaim kepada pihak asuransi atas uang pesangon karyawan dan klaim pengembalian premi nasabah kredit pensiun.

Lain-lain terdiri dari berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dibentuk sebagian besar untuk tagihan kredit lainnya. Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain adalah sebagai berikut:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Saldo awal	(52,507)	(722)	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	(53,065)	(52,313)	<i>Provision during the year (Note 34)</i>
Lain-lain	-	528	<i>Others</i>
Saldo akhir	<u>(105,572)</u>	<u>(52,507)</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

16. OTHER ASSETS – NET (continued)

Other export bills are receivables from negotiation of export bills in usance L/C transactions which have not been accepted.

Receivables from sales of securities represent receivables from third parties for sales of securities which have not been settled at the end of the day.

Advance payment consists of advances for purchase on office supplies, business trip allowances and other operational advances.

Office supplies represent supply of application forms, stamps, ATM cards and cheques.

Receivables from insurance companies are the claim to the insurance companies on employees' severance pay and premium refund claim for pension loan's debtors.

Others mainly consist of various receivables from transactions with third parties.

Allowance for impairment losses for other assets as of 31 December 2023 and 2022 was made mainly made for other credit receivables. The movement of the allowance for impairment losses for other assets was as follows:

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on other assets as of 31 December 2023 and 2022.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS SEGERA

Seluruh liabilitas segera dengan pihak ketiga.

17. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

All obligations due immediately were to third parties.

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah:			Rupiah:
Titipan transaksi surat berharga	19,844	2,672	Unsettled securities transaction
Hutang kepada pihak ketiga	16,336	31,153	Payables to third parties
Kewajiban penutupan tabungan	14,253	-	Saving deposit closing obligation
Titipan bagi hasil deposito	3,943	2,887	Unsettled profit-sharing of time deposits
Titipan uang notaris	1,296	1,898	Unsettled notary transactions
Kiriman uang yang belum diselesaikan	580	8,908	Unsettled remittance transactions
Titipan uang pensiun	905	797	Unsettled pension funds
Lain-lain	9,878	4,696	Others
	<u>67,035</u>	<u>53,011</u>	
Mata uang asing:			Other currencies:
Titipan transaksi surat berharga	4,565	-	Unsettled securities transaction
Kewajiban penutupan tabungan	6	-	Saving deposit closing obligation
Kiriman uang yang belum diselesaikan	-	6,034	Unsettled remittance transactions
	<u>71,606</u>	<u>59,045</u>	

Titipan transaksi surat berharga merupakan tampungan atas uang penjualan surat berharga yang belum diselesaikan.

Unsettled securities transaction represent the payment of securities that have not been settled.

Titipan uang pensiun merupakan tampungan uang pembayaran pensiun nasabah yang akan dibayarkan ke rekening nasabah.

Unsettled pension funds represent the customer's retirement payments that will be paid to the customer's bank account.

18. SIMPANAN NASABAH

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pihak ketiga:			Third parties:
- Giro	26,578,680	23,708,094	Current accounts -
- Tabungan	16,580,693	15,572,990	Savings deposits -
- Deposito berjangka	40,975,031	64,560,849	Time deposit -
- Deposito on call	13,659,076	100,470	Deposits on call -
	<u>97,793,480</u>	<u>103,942,403</u>	
Pihak berelasi:			Related parties:
- Giro	50,003	57,708	Current accounts -
- Tabungan	88,170	59,543	Savings deposits -
- Deposito berjangka	106,953	963,633	Time deposits -
- Deposito on call	239,150	-	Deposits on call -
	<u>484,276</u>	<u>1,080,884</u>	
	<u>98,277,756</u>	<u>105,023,287</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	179,647	145,624	Accrued interest expenses
	<u>98,457,403</u>	<u>105,168,911</u>	
Berdasarkan mata uang:			By currency:
			Deposits from customers:
Simpanan nasabah:			Rupiah
Rupiah	75,476,253	82,507,890	United States Dollar
Dolar Amerika Serikat	19,815,371	20,798,083	Japanese Yen
Yen Jepang	2,564,810	1,353,262	Other foreign currencies
Mata uang asing lainnya	421,322	364,052	
	<u>98,277,756</u>	<u>105,023,287</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	179,647	145,624	Accrued interest expenses
	<u>98,457,403</u>	<u>105,168,911</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Giro

Berdasarkan mata uang:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Rupiah	15,846,676	12,273,465
Dolar Amerika Serikat	8,735,833	10,174,982
Yen Jepang	1,928,682	1,144,277
Mata uang asing lainnya	117,492	173,078
	<u>26,628,683</u>	<u>23,765,802</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	5,960	1,489
	<u>26,634,643</u>	<u>23,767,291</u>

Giro Wadiah yang dikelola oleh Entitas Anak masing-masing sebesar Rp 24.009 dan Rp 27.645 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2023	2022
Rupiah	1.64%	1.64%
Mata uang asing	1.85%	0.40%

Saldo giro yang diblokir masing-masing sebesar Rp 329.041 dan Rp 129.432 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pemblokiran giro sebagian besar dikarenakan giro tersebut diperuntukkan sebagai akun tampungan untuk cicilan pinjaman yang diberikan dan sebagai agunan pinjaman yang diberikan.

b. Tabungan

Berdasarkan jenis:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Tabungan "Jenius"	11,414,116	9,750,254
Tabungan "Citra Pensiun"	2,155,288	2,174,755
Tabungan "Tepat Tabungan Kelompok Syariah"	2,140,799	2,109,497
Tabungan "Se To"	738,244	1,274,056
Tabungan "Pasti"	154,263	197,149
Tabungan "Tepat Tabungan"	57,010	50,451
Tabungan "Wadiah WOW iB"	-	17,540
Lain-lain	9,143	58,831
	<u>16,668,863</u>	<u>15,632,533</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	1,499	1,659
	<u>16,670,362</u>	<u>15,634,192</u>

a. Current accounts

By currency:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Rupiah	15,846,676	12,273,465
United States Dollar	8,735,833	10,174,982
Japanese Yen	1,928,682	1,144,277
Other foreign currencies	117,492	173,078
	<u>26,628,683</u>	<u>23,765,802</u>
Accrued interest expenses	5,960	1,489
	<u>26,634,643</u>	<u>23,767,291</u>

Wadiah current account managed by Subsidiary amounted to Rp 24,009 and Rp 27,645 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

The average interest rate per annum for current accounts:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2023	2022
Rupiah	1.64%	1.64%
Foreign currencies	1.85%	0.40%

Total current accounts which were blocked amounted to Rp 329,041 and Rp 129,432 as of 31 December 2023 and 2022, respectively. The blocking of current accounts is mainly because the current accounts are designated as escrow accounts for loan installments and as collaterals for loans.

b. Saving deposits

By type:

	31 Desember/December	
	2023	2022
"Jenius" Savings	11,414,116	9,750,254
"Citra Pensiun" Savings	2,155,288	2,174,755
"Tepat Tabungan Kelompok Syariah" Savings	2,140,799	2,109,497
"Se To" Savings	738,244	1,274,056
"Pasti" Savings	154,263	197,149
"Tepat Tabungan" Savings	57,010	50,451
"Wadiah WOW iB" Savings	-	17,540
Others	9,143	58,831
	<u>16,668,863</u>	<u>15,632,533</u>
Accrued interest expenses	1,499	1,659
	<u>16,670,362</u>	<u>15,634,192</u>

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

b. Tabungan (lanjutan)

Berdasarkan mata uang:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Simpanan nasabah			<i>Deposits from customers</i>
Rupiah	15,660,285	14,946,057	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerikat Serikat	543,438	344,625	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	215,605	150,877	<i>Japanese Yen</i>
Mata uang asing lainnya	249,535	190,974	<i>Other foreign currencies</i>
	<u>16,668,863</u>	<u>15,632,533</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	1,499	1,659	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>16,670,362</u>	<u>15,634,192</u>	

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Saving deposits (continued)

By currency:

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun:

Average interest rate per annum for saving deposits:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Rupiah	1.86%	1.60%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	1.34%	0.17%	<i>Foreign currencies</i>

Saldo tabungan yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 4.384.408 dan Rp 3.989.159. Pemblokiran tabungan sebagian besar dikarenakan tabungan tersebut diperuntukkan sebagai dana nasabah yang tidak dapat ditarik hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Total saving deposits which were blocked as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 4,384,408 and Rp 3,989,159, respectively. The blocking of saving accounts is mainly because the saving accounts are designated as customer funds that cannot be withdrawn until the specified maturity date.

c. Deposito berjangka

Berdasarkan mata uang:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Deposito berjangka			<i>Time Deposits</i>
Rupiah	35,300,062	55,187,898	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	5,673,926	10,278,476	<i>United States Dollar</i>
Dolar Singapura	54,295	-	<i>Singapore dollar</i>
Yen Jepang	53,701	58,108	<i>Japanese Yen</i>
	<u>41,081,984</u>	<u>65,524,482</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	143,663	142,423	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>41,225,647</u>	<u>65,666,905</u>	

c. Time deposits

By currency:

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

Berdasarkan jangka waktu:

By time period:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Hingga 1 bulan	24,720,307	50,280,859	<i>Up to 1 month</i>
Lebih dari 1 - 3 bulan	11,175,601	11,510,339	<i>More than 1 - 3 months</i>
Lebih dari 3 - 6 bulan	2,601,838	2,153,881	<i>More than 3 - 6 months</i>
Lebih dari 6 - 12 bulan	2,570,983	1,557,581	<i>More than 6 - 12 months</i>
Lebih dari 1 tahun	13,255	21,822	<i>More than 1 year</i>
	<u>41,081,984</u>	<u>65,524,482</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	143,663	142,423	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>41,225,647</u>	<u>65,666,905</u>	

Berdasarkan tingkat suku bunga:

By interest rate:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Hingga 3%	679,070	5,874,336	<i>Up to 3%</i>
Lebih dari 3 - 5%	25,049,460	53,118,373	<i>More than 3 - 5%</i>
Lebih dari 5 - 7%	15,353,454	6,531,773	<i>More than 5 - 7%</i>
	<u>41,081,984</u>	<u>65,524,482</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	143,663	142,423	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>41,225,647</u>	<u>65,666,905</u>	

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito:

Average interest rate per annum for time deposits:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Rupiah	4.78%	3.31%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	4.03%	1.73%	<i>Foreign currencies</i>

Saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 265.002 dan Rp 377.514. Pemblokiran deposito berjangka sebagian besar dikarenakan deposito berjangka tersebut diperuntukkan sebagai agunan pinjaman yang diberikan dan sebagai akun tampungan untuk cicilan pinjaman yang diberikan.

Total time deposits blocked or pledged for collaterals of loans as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 265,002 and Rp 377,514, respectively. The blocking of time deposits is mainly because the time deposits are designated as collateral for loans and escrow accounts for loan installments.

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

d. Deposito on call

d. Deposits on call

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Deposito on call			<i>Deposits on call</i>
Rupiah	8,669,230	100,470	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	4,862,174	-	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	366,822	-	<i>Japanese Yen</i>
	<u>13,898,226</u>	<u>100,470</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	28,525	53	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>13,926,751</u>	<u>100,523</u>	

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito on call:

Average interest rate per annum for deposits on call:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Rupiah	4.59%	2.06%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	4.33%	-	<i>Foreign currencies</i>

19. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pihak ketiga	1,253,579	18,779	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	9,561,059	147,352	<i>Related parties</i>
	<u>10,814,638</u>	<u>166,131</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>10,822,121</u>	<u>166,131</u>	

a. Berdasarkan jenis:

a. By type:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Call money	10,463,200	-	<i>Call money</i>
Giro	349,438	164,131	<i>Current accounts</i>
Deposito berjangka	2,000	2,000	<i>Time deposits</i>
	<u>10,814,638</u>	<u>166,131</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>10,822,121</u>	<u>166,131</u>	

Tidak ada saldo simpanan dari bank-bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

There were no deposits from other banks which were blocked or pledged as of 31 December 2023 and 2022.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan mata uang:

b. By currency:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Rupiah	1,576,438	166,131	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	9,238,200	-	<i>United States Dollar</i>
	<u>10,814,638</u>	<u>166,131</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>10,822,121</u>	<u>166,131</u>	

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

c. Average interest rate per annum:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Call money	6.17%	4.35%	<i>Call money</i>
Deposito berjangka	2.44%	1.90%	<i>Time deposits</i>
Giro	0.00%	0.06%	<i>Current accounts</i>
Dolar Amerika Serikat			<i>United States Dollar</i>
Call money	6.03%	1.20%	<i>Call money</i>

d. Jangka waktu:

d. Time period:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Sesuai permintaan	349,438	164,131	<i>On demand</i>
Hingga 1 bulan	8,592,545	-	<i>Up to 1 month</i>
Lebih dari 1 - 3 bulan	1,872,655	2,000	<i>More than 1 - 3 months</i>
	<u>10,814,638</u>	<u>166,131</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>10,822,121</u>	<u>166,131</u>	

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

20. SECURITIES ISSUED

Utang obligasi

Bonds payable

	Peringkat/ Rating*)	31 Desember/December		
		2023	2022	
Nilai nominal: - Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	AAA(idn)	201,000	201,000	Nominal value: Continuing Bonds IV - Phase I
Dikurangi: Biaya emisi yang belum diamortisasi		(431)	(866)	Less: Unamortized bonds issuance costs
Ditambah: Beban bunga yang masih harus dibayar		1,514	1,514	Add: Accrued interest expenses
		<u>202,083</u>	<u>201,648</u>	
Utang obligasi sesuai dengan jangka waktunya: Lebih dari 3 tahun		201,000	201,000	Bonds payable based on time period: More than 3 years
		<u>201,000</u>	<u>201,000</u>	

*) Berdasarkan peringkat dari PT Fitch Ratings Indonesia

*) Based on rating by PT Fitch Ratings Indonesia

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Other information relating to bonds payable as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

Seri/ Series	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Tanggal penerbitan/ Date of issuance	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
<u>Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I/Continuing Bonds IV Phase I:</u>					
Seri/ Series A	799,000	7.55%	27 November/ November 2019	26 November/ November 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Series B	201,000	7.75%	27 November/ November 2019	26 November/ November 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 bulan dan pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo. Bank telah melakukan pembayaran pokok dan bunga obligasi sesuai dengan jadwal.

Bonds interests are paid every 3 months and bonds principals are paid on the maturity date. The Bank has paid the bonds principal and interest based on the schedule.

Perjanjian perwalianan mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank, antara lain tidak menerbitkan obligasi lain atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit.

The trustee agreements provide several negative covenants to the Bank, among others, not issuing another bonds or other similar debt instrument with higher collecting right as compared to Continuing Bonds IV Phase I and collateralized with asset, except loans and facilities from bilateral interbank loan and bilateral facilities from Bank Indonesia which are secured with assets in the amount of 20% from assets which are calculated from the last audited financial statements.

Bank berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok obligasi. Bank telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

The Bank should keep the total assets that have not been specifically pledged at the minimum 125% from total issued bonds including bonds principal. The Bank has complied with the covenants on the trustee agreement.

Beban bunga atas utang obligasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 16.013 dan Rp 73.082 (Catatan 30).

The interest expenses of bonds payable for for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 16,013 and Rp 73,082, respectively (Note 30).

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman bukan bank yang dilakukan dengan pihak berelasi dan pihak ketiga.

21. BORROWINGS

Borrowings consists of bank borrowings and non-bank borrowings with related parties and third parties.

	31 Desember/ December		
	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties:
Pinjaman bank:			Bank borrowings:
PT Bank Central Asia Tbk	6,000,000	4,500,000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	-	1,000,000	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	100,000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
	<u>6,000,000</u>	<u>5,600,000</u>	
Pinjaman bukan bank:			Non-bank borrowings:
International Finance Corporation	6,682,950	2,063,850	International Finance Corporation
	<u>12,682,950</u>	<u>7,663,850</u>	
Pihak berelasi			Related party:
Pinjaman bank:			Bank borrowings:
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	18,569,798	37,257,744	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
	<u>31,252,748</u>	<u>44,921,594</u>	
Dikurangi:			Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48,251)	(9,988)	Unamortized transaction costs
Ditambah:			Add:
Beban bunga yang masih harus dibayar	151,020	155,802	Accrued interest expenses
	<u>31,355,517</u>	<u>45,067,408</u>	

a. Pinjaman bank

Jumlah pokok pinjaman berdasarkan jangka waktu:

a. Bank borrowings

Borrowing principals amount based on time period:

	31 Desember/ December		
	2023	2022	
Hingga 1 tahun	-	1,000,000	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	16,392,975	4,600,000	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 3 tahun	170,383	8,017,262	More than 2 - 3 years
Lebih dari 3 tahun	8,006,440	29,240,482	More than 3 years
	<u>24,569,798</u>	<u>42,857,744</u>	
Ditambah:			Add:
Beban bunga yang masih harus dibayar	52,745	107,801	Accrued interest expenses
	<u>24,622,543</u>	<u>42,965,545</u>	

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk

Bank memiliki 5 fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank Central Asia Tbk yang ditandatangani pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2022, dengan total fasilitas sebesar Rp 6.000.000, dengan detail sebagai berikut:

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk

The Bank had 5 Bilateral Borrowing facilities from PT Bank Central Asia Tbk which were signed during 2009 to 2022, with total facilities amounted to Rp 6,000,000, with details as follows:

a) Perjanjian pinjaman *revolving Term Loan I* sebesar Rp 500.000 yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2009 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2022.

a) *The facility agreement of revolving Term Loan I amounting to Rp 500,000 was signed on 15 May 2009 and had been extended several times with the latest extension was signed on 12 May 2022.*

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

**Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk
(lanjutan)**

- a) Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Fasilitas harus ditarik dalam 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40% berlaku sejak tanggal 13 Mei 2022 hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

Pada tanggal 28 Desember 2023, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 500.000, dengan jatuh tempo pada 13 Mei 2025.

- b) Perjanjian pinjaman Revolving Term Loan III sebesar Rp 1.000.000 yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 27 September 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40% terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

Pada tanggal 25 April 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 29 September 2023.

Pada tanggal 22 Desember 2023, Bank melakukan penarikan kembali atas fasilitas ini sebesar Rp 1.000.000, dengan jatuh tempo pada 1 April 2025.

21. BORROWINGS (continued)

a. Bank borrowings (continued)

**Bilateral Borrowing with PT Bank Central
Asia Tbk (continued)**

- a) *Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 18 (eighteen) months from the date of agreement.*

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.40% shall be calculated from 13 May 2022 until the final maturity date.

On 28 December 2023, the Bank made a withdrawal of Rp 500,000, with a maturity date on 13 May 2025.

- b) *The facility agreement of Revolving Term Loan III amounting to Rp 1,000,000 was signed on 1 April 2015 and had been extended several times with the latest extension was signed on 27 September 2023.*

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 6 (six) month of the date of agreement.

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid of every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.40% and calculated from 1 October 2023 until the Final Maturity Date.

On 25 April 2022, The Bank made a withdrawal of Rp 1,000,000. The loan has been repaid on 29 September 2023.

On 22 December 2023, the Bank made an another withdrawal amounted Rp 1,000,000, with a maturity date on 1 April 2025.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

**Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk
(lanjutan)**

- c) Perjanjian pinjaman *Non-revolving Term Loan IV* sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas terakhir, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian kredit. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,4%.

Pada tanggal 28 Desember 2023, Bank melakukan penarikan kembali atas fasilitas ini sebesar Rp 1.000.000, dengan jatuh tempo pada 24 November 2024.

- d) Perjanjian pinjaman *Non-revolving Term Loan II* sebesar Rp 2.500.000 ditandatangani pada tanggal 29 April 2020 dan telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,4%.

Pada tanggal 4 Mei 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 2.500.000, dengan jatuh tempo pada 4 November 2024.

- e) Perjanjian pinjaman *Revolving Term Loan VI* sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani pada tanggal 29 November 2022.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

21. BORROWINGS (continued)

a. Bank borrowings (continued)

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk (continued)

- c) *The facility agreement of Non-revolving Term Loan IV amounting Rp 1,000,000 was signed on 10 June 2015 and had been extended several times with the latest extension was signed on 24 May 2023.*

Based on the latest facility agreement, the availability period will be ended within 1 (one) month from the date of agreement. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.4%.

On 28 December 2023, the Bank made another withdrawal on this facility amounted Rp 1,000,000, with a maturity date on 24 November 2024.

- d) *The facility agreement of Non-revolving Term Loan II amounting Rp 2,500,000 was signed on 29 April 2020 and had been amended with the latest amendment signed on 4 May 2023.*

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 6 (six) months from the date of agreement.

The interest period is 3 (three) months and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.4%.

On 4 May 2022, the Bank made a withdrawal of Rp 2,500,000, with a maturity date on 4 November 2024.

- e) *The facility agreement of Revolving Term Loan VI amounting Rp 1,000,000 was signed on 29 November 2022.*

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 6 (six) months from the date of agreement.

The facility should be fully drawdown within 18 (eighteen) months from the date of agreement.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman bank (lanjutan)

**Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk
(lanjutan)**

- e) Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,4%.

Pada tanggal 29 Mei 2023, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000, dengan jatuh tempo pada 29 Mei 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank telah menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Pada tanggal 31 Desember 2022, total fasilitas PT Bank Central Asia Tbk yang belum digunakan adalah sebesar Rp 1.500.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang dipersyaratkan.

Pinjaman Bilateral PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 2021, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit - *committed term loan* sebesar Rp 1.000.000 dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai kreditur. Tujuan pinjaman adalah untuk modal kerja Bank.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Fasilitas kredit harus ditarik sepenuhnya dalam batas waktu penarikan dengan ketentuan jumlah minimum penarikan adalah Rp 500.000 atau sebesar jumlah fasilitas kredit yang belum ditarik.

Pinjaman harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian pinjaman. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,25%, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo.

21. BORROWINGS (continued)

b. Bank borrowings (continued)

**Bilateral Borrowing with PT Bank Central
Asia Tbk (continued)**

- e) *The interest period is 3 (three) months and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.4%.*

On 29 May 2023, the Bank made a withdrawal of Rp 1,000,000, with a maturity date on 29 May 2024.

As of 31 December 2023, the Bank has utilized all borrowing facility. As of 31 December 2022, total unused facility from PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp 1,500,000.

As of 31 December 2023 and 2022, based on the agreement there was no certain covenant which was required to be maintained.

**Bilateral Borrowing with PT Bank UOB
Indonesia**

On 18 August 2021, the Bank signed Committed term loan facility agreement amounting to Rp 1,000,000 with PT Bank UOB Indonesia as the creditor. The purpose of the borrowing is for the Bank's working capital.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended on the 6 (sixth) month from the date of agreement.

The facility should be fully drawdown within the availability period with minimum drawdown amount is Rp 500,000 or any remaining undrawn amount.

The borrowing should be repaid within 12 (twelve) months after the date of borrowings agreement. Interest period is 3 (three) months based on the benchmark interest rate of 3 months + 0.25%, with interest payments are made at each maturity date.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

**Pinjaman Bilateral PT Bank UOB Indonesia
(lanjutan)**

Pada tanggal 25 Februari 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000. Perjanjian ini telah berakhir dan dilunasi pada tanggal 25 Agustus 2022.

Pada tanggal 23 September 2022, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit – committed term loan sebesar Rp 1.000.000 dengan PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan perjanjian fasilitas, jangka waktu fasilitas 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal fasilitas. Tanggal fasilitas adalah tanggal dimana dilakukan penarikan untuk pertama kali atau 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal perjanjian Kredit, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

Batas waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal fasilitas. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,3%, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 12 Oktober 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000. Perjanjian ini telah berakhir dan dilunasi pada tanggal 29 September 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman yang ada.

Pinjaman PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 13 Desember 2021, Entitas Anak mendapatkan fasilitas pinjaman dengan akad mudharabah yang diberikan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp 100.000. Fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Tujuan pinjaman adalah untuk menunjang bisnis Entitas Anak.

Penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp 100.000 dengan indikasi bagi hasil setara 5%. Entitas Anak telah melunasi pinjaman pada tanggal 9 Maret 2023.

21. BORROWINGS (continued)

a. Bank borrowings (continued)

**Bilateral Borrowing with PT Bank UOB
Indonesia (continued)**

On 25 February 2022, the Bank drawdown this loan at amount of Rp 1,000,000. The facility has been expired and repaid on 25 August 2022.

On 23 September 2022, the Bank signed Committed term loan facility agreement amounting to Rp 1,000,000 with PT Bank UOB Indonesia.

Based on the facility agreement, The facility should be fully drawdown within 12 (twelve) months from the date of facility. The facility date is the date on which a withdrawal is made for the first time or 5 (five) Business Days after the date of the Agreement, whichever occurs first.

The availability period will be ended on the 6 (sixth) month from the date of facility. Interest period is 3 (three) months based on the JIBOR interest rate of 3 months + 0.3%, with interest payments are made at each maturity date.

On 12 October 2022, the Bank made a withdrawal of Rp 1,000,000. The facility has been expired and repaid on 29 September 2023.

As of 31 December 2023, the Bank has paid off all borrowing facility.

Borrowing PT Bank Maybank Indonesia Tbk

On 13 December 2021, the Subsidiary obtained a borrowing facility on the basis of mudharabah provided by PT Bank Maybank Indonesia Tbk in the amount of Rp 100,000. The facility is valid until 13 December 2022. The purpose of the borrowing is to support the Subsidiary's business.

Withdrawal of borrowing was carried out on 9 March 2022 in the amount of Rp 100,000 with an indication of profit sharing equivalent to 5%. The Subsidiary has fully paid the borrowing on 9 March 2023.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

Pinjaman Bilateral Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura

Bank mendapatkan *revolving long-term borrowings* dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura, dengan total fasilitas setara dengan USD 3.625.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS atau jumlah yang setara dari jumlah tersebut dalam mata uang selain dari Dolar AS dan Dolar Singapura.

Total pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 1.195.000.000 (nilai penuh) dan EUR 10.000.000 (nilai penuh) (31 Desember 2022: USD 2.372.000.000 (nilai penuh) dan EUR 20.000.000 (nilai penuh)).

Pinjaman ini akan jatuh tempo berkisar antara tanggal 30 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025.

Tingkat suku bunga kontraktual setahun atas pinjaman jangka panjang ini adalah *cost of fund* ditambah margin tertentu. Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2023, margin yang diterapkan adalah 0,50% (untuk total pinjaman USD 1.195.000.000 (nilai penuh) dan EUR 10.000.000 (nilai penuh)). Untuk posisi 31 Desember 2022, margin yang diterapkan adalah 0,66% (untuk total pinjaman USD 355.000.000 (nilai penuh)) dan 0,50% (untuk total pinjaman USD 2.017.000.000 (nilai penuh) dan EUR 20.000.000 (nilai penuh)).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang disyaratkan dalam pinjaman jangka panjang ini.

b. Pinjaman bukan bank

Jumlah pokok pinjaman berdasarkan jangka waktu:

	31 Desember/ December	
	2023	2022
Lebih dari 3 tahun	6,682,950	2,063,850
Dikurangi:		
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48,251)	(9,988)
Ditambah:		
Beban bunga yang masih harus dibayar	98,275	48,001
	<u>6,732,974</u>	<u>2,101,863</u>

21. BORROWINGS (continued)

a. Bank borrowings (continued)

Bilateral Borrowing with Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch

The Bank entered into *revolving long-term borrowings* with Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch, with total facility amounting to equivalent of USD 3,625,000,000 (full amount). The facility can be drawn in US Dollars or the amount equivalent thereof in any other currencies other than US Dollars and Singapore Dollars.

Total outstanding amount drawn from this facility as of 31 December 2023 amounted to USD 1,195,000,000 (full amount) and EUR 10,000,000 (full amount) (31 December 2022: USD 2,372,000,000 (full amount) and EUR 20,000,000 (full amount)).

This borrowing will mature ranging from 30 January 2025 until 30 June 2025.

Contractual interest rate per annum on long-term borrowings is *cost of fund* plus certain margin. For position as of 31 December 2023, the applied margin was 0.50% (for total outstanding amount of USD 1,195,000,000 (full amount) and EUR 10,000,000 (full amount)). For position as of 31 December 2022, the applied margin was 0.66% (for total outstanding amount of USD 355,000,000 (full amount)) and 0.50% (for total outstanding amount of USD 2,017,000,000 (full amount) and EUR 20,000,000 (full amount)).

As of 31 December 2023 and 2022, there was no certain covenant which was required to be maintained in this long-term borrowing.

b. Non-bank borrowings

Borrowing principals amount based on time period:

More than 3 years
Less:
Unamortized transaction costs
Add:
Accrued interest expenses

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

Pembayaran bunga pinjaman telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Pinjaman bukan bank adalah fasilitas pinjaman dengan International Finance Corporation (IFC), bukan pihak berelasi yang terdiri dari beberapa perjanjian sebagai berikut:

(i) Perjanjian Pinjaman 2019

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro, usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, *green loans*, pinjaman *Supply Chain Finance* (SCF). Bank akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa jumlah agregat dari pencairan yang diberikan untuk setiap pinjaman setidaknya sama dengan 25% dari jumlah maksimum pinjaman.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 699.250, ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,75% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2024. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2021 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2024.

Pada tanggal 28 Januari 2020, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.364.600, ekuivalen USD 100.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,30% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2025. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 28 Juli 2021 dan akan berakhir pada tanggal 28 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Bank telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman yang ada.

21. BORROWINGS (continued)

b. Non-bank borrowings (continued)

Payments of interest on borrowings had been paid by the Bank in accordance with the schedule.

Non-bank borrowings are borrowing facilities from International Finance Corporation (IFC), non-related party, consist of some agreements as follows:

(i) Borrowing Agreement 2019

The purpose of borrowing was to finance the Women-Owned Micro, Small Medium Enterprise (MSME) loans, Green loans and Supply Chain Finance (SCF) loans. The Bank will use its best efforts to ensure that the aggregated amount of the disbursements made to each loans was at least equal to 25% of the maximum loan amount.

On 30 December 2019, the Bank drawdown this loan at amount of Rp 699,250, equivalent to USD 50,000,000 (full amount) with interest rate 7.75% per annum and maturity date on 3 December 2024. Interest payment will be paid every 6 (six) months, which is started on 30 June 2021 and will be ended on 30 December 2024.

On 28 January 2020, the Bank drawdown this at amount of Rp 1,364,600, equivalent to USD 100,000,000 (full amount) with interest rate 7.30% per annum and maturity date on 28 January 2025. Interest payment will be paid every 6 (six) months, which is started on 28 July 2021 and will be ended on 28 January 2025.

As of 31 December 2023 and 31 December 2022, the Bank has utilized all borrowing facility.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

(i) Perjanjian Pinjaman 2019 (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman;
- tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi korporasi, yang dapat memberikan dampak merugikan yang material;
- tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah SMBC menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia;

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Bank telah memenuhi seluruh pembatasan yang dipersyaratkan.

(ii) Perjanjian Pinjaman 2023

Pada tanggal 20 Juni 2023, Bank telah menandatangani perjanjian Fasilitas pinjaman sebesar USD 500.000.000 (nilai penuh). Bentuk pinjaman ini adalah *Privately Placed Senior Sustainability Bond*. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk pembiayaan usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, pembangunan bangunan ramah lingkungan, dan *Social Bond*.

Pada tanggal 25 Agustus 2023, Bank melakukan penarikan sebesar USD 300.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,846%. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, yang dimulai pada tanggal 27 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas yang belum digunakan adalah sebesar USD 200.000.000 (nilai penuh).

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Menyatakan atau membayarkan dividen apa pun atau melakukan pembagian apa pun atas modal sahamnya (selain dividen atau pembagian yang harus dibayar dalam saham Emiten), kecuali pembayaran atau pembagian yang diusulkan diambil dari penghasilan bersih dari Tahun Buku yang relevan.

21. BORROWINGS (continued)

b. Non-bank borrowings (continued)

(i) Borrowing Agreement 2019 (continued)

The borrowing agreements provide several covenants required from the Bank, such as:

- *no substantial change is made to the general nature of its business without prior written consent of the lender;*
- *not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect;*
- *not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that action would make the SMBC to become a non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations;*

As of 31 December 2023 and 31 December 2022, the Bank had fulfilled all the required covenants.

(ii) Borrowing Agreement 2023

On 20 June 2023, the Bank has signed a loan facility agreement of USD 500,000,000 (full amount). The form of this loan is a Privately Placed Senior Sustainability Bond. The purpose of these loans is to finance small and medium enterprises owned by women, construction of environmentally friendly buildings, and Social Bonds.

On 25 August 2023, the Bank made a withdrawal of USD 300,000,000 (full amount) with interest rates based on the 3-month benchmark interest rate + 0.846%. Interest payments are made every 3 (three) months, starting on 27 November 2023 and ending on 25 August 2028.

As of 31 December 2023, total unused facility amounted to USD 200,000,000 (full amount).

The borrowing agreements provide several covenants required from the Bank, such as:

- *Declare or pay any dividend or make any distributions on its share capital (other than dividends or distributions payable in shares of the Issuer), unless the proposed payment or distribution is out of net income of the relevant Financial Year.*

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2023 (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain: (lanjutan)

- Membuat atau memungkinkan utang apa pun yang dijamin atau berperingkat di atas atau senior terhadap Obligasi, kecuali untuk transaksi sewa guna usaha (*leasing*) atau transaksi lain yang didukung aset dalam operasional bisnis perbankan pada umumnya.
- Membentuk atau memiliki Anak Perusahaan Utama apa pun (selain PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan PT BTPN SYARIAH VENTURA).
- Tidak melakukan perubahan mendasar atas Anggaran Dasar dengan cara apa pun yang dapat tidak sesuai dengan ketentuan pada perjanjian.
- Tidak melakukan atau mengizinkan penggabungan, pemekaran, peleburan atau reorganisasi apa pun; atau menjual, memindahkan, menyewakan atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau suatu bagian substansial dari aset-asetnya selain aset-aset yang diambil alih dalam mengeksekusi jaminan yang dibuat untuk kepentingan Emiten dalam usaha perbankannya.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank telah memenuhi persyaratan terkait penarikan pertama fasilitas IFC.

21. BORROWINGS (continued)

b. Non-bank borrowings (continued)

(ii) Borrowing Agreement 2023 (continued)

The borrowing agreements provide several covenants required from the Bank, such as: (continued)

- *Create or allow any indebtedness that is secured or ranks prior or senior to the Bonds, except for the leasing transactions or other asset-backed transactions in the ordinary course of banking business.*
- *Form or have any Material Subsidiary (other than PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and PT BTPN SYARIAH VENTURA).*
- *No substantial change of its Charter in any manner which would be inconsistent with the provisions of this Agreement.*
- *Not undertake Merger, Consolidation or Reorganization. Undertake or permit any merger, spin-off, consolidation or reorganization; or sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substantial part of its assets, other than assets acquired in the enforcement of security created in Favor of the Issuer in the ordinary course of its banking business, whether in a single transaction or in a series of transactions, related or otherwise.*

As of 31 December 2023, the Bank managed to fulfill the requirement related with first disbursement of IFC facility.

22. AKRUAL

	31 Desember/ December	
	2023	2022
Akrual beban operasional	328,468	304,544
Akrual beban promosi	101,610	75,206
Akrual jasa profesional	48,903	54,949
Akrual beban kepegawaian	-	19,293
	<u>478,981</u>	<u>453,992</u>

Akrual jasa profesional merupakan akrual untuk biaya konsultan yang bekerjasama dengan Bank untuk menyelesaikan proyek tertentu, termasuk akrual untuk biaya konsultan hukum, konsultan bisnis, akuntan publik dan lainnya.

22. ACCRUALS

	31 Desember/ December	
	2023	2022
Akrual beban operasional	328,468	304,544
Akrual beban promosi	101,610	75,206
Akrual jasa profesional	48,903	54,949
Akrual beban kepegawaian	-	19,293
	<u>478,981</u>	<u>453,992</u>

Accrued professional fees are accrual for the costs of consultants who collaborate with the Bank to complete certain projects, including accrual for the costs of legal consultant, business consultant, public accountant and others.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

	31 Desember/ December	
	2023	2022
<u>Imbalan kerja jangka pendek</u>		
Akrual bonus karyawan, THR, tantiem, dan liabilitas jangka pendek lainnya		
- Bank	323,918	278,730
- Entitas Anak	187,270	164,746
	<u>511,188</u>	<u>443,476</u>
<u>Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya</u>		
- Bank	128,085	43,281
- Entitas Anak	42,020	20,947
	<u>170,105</u>	<u>64,228</u>
	<u>681,293</u>	<u>507,704</u>

Grup menerapkan kebijakan program manfaat imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ("UUCK") No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerjasama yang berlaku di Grup. Dasar perhitungan manfaat ini menggunakan gaji pokok terkini. Program pensiun manfaat pasti ini dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendanaan program pensiun ini dilakukan oleh Grup dengan membayar iuran tahunan yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang Bank dan Entitas Anak menggunakan hasil perhitungan Aktuari periode 31 Desember 2023 dengan informasi komparatif 31 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah karyawan Bank yang memiliki hak atas manfaat ini adalah 6.237 karyawan (31 Desember 2022: 6.271 karyawan) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah karyawan Entitas Anak yang memiliki hak atas imbalan ini adalah sebanyak 3.628 karyawan (31 Desember 2022: 3.924 karyawan) (tidak diaudit).

Selain memberikan manfaat yang disebutkan di atas, Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee benefits liabilities consist of:

<u>Short-term employee benefits</u>	
<i>Accrual of employee bonus, THR, tantiem, and other short-term liabilities</i>	
Bank -	
Subsidiary -	
<u>Post-employment benefits and other long-term employee benefits</u>	
Bank -	
Subsidiary -	

The Group implements post-employment benefits policy based on Job Creation Law ("UUCK") No. 11 Year 2020, Government Regulation No. 35 Year 2021 and Collective Labor Agreement applied by the Group. The calculation basis of benefits is based on current basic salary. The Bank's defined benefits pension plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

The program calls for benefits to be paid to eligible employees at retirement or when the employees resign according to the prevailing regulations. The funding of the pension plan is conducted by the Group through payments of annual contributions which are sufficient to meet the minimum requirements set forth in applicable laws.

The calculation of the long-term employee benefits of the Bank and Subsidiary use the results of the calculation of the Actuarial period 31 December 2023 with comparative information 31 December 2022.

As of 31 December 2023, the total number of the Bank's employees eligible for this benefit was 6,237 employees (31 December 2022: 6,271 employees) (unaudited).

As of 31 December 2023, the total number of the Subsidiary's employees eligible for this benefit was 3,628 employees (31 December 2022: 3,924 employees) (unaudited).

In addition to the benefits mentioned above, the Bank also provides its employees with long leave benefits.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Bank

Bank

Perhitungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" berdasarkan laporannya tertanggal 31 Januari 2024 (31 Desember 2022: tanggal 8 Februari 2023).

The actuarial calculation for the Bank's employee benefits liabilities as of 31 December 2023 and 2022 was performed by Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, an independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method based on its reports dated 31 January 2024 (31 December 2022: dated 8 February 2023).

Perhitungan aktuarial tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial valuations were carried out using the following assumptions:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
Tingkat diskonto per tahun	6.37% - 7.10%	5.52% - 7.43%	Interest discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7%	7%	Salary increment rate per annum
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Usia pensiun normal	55	55	Normal pension age
	Tabel mortalitas/ Mortality table Indonesia 2019	Tabel mortalitas/ Mortality table Indonesia 2019	
Tingkat kematian	(TMI 2019)	(TMI 2019)	Mortality rate
Tingkat cacat	10% TMI 2019	10% TMI 2019	Disability rate

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan laporan aktuarial adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2023 and 2022 based on the actuarial reports was as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	732,177	674,325	Present value of defined benefits liabilities
Nilai wajar aset program	(634,515)	(657,834)	Fair value of plan assets
Kekurangan pendanaan	97,662	16,491	Funding deficit

Perubahan liabilitas imbalan manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefits liabilities during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini kewajiban imbalan manfaat pasti, awal tahun	674,325	671,934	Present value of defined benefits liabilities, beginning of the year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	86,161	85,663	Current service cost
Beban bunga	45,241	40,220	Interest expense
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(48,052)	Adjustment due to change in benefit attribution method
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Kerugian/keuntungan aktuarial yang timbul dari:			Actuarial losses/gains arising from:
- Asumsi keuangan	21,597	(12,386)	Financial assumption -
- Penyesuaian pengalaman	37,862	21,242	Experiences adjustment -
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayarkan oleh aset program selama tahun berjalan	(133,009)	(84,296)	Benefits paid by the plan assets during the year
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	732,177	674,325	Present value of net defined benefits liabilities, end of year

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

Perubahan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of fair value of plan assets during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Perubahan nilai wajar aset program:			Movement in the fair value of plan assets:
Nilai wajar aset program, awal tahun	657,834	657,951	Fair value of plan assets, beginning of year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Pendapatan bunga atas aset program	46,304	43,720	Interest income on plan assets
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Imbal hasil atas aset program di luar pendapatan bunga	(32,115)	(34,244)	Return on plan assets excluding interest income
Lain-lain			Others
Kontribusi yang dibayarkan kepada program	95,501	74,703	Contributions paid into the plan
Imbalan yang dibayarkan oleh program	(133,009)	(84,296)	Benefits paid by the plan
Nilai wajar aset program, akhir tahun	634,515	657,834	Fair value of plan assets, end of year

Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada kas di Bank Kustodian dan deposito berjangka di Bank.

All of the pension plan assets are placed on cash with the Custodian Bank and time deposits with the Bank.

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Asset volatility

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, then this will create a deficit.

Perubahan imbal hasil obligasi

Changes in bond yields

Kenaikan pada liabilitas program disebabkan oleh penurunan imbal hasil obligasi pemerintah, walaupun hal ini akan saling hapus dengan pilihan jenis investasi Bank.

An increase in plan liabilities is caused by the decrease in government bond yields, although this will be partially offset by the Bank's investment choices.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Bank (lanjutan)

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December					
	2023	2022	2021	2020	2019	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	732,177	674,325	671,934	640,803	540,349	Present value of defined benefits liabilities
Nilai wajar aset program	(634,515)	(657,834)	(657,951)	(545,350)	(595,828)	Fair value of plan assets
Dampak batas atas aset	-	-	-	-	-	The effect of the asset ceiling
Defisit (surplus)	97,662	16,491	13,983	95,453	(55,479)	Deficit (surplus)
Penyesuaian pada liabilitas program	59,459	8,856	(2,829)	56,208	25,883	Adjustments on plan liabilities
Penyesuaian pada aset program	32,115	34,244	22,272	19,473	17,085	Adjustments on plan assets

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memenuhi persyaratan minimum UUCK.

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as of 31 December 2023 and 2022 have fulfilled the minimum requirements of UUCK.

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 11,61 tahun dan 10,78 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 31 December 2023 and 2022 was 11.61 years and 10.78 years, respectively.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	31 Desember/ December		
	2023	2022	
Hingga 1 tahun	84,573	65,092	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	71,839	83,406	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	284,254	259,653	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	3,528,404	2,891,964	More than 5 years

Sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefits liabilities to changes in the key actuarial assumptions was as follows:

	2023		
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Increase (decrease) in present value of benefit obligation	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(48,514)	(6,750)
	Penurunan/Decrease 1%	54,581	7,712
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	52,384	7,489
	Penurunan/Decrease 1%	(47,377)	(6,669)

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

		2022		
Perubahan asumsi/ Change in assumption		Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	(40,837) 45,789	(6,528) 7,128	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	47,478 (42,947)	7,355 (6,548)	Salary increase rate

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the post-employment benefits liabilities.

Entitas Anak

Subsidiary

Perhitungan aktuarial pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Yusi dan Rekan, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 9 Januari 2024 (31 Desember 2022: tanggal 6 Januari 2023) dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculation as of 31 December 2023 and 2022 was performed by Kantor Konsultan Aktuarial Yusi dan Rekan, independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated 9 January 2024 (31 December 2022: 6 January 2023) with the following assumptions:

		31 Desember/December		
		2023	2022	
Tingkat diskonto per tahun		6.45% - 7.14%	5.77% - 7.30%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun		9%	9%	Annual salary increase rate
Tabel mortalita	Tabel mortalitas/ Mortality table Indonesia 2019		Tabel mortalitas/ Mortality table Indonesia 2019	Mortality table
Usia pensiun normal		55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pension age

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan laporan aktuarial adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2023 and 2022 based on the actuarial reports was as follows:

		31 Desember/December		
		2023	2022	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti		229,374	195,106	Present value of defined benefits liabilities
Nilai wajar aset program		(204,563)	(202,188)	Fair value of plan assets
(Kelebihan) kekurangan pendanaan		24,811	(7,082)	Funding (gain) deficit
Dampak batas atas aset		-	7,082	The effect of the asset ceiling
Liabilitas/(aset) imbalan bersih neto		24,811	-	Net defined liability/(asset)

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

Perubahan liabilitas imbalan manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of defined benefits liabilities during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, awal tahun	195,106	240,583	Present value of defined benefits liabilities, beginning of year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	34,487	32,371	Current service cost
Beban bunga	13,647	15,243	Interest expense
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(53,029)	Adjustment due to change in benefit attribution method
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Kerugian/keuntungan aktuarial yang timbul dari:			Actuarial losses/gains arising from:
- Asumsi keuangan	6,593	(4,554)	Financial assumption -
- Penyesuaian pengalaman	(11,247)	(19,388)	Experience adjustment -
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayar	(9,212)	(16,120)	Benefits paid
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	229,374	195,106	Present value of defined benefits liabilities, end of year

Perubahan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of fair value of plan assets during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Perubahan nilai wajar aset program:			Movement in the fair value of plan assets:
Saldo, awal tahun	202,188	219,728	Balance, beginning of year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Hasil yang diharapkan dari aset program	14,521	15,024	Expected return on plan assets
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Imbal hasil atas aset program di luar pendapatan bunga	(12,934)	(10,969)	Return on plan assets excluding interest income
Lain-lain			Others
Kontribusi pemberi kerja	10,000	-	Employer's contribution
Mutasi aset	-	(5,475)	Asset mutation
Imbalan yang dibayar	(9,212)	(16,120)	Benefits paid
Saldo, akhir tahun	204,563	202,188	Balance, end of year

Seluruh aset program pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditempatkan pada Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz dengan deposito berjangka sebagai aset yang mendasari.

All of the pension plan assets as of 31 December 2023 and 2022 were placed on Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz with time deposits as underlying assets.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak terekspos dengan risiko volatilitas aset melalui program imbalan pasti. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefits (continued)

Subsidiary (continued)

Subsidiary is exposed to asset volatility risks through its defined benefit pension plans. The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, then this will create a deficit.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date.

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Dampak batas atas aset pada awal program:	7,082	-	Effect of asset ceiling at beginning of period:
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Bunga atas dampak batas aset	510	-	Interest on the effect of asset ceiling
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			Included in other comprehensive income
Setiap perubahan yang berdampak pada batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	(7,592)	7,082	Any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset)
Dampak batas atas aset pada akhir periode	-	7,082	Effect of asset ceiling at the end of period

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Present value of post-employment benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

	31 Desember/December					
	2023	2022	2021	2020	2019	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	229,374	195,106	240,583	217,467	175,160	Present value of defined benefits liabilities
Nilai wajar aset program	(204,563)	(202,188)	(219,728)	(193,363)	(188,883)	Fair value of plan assets
Defisit (surplus)	24,811	(7,082)	20,855	24,104	(13,723)	Deficit (surplus)
Dampak batas atas aset	-	7,082	-	-	-	The effect of the asset ceiling
Liabilitas (aset) imbalan bersih neto	24,811	-	20,855	24,104	(13,723)	Net defined benefit liability (asset)
Penyesuaian pada liabilitas program	4,654	23,942	13,603	7,606	(16,253)	Adjustments on plan liabilities
Penyesuaian pengalaman yang timbul pada aset program	12,934	10,969	8,153	5,969	4,052	Experience adjustment on plan assets

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits was as follow:

	31 Desember/ December		
	2023	2022	
Hingga 1 tahun	11,709	8,428	Up to 1 years
Lebih dari 1 - 2 tahun	14,013	7,675	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	100,282	79,774	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	2,158,255	1,516,997	More than 5 years

Sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefit obligation to change in the key actuarial assumption was as follow:

	2023			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(18,539)	(3,195)	Discount rate
	Penurunan/Decrease 1%	21,207	3,733	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	20,208	3,605	Salary increase rate
	Penurunan/Decrease 1%	(18,048)	(3,152)	
	2022			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(15,143)	(2,918)	Discount rate
	Penurunan/Decrease 1%	17,252	3,393	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	17,420	3,425	Salary increase rate
	Penurunan/Decrease 1%	(15,566)	(2,999)	

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefits liabilities to key actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the post-employment benefits liabilities.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, imbalan pascakerja untuk karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Entitas Anak dihitung secara internal dengan metode *historical stay rate* masing-masing sebesar Rp 3,494 dan Rp 7.955.

As of 31 December 2023 and 2022, post-employment benefits for the Subsidiary's employees with Fixed Time Employment Agreements (PKWT) are calculated internally using the historical stay rate method amounted to Rp 3,494 and Rp 7,955, respectively.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long term employee benefits

Bank

Bank

Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

The Bank also provides its employees with long leave benefit.

Perubahan liabilitas yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the Bank's liabilities arising from other long-term employee benefits was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, awal tahun	26,790	27,075	Present value of defined liabilities, beginning of the year
Termasuk dalam laba rugi			Included in profit or loss
Beban jasa kini	5,307	4,871	Current service cost
Beban bunga	1,746	1,426	Interest expense
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
- Penyesuaian asumsi demografi		-	Changes in demography assumptions -
- Penyesuaian asumsi keuangan	396	(714)	Changes in financial assumptions -
- Penyesuaian pengalaman	(386)	(100)	Experience adjustment -
Lain-lain			Others
Imbalan yang dibayarkan dari pemberi kerja selama tahun berjalan	(3,430)	(5,768)	Benefits paid by the employer during year
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	30,423	26,790	Present value of net defined benefits liabilities, end of year

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefits was as follows:

	31 Desember/ December		
	2023	2022	
Hingga 1 tahun	3,877	2,807	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	7,951	3,330	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	20,644	21,494	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	63,783	60,402	More than 5 years

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long term employee benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank (continued)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

		2023		
Perubahan asumsi/ Change in assumption		Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	(1,335) 1,462	(240) 264	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	1,284 (1,196)	233 (217)	Salary increase rate
		2022		
Perubahan asumsi/ Change in assumption		Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	(1,117) 1,221	(211) 230	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	1,209 (1,127)	227 (211)	Salary increase rate

Entitas Anak

Subsidiary

Perubahan liabilitas yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the liabilities arising from other long-term employee benefits during the year was as follows:

		Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2023	2022	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:				Movement in present value of defined benefits liabilities:
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun		12,992	12,483	Present value of the defined benefits liabilities, beginning of year
Termasuk dalam laba rugi				Included in profit or loss
Beban jasa kini		1,794	1,881	Current service cost
Beban bunga		878	692	Interest expense
Pengukuran kembali:				Remeasurement:
- Penyesuaian asumsi demografi				Changes in demographic -
- Penyesuaian asumsi keuangan		246	(362)	Changes in financial assumptions -
- Penyesuaian pengalaman		(818)	(544)	Experience adjustment -
Lain-lain				Others
Imbalan yang dibayar		(1,376)	(1,158)	Benefits paid
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun		13,716	12,992	Present value of defined benefits liabilities, end of year

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefits was as follow:

		31 Desember/ December		
		2023	2022	
Hingga 1 tahun		1,999	1,396	Up to 1 year
Lebih dari 1-2 tahun		2,076	2,078	More than 1-2 years
Lebih dari 2-5 tahun		6,411	6,658	More than 2-5 years
Lebih dari 5 tahun		39,701	40,089	More than 5 years

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long term employee benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary (continued)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

		2023		
Perubahan asumsi/ Change in assumption		Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(790)	(103)	Discount rate
	Penurunan/Decrease 1%	886	115	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	789	103	Salary increase rate
	Penurunan/Decrease 1%	(719)	(94)	
		2022		
Perubahan asumsi/ Change in assumption		Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ increase (decrease) in present value of benefit obligation	Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ Increase (decrease) in current service cost	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(699)	(102)	Discount rate
	Penurunan/Decrease 1%	784	112	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	763	109	Salary increase rate
	Penurunan/Decrease 1%	(694)	(100)	

Dampak pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pada penghasilan komprehensif konsolidasian adalah masing-masing sebesar Rp 92.262, dan Rp 37.209 untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Effect of remeasurements of employee benefits liabilities on consolidated other comprehensive income was Rp 92,262 and Rp 37,209 for the years ended 31 December 2023 and 2022, respectively.

24. PINJAMAN SUBORDINASI

24. SUBORDINATED LOANS

Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman dari SMBC Cabang Singapura sejumlah USD 200.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp 3.079.400 pada tanggal 31 Desember 2023 dan sejumlah USD 200.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp 3.113.500 pada tanggal 31 Desember 2022.

The outstanding subordinated loans represent loans obtained from SMBC Singapore Branch amounted to USD 200,000,000 (full amount), equivalent to Rp 3,079,400 as of 31 December 2023 and amounted to USD 200,000,000 (full amount), equivalent to Rp 3,113,500 as of 31 December 2022.

Pinjaman subordinasi sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh) dan USD 100.000.000 (nilai penuh) masing-masing diperoleh pada tanggal 26 September 2018 dan 23 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2028 dan 21 November 2028.

Subordinated loans of USD 100,000,000 (full amount) and USD 100,000,000 (full amount) were obtained on 26 September 2018 and 23 November 2018 respectively and will mature on 26 September 2028 and 21 November 2028, respectively.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Untuk fasilitas USD 100.000.000 (nilai penuh) yang diperoleh pada tanggal 26 September 2018, telah terdapat Perjanjian Tambahan yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2021, sehingga tanggal jatuh tempo berubah dari tanggal 26 September 2025 menjadi tanggal 26 September 2028.

Pinjaman subordinasi memiliki opsi pembayaran lebih awal dengan pemberitahuan 20 hari sebelumnya dan dengan persetujuan dari kreditur.

Kisaran tingkat suku bunga pinjaman subordinasi adalah 6,90% - 6,93% per tahun.

Pinjaman subordinasi digunakan untuk memperkuat struktur modal Bank sebagai Modal Pelengkap (Tier 2).

Sesuai Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, Kreditur dan Debitur memahami bahwa terdapat kondisi yang menyebabkan (trigger events) pinjaman yang diberikan sesuai dengan Perjanjian ini harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down*, yaitu dalam hal kelangsungan usaha debitur berpotensi terganggu (*point of non viability*) sehingga mempengaruhi kewajiban debitur kepada kreditur, yaitu dapat berupa:

- (i) rasio Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan Entitas Anak; dan/atau
- (ii) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Debitur yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
- (iii) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *write-down*.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman subordinasi.

24. SUBORDINATED LOANS (continued)

For the USD 100,000,000 (full amount) facility obtained on 26 September 2018, a Supplemental Agreement has been signed on 27 September 2021, so that the maturity date has changed from previously 26 September 2025 to 26 September 2028.

These subordinated loans have early repayment option by 20 days notification in advance with lender's approval.

Range of interest rate for subordinated loans per year was 6.90% - 6.93%.

Subordinated loans are used to strengthen the Bank's capital structure as Supplementary Capital (Tier 2).

In accordance with the Regulation of OJK Number 11/POJK.03/2016 and Circular Letter of OJK Number 20/SEOJK.03/2016 regarding Feature of Conversion to Common Stock or Write Down The Instruments of Additional Tier 1 and Tier 2, Lender and Borrower acknowledge the trigger events that will cause the loan provided under this Agreement to be converted to common stock or written down, particularly in the event when the business continuity of the debtor is potentially disrupted (point of non viability) and therefore affecting the liabilities of borrower to the lender, in the term of:

- (i) Common Equity Tier 1 (CET 1) is lower than or equal to 5.125% of Risk-Weighted Assets (RWA), both individually and consolidated with its Subsidiaries; and/or*
- (ii) there is a plan of the competent authority to make capital injection to the Borrower which continuity of its business is evaluated to have the potential to be disrupted; and*
- (iii) There is an order from OJK to convert into common stock and/or write-down.*

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank complied with all the requirements mentioned in the subordinated loan agreements.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS LAIN-LAIN

25. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Transaksi ATM, transfer dan tagihan <i>merchant</i>	253,284	104,390	<i>ATM transaction, transfer and merchant bills</i>
<i>Term Deposit</i> DHE	250,201	-	<i>DHE Term Deposit</i>
Pendapatan ditangguhkan	102,106	70,866	<i>Unearned income</i>
Beban <i>Standby Letter of Credit</i> yang masih harus dibayarkan	81,244	99,880	<i>Accrued Standby Letter of Credit fee</i>
Utang premi asuransi kredit	53,828	30,995	<i>Loan insurance premium payable</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai - komitmen	52,990	89,448	<i>Allowance for impairment losses - commitment</i>
Utang kepada pihak ketiga	37,685	140,044	<i>Payable to third parties</i>
Komisi asuransi diterima dimuka	11,667	31,667	<i>Up-front insurance commission</i>
Utang premi asuransi lainnya	11,184	17,035	<i>Other insurance premium payable</i>
Klaim asuransi	4,009	10,880	<i>Insurance claim</i>
Lainnya	217,310	145,074	<i>Others</i>
	<u>1,075,508</u>	<u>740,279</u>	

Transaksi ATM, transfer dan tagihan *merchant* merupakan hutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya, serta transaksi dengan *merchant* melalui gerbang pembayaran.

ATM transaction, transfer and merchant bills consist of payables from Bank ATM transaction and transfer to other banks that will be settled on the next working day and transactions with merchants via payment gateway.

Term Deposit DHE adalah instrumen untuk memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia, dengan mekanisme *pass on* transaksi bank dengan nasabah (eksportir) kepada Bank Indonesia. Bank mencatat *Term Deposit* DHE tersebut pada akun aset lain-lain dan kewajiban kepada nasabah (eksportir) pada akun liabilitas lain-lain dengan nilai yang sama.

DHE Term Deposit is an instrument to facilitate the placement of DHE by exporters at Bank Indonesia, with a pass-on mechanism for bank transactions with customers (exporters) to Bank Indonesia. The Bank records DHE Term Deposit in the other assets account and liabilities to customers (exporters) in the other liabilities account with same amount.

Pendapatan ditangguhkan terdiri atas pendapatan dari pembelian wesel ekspor yang ditangguhkan.

Unearned income consists of deferred income from export bills purchase.

Beban *standby letter of credit* yang masih harus dibayarkan merupakan beban yang masih harus dibayar atas *standby letter of credit* terkait dengan pinjaman yang diberikan.

Accrued standby letter of credit fees are expense for standby letter of credit related to loans that has not been paid.

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Loan insurance premium payable consists of insurance premium payment from debtors but not yet paid to the insurance companies.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Utang kepada pihak ketiga sebagian besar merupakan utang kepada mitra bisnis Entitas Anak, utang terkait informasi dan teknologi dan informasi (TI) dan utang kepada ASABRI.

Komisi asuransi diterima dimuka merupakan komisi yang diterima dari Allianz atas penjualan produk-produk asuransi kepada nasabah Bank melalui seluruh saluran distribusi Bank.

Utang premi asuransi lainnya merupakan premi terutang atas asuransi karyawan Grup.

Klaim asuransi terdiri dari dana yang diterima dari hasil klaim asuransi atas nasabah kredit pensiun yang meninggal dunia dan pencatatan sementara penerimaan kembali premi asuransi Bank. Dana yang diterima akan berada dalam akun ini sampai Bank dapat mengidentifikasi kontrak terkait.

Lainnya terutama terdiri dari akun tampungan sementara atas penerimaan pembayaran dimuka dari debitur, yang akan didebitkan pada waktu penyelesaian kewajiban kontrak dengan debitur di masa mendatang.

26. DANA SYIRKAH TEMPORER

Grup menyajikan dana syirkah temporer sehubungan dengan kepemilikan Bank atas Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan syariah.

25. OTHER LIABILITIES (continued)

Payables to third parties mainly represent payable to Subsidiary's business partner, payable related to information and technology (IT) and payable to ASABRI.

Up-front insurance commission represents commission received from Allianz for the sales of insurance products to the Bank's customers through all Bank's distribution channels.

Other insurance premium payables are employees insurance premium payables of the Group.

Insurance claim represents funds received from insurance claim on pensioner debtors who passed away and a temporary record of refund of Bank's insurance premium. The received fund would be in this account until the Bank can identify the specific contract.

Others mainly consist of temporary account for upfront funds received from debtors, which will be debited upon future contract settlement period.

26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

The Group presented temporary syirkah funds in relation to the Bank's ownership in the Subsidiary which engages in sharia banking industry.

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Simpanan nasabah:			<i>Deposits from customer:</i>
Tabungan mudharabah	889,954	763,666	<i>Mudharabah saving deposits</i>
Deposito mudharabah	9,030,866	9,079,595	<i>Mudharabah time deposits</i>
	<u>9,920,820</u>	<u>9,843,261</u>	

a. Tabungan mudharabah

Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Pihak ketiga	887,890	763,070
Pihak berelasi	2,064	596
	<u>889,954</u>	<u>763,666</u>

a. Mudharabah savings deposits

By relationship with counterparties:

Third parties
Related parties

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

a. Tabungan mudharabah (lanjutan)

a. Mudharabah savings deposits (continued)

Berdasarkan jenis produk:

By product type:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Tepat Tabungan Platinum Bisnis	482,900	508,799	<i>Tepat Tabungan Platinum Bisnis</i>
Tepat Tabungan Platinum	404,721	254,867	<i>Tepat Tabungan Platinum</i>
Tepat Tabungan Payroll	1,798	-	<i>Tepat Tabungan Payroll</i>
Tepat Tabungan Rencana	535	-	<i>Tepat Tabungan Rencana</i>
	<u>889,954</u>	<u>763,666</u>	

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio and profit sharing rate for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/December 2023		
	Nisbah (%)/ <i>Pre-determined ratio (%)</i>	Tingkat bagi hasil (%)/ <i>Profit sharing rate (%)</i>	
Tabungan mudharabah	2.52%	2.99%	<i>Mudharabah savings deposits</i>
	31 Desember/December 2022		
	Nisbah (%)/ <i>Pre-determined ratio (%)</i>	Tingkat bagi hasil (%)/ <i>Profit sharing rate (%)</i>	
Tabungan mudharabah	2.68%	3.10%	<i>Mudharabah savings deposits</i>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada saldo tabungan mudharabah yang diblokir atau dijadikan jaminan pembiayaan.

As of 31 December 2023 and 2022, there were no mudharabah saving deposits which were blocked or pledged for financing.

b. Deposito mudharabah

b. Mudharabah time deposits

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pihak ketiga	8,997,932	9,043,060	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	32,934	36,535	<i>Related parties</i>
	<u>9,030,866</u>	<u>9,079,595</u>	

Berdasarkan jangka waktu

By time period

	31 Desember/December		
	2023	2022	
<u>Bukan Bank</u>			<u>Non-Bank</u>
Lebih dari 1 - 3 bulan	8,721,511	8,786,784	<i>More than 1 - 3 months</i>
Lebih dari 3 - 6 bulan	299,222	280,994	<i>More than 3 - 6 months</i>
Lebih dari 6 - 9 bulan	-	2,000	<i>More than 6 - 9 months</i>
Lebih dari 9 - 12 bulan	10,111	9,795	<i>More than 9 - 12 months</i>
Lebih dari 12 bulan	22	22	<i>More than 12 months</i>
	<u>9,030,866</u>	<u>9,079,595</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

b. Deposito mudharabah (lanjutan)

b. Mudharabah time deposits (continued)

Berdasarkan sisa umur sampai jatuh tempo

By remaining period to maturity date

	31 Desember/December		
	2023	2022	
<u>Bukan Bank</u>			<u>Non-Bank</u>
Hingga 1 bulan	7,329,602	7,513,812	Up to 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	1,467,881	1,378,351	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	227,896	180,550	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 - 9 bulan	1,193	3,385	More than 6 - 9 months
Lebih dari 9 - 12 bulan	4,294	3,475	More than 9 - 12 months
Lebih dari 12 bulan	-	22	More than 12 months
	<u>9,030,866</u>	<u>9,079,595</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo deposito mudharabah yang diblokir atau dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan sebesar Rp 8.000 (31 Desember 2022: tidak ada deposito yang diblokir).

As of 31 December 2023, mudharabah time deposits which were blocked or pledged for financing amounted to Rp 8,000 (31 December 2022: no deposits were blocked).

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah selama tahun-tahun berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio (nisbah) and profit sharing rate for mudharabah time deposits during the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/December 2023		
	Nisbah (%)/ Pre-determined Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%) / Profit sharing rate (%)	
1 bulan	9.00%	4.88%	1 month
3 bulan	8.93%	4.97%	3 months
6 bulan	8.76%	4.80%	6 months
12 bulan	8.13%	4.79%	12 months
	31 Desember/December 2022		
	Nisbah (%)/ Pre-determined Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%) / Profit sharing rate (%)	
1 bulan	7.71%	3.82%	1 month
3 bulan	7.77%	3.81%	3 months
6 bulan	7.89%	3.82%	6 months
12 bulan	8.24%	4.23%	12 months

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

27. SHARE CAPITAL

Based on the share registrant record from Biro Administrasi Efek, the composition of the Bank's shareholders composition as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

31 Desember/December 2023				
Pemegang saham	Lembar saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase/ <i>Percentage</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Shareholder
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7,332,311,297	89.977%	146,646	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
PT Bank Central Asia Tbk	83,052,408	1.019%	1,661	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,007,137	0.147%	240	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi				The Board of Directors
Merisa Darwis	222,358	0.003%	4	Merisa Darwis
Henoch Munandar	173,756	0.002%	3	Henoch Munandar
Hanna Tantani	148,154	0.002%	3	Hanna Tantani
Dini Herdini	118,572	0.001%	2	Dini Herdini
Darmadi Sutanto	89,120	0.001%	2	Darmadi Sutanto
Kaoru Furuya	3,000	0.000%	0	Kaoru Furuya
Dewan Komisaris				The Board of Commissioners
Ongki Wanadjati Dana	860,804	0.011%	17	Ongki Wanadjati Dana
Publik	627,828,065	7.704%	12,558	Public
	8,056,814,671	98.867%	161,136	
Saham tresuri	92,292,198	1.133%	1,846	Treasury shares
	8,149,106,869	100.000%	162,982	

31 Desember/December 2022				
Pemegang saham	Lembar saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase/ <i>Percentage</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Shareholder
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7,532,311,297	92.431%	150,647	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
PT Bank Central Asia Tbk	83,052,408	1.019%	1,661	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,007,137	0.147%	240	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi				The Board of Directors
Darmadi Sutanto	311,120	0.004%	6	Darmadi Sutanto
Merisa Darwis	220,858	0.003%	4	Merisa Darwis
Henoch Munandar	172,256	0.002%	3	Henoch Munandar
Hanna Tantani	146,654	0.002%	3	Hanna Tantani
Dini Herdini	117,072	0.001%	2	Dini Herdini
Hiromichi Kubo	64,164	0.001%	1	Hiromichi Kubo
Kaoru Furuya	1,500	0.000%	0	Kaoru Furuya
Kan Funakoshi	1,500	0.000%	0	Kan Funakoshi
Dewan Komisaris				The Board of Commissioners
Ongki Wanadjati Dana	860,804	0.011%	17	Ongki Wanadjati Dana
Publik	427,377,301	5.244%	8,549	Public
	8,056,644,071	98.865%	161,133	
Saham tresuri	92,462,798	1.135%	1,849	Treasury shares
	8,149,106,869	100.000%	162,982	

Pemegang saham publik terdiri dari pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% jumlah saham beredar. Seluruh saham yang beredar adalah saham biasa.

Public shareholders consist of shareholders whose ownership are less than 5% of outstanding shares. All the outstanding shares are ordinary shares.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan komposisi kepemilikan saham

Sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama adalah minimum sebesar 7,5% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh Bank (Saham *Free Float*). Oleh karenanya, SMBC telah menjual 200 juta lembar sahamnya pada tanggal 12 Desember 2023 dengan harga jual Rp 2.600 (nilai penuh) per saham. Pemenuhan ketentuan Saham *Free Float* ini telah menyebabkan kepemilikan SMBC berubah dari 92,43% ke 89,98%.

28. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 13 April 2023 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn sebagai berikut: (1) Bank akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sejumlah 20% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp 619.140 atau kurang lebih sebesar Rp 76,8 per lembar saham (nilai penuh); (2) Bank tidak menyisihkan cadangan wajib Bank, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi; dan (3) Sisa dari total laba bersih yang diperoleh Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 setelah dikurangi penyisihan Dividen dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Pada tanggal 12 Mei 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai Bank kepada pemegang saham sesuai Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Mei 2023 (tanggal pencatatan).

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan akta notaris No. 44 tanggal 21 April 2022 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn sebagai berikut: (1) Bank membukukan saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp 700.000 (nilai penuh) dan (2) sisa dari total laba bersih yang diperoleh Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

27. SHARE CAPITAL (continued)

Changes in share ownership composition

In accordance with the Indonesia Stock Exchange Regulation, the number of shares owned by non controlling shareholders and non majority shareholders is at the minimum of 7.5% of total issued shares of the Bank (Free Float Shares). Therefore, SMBC sold 200 million of its shares on 12 December 2023 with the selling price of Rp 2,600 (full amount) per share. The compliance with Free Float Shares requirement has changed the SMBC's ownership from 92.43% to 89.98%.

28. APPROPRIATION OF NET INCOME

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2022 based on notarial deed No. 31 dated 13 April 2023 of Notary Ashoya Ratam, S.H., Mkn as follows: (1) the Bank shall distribute dividend to the shareholders for 20% (twenty percent) of Net Profit or more or less Rp 619,140 or estimated at Rp 76,8 per share (full amount); (2) the Bank not allocate any reserve of the Bank, in regards to the minimum statutory reserve as stipulated in the Article 70 of the Limited Liability Company Law, i.e. minimum 20% of the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Company has been complied; and (3) the remaining balance of the net income earned by the Bank in financial year ended on 31 December 2022 after being deducted with the allocation for Dividend shall be declared as unappropriated retained earnings.

On 12 May 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed Bank's cash dividends to Shareholders based on Shareholders List on 3 May 2023 (recording date).

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2021 based on notarial deed No. 44 dated 21 April 2022 of Notary Ashoya Ratam, S.H., Mkn as follows: (1) the Bank booked appropriated retained earnings amounting to Rp 700,000 (full amount) and (2) the remaining balance of the net income earned by the Bank in financial year ended on 31 December 2021 shall be declared as unappropriated retained earnings.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH

29. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
<u>Pendapatan bunga</u>			<u>Interest income</u>
Pihak ketiga:			Third parties:
Pinjaman yang diberikan	11,575,894	9,454,373	Loans
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	668,093	450,674	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Efek-efek	587,357	576,758	Securities
Giro dan penempatan pada bank-bank lain	27,519	9,764	Current accounts and placements with other banks
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	436	-	Reverse repo
	<u>12,859,299</u>	<u>10,491,569</u>	
Pihak berelasi:			Related parties:
Pinjaman yang diberikan	210,192	30,516	Loans
Efek-efek	-	3,767	Securities
Penempatan pada bank-bank lain	-	4	Placements with other banks
	<u>210,192</u>	<u>34,287</u>	
	<u>13,069,491</u>	<u>10,525,856</u>	
<u>Pendapatan syariah</u>			<u>Sharia income</u>
Pihak ketiga:			Third parties:
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	5,299,422	5,048,219	Income from sales and purchases - murabahah margin
Pendapatan dari piutang lainnya - Qardh	182	120	Income from other receivables - Qardh
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	4,727	3,289	Revenue from profit sharing - musyarakah financing
Pendapatan usaha utama lainnya	441,851	322,162	Other main operating income
	<u>5,746,182</u>	<u>5,373,790</u>	
	<u>18,815,673</u>	<u>15,899,646</u>	

Pendapatan usaha utama lainnya dari pendapatan syariah merupakan pendapatan dari investasi pada surat berharga, SBIS, FASBIS, SIMA dan penempatan pada deposito.

Other main operating income from sharia income are income from investment in marketable securities, SBIS, FASBIS, SIMA and placement in deposits .

30. BEBAN BUNGA DAN HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

30. INTEREST EXPENSE AND THIRD PARTIES' SHARES ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
<u>Beban bunga</u>			<u>Interest expenses</u>
Pihak ketiga:			Third parties:
Simpanan nasabah			Customer deposits
Deposito berjangka	2,287,754	1,818,984	Time deposits
Deposito on call	656,555	1,534	Deposits on call
Giro	447,275	327,628	Current accounts
Tabungan	200,387	142,012	Saving deposits
	<u>3,591,971</u>	<u>2,290,158</u>	
Pinjaman yang diterima	814,930	390,695	Borrowings
Simpanan dari bank-bank lain	72,452	60,648	Deposits from other banks
Utang obligasi (Catatan 20)	16,013	73,082	Bonds payables (Note 20)
Liabilitas sewa	18,162	26,480	Lease liabilities
	<u>4,513,528</u>	<u>2,841,063</u>	
Dipindahkan			Carry forward

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. BEBAN BUNGA DAN HAK PIHAK KETIGA ATAS
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER
(lanjutan)

30. INTEREST EXPENSE AND THIRD PARTIES'
SHARES ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH
FUNDS (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Pindahan	4,513,528	2,841,063	Carried forward
<u>Beban bunga</u>			<u>Interest expenses</u>
<u>Pihak berelasi:</u>			<u>Related parties:</u>
Simpanan nasabah			Customer deposits
Deposito <i>on call</i>	13,535	-	Deposits on call
Deposito berjangka	6,205	46,654	Time deposits
Tabungan	365	2,816	Saving deposits
Giro	11	99	Current accounts
	20,116	49,569	
Pinjaman yang diterima	1,526,140	880,225	Borrowings
Pinjaman subordinasi	203,739	105,471	Subordinated loans
Simpanan dari bank-bank lain	21,654	563	Deposits from other banks
	1,771,649	1,035,828	
<u>Beban syariah</u>			<u>Sharia expenses</u>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer			Third parties' shares on return of temporary syirkah funds
Pihak ketiga	483,643	338,403	Third parties
Pihak berelasi	1,970	1,787	Related parties
Pinjaman yang diterima	820	4,250	Borrowings
	486,433	344,440	
	6,771,610	4,221,331	

31. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

31. OTHER OPERATING INCOME

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Pendapatan dari penerimaan kembali kredit yang dihapusbukukan	341,564	243,709	Income from recovery of written-off loans
Pendapatan administrasi dana pihak ketiga	317,635	315,821	Third party fund administration income
Pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan	278,551	193,369	Loan commission income
Pendapatan dari penjualan produk investasi	96,677	119,833	Income from sale of investment products
Denda pelunasan dipercepat dan keterlambatan	92,658	84,026	Early termination penalty and late penalty income
Pendapatan transaksi perdagangan efek-efek - bersih	66,704	38,619	Securities trading income - net
Pendapatan dari komisi asuransi	54,570	25,183	Insurance commission income
Jasa penerbitan garansi	31,946	30,069	Guarantee fees
Pendapatan komisi lainnya	21,766	77,379	Others commission income
Penerimaan kembali dari kerugian operasional	10,560	3,459	Operational loss recovery
Jasa kliring dan transfer	1,893	17,802	Clearing and transfer fees
Lain-lain	109,425	78,861	Others
	1,423,949	1,228,130	

Pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan adalah pendapatan administrasi yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan oleh bank.

Loan commission income are administration income received from bank's loans.

Pendapatan dari penjualan produk investasi adalah pendapatan komisi dari pihak ketiga atas produk investasi yang dijual melalui Bank.

Income from sale of investment products are commission income received from third party related with investment product that are sold through the Bank.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
(lanjutan)

Pendapatan dari komisi asuransi adalah pendapatan atas komisi yang diterima oleh Bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan asuransi: Allianz, Avrist, (Catatan 11n) dan asuransi jaminan.

Lain-lain termasuk jasa *cash handling*, jasa *payment point* dan pendapatan dividen.

31. OTHER OPERATING INCOME (continued)

Insurance commission income are income from commission received by the Bank based on agreements with insurance companies: Allianz, Avrist, (Note 11n) and insurance of collateral.

Others consist of cash handling services, payment point service and dividend income.

32. BEBAN KEPEGAWAIAN

32. PERSONNEL EXPENSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Gaji, upah, bonus dan tantiem	2,173,303	1,992,365	<i>Salaries, wages, bonus and tantiem</i>
Imbalan pascakerja	128,404	51,675	<i>Post-employment benefits</i>
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	9,163	7,150	<i>Other long term employee benefits</i>
Tunjangan hari raya	445,952	468,729	<i>Holiday allowances</i>
Tunjangan pajak	227,232	208,955	<i>Tax allowances</i>
Tunjangan kesehatan	198,821	164,366	<i>Medical benefits</i>
Tunjangan representasi	156,136	115,813	<i>Representation allowance</i>
Jamsostek	100,042	91,772	<i>Jamsostek</i>
Pendidikan dan latihan	93,275	75,110	<i>Training and education</i>
Tunjangan program kepemilikan kendaraan	60,398	57,957	<i>Car ownership program allowance</i>
Tunjangan telepon	41,140	38,530	<i>Telephone allowance</i>
Tunjangan perumahan	21,543	21,265	<i>Housing allowance</i>
Lain-lain	101,069	109,632	<i>Others</i>
	<u>3,756,478</u>	<u>3,403,319</u>	

Termasuk dalam beban kepegawaian adalah gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Lain-lain terdiri dari tunjangan *marketing*, akomodasi karyawan dan lainnya.

Included under personnel expenses are salaries and other compensations paid to the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.

Others consist of marketing allowances, employees accomodation and others.

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Jasa dari pihak ketiga dan perlengkapan kantor	838,500	862,218	<i>Services from third parties and office supplies</i>
Sewa	603,837	533,802	<i>Rent</i>
Beban asuransi	478,693	470,738	<i>Insurance expense</i>
Amortisasi piranti lunak (Catatan 15)	316,310	351,114	<i>Amortization of software (Note 15)</i>
Promosi dan iklan	282,754	260,947	<i>Promotion and advertising</i>
Penyusutan aset tetap (Catatan 14)	238,251	257,957	<i>Depreciation of fixed assets (Note 14)</i>
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	211,586	225,718	<i>Depreciation of right-of-use assets (Note 14)</i>
Jasa profesional	177,600	164,660	<i>Professional fees</i>
Pemeliharaan dan perbaikan	103,330	84,290	<i>Repairs and maintenance</i>
Lain-lain	22,905	60,571	<i>Others</i>
	<u>3,273,766</u>	<u>3,272,015</u>	

Jasa dari pihak ketiga dan perlengkapan kantor terdiri dari beban honorarium, perjalanan dinas, tagihan kantor pos, beban listrik, air dan telepon, komunikasi data, peralatan kantor dan jasa pengiriman.

Lain-lain termasuk pajak reklame, pajak kendaraan, pajak daftar perusahaan, dan beban lain-lain Entitas Anak.

Services from third parties and office supplies consist of expenses from honorarium, business travelling, post office billing, utilities, data communication, office supplies, and delivery services.

Others consist of advertisement tax, vehicle tax, company registration tax and Subsidiary's miscellaneous expenses.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

34. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11g)	3,029,571	1,754,676	Loans and sharia financing/receivables (Note 11g)
Komitmen pinjaman yang diberikan	(36,146)	34,359	Loan commitments issued
Efek-efek (Catatan 8h)	(365)	481	Securities (Note 8h)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain (Catatan 7g)	(167)	(42)	Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7g)
Giro pada bank-bank lain (Catatan 6)	(256)	(44)	Current accounts with other banks (Note 6)
Tagihan akseptasi (Catatan 10d)	4,217	(1,576)	Acceptance receivables (Note 10d)
Aset lain-lain (Catatan 16)	53,065	52,313	Other assets (Note 16)
Penyisihan selama tahun berjalan	3,049,919	1,840,167	Provision during the year

35. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

35. OTHER OPERATING EXPENSES

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Beban komisi dan administrasi luran tahunan OJK	384,297	311,269	Commissions and administrative fees OJK annual fee
Kerugian terkait risiko operasional	96,333	94,861	Loss from operational risk
Beban rumah tangga	19,193	7,620	Household expenses
Beban pengembangan komunitas	13,330	13,485	Community development expenses
Rekrutmen	7,263	40,544	Recruitment
Beban pengurusan klaim asuransi	4,176	3,837	Insurance claim expenses
Beban retribusi	2,985	3,466	Retribution expenses
Lain-lain	2,834	2,717	Others
	45,897	39,954	
	576,308	517,753	

Lain-lain termasuk beban jamuan, beban keanggotaan dan beban penyelesaian kredit.

Others consist of entertainment expenses, membership fees and credit settlement charges.

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

36. RELATED PARTY INFORMATION

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

In the normal course of business, the Group engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

Di bawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Grup, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following is a summary of related parties who have transactions with the Group, including the nature of the relationships and transactions:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	Pemegang saham pengendali/ Controlling shareholders	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif; liabilitas akseptasi/ Current accounts with other banks; deposits from other banks; derivative transactions; acceptance payables
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura/Singapore	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; liabilitas akseptasi; pinjaman yang diterima; pinjaman subordinasi; transaksi derivatif/ Current accounts with other banks; deposits from other banks; acceptance payables; borrowings; subordinated loans; derivative transactions
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Hong Kong/Hong Kong Branch	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif/ Current accounts with other banks; deposits from other banks; derivative transactions

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Sifat transaksi/ Nature of transactions
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank International plc, London	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Giro pada bank lain/ Current accounts with other banks
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Dusseldorf/Dusseldorf Branch	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Giro pada bank lain/ Current accounts with other banks
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Simpanan dari bank lain/ Deposits from other banks
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif/ Current accounts with other banks; deposits from other banks; derivative transactions
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Seoul	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Efek-efek/ Securities
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Giro pada bank lain/ Current accounts with other banks
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New Delhi	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Giro pada bank lain/ Current accounts with other banks
PT SMFL Leasing Indonesia	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ Deposits from customers; loans; derivative transactions
PT Oto Multiartha	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ Deposits from customers; loans; derivative transactions
PT Summit Oto Finance	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ Deposits from customers; loans; derivative transactions
PT INA Sekuritas Indonesia (dahulu bernama PT Nikko Sekuritas Indonesia)	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Simpanan nasabah/ Deposits from customers
PT SBCS Indonesia	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Simpanan nasabah/ Deposits from customers
Personil manajemen kunci/ Key Management Personnel	Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif/Directors, Commissioners and executive employees	Pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah, pembayaran kompensasi dan remunerasi, imbalan pascakerja/ Loans, deposits from customers, payments of compensation and remuneration, post-employment benefits

Transaksi dengan pihak berelasi

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(a) Giro pada bank-bank lain

Transactions with related parties

The outstanding balances and detail transactions with related parties were as follows:

(a) Current accounts with other banks

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Giro pada bank-bank lain			Current accounts with other banks
Pihak berelasi	462,061	639,707	Related party
Persentase terhadap jumlah aset	0.23%	0.31%	Percentage to total assets

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(a) Giro pada bank-bank lain

(a) Current accounts with other banks

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Pendapatan bunga	-	-	<i>Interest income</i>
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	-	-	<i>Percentage to total interest income</i>

(b) Efek-efek

(b) Securities

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Efek-efek			<i>Securities</i>
Pihak berelasi	-	185,510	<i>Related party</i>
	-	185,510	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	2,075	<i>Accrued interest income</i>
	-	187,585	
Persentase terhadap jumlah aset	-	0.09%	<i>Percentage to total assets</i>

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Pendapatan bunga	-	3,767	<i>Interest income</i>
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	-	0.04%	<i>Percentage to total interest income</i>

(c) Tagihan derivatif

(c) Derivative receivables

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Tagihan derivatif			<i>Derivative receivables</i>
Pihak berelasi	496,225	615,160	<i>Related party</i>
Persentase terhadap jumlah aset	0.25%	0.29%	<i>Percentage to total assets</i>

(d) Pinjaman yang diberikan

(d) Loans

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pinjaman yang diberikan			<i>Loans</i>
Personil manajemen kunci	17,944	16,504	<i>Key management personnel</i>
Pihak berelasi	3,755,420	2,370,889	<i>Related parties</i>
	3,773,364	2,387,393	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	45,016	19,863	<i>Accrued interest income</i>
	3,818,380	2,407,256	
Persentase terhadap jumlah aset	1.89%	1.15%	<i>Percentage to total assets</i>

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(d) Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

(d) Loans (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Pendapatan bunga:			<i>Interest income:</i>
Personil manajemen kunci	584	454	<i>Key management personnel</i>
Pihak berelasi	209,608	30,062	<i>Related parties</i>
	<u>210,192</u>	<u>30,516</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	<u>1.61%</u>	<u>0.29%</u>	<i>Percentage to total interest income</i>

Suku bunga atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebesar 5% - 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman antara 1 - 20 tahun. Pinjaman tersebut diberikan tanpa adanya jaminan tertentu.

Interest rate charged on loan to key management personnel amounting 5% - 8% per annum with term between 1 - 20 years. Such loan is given without any specific collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

There was no impairment on the loan to key management personnel as of 31 December 2023 and 2022.

(e) Simpanan nasabah

(e) Deposits from customers

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Dana pihak ketiga			<i>Third party funds</i>
Personil manajemen kunci:			<i>Key management personnel:</i>
Giro	-	-	<i>Current accounts</i>
Tabungan	88,170	59,543	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka dan deposito <i>on call</i>	106,928	141,457	<i>Time deposits and deposits on call</i>
	<u>195,098</u>	<u>201,000</u>	
Pihak berelasi:			<i>Related parties:</i>
Giro	50,003	57,708	<i>Current accounts</i>
Deposito <i>on call</i>	239,150	-	<i>Deposits on call</i>
Deposito berjangka	25	822,176	<i>Time deposits</i>
	<u>289,178</u>	<u>879,884</u>	
	484,276	1,080,884	
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	728	1,522	<i>Accrued interest expense</i>
	<u>485,004</u>	<u>1,082,406</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0.32%</u>	<u>0.68%</u>	<i>Percentage to total liabilities</i>

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Beban bunga	20,116	49,570	<i>Interest expense</i>
Persentase terhadap jumlah beban bunga	<u>0.32%</u>	<u>1.28%</u>	<i>Percentage to total interest expenses</i>

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(e) Simpanan nasabah (lanjutan)

(e) Deposits from customers (continued)

Dana pihak ketiga ditempatkan dalam giro, tabungan maupun deposito berjangka. Tingkat suku bunga yang diberikan oleh Bank adalah sebesar 0,01% - 6,00%. Untuk deposito berjangka tergantung tenor dan jumlah pokok deposito.

Third party funds are placed on current account, saving accounts and time deposits. Interest rate given by the Bank for the placement amounting to 0.01% - 6.00%. For time deposit depends on tenor and principal amount.

(f) Simpanan dari bank-bank lain

(f) Deposits from other banks

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Simpanan dari bank-bank lain	9,561,059	147,352	Deposits from other banks
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	6,697	-	Accrued interest expenses
	<u>9,567,756</u>	<u>147,352</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>6.37%</u>	<u>0.09%</u>	Percentage to total liabilities
	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Beban bunga	21,654	563	Interest expense
Persentase terhadap jumlah beban bunga	<u>0.34%</u>	<u>0.01%</u>	Percentage to total interest expenses

(g) Liabilitas derivatif

(g) Derivative liabilities

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Liabilitas derivatif			Derivative liabilities
Pihak berelasi	57,285	124,091	Related party
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0.04%</u>	<u>0.08%</u>	Percentage to total liabilities

(h) Liabilitas akseptasi

(h) Acceptance payables

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Liabilitas akseptasi			Acceptance payables
Pihak berelasi	163,383	199,232	Related party
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0.11%</u>	<u>0.12%</u>	Percentage to total liabilities

(i) Pinjaman yang diterima

(i) Borrowings

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pinjaman yang diterima	18,569,798	37,257,744	Borrowings
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	13,110	52,808	Accrued interest expenses
	<u>18,582,908</u>	<u>37,310,552</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>12.37%</u>	<u>23.33%</u>	Percentage to total liabilities
	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Beban bunga			Interest expense
Pihak berelasi	1,526,140	880,225	Related party
Persentase terhadap jumlah beban bunga	<u>24.28%</u>	<u>22.70%</u>	Percentage to total interest expenses

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(j) Pinjaman subordinasi

(j) Subordinated loans

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Pinjaman subordinasi	3,079,400	3,113,500	Subordinated loans
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	10,960	12,078	Accrued interest expenses
	<u>3,090,360</u>	<u>3,125,578</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>2.06%</u>	<u>1.95%</u>	Percentage to total liabilities
	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Beban bunga: Pihak berelasi	<u>203,739</u>	<u>105,471</u>	Interest expense: Related party
Persentase terhadap jumlah beban bunga	<u>3.24%</u>	<u>2.72%</u>	Percentage to total interest expenses

(k) Dana syirkah temporer

(k) Temporary syirkah funds

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Simpanan nasabah			Deposits from customers
Personil manajemen kunci:			Key management personnel:
Tabungan mudharabah	2,064	596	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	32,934	36,535	Mudharabah time deposits
	<u>34,998</u>	<u>37,131</u>	
Persentase terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil syirkah temporer	<u>0.35%</u>	<u>0.38%</u>	Percentage to total third parties' shares on return of temporary syirkah funds
	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
Hak atas bagi hasil dana syirkah temporer	<u>1,970</u>	<u>1,787</u>	Shares on return of temporary syirkah funds
Persentase terhadap beban bagi hasil	<u>0.40%</u>	<u>0.52%</u>	Percentage to total profit-sharing

(l) Kompensasi dan remunerasi personil manajemen kunci

(l) Compensation and remuneration of key management personnel

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

	31 Desember/December 2023						
	Direksi/Board of Directors		Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Personil manajemen kunci lainnya/Other key management personnel		
	%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	4.67%	175,252	1.43%	53,564	9.81%	368,423	Salaries and other short-term employee benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	0.42%	15,815	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.02%	619	Other long-term benefits
Jumlah	4.67%	175,252	1.43%	53,564	10.25%	384,857	Total

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(l) Kompensasi dan remunerasi personil
Manajemen kunci (lanjutan)

(l) Compensation and remuneration of key
management personnel (continued)

31 Desember/December 2022							
Direksi/Board of Directors		Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Personil manajemen kunci lainnya/Other key management personnel			
%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp		
						Salaries and other short-term employee benefits	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	5.52%	187,940	0.68%	23,076	10.75%	365,811	employee benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	0.20%	6,970	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.01%	455	Other long-term benefits
Jumlah	5.52%	187,940	0.68%	23,076	10.96%	373,236	Total

*) terhadap jumlah beban kepegawaian

*) % to total personnel expenses

(m) Komitmen dan kontinjensi

(m) Commitments and contingencies

		31 Desember/December		
		2023	2022	
Aset komitmen				Committed assets
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		37,247,514	19,161,055	Unused borrowing facilities
Liabilitas komitmen				Committed liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan		4,301,821	3,385,393	Unused credit facilities to customers
Liabilitas kontinjensi				Contingent liabilities
Garansi yang diberikan		30,000	-	Guarantees provided

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

37. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Berdasarkan jenis

a. By type

		31 Desember/December		
		2023	2022	
Aset komitmen				Committed assets
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik				Unused borrowing facilities
- Pihak ketiga		3,079,400	1,500,000	Third parties -
- Pihak berelasi		37,247,514	19,161,055	Related parties -
		40,326,914	20,661,055	
Aset kontinjensi - Pihak ketiga				Contingent assets - Third parties
Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan yang bermasalah		275,731	173,116	Interest receivable on non-performing loans
Garansi yang diterima		30,270,312	31,249,359	Guarantees received
		30,546,043	31,422,475	
Liabilitas komitmen				Committed liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>committed</i>				Unused credit facilities to customers - committed
- Pihak ketiga		10,870,217	13,315,311	Third parties -
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>uncommitted</i>				Unused credit facilities to customers - uncommitted
- Pihak ketiga		100,533,280	94,784,040	Third parties -
- Pihak berelasi		4,301,821	3,385,393	Related parties -
Dipindahkan		115,705,318	111,484,744	Carry forward

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

37. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

a. By type (continued)

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Liabilitas komitmen (lanjutan)			Committed liabilities (continued)
Pindahan	115,705,318	111,484,744	Carried forward
Fasilitas kredit kepada bank yang belum digunakan - <i>uncommitted</i> - Pihak ketiga	74,196	26,748	Unused credit facilities to banks - <i>uncommitted</i> - Third parties
<i>Letters of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan - Pihak ketiga	721,016	961,523	Irrevocable letters of credit - Third parties
	<u>116,500,530</u>	<u>112,473,015</u>	
Liabilitas kontinjensi - Pihak ketiga			Contingent liabilities - Third parties
Garansi yang diberikan			Guarantees provided
- Pihak ketiga	5,425,734	5,608,120	Third parties -
- Pihak berelasi	30,000	-	Related parties -
	<u>5,455,734</u>	<u>5,608,120</u>	

b. Berdasarkan kolektibilitas

b. By collectability

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Lancar	120,577,548	116,218,404	Current
Dalam Perhatian Khusus	1,378,716	1,812,731	Special Mention
Kurang Lancar	-	50,000	Substandard
Diragukan	-	-	Doubtful
Macet	-	-	Loss
	<u>121,956,264</u>	<u>118,081,135</u>	

c. Kasus hukum

c. Litigation cases

Bank menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi dan klaim yang belum terselesaikan, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Adalah tidak mungkin untuk memastikan apakah Bank akan memenangkan atau tidak menang atas masalah atau tuntutan hukum tersebut. Namun demikian, manajemen Bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Bank.

The Bank is a party to various unresolved legal actions, administrative proceedings, and claims in the ordinary course of its business. It is not possible to predict with certainty whether or not the Bank will ultimately be successful or not successful in any of these legal matters. However, the Bank's management does not expect that the results in any of these proceedings will have a material adverse effect on the Bank's results of operations, financial position or liquidity.

38. SEGMENT OPERASI

38. OPERATING SEGMENT

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi, yang bertindak sebagai pengambil keputusan operasi, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Grup telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 5, "Segmen Operasi".

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the Directors, as the chief operating decision maker, who are responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. All operating segments used by the Group meet the definition of a reportable segment under PSAK 5, "Operating Segment".

Grup memiliki 5 (lima) pelaporan segmen, berdasarkan produk usaha, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

The Group has 5 (five) reportable segments, in accordance with the business product, as set out in the table below.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Ritel

Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah pensiunan dan nasabah individual lainnya.

Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)

Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Penghimpunan dana dan treasury

Terdiri dari aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga dan bank lain, serta aktivitas treasury termasuk pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan.

Korporasi

Terdiri dari pinjaman dan layanan yang diberikan dari nasabah korporasi yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Syariah

Merupakan lini segmen operasi atas Entitas Anak yang dimulai dari tanggal efektif beroperasi sebagai bank umum syariah.

Terdiri dari pembiayaan syariah dan dana pihak ketiga dari nasabah syariah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Dalam mengalokasikan beban operasional, manajemen mengatribusikan beberapa pos beban operasional sesuai dengan kebijakan pelaporan internal Grup.

Informasi pelaporan segmen adalah sebagai berikut:

38. OPERATING SEGMENT (continued)

Retail

Consists of loans to pensioners and other individual customers.

Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

Consists of loans to micro, small & medium enterprise customers for commercial purpose.

Funding and treasury

Consists of funding business activity in raising funds from third party and other banks, and centralised treasury operations including borrowings and securities issued.

Corporate

Consists of loans and services from corporate customers which related to commercial purpose.

Sharia

Represents a line of operating segments of Subsidiary which started from the effective date to operate as a sharia commercial bank.

Consists of sharia financing and third party funds from sharia customers which related to commercial purpose.

In allocating operating expenses, management attributed some of its expenses based on Group's internal reporting policy.

The reportable segment information was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ Year ended 31 December 2023						Konsolidasian/ Consolidated	
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan tresuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination		
Pendapatan dan beban operasional								Operating income and expenses
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	3,842,949	1,208,448	1,153,880	6,864,214	5,746,182	-	18,815,673	External interest and sharia income
Pendapatan bunga antar segmen	(1,966,935)	(694,991)	7,979,661	(5,317,735)	-	-	-	Inter-segment interest income
Beban bunga antar segmen	99,394	36,584	(3,550,414)	3,414,436	-	-	-	Inter-segment interest expense
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(9,473)	(11,227)	(4,077,996)	(2,186,482)	(486,432)	-	(6,771,610)	Interest expense and sharia profit sharing
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan-bersih	1,965,935	538,814	1,505,131	2,774,433	5,259,750	-	12,044,063	Net reportable segment interest and sharia income

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING SEGMENT (continued)

Informasi pelaporan segmen adalah sebagai berikut:

The reportable segment information was as follows:

Tahun berakhir 31 Desember 2023/ Year ended 31 December 2023							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan operasional lainnya:							
Pendapatan operasional lainnya	194,157	334,504	1,075,173	257,981	60,949	(498,815)	1,423,949
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	287	93,261	556,838	(892)	-	649,494
Pendapatan operasional lainnya	194,157	334,791	1,168,434	814,819	60,057	(498,815)	2,073,443
Beban operasional lainnya							
Beban operasional lainnya	(1,650,923)	(717,917)	(2,023,436)	(1,171,656)	(2,042,620)	-	(7,606,552)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(296,016)	(120,903)	(278)	(734,605)	(1,898,117)	-	(3,049,919)
Beban operasional lainnya	(1,946,939)	(838,820)	(2,023,714)	(1,906,261)	(3,940,737)	-	(10,656,471)
Pendapatan operasional lainnya - bersih	(1,752,782)	(504,029)	(855,280)	(1,091,442)	(3,880,680)	(498,815)	(8,583,028)
Pendapatan (beban) non-operasional	845	1,742	(6,745)	(20)	825	-	(3,353)
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	213,998	36,527	643,106	1,682,971	1,379,895	(498,815)	3,457,682
Beban pajak penghasilan	(39,525)	(6,747)	(118,780)	(310,840)	(299,306)	-	(775,198)
Laba (rugi) bersih	174,473	29,780	524,326	1,372,131	1,080,589	(498,815)	2,682,484
31 Desember/December 2023							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Aset							
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan-bersih	25,318,456	13,669,400	-	102,781,449	10,173,945	-	151,943,250
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan	223,575	43,394	-	665,937	164,890	-	1,097,796
Aset lain-lain	-	-	27,673,435	-	10,076,959	(83,528)	37,666,866
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	152,967	-	75,512	-	228,479
Jumlah aset yang dialokasikan	25,542,031	13,712,794	27,826,402	103,447,386	20,491,306	(83,528)	190,936,391
Aset yang tidak dialokasikan*							10,512,001
Jumlah aset							201,448,392

*) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset takberwujud, liabilitas lainnya dan akrual.

*) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING SEGMENT (continued)

		31 Desember/December 2023								
		Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated		
Liabilitas								Liabilities		
Simpanan nasabah	2,174,755	602,187	34,994,775	65,046,302	2,205,268	-	105,023,287	Customer deposits		
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	-	145,624	-	18,996	-	164,620	Undistributed revenue sharing		
Liabilitas lain-lain	-	-	48,301,467	-	100,000	(10,096)	48,391,371	Other liabilities		
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	169,394	-	-	-	169,394	Accrued interest expenses		
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	2,174,755	602,187	83,611,260	65,046,302	2,324,264	(10,096)	153,748,672	Total allocated liabilities		
Liabilitas yang tidak dialokasikan*	-	-	-	-	-	-	6,164,747	Unallocated liabilities*		
Jumlah liabilitas							159,913,419	Total liabilities		
Dana syirkah temporer	-	-	-	-	9,843,261	-	9,843,261	Temporary syirkah fund		

*) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset takberwujud, liabilitas lainnya dan akrual.

*) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals.

		Tahun berakhir 31 Desember 2022/ Year ended 31 December 2022								
		Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated		
Pendapatan dan beban operasional								Operating income and expenses		
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	4,265,547	981,674	960,274	4,318,361	5,373,790	-	15,899,646	External interest and sharia income		
Pendapatan bunga antar segmen	(2,259,272)	(351,222)	5,192,551	(2,582,057)	-	-	-	Inter-segment interest income		
Beban bunga antar segmen	91,090	20,948	(2,320,670)	2,208,632	-	-	-	Inter-segment interest expense		
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(21,769)	(4,349)	(2,577,615)	(1,273,158)	(344,440)	-	(4,221,331)	Interest expense and sharia profit sharing		
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan-bersih	2,075,596	647,051	1,254,540	2,671,778	5,029,350	-	11,678,315	Net reportable segment interest and sharia income		
Pendapatan operasional lainnya:								Other operating income:		
Pendapatan operasional lainnya	160,206	218,666	840,897	279,535	61,818	(332,992)	1,228,130	Other operating income		
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	286	189,913	590,458	3,828	-	784,485	Net gain on foreign exchange and derivative transactions		
Pendapatan operasional lainnya	160,206	218,952	1,030,810	869,993	65,646	(332,992)	2,012,615	Other operating income		
Beban operasional lainnya								Other operating expenses		
Beban operasional lainnya	(1,587,330)	(881,123)	(1,904,827)	(950,315)	(1,869,492)	-	(7,193,087)	Other operating expenses		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(234,311)	(269,769)	482	(391,517)	(945,052)	-	(1,840,167)	Allowance for impairment losses		
Beban operasional lainnya	(1,821,641)	(1,150,892)	(1,904,345)	(1,341,832)	(2,814,544)	-	(9,033,254)	Other operating expenses		
Pendapatan operasional lainnya - bersih	(1,661,435)	(931,940)	(873,535)	(471,839)	(2,748,898)	(332,992)	(7,020,639)	Net reportable operational segment income		
Pendapatan (beban) non-operasional	1,516	698	(4,502)	(11)	1,942	-	(357)	Non-operating income (expenses)		
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	415,677	(284,191)	376,503	2,199,928	2,282,394	(332,992)	4,657,319	Segment income (loss) before income tax		
Beban pajak penghasilan	(80,581)	55,092	(72,987)	(426,465)	(502,814)	-	(1,027,755)	Income tax expense		
Laba (rugi) bersih	335,096	(229,099)	303,516	1,773,463	1,779,580	(332,992)	3,629,564	Net income (loss)		

**PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING SEGMENT (continued)

		31 Desember 2022/31 December 2022						
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan tresuri/ Funding and Treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Aset								Assets
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan- bersih	25,854,020	10,722,188	-	95,209,651	10,758,538	-	142,544,397	Net loans/financing
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima dari pinjaman/ pembiayaan yang diberikan	221,321	32,274	-	486,163	138,776	-	878,534	Accrued interest/ margin income from loans/ financing
Aset lain-lain	-	-	45,642,915	-	9,237,945	(8,982)	54,871,878	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	152,722	-	64,941	-	217,663	Accrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	26,075,341	10,754,462	45,795,637	95,695,814	20,200,200	(8,982)	198,512,472	Total allocated assets
Aset yang tidak dialokasikan*							10,657,232	Unallocated assets*
Jumlah aset							209,169,704	Total assets
Liabilitas								Liabilities
Simpanan nasabah	2,174,755	602,187	34,994,775	65,046,302	2,205,268	-	105,023,287	Customer deposits
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	-	145,624	-	18,996	-	164,620	Undistributed revenue sharing
Liabilitas lain-lain	-	-	48,301,467	-	100,000	(10,096)	48,391,371	Other liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	169,394	-	-	-	169,394	Accrued interest expenses
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	2,174,755	602,187	83,611,260	65,046,302	2,324,264	(10,096)	153,748,672	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan *							6,164,747	Unallocated liabilities*
Jumlah liabilitas							159,913,419	Total liabilities
Dana syirkah temporer	-	-	-	-	9,843,261	-	9,843,261	Temporary syirkah fund

*) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset takberwujud, liabilitas lainnya dan akrual.

*) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals.

Berdasarkan informasi geografis

Pada tanggal 31 Desember 2023, segmen berdasarkan geografis terdiri dari 73 cabang (tidak diaudit) yang terbagi menjadi 4 area yaitu Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, serta Kalimantan dan Sulawesi (31 Desember 2022: 73 cabang) (tidak diaudit).

Segmen informasi berdasarkan geografis adalah sebagai berikut:

Geographical information

As of 31 December 2023, geographical segment consists of 73 branches (unaudited) that are located into 4 areas, which are Java, Sumatera, Bali and Nusa Tenggara, also Kalimantan and Sulawesi (31 December 2022: 73 branches) (unaudited).

Information concerning geographical segments is as follows:

	Jawa/ Java	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
31 Desember 2023							31 Desember 2023
Pendapatan bunga	14,762,054	2,321,058	487,220	1,245,341	-	18,815,673	Interest income
Jumlah aset	181,546,539	10,678,290	2,410,816	8,041,057	(1,228,310)	201,448,392	Total assets
31 Desember 2022							31 Desember 2022
Pendapatan bunga	11,863,972	2,261,709	491,252	1,282,713	-	15,899,646	Interest income
Jumlah aset	190,311,295	9,822,302	2,460,961	7,808,973	(1,233,827)	209,169,704	Total assets

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. LABA BERSIH PER SAHAM

39. EARNINGS PER SHARE

a. Laba per saham dasar

a. Basic earnings per share

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Jumlah laba per saham dasar yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	293	384	<i>Total basic earnings per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank</i>

b. Laba per saham dilusian

b. Diluted earnings per share

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Jumlah laba per saham dilusian yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	293	384	<i>Total diluted earnings per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank</i>

c. Laba yang digunakan dalam perhitungan laba per saham

c. Earnings used in calculating earnings per share

	31 Desember/December		
	2023	2022	
<u>Laba per saham dasar</u>			<i>Basic earnings per share</i>
Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar	2,358,334	3,095,701	<i>Profit attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating basic earnings per share</i>
<u>Laba per saham dilusian</u>			<i>Diluted earnings per share</i>
Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian	2,358,334	3,095,701	<i>Profit attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating diluted earnings per share</i>

d. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut

d. Weighted average number of shares used as the denominator

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar	8,056,720,684	8,056,644,071	<i>Weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating basic earnings per share</i>
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dilusian	8,056,720,684	8,056,644,071	<i>Weighted average number of shares used as the denominator in calculation diluted earnings per share</i>

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN**

a. PT Taspen (Persero)

Sejak tahun 2007, Bank telah bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) dimana Bank menjadi salah satu mitra untuk penanganan pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Sejak bulan Maret 2012 Bank telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dimana PT Pos Indonesia (Persero) membantu Bank dalam melakukan pemotongan uang pensiun para pegawai Pemerintah untuk angsuran kredit pensiun dan memasarkan produk kredit pensiunan Bank.

Perjanjian kerjasama Bank dengan PT Pos Indonesia (Persero) diperbaharui secara berkala dan berdasarkan perjanjian terakhir kerjasama ini akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 25 Juli 2024. Untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2023 terkait dengan kerjasama ini, Bank membayarkan komisi kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp 73.185 (31 Desember 2022: Rp 74.764).

c. Perjanjian pembiayaan bersama

PT KB Finansia Multi Finance

Pada bulan Oktober 2022, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT KB Finansia Multi Finance ("FMF"). Dalam kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak FMF. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 300.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2022 hingga 28 Oktober 2025. Berdasarkan perubahan pada Agustus 2023, fasilitas maksimum diubah menjadi Rp 600.000.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND
COMMITMENTS**

a. PT Taspen (Persero)

Since 2007, the Bank has been cooperating with PT Taspen (Persero) in which the Bank become one of the partners for handling the payments of pension to retired government employees.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Since March 2012 the Bank has been cooperating with PT Pos Indonesia (Persero) in which PT Pos Indonesia (Persero) assists the Bank in deducting the pension benefits of retired government employees for pension loan installments and marketing the Bank's pension loan products.

The Bank's cooperation agreement with PT Pos Indonesia (Persero) is renewed regularly and based on the latest agreement, the cooperation will be continuing until 25 July 2024. For the year ended 31 December 2023 in relation to this cooperation, the Bank paid commissions to PT Pos Indonesia (Persero) amounting to Rp 73,185 (31 December 2022: Rp 74,764).

c. Joint financing agreement

PT KB Finansia Multi Finance

In October 2022, the Bank entered into a joint financing arrangement (without recourse) with PT KB Finansia Multi Finance ("FMF"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and minimum of 10% from FMF. The maximum joint financing facility is amounted to Rp 300,000. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 28 October 2022 to 28 October 2025. Based on addendum on August 2023, maximum joint financing facility has been changed to Rp 600,000.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

c. Perjanjian pembiayaan bersama (lanjutan)

PT Home Credit Indonesia

Pada tanggal 23 Juni 2014 melalui Perjanjian Kerjasama No PKS.087/DIR/TFI/VI/2014, Bank melakukan Perjanjian Kerjasama pembiayaan bersama without recourse dengan PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Dalam Perjanjian Kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak HCI.

Pada tanggal 8 Maret 2023 melalui Perjanjian Kerjasama No PKS.015/RLBJF/III/2023 fasilitas pembiayaan bersama ditingkatkan menjadi Rp 4.200.000 dan jangka waktu perjanjian telah diperpanjang hingga 8 Maret 2026.

PT Mandiri Utama Finance

Pada bulan Agustus 2023, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT Mandiri Utama Finance ("MUF"). Dalam kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah maksimum 99% dari Bank dan minimum 1% dari pihak MUF. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 500.000. Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 hingga 21 Agustus 2026.

**d. Perjanjian Kerjasama Jasa Pemasaran dan
Administrasi Produk BTPN**

PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku)

Pada bulan Juni 2023, Bank melakukan kerjasama penyaluran pendanaan dengan PT Mitrausaha Indonesia Grup ("MIG"). Fasilitas maksimum penyaluran pendanaan adalah sebesar Rp 100.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023 hingga 14 Juni 2024 dan setelahnya dapat diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

**40. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND
COMMITMENTS (continued)**

c. Joint financing agreement (continued)

PT Home Credit Indonesia

On 23 June 2014, through Cooperation Agreement No. PKS.087/DIR/TFI/VI/2014, the Bank entered a joint financing without recourse arrangement with PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and a minimum of 10% from HCI.

On 8 March 2023, through Cooperation Agreement No. PKS.015/RLBJF/III/2023 joint financing facilities has been increased to Rp 4,200,000 and the agreement has been extended to 8 March 2026.

PT Mandiri Utama Finance

In August 2023, the Bank entered into a joint financing arrangement (without recourse) with PT Mandiri Utama Finance ("MUF"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 99% from the Bank and minimum of 1% from MUF. The maximum joint financing facility is amounted to Rp 500,000. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 21 August 2023 to 21 August 2026.

**d. Marketing and Administration Services for
BTPN Product agreement**

PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku)

In June 2023, the Bank entered into channeling cooperation with PT Mitrausaha Indonesia Grup ("MIG"). The maximum channeling facility is amounted to Rp 100,000. The term of the agreement is for 1 (one) year, from 14 June 2023 to 14 June 2024 and extended automatically every year for a period of 2 (two) years.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND COMMITMENTS (continued)

e. Perjanjian Kerjasama Bancassurance

Pada bulan Agustus 2014, Bank melakukan kerjasama *bancassurance* dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). Bank akan mendistribusikan produk-produk asuransi jiwa dari Allianz kepada nasabah Bank melalui seluruh jalur distribusi Bank. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun.

e. Bancassurance Agreement

In August 2014, the Bank entered into a *bancassurance* agreement with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). The Bank will distribute life insurance products of Allianz to its customers through the Bank's distribution channels. The agreement is effective for 10 years.

f. Komitmen signifikan lainnya

Bank menyewa kantor dengan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa antara 5 – 11 tahun dengan mayoritas perjanjian jasa dapat diperbarui pada akhir periode dengan harga pasar. Bank diharuskan memberitahukan enam bulan lebih awal apabila berniat mengakhiri perjanjian sewa. Beban terkait transaksi sewa yang dibebankan pada laba rugi selama tahun berjalan diungkapkan dalam Catatan 30 dan 33.

f. Other significant commitment

The Bank leases offices under non-cancellable lease agreements. The lease terms are between 5 – 11 years, and the majority of lease agreements are renewable at the end of the lease period at the market rate. The Bank is required to give a six-month notice for the termination of these agreements. The expenses related with lease transactions charged to the profit or loss during the year was disclosed in Note 30 and 33.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Bank:

The following are counterparties of the Bank's lease commitments:

Pihak dalam perjanjian/ <i>Counterparties</i>	Item yang disewa/ <i>Leased items</i>	Periode perjanjian/ <i>Period of agreement</i>
PT Bumi Serpong Damai	Ruang Kantor/ <i>Office Space</i>	1 Februari/ <i>February</i> 2023 – 1 September/ <i>September</i> 2026
PT Bahana Semesta Citra Nusantara	Ruang Kantor/ <i>Office Space</i>	5 Oktober/ <i>October</i> 2015 – 14 Maret/ <i>March</i> 2027

Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable leases were as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Hingga 1 tahun	-	4,484	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 - 5 tahun	97,355	410,185	<i>More than 1 - 5 years</i>
	<u>97,355</u>	<u>414,669</u>	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko

Grup mengutamakan penerapan manajemen risiko baik pada Bank dan Entitas Anak. Bank memiliki segmen yang lengkap mulai dari segmen pinjaman dengan plafon kecil di BTPN Syariah (Entitas Anak), Digital, Pensiun, MUR (mikro), SME, Komersial sampai dengan Korporasi. Dalam hal konsentrasi portofolio, segmen Korporasi menjadi portofolio terbesar yaitu di kisaran 66% pada posisi 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: 65%), diikuti oleh segmen Pensiunan di kisaran 14% pada posisi 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: 16%).

Pengembangan manajemen risiko keuangan di Grup berpedoman pada peraturan OJK yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Kerangka manajemen risiko Grup diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Grup melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan perkembangan organisasi, strategi dan manajemen sistem informasi.

Penerapan manajemen risiko mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi manajemen risiko Grup melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Grup telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris dan Komite Manajemen Risiko di tingkat direksi yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, sebagai unit kontrol yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Grup.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya ini, Komite Audit dibantu oleh satuan kerja internal audit.

Risiko yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit dan pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

41. RISK MANAGEMENT

Risk management framework

The Group focuses on the risk management implementation for the Bank and Subsidiary. The Bank has complete segments starting from loans with small limit at BTPN Syariah (Subsidiary), Digital, Pension, MUR (micro), SME, Commercial up to Corporate segment. In term of portfolio concentration, Corporate segment is the largest portfolio at around 66% as of 31 December 2023 (31 December 2022: 65%), followed by Pensioners segment at around 14% as of 31 December 2023 (31 December 2022: 16%).

Financial risk management development in the Group is guided by OJK regulations which govern risk management implementation by commercial banks operating in Indonesia.

The Group's risk management framework is implemented through policies, procedures, transactions and authorisation limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Group carries out continuous risk management development in line with the increasing business complexity and the development organisation, strategies and management information systems.

The implementation of risk management covers:

- *Active supervision from Board of Commissioners and Board of Directors*
- *Sufficient policies, procedures and limit sets*
- *Sufficient process of identification, measurement, risk oversight and control and risk management information*
- *Overall internal control system*

The risk management organization of the Group involves the oversight from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Group has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level and Risk Management Committee at the director level, which constitutes a crucial element in risk control, as a control unit to monitor all of the risks in the Group's operating activities.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with risk management policies and procedures and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. In performing the role, the Audit Committee is assisted by internal audit working unit.

The risks arising from the Group's financial instruments are financial risks, which include credit and financing risk, liquidity risk, market risk and operational risk.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Entitas Anak telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada Entitas Anak. Manajemen risiko pada Entitas Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada struktur organisasi Entitas Anak juga dibentuk Komite Audit yang memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara berkala, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Entitas Anak.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap pengendalian internal melalui laporan-laporan untuk digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang tepat pada Entitas Anak.

Bank selaku Entitas Induk telah menerapkan manajemen risiko konsolidasian sesuai ketentuan OJK. Penerapan manajemen risiko konsolidasian antara lain mencakup laporan perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) konsolidasian, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) konsolidasian, laporan Profil Risiko konsolidasian, Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*) konsolidasian dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) konsolidasian.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Grup. Risiko kredit terutama berasal dari pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Grup juga terekspos risiko kredit yang muncul dari investasi pada efek-efek utang.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)

Subsidiary has implemented risk management, among others by establishing a risk unit in Subsidiary. Risk management in Subsidiary is operating separately from the business unit and conducting its function independently. To support the implementation of risk management, the Subsidiary has established Audit Committee in its organizational structure, which has responsibility to monitor the compliance of risk management policies and procedures on a regular basis, and to analyse the adequacy of risk management framework which related to the risks faced by the Subsidiary.

In addition, the Subsidiary's Board of Commissioners and Board of Directors actively monitor and evaluate the internal controls, through the reports, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiary.

As the Parent Entity, the Bank has implemented consolidated risk management in accordance with OJK regulation. The Implementation of consolidated risk management among others include report of consolidated minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), Legal Lending Limit (LLL), risk profile, Risk-Based Bank Rating and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss, should any of the customers, clients or counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Group. Credit risk arises mainly from loans and sharia financing/receivables.

The Group is also exposed to credit risks arising from investment in debt securities.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Grup melakukan kaji ulang atas kebijakan kredit secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Batas pemberian kredit ditetapkan dan ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Penelaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan kredit dilakukan melalui komite kredit dan kewenangan kredit sebagaimana ditetapkan.

(i) Manajemen risiko kredit

Grup mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit dan pembiayaan secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan akan terus dikembangkan serta telah mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan yang tepat waktu untuk mengatasi kemungkinan penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Manajemen risiko kredit atas pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 berdampak pada kemampuan membayar kembali oleh debitur, yang masih berlanjut hingga periode pasca-pandemi. Dampak keuangan langsung dari wabah tersebut bagi industri perbankan adalah peningkatan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE), yang disebabkan oleh peningkatan risiko kredit dan penurunan kualitas pinjaman.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

The Group reviews the credit policies periodically, especially if there are any changes in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

Lending limits are set and reviewed in the light of changing market and economic conditions. Periodic credit reviews and assessments of probability of default are also conducted. Credit approval is processed by credit committee and credit authority as determined.

(i) Credit risk management

The Group actively manages and monitors the loan portfolio quality by improving credit and financing risk management policies effectively, improving procedures and systems development.

Management Information Systems (MIS) are in place and continuously developed and have covered sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing timely measurement to be taken to counteract any possible deterioration in credit quality or to minimise credit losses.

Credit risk management in COVID-19 pandemic

Covid-19 pandemic impacted debtors' repayment capabilities, which continued until this post-pandemic period. Direct financial impact of the pandemic to the banking industry showed an increase in Expected Credit Loss caused by increased credit risk and the decline of credit quality.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Manajemen risiko kredit atas pandemi COVID-19 (lanjutan)

Bank telah melakukan upaya penanganan dalam menjaga stabilitas dan mitigasi dampak dari pandemi tersebut antara lain:

1. Berdasarkan POJK No 11/POJK.03/2020, POJK No.48/POJK.03/2020, dan POJK 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan kedua atas Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Bank melakukan proses *monitoring* dan pengawasan atas kualitas dan kecukupan CKPN debitur-debitur yang direstrukturisasi hingga Maret 2023. Proses ini dilanjutkan di periode pasca-pandemi dengan mengacu pada POJK No. 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana serta KDK No. 34/KDK 03/ 2022 mengenai Penetapan Daerah dan/atau Sektor Ekonomi yang Terdampak Bencana yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank (sektor ekonomi dan daerah tersebut adalah sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki; segmen usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau daerah Provinsi Bali, yang berlaku sampai dengan Maret 2024). Panduan atas penerapan POJK dan KDK tersebut telah dibuat oleh Bank. (catatan 11.o)
2. Bank melakukan penilaian apakah debitur yang direstruktur kreditnya memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi dampak COVID-19 sesuai panduan penerapan KDK No. 34/KDK 03/2022.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(i) Credit risk management (continued)

Credit risk management in COVID-19 pandemic (continued)

The Bank has made an effort to handle this issue in order to maintain stability and to mitigate the impact of pandemic as follows:

1. Referring to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020, OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020, and OJK Regulation No. 17/POJK.03/2021 concerning Second Amendment of National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Disease 2019, the Bank has conducted monitoring and supervision process of the quality and adequacy of allowance of impairment losses for restructured debtors up to March 2023. This process has been continued to the post-pandemic period in accordance to OJK Regulation No. 19/2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Specific Regions and Sectors in Indonesia Impacted by a Disaster and OJK Board of Commissioners Decree No. 34/KDK 03/2022 concerning Stipulation of Region and/or Sector Which Require Special Treatment regarding Bank Financing (the sectors and/or regions include accommodation and food and drink provision sector, the textile and textile products and footwear sectors, the micro, small and medium enterprises segment, and/or Bali Province, up to March 2024). The guideline for the implementation of the aforementioned OJK Regulation and OJK Board of Commissioners Decree has been set by the bank. (Notes 11.o)
2. The Bank conducts assessment on whether restructured debtors have the capability to withstand the impact of COVID-19 in accordance to the OJK Board of Commissioners Decree No. 34/KDK 03/2022 implementation guidelines.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- (i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Manajemen risiko kredit atas pandemi
COVID-19 (lanjutan)

Bank telah melakukan upaya penanganan dalam menjaga stabilitas dan mitigasi dampak dari pandemi tersebut antara lain: (lanjutan)

3. Bank telah melakukan pengkinian kebijakan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dirilis oleh Pemerintah melalui program penjaminan kredit dan subsidi bunga kepada debitur usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Jumlah saldo pinjaman yang telah disalurkan Bank pada posisi tanggal 31 Desember 2023 dalam rangka program PEN adalah sebesar Rp 3.068 (31 Desember 2022: Rp 16.123).

Demikian halnya dengan Entitas Anak, dalam masa pandemi, Entitas Anak membantu nasabah yang usahanya terdampak pandemi COVID-19, melalui program relaksasi sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 dan perubahan-perubahannya (POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021). Entitas Anak turut melanjutkan dukungannya pada periode pasca-pandemi ini dengan penerapan perlakuan khusus berdasarkan KDK No. 34/KDK 03/2022.

Entitas Anak juga berpartisipasi dalam program PEN sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk membantu segmen usaha mikro yang terdampak. Dalam rangka implementasi program PEN sesuai peraturan yang berlaku, Entitas Anak telah berpartisipasi dengan menjadi peserta penjaminan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang murabahah sebesar Rp 248.791 dan Rp 2.777.938 telah dijamin oleh Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- (i) Credit risk management (continued)

Credit risk management in COVID-19 pandemic
(continued)

The Bank has made an effort to handle this issue in order to maintain stability and to mitigate the impact of pandemic as follows: (continued)

3. *The Bank has updated policies to support the National Economic Recovery program released by the Government through a credit guarantee program and interest subsidies for micro, small and medium enterprise (MSME) borrowers according to the criteria set by the government. The Bank has signed a Collective Agreement with PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). The total disbursed credit by Bank as of 31 December 2023 in relation with PEN program amounted to Rp 3,068 (31 December 2022: Rp 16,123).*

As well as with the Subsidiary, during the pandemic period, the Subsidiary supports customers whose business impacted by the COVID-19 pandemic with relaxation program, in accordance to POJK No. 11/POJK.03/2020 and its amendments (POJK No. 48/POJK.03/2020 and POJK No. 17/POJK.03/2021). The Subsidiary continued the support until this post-pandemic period with the implementation of special treatment under OJK Board of Commissioners Decree No. 34/KDK 03/2022.

The Subsidiary also participates in PEN program as imposed by the government to support micro business segment impacted by the pandemic. In conjunction with the implementation of PEN Program in accordance with the prevailing regulation, the Subsidiary has participated as guarantee participant. As of 31 December 2023 and 2022, murabahah receivables amounting to Rp 248,791 and Rp 2,777,938 were guaranteed by the designated Guarantee Company which are PT Penjaminan Jamkrindo Syariah and PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Agunan

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit, Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah:

- Kas/deposito
- Tanah dan/atau Bangunan
- SBLC
- Kendaraan
- Peralatan (termasuk mesin dan alat berat)

- Persediaan
- Piutang

Untuk kredit korporasi, Bank mendapatkan jaminan dalam bentuk *standby letters of credit* dari bank afiliasi untuk membatasi risiko kredit bank. Bank juga menyediakan bank garansi kepada nasabahnya yang mengharuskan Bank melakukan pembayaran untuk kepentingan mereka. Hal ini menyebabkan Bank menghadapi risiko yang sama dengan kredit yang diberikan dan risiko tersebut juga dimitigasi dengan prosedur dan kebijakan yang sama.

Selain agunan yang disebutkan di atas, agunan yang diterima untuk kredit korporasi terutama terdiri dari jaminan yang diterima dari perusahaan induk debitur, penjaminan kredit korporasi dan entitas publik lainnya, lembaga keuangan dan perusahaan lain serta jaminan berupa efek-efek.

Porsi kredit yang diberikan yang mendapatkan manfaat dari agunan, baik sebagian maupun penuh, sebagai mitigasi dari risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 33,79% dan 34,06% dari jumlah kredit yang diberikan.

(ii) Eksposur maksimum risiko kredit (tanpa memperhitungkan agunan dan perlindungan kredit lainnya)

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi dan *irrevocable L/C* yang diterbitkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas bank garansi dan *irrevocable L/C* yang diterbitkan terjadi. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah komitmen fasilitas kredit (*committed*) yang belum digunakan oleh nasabah.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(i) Credit risk management (continued)

Collaterals

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral to mitigate credit risk. The collateral types for loans are as follows:

- Cash/Time deposits
- Lands and/or Buildings
- SBLC
- Vehicles
- Equipment (including machines and heavy equipment)
- Inventories
- Accounts receivable

For corporate loans, the Bank received collateral in the form of standby letters of credit from controlling banks to restrict the Bank's credit risk. The Bank also provides bank guarantee to its customers which require the Bank to make payments for their interests. This causes the Bank to face the same risks as the loans granted and these risks are also mitigated by the same procedures and policies.

In addition to the collateral mentioned above, collaterals for corporate loans mainly consists of guarantees received from the parent company of the debtor, corporate credit guarantees and other public entities, financial institutions and other companies as well as collateral in the form of securities.

The portion of loans that benefits from such partial or full collateralization as credit risk mitigation as of 31 December 2023 and 2022 were 33.79% and 34.06% of total outstanding loans, respectively.

(ii) Maximum exposure to credit risk (without taking into account collateral held or other credit enhancements)

For financial assets recognized in the consolidated statement of financial position, the maximum exposure to credit risk is equal to its carrying value. For bank guarantees and irrevocable L/C issued, maximum exposure to credit risk is the value that must be paid by the Bank if the liabilities on the bank guarantee and irrevocable L/C issued has been occurred. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is equal to the amount of committed credit facilities that have not been used by customers.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- (ii) Eksposur maksimum risiko kredit (tanpa memperhitungkan agunan dan perlindungan kredit lainnya) (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

	31 Desember/December	
	2023	2022
Giro pada Bank Indonesia	9,276,598	10,215,350
Giro pada bank-bank lain	962,229	2,189,146
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,964,278	21,887,894
Efek-efek	17,263,557	19,049,690
Tagihan derivatif	1,133,149	1,746,824
Tagihan akseptasi	3,281,120	3,065,359
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih		
- Korporasi	102,781,448	95,209,651
- Pensiunan	22,190,683	23,733,930
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM")	13,669,400	10,722,188
- Pembiayaan/piutang syariah	10,173,945	10,758,538
- Lainnya	3,127,774	2,120,090
- Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	1,097,796	878,534
Penyertaan saham	102,586	103,473
Aset lain-lain	423,113	228,822
	<u>194,447,676</u>	<u>201,909,489</u>
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:		
Garansi yang diberikan	5,455,734	5,608,120
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>committed</i>	10,870,217	13,315,311
<i>Letters of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan	721,016	961,523

- (iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Grup mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

Grup menentukan tingkat risiko kredit dan pembiayaan yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau kelompok debitur.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- (ii) Maximum exposure to credit risk (without taking into account collateral held or other credit enhancements) (continued)

The following table presents the Group's maximum exposure to credit risk of financial instruments in the consolidated statement of financial position and off-balance sheet accounts, without taking into account any collateral held or other credit enhancements:

Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Securities
Derivative receivables
Acceptance receivables
Loans and sharia financing/receivables - net
Corporates -
Pensioners -
Micro Small and Medium Enterprises ("MSME")
Sharia financing/receivables -
Others -
Accrued interest/margin income -
Investment in shares
Other assets
Commitments and contingencies with credit risk:
Guarantees provided
Unused credit facilities to customers - committed
Irrevocable letters of credit

- (iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

The Group manages and controls concentrations of credit risk wherever they are identified - in particular, to individual and group counterparties, and to industries and geographical sectors.

The Group structures the levels of credit and financing risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one or group borrowers.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor geografis adalah sebagai berikut:

Credit risk concentration by geographical sectors was as follows:

		31 Desember/December 2023					
		Jawa/Java*	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jumlah/ Total	
	Giro pada Bank Indonesia	9,276,598	-	-	-	9,276,598	Current accounts with Bank Indonesia
	Giro pada bank-bank lain	961,885	121	95	128	962,229	Current accounts with other banks
	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,964,278	-	-	-	8,964,278	Placements with Bank Indonesia and other banks
	Efek-efek	17,263,557	-	-	-	17,263,557	Securities
	Tagihan derivatif	1,133,149	-	-	-	1,133,149	Derivative receivables
	Tagihan akseptasi	3,281,120	-	-	-	3,281,120	Acceptance receivables
	Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – bersih	132,873,008	10,130,220	2,321,948	7,715,870	153,041,046	Loans and sharia financing/ receivables - net
	Penyertaan saham	102,564	8	-	14	102,586	Investment in shares
	Aset lain-lain	421,775	591	194	553	423,113	Other assets
		<u>174,277,934</u>	<u>10,130,940</u>	<u>2,322,237</u>	<u>7,716,565</u>	<u>194,447,676</u>	
<u>Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:</u>							<u>Commitments and contingencies with credit risk:</u>
	Garansi yang diterbitkan	5,455,734	-	-	-	5,455,734	Guarantees issued
	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - committed	10,490,341	-	-	379,876	10,870,217	Unused credit facilities to customers - committed
	Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	721,016	-	-	-	721,016	Irrevocable letters of credit
	*) Termasuk Kantor Pusat						*) Including Head Office
		31 Desember/December 2022					
		Jawa/Java*	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jumlah/ Total	
	Giro pada Bank Indonesia	10,215,350	-	-	-	10,215,350	Current accounts with Bank Indonesia
	Giro pada bank-bank lain	2,188,627	210	151	158	2,189,146	Current accounts with other banks
	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	21,887,894	-	-	-	21,887,894	Placements with Bank Indonesia and other banks
	Efek-efek	19,049,690	-	-	-	19,049,690	Securities
	Tagihan derivatif	1,746,824	-	-	-	1,746,824	Derivative receivables
	Tagihan akseptasi	3,065,359	-	-	-	3,065,359	Acceptance receivables
	Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – bersih	124,387,704	9,194,397	2,355,909	7,484,921	143,422,931	Loans and sharia financing/ receivables - net
	Penyertaan saham	103,451	8	-	14	103,473	Investment in shares
	Aset lain-lain	227,243	695	13	871	228,822	Other assets
		<u>182,872,142</u>	<u>9,195,310</u>	<u>2,356,073</u>	<u>7,485,964</u>	<u>201,909,489</u>	
<u>Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:</u>							<u>Commitments and contingencies with credit risk:</u>
	Garansi yang diterbitkan	5,608,120	-	-	-	5,608,120	Guarantees issued
	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - committed	13,315,311	-	-	-	13,315,311	Unused credit facilities to customers - committed
	Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	961,523	-	-	-	961,523	Irrevocable letters of credit
	*) Termasuk Kantor Pusat						*) Including Head Office

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

(iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri adalah sebagai berikut:

Credit risk concentration by industry sectors was as follows:

31 Desember / December 2023								
Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total		
Giro pada Bank Indonesia	9,276,598	-	-	-	-	9,276,598	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank-bank lain	-	962,229	-	-	-	962,229	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,728,278	236,000	-	-	-	8,964,278	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	15,144,339	1,859,875	-	-	259,343	17,263,557	Securities	
Tagihan derivatif	-	1,098,893	8,526	102	25,628	1,133,149	Derivative receivables	
Tagihan akseptasi	-	-	3,281,120	-	-	3,281,120	Acceptance receivables	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	-	26,101,603	24,945,918	25,207,114	33,388,526	43,397,885	Loans and sharia financing/receivables - net	
Penyertaan saham	-	102,586	-	-	-	102,586	Investment in shares	
Aset lain-lain	593	269,950	-	-	152,570	423,113	Other assets	
	<u>33,149,808</u>	<u>30,631,136</u>	<u>28,235,564</u>	<u>25,207,216</u>	<u>33,673,497</u>	<u>194,447,676</u>		
31 Desember/December 2022								
Giro pada Bank Indonesia	10,215,350	-	-	-	-	10,215,350	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank-bank lain	-	2,189,146	-	-	-	2,189,146	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	21,482,219	405,675	-	-	-	21,887,894	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	16,186,675	2,636,584	-	-	226,431	19,049,690	Securities	
Tagihan derivatif	-	1,722,869	2,137	432	21,386	1,746,824	Derivative receivables	
Tagihan akseptasi	-	-	3,065,359	-	-	3,065,359	Acceptance receivables	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	-	21,801,214	26,261,478	18,460,579	34,927,012	41,972,648	Loans and sharia financing/receivables - net	
Penyertaan saham	-	103,473	-	-	-	103,473	Investment in shares	
Aset lain-lain	556	25,262	-	-	203,004	228,822	Other assets	
	<u>47,884,800</u>	<u>28,884,223</u>	<u>29,328,974</u>	<u>18,461,011</u>	<u>35,174,829</u>	<u>42,175,652</u>	<u>201,909,489</u>	
31 Desember/December 2022								
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:							<u>Commitments and contingencies with credit risk:</u>	
Garansi yang diterbitkan	-	-	5,455,734	-	-	5,455,734	Guarantees issued	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - committed	-	1,022,645	798,933	2,769,881	2,458,078	3,820,680	Unused credit facilities to customers - committed	
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	-	-	721,016	-	-	721,016	Irrevocable letters of credit	

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan jenis kredit atau pembiayaan, mata uang, sektor ekonomi dan hubungan dengan debitur diungkapkan pada Catatan 11.

The credit risk concentration by type of credit or financing, currency, economic sector and relationship with debtors is disclosed in Note 11.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan

Proses penentuan kualitas kredit Bank mengacu pada kolektibilitas sesuai peraturan OJK.

Segmen korporasi

Untuk segmen korporasi, kualitas kredit dikelola oleh Bank dengan menggunakan peringkat kredit internal. Bank menentukan peringkat suatu debitur dengan terlebih dahulu menetapkan peringkat keuangan (*financial grade*) dengan menggunakan model peringkat dari aspek keuangan dan data yang diperoleh dari laporan keuangan debitur, termasuk kekayaan bersih dan arus kas. Peringkat keuangan ini kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi dari posisi keuangan debitur dan faktor kualitatif untuk menentukan peringkat debitur.

Faktor kualitatif terutama mencakup arus kas masa depan yang diharapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti informasi kerugian historis, kesesuaian rencana bisnis debitur atau rencana perbaikan operasional, status perkembangan rencana bisnis dan dukungan menyeluruh dari lembaga keuangan.

Selain prosedur peringkat di atas, dalam hal debitur dianggap sebagai anak perusahaan yang dikonsolidasi oleh induk perusahaan di luar negeri, peringkat debitur bisa ditentukan dengan mengadopsi peringkat obligor berdasarkan kualitas kredit induk perusahaan atau peringkat kredit yang diberikan induk perusahaan Bank terhadap induk perusahaan tersebut. Peringkat debitur dan peringkat fasilitas ditelaah paling sedikit setahun sekali, atau bila diperlukan, ketika ada perubahan kredit.

Peringkat internal untuk segmen korporasi digolongkan sebagai berikut:

- Debitur *Grading* 1-3 memiliki kemampuan membayar kewajiban yang tinggi.
- Debitur *Grading* 4-6 tidak mengalami kesulitan pembayaran kewajiban, namun terdapat faktor bisnis atau ekonomi yang dapat menyebabkan masalah dalam pembayaran kewajiban.
- Debitur *Grading* 7A dan 7B memerlukan pemantauan khusus karena bisnis yang lesu/tidak stabil, atau masalah keuangan.
- Debitur *Grading* 7R atau lebih rendah merupakan debitur yang telah mengalami penurunan nilai (*default*).

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) Credit quality of financial assets

Process of determining the Bank's credit quality refers to collectibility in accordance with the OJK regulations.

Corporate segment

For corporate segment, the quality of credit is managed by the Bank using internal credit ratings. The Bank determines the rating of a debtor by first determining the financial grade using a rating model from financial aspects and data obtained from the debtor's financial statements, including net worth and cash flows. This financial grade is then adjusted by considering the conditions of the debtor's financial position and qualitative factors to determine the grade of the debtor.

Qualitative factors mainly cover expected future cash flows with considering some factors such as historical loss information, conformity of the debtor's business plan or operational improvement plan, status of developments in the business plan and overall support from financial institutions.

In addition of grading procedure above, in the event that the debtor is considered as a subsidiary that is consolidated by a parent company abroad, the debtor's grading can be determined by adopting an obligor grading based on the quality of the parent loan or credit grading provided by the Bank's parent company. Debtor grading and facility grading are reviewed at least once a year, or if needed, when there are changes in credit.

Internal grading for corporate segment is categorized as follows:

- *Grading* 1-3 debtors have very strong ability to pay their obligations.
- *Grading* 4-6 debtors do not experience difficulties to pay their obligations; however, there are business or economy factors that may cause difficulties to pay the obligations.
- *Grading* 7A and 7B debtors need special observation as they experience sluggish/unstable business, or financial issues.
- *Grading* 7R or lower debtors represent debtors which are credit-impaired (*default*).

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows:

	31 Desember / December 2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia Grade 1-3	8,613,155	-	-	663,443	9,276,598	Current accounts with Bank Indonesia Grade 1-3
Giro pada bank-bank lain Grade 1-3	496,671	-	-	-	496,671	Current accounts with other banks Grade 1-3
Tanpa peringkat	462,061	-	-	3,655	465,716	Non-graded
	958,732	-	-	3,655	962,387	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank- bank lain Grade 1-3	8,626,278	-	-	-	8,626,278	Placement with Bank Indonesia and other banks Grade 1-3
Tanpa peringkat	-	-	-	338,000	338,000	Non-graded
	8,626,278	-	-	338,000	8,964,278	
Efek-efek Grade 1-3	8,694,708	-	-	-	8,694,708	Securities Grade 1-3
Grade 4-6	-	2,956	-	-	2,956	Grade 4-6
Tanpa peringkat	-	-	-	8,566,692	8,566,692	Non-graded
	8,694,708	2,956	-	8,566,692	17,264,356	
Tagihan derivatif Belum jatuh tempo	1,133,149	-	-	-	1,133,149	Derivative receivables Not yet overdue
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah:						Loans and sharia financing/ receivables:
Korporasi						Corporates
Grade 1-3	85,561,286	240,109	-	-	85,801,395	Grade 1-3
Grade 4-6	5,567,387	6,197,539	-	-	11,764,926	Grade 4-6
Grade 7A-7B	-	224,543	-	-	224,543	Grade 7A-7B
Default	-	-	5,063,549	-	5,063,549	Default
	91,128,673	6,662,191	5,063,549	-	102,854,413	
Non-korporasi						Non-corporates
Belum jatuh tempo	39,955,284	331,736	116,635	-	40,403,655	Not yet overdue
Telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	394,080	331,415	48,876	-	774,371	90 days Past due for
Telah jatuh tempo 91-120 hari	-	-	91,773	-	91,773	91-120 days Past due for
Telah jatuh tempo 121-180 hari	-	-	100,524	-	100,524	121-180 days Past due for
Telah jatuh tempo lebih dari 180 hari	-	-	948,700	-	948,700	Past due more than 180 days
	40,349,364	663,151	1,306,508	-	42,319,023	
Dipindahkan	131,478,037	7,325,342	6,370,057	-	145,173,436	Carry forward

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows (continued):

	31 Desember/December 2023					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan):						<i>Loans and sharia financing/receivables (continued):</i>
Pindahan	131,478,037	7,325,342	6,370,057	-	145,173,436	<i>Carried forward</i>
Syariah						Sharia
Belum jatuh tempo	-	-	-	10,593,668	10,593,668	<i>Not yet overdue</i>
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 1-30 hari	-	-	-	143,281	143,281	<i>Past due but not impaired for 1-30 days</i>
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 31-60 hari	-	-	-	143,129	143,129	<i>Past due but not impaired for 31-60 days</i>
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 61-90 hari	-	-	-	173,266	173,266	<i>Past due but not impaired for 61-90 days</i>
Mengalami penurunan nilai	-	-	-	334,517	334,517	<i>Impaired</i>
	-	-	-	11,387,861	11,387,861	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	640,617	80,697	211,592	164,890	1,097,796	<i>Accrued interest/margin income</i>
	132,118,654	7,406,039	6,581,649	11,552,751	157,659,093	
Tagihan akseptasi						<i>Acceptance receivables</i>
Grade 1-3	3,073,305	-	-	-	3,073,305	<i>Grade 1-3</i>
Grade 4-6	30,792	184,499	-	-	215,291	<i>Grade 4-6</i>
Tanpa peringkat	1,161	-	-	-	1,161	<i>Non-graded</i>
	3,105,258	184,499	-	-	3,289,757	
Penyertaan saham						<i>Investment in shares</i>
Tanpa peringkat	22,522	-	-	80,064	102,586	<i>Non-graded</i>
Aset lain-lain						<i>Other assets</i>
Tanpa peringkat	405,850	-	-	17,263	423,113	<i>Non-graded</i>
	163,678,306	7,593,494	6,581,649	21,221,868	199,075,317	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(634,415)	(175,608)	(2,603,702)	(1,213,916)	(4,627,641)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	163,043,891	7,417,886	3,977,947	20,007,952	194,447,676	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows (continued):

	31 Desember/December 2022					
	Tahap 1/ Stage 1*	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia Tanpa peringkat	10,215,350	-	-	-	10,215,350	Current accounts with Bank Indonesia Non-graded
Giro pada bank-bank lain Grade 1-3	558,824				558,824	Current accounts with other banks Grade 1-3
Tanpa peringkat	1,630,737	-	-	-	1,630,737	Non-graded
	2,189,561	-	-	-	2,189,561	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank- bank lain Grade 1-3	1,457,631	-	-	-	1,457,631	Placement with Bank Indonesia and other banks Grade 1-3
Tanpa peringkat	20,430,434	-	-	-	20,430,434	Non-graded
	21,888,065	-	-	-	21,888,065	
Efek-efek Grade 1-3	1,739,297	-	-	-	1,739,297	Securities Grade 1-3
Grade 4-6	-	1,478	-	-	1,478	Grade 4-6
Tanpa peringkat	17,309,914	-	-	-	17,309,914	Non-graded
	19,049,211	1,478	-	-	19,050,689	
Tagihan derivatif Belum jatuh tempo	1,746,824	-	-	-	1,746,824	Derivative receivables Not yet overdue
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah:						Loans and sharia financing/ receivables:
Korporasi						Corporates
Grade 1-3	77,651,301	315,611	-	-	77,966,912	Grade 1-3
Grade 4-6	6,421,326	7,689,124	-	-	14,110,450	Grade 4-6
Grade 7A-7B	-	101,189	-	-	101,189	Grade 7A-7B
Default	-	-	3,130,632	-	3,130,632	Default
	84,072,627	8,105,924	3,130,632	-	95,309,183	
Non-korporasi						Non-corporates
Belum jatuh tempo	36,929,086	299,053	117,374	-	37,345,513	Not yet overdue
Telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	383,823	323,590	264,942	-	972,355	Past due up to 90 days
Telah jatuh tempo 91-120 hari	-	-	67,708	-	67,708	Past due for 91-120 days
Telah jatuh tempo 121-180 hari	-	-	91,663	-	91,663	Past due for 121-180 days
Telah jatuh tempo lebih dari 180 hari	-	-	809,631	-	809,631	Past due more than 180 days
	37,312,909	622,643	1,351,318	-	39,286,870	
Dipindahkan	121,385,536	8,728,567	4,481,950	-	134,596,053	Carry forward

*) Termasuk aset keuangan syariah dengan kualitas kredit lancar

Include sharia financial assets with current credit quality *)

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows (continued):

	31 Desember/December 2022					
	Tahap 1/ Stage 1*	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan):						Loans and sharia financing/receivables (continued):
Pindahan	121,385,536	8,728,567	4,481,950	-	134,596,053	Carried forward
Syariah						Sharia
Belum jatuh tempo	-	-	-	10,949,316	10,949,316	Not yet overdue
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 1-30 hari	-	-	-	99,466	99,466	Past due but not impaired for 1-30 days
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 31-60 hari	-	-	-	86,523	86,523	Past due but not impaired for 31-60 days
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 61-90 hari	-	-	-	86,831	86,831	Past due but not impaired for 61-90 days
Mengalami penurunan nilai	-	-	-	305,327	305,327	Impaired
	-	-	-	11,527,463	11,527,463	
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	664,507	65,410	9,841	138,776	878,534	Accrued interest/margin income
	122,050,043	8,793,977	4,491,791	11,666,239	147,002,050	
Tagihan akseptasi						Acceptance receivables
Grade 1-3	2,668,983	-	-	-	2,668,983	Grade 1-3
Grade 4-6	367,776	33,095	-	-	400,871	Grade 4-6
	3,036,759	33,095	-	-	3,069,854	
Penyertaan saham						Investment in shares
Tanpa peringkat	103,473	-	-	-	103,473	Non-graded
Aset lain-lain						Other assets
Tanpa peringkat	218,552	-	-	10,270	228,822	Non-graded
	180,497,838	8,828,550	4,491,791	11,676,509	205,494,688	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(703,354)	(273,934)	(1,838,986)	(768,925)	(3,585,199)	Allowance for impairment losses
	179,794,484	8,554,616	2,652,805	10,907,584	201,909,489	

*) Termasuk aset keuangan syariah dengan kualitas kredit lancar

Include sharia financial assets with current credit quality *)

Penjelasan mengenai Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3 dapat dilihat pada Catatan 2i.

The explanation of Stage 1, Stage 2 and Stage 3 can be referred to Note 2i.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan jenis portofolio kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tahun berakhir 31 Desember 2023/ Year ended 31 December 2023							
	Pensiunan/ Pension*	UMKM/ MSME	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Saldo awal	255,742	974,353	1,356,573	768,925	223,526	3,579,119	Beginning balance
Penambahan	87,986	179,215	779,226	1,898,117	85,027	3,029,571	Addition
Penerimaan kembali	16,022	15,216	-	48,284	8,769	88,291	Recovery
Penghapusbukuan	(147,421)	(276,955)	-	(1,501,410)	(140,258)	(2,066,044)	Write-off
Lainnya	-	-	(12,890)	-	-	(12,890)	Others
Saldo akhir	<u>212,329</u>	<u>891,829</u>	<u>2,122,909</u>	<u>1,213,916</u>	<u>177,064</u>	<u>4,618,047</u>	Ending balance

Tahun berakhir 31 Desember 2022/ Year ended 31 December 2022							
	Pensiunan/ Pension*	UMKM/ MSME	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Saldo awal	276,449	1,080,904	1,707,880	699,265	189,201	3,953,699	Beginning balance
Penambahan	138,319	260,577	314,575	945,052	96,153	1,754,676	Addition
Penerimaan kembali	15,907	23,167	-	74,832	6,288	120,194	Recovery
Penghapusbukuan	(174,933)	(390,295)	(288,142)	(950,224)	(68,116)	(1,871,710)	Write-off
Kerugian modifikasi	-	-	(308,911)	-	-	(308,911)	Modification loss
Penjualan pinjaman	-	-	(91,486)	-	-	(91,486)	Sale of loan
Lainnya	-	-	22,657	-	-	22,657	Others
Saldo akhir	<u>255,742</u>	<u>974,353</u>	<u>1,356,573</u>	<u>768,925</u>	<u>223,526</u>	<u>3,579,119</u>	Ending balance

*) Termasuk Kredit Pegawai Aktif

Include Active Employee Loan*)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi jika Grup tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah. Salah satu parameter yang digunakan adalah dengan menganalisa profil jatuh tempo dari sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan sebagian besar aset yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan jangka waktu yang pada umumnya berjangka panjang. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan dapat meningkatkan risiko likuiditas.

Dalam mengantisipasi potensi tekanan likuiditas yang mungkin terjadi, Grup telah mempersiapkan strategi pendanaan dan cadangan likuiditas yang memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan profil likuiditas agar selalu memenuhi regulasi terkait.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Movement of the allowance for impairment losses by credit/financing portfolio types was as follows:

Tahun berakhir 31 Desember 2023/ Year ended 31 December 2023							
	Pensiunan/ Pension*	UMKM/ MSME	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Saldo awal	255,742	974,353	1,356,573	768,925	223,526	3,579,119	Beginning balance
Penambahan	87,986	179,215	779,226	1,898,117	85,027	3,029,571	Addition
Penerimaan kembali	16,022	15,216	-	48,284	8,769	88,291	Recovery
Penghapusbukuan	(147,421)	(276,955)	-	(1,501,410)	(140,258)	(2,066,044)	Write-off
Lainnya	-	-	(12,890)	-	-	(12,890)	Others
Saldo akhir	<u>212,329</u>	<u>891,829</u>	<u>2,122,909</u>	<u>1,213,916</u>	<u>177,064</u>	<u>4,618,047</u>	Ending balance

Tahun berakhir 31 Desember 2022/ Year ended 31 December 2022							
	Pensiunan/ Pension*	UMKM/ MSME	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Saldo awal	276,449	1,080,904	1,707,880	699,265	189,201	3,953,699	Beginning balance
Penambahan	138,319	260,577	314,575	945,052	96,153	1,754,676	Addition
Penerimaan kembali	15,907	23,167	-	74,832	6,288	120,194	Recovery
Penghapusbukuan	(174,933)	(390,295)	(288,142)	(950,224)	(68,116)	(1,871,710)	Write-off
Kerugian modifikasi	-	-	(308,911)	-	-	(308,911)	Modification loss
Penjualan pinjaman	-	-	(91,486)	-	-	(91,486)	Sale of loan
Lainnya	-	-	22,657	-	-	22,657	Others
Saldo akhir	<u>255,742</u>	<u>974,353</u>	<u>1,356,573</u>	<u>768,925</u>	<u>223,526</u>	<u>3,579,119</u>	Ending balance

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet their payment obligations as they fall due, including withdrawal of customer deposits. One of the parameters used is by analysing the maturity profile from the funding sources, which are usually short term, while most of the assets which were distributed in the form of loans, are usually long-term. A relatively wide gap can increase liquidity risk.

In anticipating potential liquidity pressures that may occur, the Group has prepared the funding strategy and adequate liquidity reserves which are adjusted to the operational needs and the liquidity profile in order to always comply with the relevant regulations.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Profil jatuh tempo diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktual aset dan liabilitas tertentu. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Grup. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka Grup menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah kas dan aset likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak.

Tabel berikut ini menyajikan rincian sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo aset keuangan (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

This maturity profile is projected based on the remaining period to the contractual maturity date of assets and liabilities. Historically, a significant portion of deposits are rolled-over on the maturity date which is affected by customer behaviour and confidence level to the Group. To manage the liquidity risk of this condition, the Group establishes appropriate strategies and sufficient amount of cash and liquid assets that can be liquidated or used as collateral should there be an urgent need for liquidity.

The following tables provide detail of remaining period to maturity date of financial assets (before allowance for impairment losses) and financial liabilities.

		31 Desember/December 2023							
		Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1-3 bulan/ > 1-3 months	> 3-6 bulan/ > 3-6 months	> 6-12 bulan/ > 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months	
Aset									Assets
Kas		1,428,683	1,428,683	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia		9,276,598	9,276,598	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain		962,387	962,387	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain		8,964,278	-	8,855,778	108,500	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek		17,264,356	-	3,838,099	5,192,894	1,098,198	1,477,625	5,657,540	Securities
Tagihan derivatif		1,133,149	-	68,940	91,953	76,993	142,831	752,432	Derivative receivables
Tagihan akseptasi Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		3,289,757	-	193,484	1,624,722	1,471,551	-	-	Acceptance receivables
Penyertaan saham		157,659,093	-	28,897,593	19,849,556	10,182,760	19,332,839	79,396,345	Loans and sharia financing/receivables
Aset lain-lain		102,586	102,586	-	-	-	-	-	Investment in shares
Jumlah aset		423,113	7,458	407,093	-	25	187	8,350	Other assets
		<u>200,504,000</u>	<u>11,777,712</u>	<u>42,260,987</u>	<u>26,867,625</u>	<u>12,829,527</u>	<u>20,953,482</u>	<u>85,814,667</u>	Total assets
Liabilitas									Liabilities
Liabilitas segera		(71,606)	-	(49,140)	(22,466)	-	-	-	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan		(21,951)	-	(21,951)	-	-	-	-	Undistributed revenue sharing
Giro		(26,634,643)	(26,628,683)	(5,960)	-	-	-	-	Current accounts
Tabungan		(16,670,362)	(16,668,863)	(1,499)	-	-	-	-	Saving deposits
Deposito berjangka dan deposito on call		(55,152,398)	-	(41,962,192)	(9,139,063)	(2,185,498)	(1,760,395)	(105,250)	Time deposits and deposits on call
Simpanan dari bank-bank lain		(10,822,121)	(351,438)	(8,600,028)	(1,870,655)	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif		(1,072,104)	-	(84,869)	(102,060)	(76,309)	(131,318)	(677,548)	Derivative payables
Liabilitas akseptasi Surat berharga yang diterbitkan		(2,323,633)	-	(72,891)	(1,248,426)	(1,002,316)	-	-	Acceptance payables
Pinjaman yang diterima		(202,083)	-	(1,514)	-	-	(200,569)	-	Securities issued
Pinjaman subordinasi		(31,355,517)	-	(151,020)	-	(1,000,000)	(4,197,515)	(26,006,982)	Borrowings
Liabilitas sewa		(3,090,360)	-	(10,960)	-	-	-	(3,079,400)	Subordinated loans
Liabilitas lain-lain		(353,990)	-	(1,866)	(82)	(831)	(5,279)	(345,932)	Lease liabilities
Jumlah liabilitas		(505,982)	(29,781)	(471,241)	(4,288)	(629)	(43)	-	Other liabilities
		<u>(148,276,750)</u>	<u>(43,678,765)</u>	<u>(51,435,131)</u>	<u>(12,387,040)</u>	<u>(4,265,583)</u>	<u>(6,295,119)</u>	<u>(30,215,112)</u>	Total liabilities
Aset (liabilitas) bersih		<u>52,227,250</u>	<u>(31,901,053)</u>	<u>(9,174,144)</u>	<u>14,480,585</u>	<u>8,563,944</u>	<u>14,658,363</u>	<u>55,599,555</u>	Net assets (liabilities)

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan rincian sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo aset keuangan (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan (lanjutan).

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The following tables provide detail of remaining period to maturity date of financial assets (before allowance for impairment losses) and financial liabilities (continued).

		31 Desember/December 2022						
	Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1-3 bulan/ > 1-3 months	> 3-6 bulan/ > 3-6 months	> 6-12 bulan/ > 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months	
Aset								Assets
Kas	1,747,461	1,747,461	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	10,215,350	10,215,350	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	2,189,561	2,189,561	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	21,888,065	-	21,798,065	90,000	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	19,050,689	-	3,963,945	2,191,661	4,815,590	1,454,969	6,624,524	Securities
Tagihan derivatif	1,746,824	-	97,184	81,870	42,664	239,221	1,285,885	Derivative receivables
Tagihan akseptasi Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	3,069,854	-	273,136	1,479,902	1,316,816	-	-	Acceptance receivables
Penyertaan saham	147,002,050	-	25,645,867	18,367,645	10,186,775	21,900,681	70,901,082	Loans and sharia financing/receivables
Aset lain-lain	103,473	103,473	-	-	-	-	-	Investment in shares
Jumlah aset	242,826	15,062	219,039	40	20	579	8,086	Other assets
	<u>207,256,153</u>	<u>14,270,907</u>	<u>51,997,236</u>	<u>22,211,118</u>	<u>16,361,865</u>	<u>23,595,450</u>	<u>78,819,577</u>	Total assets
Liabilitas								Liabilities
Liabilitas segera	(59,045)	-	(23,592)	(35,453)	-	-	-	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	(18,996)	-	(18,996)	-	-	-	-	Undistributed revenue sharing
Giro	(23,767,291)	(23,765,802)	(1,489)	-	-	-	-	Current accounts
Tabungan	(15,634,192)	(15,632,533)	(1,659)	-	-	-	-	Saving deposits
Deposito berjangka dan deposito on call	(65,767,428)	-	(54,446,288)	(8,940,417)	(1,438,514)	(929,691)	(12,518)	Time deposits and deposits on call
Simpanan dari bank-bank lain	(166,131)	(166,131)	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	(1,447,736)	-	(82,402)	(52,316)	(26,381)	(211,283)	(1,075,354)	Derivative payables
Liabilitas akseptasi Surat berharga yang diterbitkan yang	(2,356,828)	-	(155,693)	(1,207,933)	(993,202)	-	-	Acceptance payables
Pinjaman yang diterima	(201,648)	-	(1,514)	-	-	-	(200,134)	Securities issued
Pinjaman subordinasi	(45,067,408)	-	(155,802)	-	(3,500,000)	(2,100,000)	(39,311,606)	Borrowings
Liabilitas sewa	(3,125,578)	-	(12,078)	-	-	-	(3,113,500)	Subordinated loans
Liabilitas lain-lain	(425,887)	-	(14,590)	-	(2,203)	(5,639)	(403,455)	Lease liabilities
Jumlah liabilitas	(330,316)	(29,756)	(296,638)	(3,396)	(513)	(13)	-	Other liabilities
	<u>(158,368,484)</u>	<u>(39,594,222)</u>	<u>(55,210,741)</u>	<u>(10,239,515)</u>	<u>(5,960,813)</u>	<u>(3,246,626)</u>	<u>(44,116,567)</u>	Total liabilities
Aset (liabilitas) bersih	<u>48,887,669</u>	<u>(25,323,315)</u>	<u>(3,213,505)</u>	<u>11,971,603</u>	<u>10,401,052</u>	<u>20,348,824</u>	<u>34,703,010</u>	Net assets (liabilities)

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukkan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto dari liabilitas keuangan dan rekening administratif Grup berdasarkan periode tersisa sampai dengan jatuh tempo kontraktual:

The following table shows the contractual undiscounted cash flows of the Group's financial liabilities and administrative accounts based on the remaining period to contractual maturity:

31 Desember/December 2023						
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/Gross nominal inflow (outflow)	Hingga 1 bulan/ Up to 1 month	>1 - 3 bulan/ months	>3 - 12 bulan/ months	>1 - 2 tahun/ years	>2 tahun/ years
Liabilitas non-derivatif						
Liabilitas segera	(71,606)	(71,606)	(71,606)	-	-	-
Bagi hasil yang belum dibagikan	(21,951)	(21,951)	(21,951)	-	-	-
Giro	(26,634,643)	(26,683,135)	(26,683,135)	-	-	-
Tabungan	(16,670,362)	(16,678,067)	(16,666,200)	(3,718)	(6,685)	(1,464)
Deposito berjangka dan deposito on call	(55,152,398)	(55,260,504)	(42,005,549)	(9,236,499)	(4,014,576)	(3,880)
Simpanan dari bank-bank lain	(10,822,121)	(10,825,968)	(8,954,247)	(1,871,721)	-	-
Liabilitas akseptasi	(2,323,633)	(2,323,633)	(27,891)	(1,248,426)	(1,002,316)	-
Surat berharga yang diterbitkan	(202,083)	(266,275)	(50,000)	(3,926)	(212,349)	-
Pinjaman yang diterima	(31,355,517)	(35,035,603)	(151,260)	(403,641)	(6,693,882)	(22,411,003)
Pinjaman subordinasi	(3,090,360)	(4,129,079)	-	(53,827)	(161,480)	(215,307)
Liabilitas sewa	(353,990)	(365,048)	(28,813)	(4,930)	(101,466)	(123,378)
Liabilitas lain-lain	(505,982)	(505,982)	(505,982)	-	-	-
	(147,204,646)	(152,166,851)	(95,211,634)	(12,826,688)	(12,192,754)	(22,755,032)
						(9,180,743)
Liabilitas derivatif						
Arus kas masuk	(1,072,104)	-	-	-	-	-
Arus kas keluar	-	30,558,152	10,534,268	4,792,544	6,654,894	4,302,673
	(1,072,104)	(31,791,298)	(10,638,886)	(4,949,849)	(7,047,313)	(4,584,282)
		(1,233,146)	(104,618)	(157,305)	(392,419)	(281,609)
						(297,195)
L/C yang tidak dapat dibatalkan						
Fasilitas kredit yang belum digunakan - committed	-	(721,017)	(273,495)	(247,757)	(199,765)	-
Garansi yang diterbitkan	-	(10,870,217)	-	-	(2,574,317)	(865,241)
	-	(5,455,734)	(430,838)	(753,099)	(2,348,957)	(812,067)
	-	(17,046,968)	(704,333)	(1,000,856)	(5,123,039)	(1,677,308)
						(8,541,432)
Jumlah	(148,276,750)	(170,446,965)	(96,020,585)	(13,984,849)	(17,708,212)	(24,713,949)
						(18,019,370)
31 Desember/December 2022						
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/Gross nominal inflow (outflow)	Hingga 1 bulan/ Up to 1 month	>1 - 3 bulan/ months	>3 - 12 bulan/ months	>1 - 2 tahun/ years	>2 tahun/ years
Liabilitas non-derivatif						
Liabilitas segera	(59,045)	(59,045)	(59,045)	-	-	-
Bagi hasil yang belum dibagikan	(18,996)	(18,996)	(18,996)	-	-	-
Giro	(23,767,291)	(23,793,972)	(23,793,972)	-	-	-
Tabungan	(15,634,192)	(15,641,692)	(15,632,030)	(2,077)	(6,637)	(948)
Deposito berjangka dan deposito on call	(65,767,428)	(66,041,088)	(54,613,246)	(9,009,990)	(2,404,884)	(12,968)
Simpanan dari bank-bank lain	(166,131)	(176,247)	(176,247)	-	-	-
Liabilitas akseptasi	(2,356,828)	(2,356,828)	(156,346)	(1,207,280)	(993,202)	-
Surat berharga yang diterbitkan	(201,648)	(231,545)	-	(3,926)	(11,779)	-
Pinjaman yang diterima	(45,067,408)	(48,556,032)	(199,919)	(384,208)	(7,273,145)	(39,290,872)
Pinjaman subordinasi	(3,125,578)	(4,255,954)	-	(48,599)	(145,797)	(194,397)
Liabilitas sewa	(425,887)	(514,752)	(41,400)	(6,554)	(103,587)	(134,340)
Liabilitas lain-lain	(330,316)	(330,316)	(330,316)	-	-	-
	(156,920,748)	(161,976,467)	(95,021,517)	(10,662,634)	(10,939,031)	(39,849,365)
						(5,503,920)
Liabilitas derivatif						
Arus kas masuk	(1,447,736)	-	-	-	-	-
Arus kas keluar	-	17,408,697	3,970,439	1,694,152	3,878,369	3,855,642
	(1,447,736)	(19,064,558)	(4,057,995)	(1,801,098)	(4,336,680)	(4,264,952)
		(1,655,861)	(87,556)	(106,946)	(458,311)	(409,310)
						(593,738)
L/C yang tidak dapat dibatalkan						
Fasilitas kredit yang belum digunakan - committed	-	(961,523)	(428,005)	(335,780)	(197,738)	-
Garansi yang diterbitkan	-	(13,315,311)	-	(1,464,656)	(3,500,806)	(435,416)
	-	(5,608,120)	(697,906)	(680,026)	(2,600,755)	(1,629,433)
	-	(19,884,954)	(1,125,911)	(2,480,462)	(6,299,299)	(2,064,849)
						(7,914,433)
Jumlah	(158,368,484)	(183,517,282)	(96,234,984)	(13,250,042)	(17,696,641)	(42,323,524)
						(14,012,091)

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel sebelumnya menyajikan arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan periode jatuh tempo kontraktual yang paling dekat. Arus kas yang diharapkan atas instrumen keuangan Grup mungkin berbeda dengan analisis ini. Sebagai contoh, simpanan diharapkan memiliki saldo yang stabil atau meningkat atau fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (*committed*) tidak seluruhnya diharapkan untuk segera digunakan.

Nilai nominal arus kas masuk/(keluar) yang diungkapkan pada tabel di atas menyajikan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan nilai pokok dan bunga dari liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga nilai bruto arus kas masuk dan keluar untuk derivatif yang diselesaikan secara bruto. Arus kas liabilitas derivatif seperti yang ditunjukkan di tabel di atas merupakan arus kas berdasarkan jatuh tempo kontraktual yang menurut Grup adalah penting untuk memahami jadwal dari arus kas.

Kebijakan yang dijalankan Grup dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Grup.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai dan cukup mudah ditelusuri.
- Menjaga cadangan likuiditas agar sesuai dengan rekomendasi ALCO.
- Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor secara bulanan oleh ALCO dan *Risk Management Committee* (RMC).
- Fungsi pengawasan yang independen dari satuan kerja manajemen risiko.

Untuk menjaga ketahanan likuiditas, Bank melakukan pemantauan terhadap rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*/LCR) dan rasio pendanaan stabil bersih (*Net Stable Funding Ratio*/NSFR). Selain sebagai bagian dari ketentuan yang wajib dipatuhi, secara internal Bank juga menetapkan rasio-rasio tersebut ditetapkan sebagai bagian dari indikator peringatan dini (*early warning indicators*) dan indikator rencana pemulihan (*recovery plan*) yang dimonitor secara harian.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The previous table shows the undiscounted cash flows on the Group's financial liabilities on the basis of their earliest possible contractual maturity. The Group expected cash flows on these instruments may vary from this analysis. For example, deposits are expected to maintain a stable or increasing balance or unused credit facilities to customer-committed are not all expected to be drawn down immediately.

The nominal inflow/(outflow) disclosed in the above tables represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liabilities. The disclosure for derivatives shows the net amount of derivatives that are net settled, and a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement. The cash flows of derivatives liabilities in the table represent the cash flows based on contractual maturities which the Group believes is essential for an understanding of the timing of the cash flows.

Policies adopted by the Group in managing its liquidity risk include:

- *Application of a liquidity risk control policy that is suited to the mission, business strategy, capital adequacy, human resources and appetite for risk of the Group.*
- *Application of a liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow.*
- *Maintain liquidity reserves to match the ALCO's recommendation.*
- *Managing it's funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. It is monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC).*
- *The independent monitoring function of the risk management working unit.*

To maintain its liquidity resilience, the Bank monitor the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and a Net Stable Funding Ratio (NSFR). Apart of being the requirements that must be complied with, internally Bank also set those ratios as part of the early warning indicator and the recovery plan indicators which are monitored on a daily basis.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

LCR dikelola dengan memelihara asset likuid yang berkualitas tinggi (*High Quality Liquid Assets/HQLA*) untuk dapat memenuhi potensi dana keluar bersih dalam 30 hari kedepan sesuai dengan skenario yang ditetapkan berdasarkan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan NSFR bertujuan untuk memelihara profil pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan transaksi rekening administratif Bank sesuai dengan peraturan dari OJK.

Laporan LCR dan NSFR disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Bank secara internal berupaya memastikan eksposur, transaksi dan ekspansi dalam valuta asing dan berdasarkan suku bunga yang dilakukan bisnis telah sesuai dengan limit dan *risk appetite* Bank.

Secara keseluruhan, risiko pasar dibagi menjadi dua risiko sebagai berikut:

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing timbul dari adanya posisi neraca dan komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet*) baik di sisi aset maupun liabilitas yang timbul melalui transaksi mata uang asing.

Bank mengukur risiko nilai tukar untuk melihat dampak perubahan nilai tukar pada pendapatan dan modal Bank. Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, pembatasan posisi secara internal ditetapkan jauh di bawah limit posisi devisa neto yang ditetapkan regulator. Bank juga memonitor *stop loss limit* untuk menjaga tingkat kerugian yang disebabkan oleh pergerakan pada nilai pasar tidak melebihi kisaran yang telah ditetapkan.

Entitas Anak tidak memiliki aset maupun liabilitas keuangan dalam mata uang asing, maupun posisi untuk diperdagangkan, sehingga Entitas Anak tidak memiliki risiko mata uang asing.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

LCR is managed by maintaining high quality liquid assets (HQLA) which enables Bank to cover the potential net outflows within the next 30 days in accordance with the scenario determined based on regulations from Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meanwhile, the NSFR aims to maintain a stable funding profile that is adjusted to the composition of assets and administrative account transactions of the Bank in accordance with regulations from OJK.

LCR and NSFR reports are submitted periodically to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and published in accordance with applicable regulations.

Market risk

Market risk is the potential loss in book value or future cash flows fluctuation due to changes in interest rates or exchange rates.

Bank internally seeks to ensure exposures, as well as foreign exchange and interest rates based transactions and expansion undertaken by the business is in accordance with the Bank's limits and risk appetite.

In overall, market risk is divided into two following risks:

(i) Foreign currency risk

Foreign exchange risk arises from on and off-balance sheet positions both on the asset and liability sides through transactions in foreign currencies.

The Bank measures the foreign exchange risk to understand the impact of the exchange rate movement on the Bank's revenue and capital. In order to manage and mitigate the foreign exchange risk, predefined internal limits are set below net open position limit that is defined by regulator. The Bank also monitors stop loss limit to maintain the loss rate caused by movement in market value do not exceed the specified range.

The Subsidiary does not have any assets or liabilities which are denominated in foreign currencies, or held for trading, thus the Subsidiary does not have foreign currency risk.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing (lanjutan)

Posisi Devisa Neto

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Neto yang berlaku, maksimum Posisi Devisa Neto adalah 20% dari modal.

Posisi Devisa Neto adalah jumlah dari nilai absolut selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dalam mata uang (ekuivalen Rupiah). Nilai ini adalah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan harian.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(i) Foreign currency risk (continued)

Net Open Position

Based on the prevailing Bank Indonesia Regulation relating with Net Open Position, the maximum Net Open Position is at 20% of capital.

Net Open Position is the sum of the absolute values of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference of receivables and commitments and contingent liabilities in the administrative accounts for each foreign currency, which are all stated in Rupiah.

Below is the Net Open Position of Bank as of 31 December 2023 and 2022 in currency (Rupiah equivalent). These amounts are reported to Bank Indonesia on the statement of financial position's date as part of daily reporting.

31 Desember/December 2023				
<u>Mata Uang</u>	<u>Aset/ Assets</u>	<u>Liabilitas/ Liabilities</u>	<u>Posisi Devisa Neto/ Net Open Position</u>	<u>Currencies</u>
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif				Statement of financial position and off-balance sheet
Dolar Amerika Serikat	95,526,416	95,662,487	136,071	United States Dollar
Yen Jepang	3,329,464	3,325,257	4,207	Japanese Yen
Dolar Singapura	207,782	196,172	11,610	Singapore Dollar
Euro Eropa	377,550	363,445	14,105	European Euro
Baht Thailand	18,493	18,487	6	Thailand Baht
Poundsterling Inggris	42,748	35,283	7,465	British Poundsterling
Dolar Australia	54,763	48,348	6,415	Australian Dollar
Yuan China	11,227	12,538	1,311	China Yuan
Dolar Hong Kong	3,912	8,080	4,168	Hong Kong Dollar
Franc Swiss	491	-	491	Swiss Franc
Ruppee India	74	-	74	Indian Rupee
Ringgit Malaysia	1	-	1	Malaysia Ringgit
Jumlah			185,924	Total
Jumlah Modal Tier I dan II			35,452,414	Total Tier I and II Capital
Rasio PDN			0.52%	NOP Ratio
31 Desember/December 2022				
<u>Mata Uang</u>	<u>Aset/ Assets</u>	<u>Liabilitas/ Liabilities</u>	<u>Posisi Devisa Neto/ Net Open Position</u>	<u>Currencies</u>
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif				Statement of financial position and off-balance sheet
Dolar Amerika Serikat	91,937,455	92,027,248	89,793	United States Dollar
Yen Jepang	2,782,946	2,784,000	1,054	Japanese Yen
Dolar Singapura	153,753	151,179	2,574	Singapore Dollar
Euro Eropa	549,811	548,073	1,738	European Euro
Baht Thailand	84,304	89,911	5,607	Thailand Baht
Poundsterling Inggris	35,593	36,100	507	British Poundsterling
Dolar Australia	38,727	31,458	7,269	Australian Dollar
Yuan China	5,390	4,802	588	China Yuan
Dolar Hong Kong	452	1,151	699	Hong Kong Dollar
Franc Swiss	226	-	226	Swiss Franc
Ruppee India	30	-	30	Indian Rupee
Jumlah			110,085	Total
Jumlah Modal Tier I dan II			33,705,339	Total Tier I and II Capital
Rasio PDN			0.33%	NOP Ratio

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas Bank terhadap mata uang asing diperhitungkan dengan menggunakan informasi selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Bank (linier) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 atas perubahan nilai tukar mata uang asing yaitu:

	Menambah (mengurangi) laba bersih/ Increase (decrease) net income		
	2023	2022	
IDR melemah 1%	(972)	(852)	<i>IDR weakening by 1%</i>
IDR menguat 1%	972	852	<i>IDR strengthening by 1%</i>

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa perubahan nilai tukar mata uang asing bergerak pada jumlah yang sama sehingga tidak mencerminkan perubahan potensial kepada laba atas perubahan beberapa nilai tukar mata uang asing sementara lainnya tidak berubah. Proyeksi juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan dan berdasarkan tanggal pelaporan yang konstan serta seluruh posisi berjalan hingga jatuh tempo.

(ii) Risiko suku bunga

Pendapatan Bank yang berasal dari kegiatan konvensional merupakan selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Bank.

Risiko suku bunga berdampak pada fluktuasi arus kas di masa mendatang baik pada aset maupun liabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank maupun nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki Bank.

Bisnis utama Entitas Anak adalah memberikan pembiayaan dengan akad murabahah. Pendapatan margin murabahah dipengaruhi oleh harga pembiayaan atau suku bunga di pasar konvensional.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(i) Foreign currency risk (continued)

The Bank's sensitivity to foreign currency is calculated using net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference of receivables and commitments and contingent liabilities in the off-balance sheet accounts for each foreign currency information.

The table below shows the sensitivity of the Bank's net income (linear) to movement of foreign exchange rates as of 31 December 2023 and 2022:

The above projection assumes that foreign exchange rates move by the same amount and, therefore, do not reflect the potential impact on profit of some rates changing while others remain unchanged. The projections also assume that all other variables are held constant and are based on a constant reporting date position and that all positions run to maturity.

(ii) Interest rate risk

The Bank's income from conventional activities are derived from the difference between the interest generated on the asset side and the interest paid to third party funds. If not anticipated, changes in interest rates can result in a decrease in the Bank's income.

Interest rate risk has an effect to future cash flows fluctuation of both assets and liabilities. It can affect the Bank's interest income and fair value of the financial instruments.

The Subsidiary's main business is to provide financing with murabahah contracts. The murabahah margin income is affected by the financing price or interest rate in the conventional market.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Manajemen risiko suku bunga

Kebijakan yang dijalankan Grup dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga mencakup:

- Memantau limit risiko suku bunga.
- Mengelola risiko suku bunga sesuai regulasi terkait dan kebijakan internal Bank.
- Melakukan simulasi perhitungan pendapatan marjin bersih terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga di pasar.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur instrumen keuangan Grup terhadap risiko tingkat suku bunga.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

Interest rate risk management

Policies adopted by the Group in managing its interest rate risk include:

- Monitoring of interest rate risk limit.
- Managing interest rate risk in accordance with relevant regulations and Bank's internal policies.
- Conduct simulation of net margin income calculation toward all possible market interest rate changes.

The tables below summarise the exposures of financial instruments of the Group to interest rate risks.

	31 Desember/December 2023										
	Suku bunga mengambang/Floating rate			Bunga tetap/Fixed rate					Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
	≤ 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	≤ 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	> 12 bulan/ months			
Aset										Assets	
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428,683	1,428,683	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	9,276,598	-	-	-	-	-	9,276,598	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	-	-	-	962,387	-	-	-	-	-	962,387	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	-	-	-	8,853,154	108,500	-	-	-	2,624	8,964,278	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	-	-	3,687,758	5,192,893	1,098,198	1,557,689	5,577,475	150,343	17,264,356	Securities
Tagihan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,149	1,133,149	Derivative receivables
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	3,289,757	3,289,757	Acceptance receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	48,638,687	27,012,683	5,437,501	18,518,832	4,973,021	6,602,727	13,944,202	28,833,876	3,697,564	157,659,093	Loans and sharia financing/receivables
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-	-	102,586	102,586	Investment in shares
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	423,113	423,113	Other assets
Jumlah aset keuangan, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	48,638,687	27,012,683	5,437,501	41,298,729	10,274,414	7,700,925	15,501,891	34,411,351	10,227,819	200,504,000	Total financial assets before allowance for impairment losses
Liabilitas										Liabilities	
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,606)	(71,606)	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	-	-	-	(85,087,550)	(9,139,063)	(2,185,498)	(1,760,395)	(105,250)	(179,647)	(98,457,403)	Deposits from customers
Simpanan dari bank-bank lain	-	-	-	(8,943,983)	(1,870,655)	-	-	-	(7,483)	(10,822,121)	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,072,104)	(1,072,104)	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,323,633)	(2,323,633)	Acceptance payables
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	(200,569)	-	(1,514)	(202,083)	Securities issued
Pinjaman yang diterima	(13,642,758)	(15,503,211)	-	-	-	-	(697,515)	(1,361,013)	(151,020)	(31,355,517)	Borrowings
Pinjaman subordinasi	-	(3,079,400)	-	-	-	-	-	-	(10,960)	(3,090,360)	Subordinated loans
Liabilitas sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	(353,990)	(353,990)	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	(505,982)	(505,982)	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	(13,642,758)	(18,582,611)	-	(94,031,533)	(11,009,718)	(2,185,498)	(2,658,479)	(1,466,263)	(4,677,939)	(148,254,799)	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	34,995,929	8,430,072	5,437,501	(52,732,804)	(735,304)	5,515,427	12,843,412	32,945,088	5,549,880	52,249,201	Total interest repricing gap

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Interest rate risk management (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur instrumen keuangan Grup terhadap risiko tingkat suku bunga (lanjutan).

The tables below summarise the exposures of financial instruments of the Group to interest rate risks (continued).

	31 Desember/December 2022										
	Suku bunga mengambang/Floating rate			Bunga tetap/Fixed rate					Tidak dikenakan bunga/Non-interest bearing	Jumlah/Total	
	≤ 1 bulan/month	1 - 3 bulan/months	> 3 - 6 bulan/months	≤ 1 bulan/month	1 - 3 bulan/months	> 3 - 6 bulan/months	> 6 - 12 bulan/months	> 12 bulan/months			
Aset										Assets	
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,747,461	1,747,461	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	10,215,350	-	-	-	-	-	10,215,350	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	-	-	-	2,189,561	-	-	-	-	-	2,189,561	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	-	-	-	21,795,214	90,000	-	-	-	2,851	21,888,065	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	-	-	3,814,073	2,191,661	4,815,591	1,535,920	6,543,573	149,871	19,050,689	Securities receivables
Tagihan derivatif Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1,746,824	1,746,824	Derivative Acceptance receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	30,903,104	22,519,915	2,264,603	25,713,180	9,544,255	7,904,430	16,018,677	30,240,862	1,893,024	147,002,050	Loans and sharia financing receivables
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-	-	103,473	103,473	Investment in shares
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	228,822	228,822	Other assets
Jumlah aset keuangan, sebelum kerugian penurunan nilai	30,903,104	22,519,915	2,264,603	63,727,378	11,825,916	12,720,021	17,554,597	36,784,435	8,942,180	207,242,149	Total financial assets before allowance for impairment losses
Liabilitas										Liabilities	
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,045)	(59,045)	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	-	-	-	(93,702,148)	(8,940,417)	(1,438,514)	(929,691)	(12,518)	(145,623)	(105,168,911)	Deposits from customers
Simpanan dari bank-bank lain	-	-	-	(166,131)	-	-	-	-	-	(166,131)	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,447,736)	(1,447,736)	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,356,828)	(2,356,828)	Acceptance payables
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	(200,134)	(1,514)	(201,648)	Securities issued
Pinjaman yang diterima	(26,725,906)	(12,918,338)	(3,113,500)	-	-	-	(100,000)	(2,053,862)	(155,802)	(45,067,408)	Borrowings
Pinjaman subordinasi	-	(3,113,500)	-	-	-	-	-	-	(12,078)	(3,125,578)	Subordinated loans
Liabilitas sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	(425,887)	(425,887)	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	(330,316)	(330,316)	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	(26,725,906)	(16,031,838)	(3,113,500)	(93,868,279)	(8,940,417)	(1,438,514)	(1,029,691)	(2,266,514)	(4,934,829)	(158,349,488)	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	4,177,198	6,488,077	(848,897)	(30,140,901)	2,885,499	11,281,507	16,524,906	34,517,921	4,007,351	48,892,661	Total interest repricing gap

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Grup selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 atas kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris di kurva imbal hasil:

	(Penurunan) peningkatan laba bersih/ (Decrease) increase net profit		
	2023	2022	
Peningkatan 100 bps	22,945	3,903	<i>Increased by 100 bps</i>
Penurunan 100 bps	(32,651)	(14,083)	<i>Decreased by 100 bps</i>

Manajemen Risiko Permodalan

Modal regulasi

Tujuan manajemen permodalan Grup adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Grup mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Adequacy Maintained Assets (CEMA)*, Bank wajib melakukan perhitungan KPMM minimum berdasarkan profil risiko dan melakukan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*. Peraturan ini juga mengatur tentang pemenuhan rasio modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% dan rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5%, efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

Grup telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

Interest rate risk management (continued)

The table below shows the sensitivity of the Group's net profit during the year ended 31 December 2023 and 2022 due to an increase or decrease in market interest rates, assuming no asymmetrical movement in yield curves:

Capital Risk Management

Regulatory capital

The Group capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investors, depositors, customers and market confidence. In managing its capital, the Group considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

According to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 dated 12 December 2013 regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) for Commercial Bank and SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 regarding Capital Adequacy Ratio based on Risk Profile and Fullfillment of Capital Adequacy Maintained Assets (CEMA), the Bank is required to calculate minimum CAR in accordance to its risk profile and to perform Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). This regulation also stipulates minimum Tier 1 ratio at the minimum of 6% and common equity Tier 1 ratio at the minimum of 4.5%, effective on 1 January 2014.

The Group has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Capital Risk Management (continued)

Modal regulasi (lanjutan)

Regulatory capital (continued)

Posisi permodalan Grup berdasarkan peraturan OJK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The Group's regulatory capital position under the prevailing OJK regulation as of 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
KONSOLIDASI			CONSOLIDATED
Aset tertimbang menurut risiko			Risk weighted assets
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	125,294,554	121,057,375	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	135,795,396	144,374,143	<i>With credit, operational risk -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	137,651,897	145,091,415	<i>charge</i> <i>With credit, operational and market -</i>
Modal			Capital
- Modal inti	36,613,893	34,966,039	<i>Core capital -</i>
- Modal pelengkap	4,543,487	4,626,967	<i>Supplementary capital -</i>
	<u>41,157,380</u>	<u>39,593,006</u>	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum			Capital adequacy ratio
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	32.85%	32.71%	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	30.31%	27.42%	<i>With credit, operational risk -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	29.90%	27.29%	<i>charge</i> <i>With credit, operational and market -</i>
			<i>risk charge</i>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to less than 10%	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to less than 10%	<i>Minimum capital adequacy ratio required</i>
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	29.90%	27.29%	<i>Capital Adequacy Ratio -</i>
- Rasio CET 1	26.60%	24.10%	<i>CET 1 ratio -</i>
- Rasio tier 1	26.60%	24.10%	<i>Tier 1 ratio -</i>
- Rasio tier 2	3.30%	3.19%	<i>Tier 2 ratio -</i>
BANK			BANK
Aset tertimbang menurut risiko			Risk weighted assets
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	116,728,894	113,060,445	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	126,954,327	129,231,779	<i>With credit, operational risk -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	128,810,828	129,949,051	<i>charge</i> <i>With credit, operational and market -</i>
Modal			Capital
- Modal inti	31,015,970	29,178,186	<i>Core capital -</i>
- Modal pelengkap	4,436,444	4,527,153	<i>Supplementary capital -</i>
	<u>35,452,414</u>	<u>33,705,339</u>	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum			Capital adequacy ratio
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	30.37%	29.81%	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	27.93%	26.08%	<i>With credit, operational risk -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	27.52%	25.94%	<i>charge</i> <i>With credit, operational and market -</i>
			<i>risk charge</i>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to less than 10%	9% sampai dengan kurang dari 10%/9% to less than 10%	<i>Minimum capital adequacy ratio required</i>
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	27.52%	25.94%	<i>Capital Adequacy Ratio -</i>
- Rasio CET 1	24.08%	22.45%	<i>CET 1 ratio -</i>
- Rasio tier 1	24.08%	22.45%	<i>Tier 1 ratio -</i>
- Rasio tier 2	3.44%	3.48%	<i>Tier 2 ratio -</i>

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Modal regulasi (lanjutan)

	31 Desember/December	
	2023	2022
ENTITAS ANAK		
Modal inti	8,235,764	8,019,187
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	107,043	99,814
Jumlah modal	<u>8,342,807</u>	<u>8,119,001</u>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
Risiko Kredit	8,072,300	7,750,299
Risiko Operasional	8,095,128	7,380,362
Rasio total	<u>51.60%</u>	<u>53.66%</u>
Rasio KPMM yang diwajibkan	<u>9% - 10%</u>	<u>9% - 10%</u>

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia.

Reformasi acuan suku bunga

Reformasi mendasar dari acuan suku bunga utama sedang dilakukan secara global, termasuk penggantian beberapa suku bunga yang ditawarkan antar bank ("IBOR") dengan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko ("Reformasi IBOR").

Bank memiliki eksposur terhadap IBOR atas instrumen keuangan yang akan direformasi sebagai bagian dari inisiatif pasar global.

Pada tanggal 27 Juli 2017, *Financial Conduct Authority* (FCA) mengumumkan bahwa setelah tanggal 31 Desember 2021, bank yang menjadi kontributor LIBOR tidak lagi diwajibkan untuk memberikan kuotasi LIBOR. Menindaklanjuti pengumuman dari FCA tersebut, lima otoritas dari masing-masing negara mata uang LIBOR mencari dan memilih suku bunga referensi alternatif (*Alternative Reference Rate - ARR*) untuk menggantikan LIBOR.

Seluruh otoritas pada negara mata uang LIBOR memilih ARR berupa bunga rata-rata tertimbang dari transaksi *repurchase agreement (secured)* atau transaksi pasar uang antar bank (*unsecured*) dengan jangka waktu *overnight*. Pemilihan transaksi dengan tenor *overnight* dilakukan karena transaksi pada tenor tersebut paling likuid dan merefleksikan suku bunga pasar antarbank.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Capital Risk Management (continued)

Regulatory capital (continued)

	SUBSIDIARY
Modal inti	Core capital
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	Supplementary capital (maximum at 100% from core capital)
Jumlah modal	Total capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Risk Weighted Assets (RWA)
Risiko Kredit	Credit Risk
Risiko Operasional	Operational Risk
Rasio total	Total ratio
Rasio KPMM yang diwajibkan	Minimum CAR

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. Bank Indonesia's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement to available capital resources.

Interest rate benchmark reform

A fundamental reform of major interest rate benchmarks is being undertaken globally, including the replacement of some interbank offered rates ("IBORs") with alternative nearly risk-free rates ("IBOR Reform").

The Bank has exposures to IBORs on its financial instruments that will be reformed as part of this market-wide initiative.

On 27 July 2017, *Financial Conduct Authority* (FCA) announced that after 31 December 2021, banks contributing to LIBOR will be no longer required to provide LIBOR quotation. In response to the announcement from FCA, five authorities from each LIBOR currency country moved to find and select an alternative reference rate (ARR) to replace LIBOR.

All authorities in the LIBOR currency country choose ARR in the form of a weighted average of repurchase agreement transactions (secured) or interbank money market transactions (unsecured) with overnight tenor. The selection of transactions with overnight tenor is made because transactions in this tenor is the most liquid and reflecting interbank market interest rates.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Reformasi acuan suku bunga (lanjutan)

Risiko utama yang dihadapi Bank sebagai akibat dari reformasi IBOR adalah risiko operasional. Sebagai contoh, renegotiasi kontrak perjanjian pinjaman secara bilateral dengan nasabah, pembaruan persyaratan kontrak, pembaruan sistem yang masih menggunakan IBOR dan perubahan kontrol operasional terkait reformasi IBOR. Risiko keuangan sebagian besar terbatas pada risiko suku bunga.

Bank membentuk Komite IBOR lintas fungsi untuk mengelola transisi ke ARR. Tujuan Komite IBOR termasuk mengevaluasi sejauh mana pinjaman yang diberikan, komitmen kredit, dan transaksi *trade finance* perlu diubah sebagai dampak dari reformasi IBOR dan bagaimana mengelola komunikasi tentang reformasi IBOR dengan pihak lawan.

Bank mengelola transisi IBOR ke ARR sebagai berikut:

1. Menggunakan ARR pada kontrak keuangan baru sesuai anjuran otoritas masing-masing negara mata uang LIBOR dengan mempertimbangkan beberapa opsi ARR yang sesuai.
2. Membentuk tim transisi IBOR untuk memastikan kelancaran proses transisi, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, prosedur, sistem informasi, legal dan akuntansi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan negosiasi kontrak-kontrak yang ada dengan debitur atau pihak lawan untuk menyepakati klausul *fallback*, antara lain mengenai *trigger event*, suku bunga referensi pengganti dan *notice of payment*.
4. Menggunakan bahasa untuk klausul *fallback* dari standard pasar yang berlaku secara global, misalnya ISDA *Fallback Protocol* atau Asia *Pacific Loan Market Association* (APLMA).
5. Mengikuti terus perkembangan proses transisi IBOR.

Terkait reformasi IBOR, Bank menetapkan tenggat waktu penghentian internal untuk transaksi berbasis LIBOR mulai tanggal 30 Juni 2021, dengan *exceptional handling* untuk produk USD LIBOR untuk menunjang kebutuhan pelanggan.

Suku bunga alternatif yang digunakan Bank dalam transisi dari LIBOR adalah sebagai berikut:

Mata Uang/ Currency	Mata Uang IBOR/ Currency IBOR	Suku bunga referensi alternatif/ Alternative Reference Rate (ARR)
USD	USD LIBOR	Cost of Fund, Fixed Rate, Compounded Secured Overnight Financing Rate (SOFR), Term Risk Free Rate (RFR)
JPY	JPY LIBOR	Cost of Fund, Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR), Compounded Tokyo Overnight Average Rate (TONAR), Tokyo Term Risk Free Rate (TORF)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Interest rate benchmark reform (continued)

The main risks to which the Bank is exposed as a result of IBOR reform are operational risks. For example, bilateral renegotiation of loan contracts with customers, amendments of contractual terms, updating systems that use IBOR curves and changes of operational controls related to the IBOR reform. Financial risk is predominantly limited to interest rate risk.

The Bank established a cross-functional IBOR Committee to manage its transition to ARR. The objectives of the IBOR Committee include evaluating the extent of amendments required for loans, loan commitments and trade finance transactions as the impacts of IBOR reform and how to manage the communication about IBOR reform with counterparties.

The Bank manages the transition of LIBOR to ARR as follows:

1. Using the ARR on new financial contracts as recommended by the authorities of each LIBOR currency by considering several appropriate ARR options.
2. Establishing a IBOR transition team to ensure a smooth transition process, both in terms of governance, risk management, procedures, information system, legal and accounting, with due observance of applicable regulations.
3. Negotiating outstanding contracts with debtors or counterparties to agree on fallback clauses, including on trigger events, alternative reference interest rates and notice of payments.
4. Using fallback clause language from market standards that apply globally, for example ISDA *Fallback Protocol* or Asia *Pacific Loan Market Association* (APLMA).
5. Continuing follow-ups on the development of the IBOR transition process.

In response to the IBOR reform, the Bank has set an internal cessation deadlines for new LIBOR-based transactions since 30 June 2021, with certain *exceptional handling* for USD LIBOR products to support customer's needs.

Alternative interest rates that are used by the Bank in the transition from LIBOR are as follows:

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Reformasi acuan suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan acuan sebelum reformasi dari produk Bank yang terdampak (pinjaman yang diberikan dan derivatif), acuan baru dan status transisi.

Mata Uang/ Currency	Acuan sebelum reformasi/ Benchmark before reform	Acuan setelah reformasi/ Benchmark after reform	Status transisi pada tanggal 31 Desember 2023/ Status of transition as of 31 December 2023
USD	USD LIBOR	USD SOFR	Dalam proses/In progress*
JPY	JPY LIBOR	JPY TONA	Selesai/Completed
JPY	JPY LIBOR	JPY TORF	Selesai/Completed

Tabel berikut adalah jumlah eksposur pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk instrumen keuangan non-derivatif (pinjaman yang diberikan) dan derivatif serta komitmen pinjaman yang terdampak terhadap reformasi IBOR. Eksposur pinjaman yang diberikan disajikan pada jumlah plafon fasilitasnya, sementara eksposur derivatif disajikan pada jumlah nosionalnya pada ekuivalen jutaan Rupiah, dijabarkan dengan nilai tukar mata uang tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Interest rate benchmark reform (continued)

The table below sets out the benchmark before reform from the impacted products (loans and derivatives), new benchmark and status of the transition.

The following table shows the total exposure as of 31 December 2023 and 2022 for non-derivative (loans) and derivative financial instruments as well as loan commitments which are affected by the IBOR reform. The exposure of loans are presented at their facility limit amount, while derivatives are presented at their notional amount in equivalent millions of Rupiah, translated using foreign exchange rate as of, 31 December 2023 and 2022.

	31 Desember/December 2023				
	Acuan JPY LIBOR/ JPY LIBOR Benchmark		Acuan USD LIBOR/ USD LIBOR Benchmark		
	Eksposur yang belum direformasi/ Unreformed exposures	Eksposur dengan klausul fallback yang sesuai/ Amount with appropriate fallback clause	Eksposur yang belum direformasi/ Unreformed exposures	Eksposur dengan klausul fallback yang sesuai/ Amount with appropriate fallback clause	
Pinjaman yang diberikan*					Loans*
Committed	-	-	-	-	Committed
Uncommitted	-	-	-	-	Uncommitted
	=	=	=	=	
Derivatif					Derivatives
Antarbank	-	-	-	-	Interbank
Nasabah	-	-	-	-	Customer
	=	=	=	=	

*) Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank sudah tidak memiliki eksposur LIBOR pada setiap posisi mata uang asing. Beberapa perjanjian sindikasi yang semulanya memiliki eksposur USD LIBOR masih dalam proses penyelesaian dan persetujuan dari semua pihak-pihak sindikasi, namun telah mendapat persetujuan sementara untuk menggunakan USD SOFR sehingga Bank tidak lagi memiliki eksposur terhadap LIBOR pada tanggal 31 Desember 2023.

*) As of 31 December 2023, the Bank no longer has outstanding LIBOR exposures with respect to each currency position. A couple of syndicated facilities agreements which initially had exposures to USD LIBOR were still in progress of finalization and agreement from all related syndication parties, however have obtained temporary approval to use USD SOFR such that the Bank no longer has exposure to LIBOR as of 31 December 2023.

	31 Desember/December 2022				
	Acuan JPY LIBOR/ JPY LIBOR Benchmark		Acuan USD LIBOR/ USD LIBOR Benchmark		
	Eksposur yang belum direformasi/ Unreformed exposures	Eksposur dengan klausul fallback yang sesuai/ Amount with appropriate fallback clause	Eksposur yang belum direformasi/ Unreformed exposures	Eksposur dengan klausul fallback yang sesuai/ Amount with appropriate fallback clause	
Pinjaman yang diberikan					Loans
Committed	-	-	10,606,829	5,373,159	Committed
Uncommitted	-	-	8,444,025	2,335,125	Uncommitted
	=	=	19,050,854	7,708,284	
Derivatif					Derivatives
Antarbank	-	-	-	18,271,151	Interbank
Nasabah	-	-	7,137,849	6,784,374	Customer
	=	=	7,137,849	25,055,525	

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

a. Level 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

b. Level 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan harga); dan

c. Level 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

31 Desember/December 2023					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Level 1	Level 2	Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					
Efek-efek	7,817,003	205,183	7,611,820	-	7,817,003
Tagihan derivatif	1,133,149	-	1,133,149	-	1,133,149
Penyertaan saham	102,586	-	80,064	22,522	102,586
	<u>9,052,738</u>	<u>205,183</u>	<u>8,825,033</u>	<u>22,522</u>	<u>9,052,738</u>
Liabilitas					
Liabilitas derivatif	1,072,104	-	1,072,104	-	1,072,104

31 Desember/December 2022					
	Nilai tercatat/ Carrying Value	Level 1	Level 2	Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					
Efek-efek	9,578,603	-	9,578,603	-	9,578,603
Tagihan derivatif	1,746,824	-	1,746,824	-	1,746,824
Penyertaan saham	103,473	-	80,951	22,522	103,473
	<u>11,428,900</u>	<u>-</u>	<u>11,406,378</u>	<u>22,522</u>	<u>11,428,900</u>
Liabilitas					
Liabilitas derivatif	1,447,736	-	1,447,736	-	1,447,736

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya:

	31 Desember/December 2023		31 Desember/December 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset					Assets
Giro pada Bank Indonesia	9,276,598	9,276,598	10,215,350	10,215,350	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	962,229	962,229	2,189,146	2,189,146	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,964,278	8,964,278	21,887,894	21,887,894	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	9,446,554	9,461,043	9,471,087	9,757,119	Securities
Tagihan akseptasi	3,281,120	3,281,120	3,065,359	3,065,359	Acceptance receivables
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	153,041,046	157,244,639	143,422,931	146,384,580	Loans and sharia financing/ receivables
Aset lain-lain	423,113	423,113	228,822	228,822	Other assets

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation of financial instruments

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following is the hierarchy of the fair values:

a. Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

b. Level 2

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is as prices) or indirectly (that is derived from prices); and

c. Level 3

Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The tables below show the Group's financial assets and liabilities that were measured at fair value as of 31 December 2023 and 2022:

31 Desember/December 2023					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Level 1	Level 2	Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					
Efek-efek	7,817,003	205,183	7,611,820	-	7,817,003
Tagihan derivatif	1,133,149	-	1,133,149	-	1,133,149
Penyertaan saham	102,586	-	80,064	22,522	102,586
	<u>9,052,738</u>	<u>205,183</u>	<u>8,825,033</u>	<u>22,522</u>	<u>9,052,738</u>
Liabilitas					
Liabilitas derivatif	1,072,104	-	1,072,104	-	1,072,104

31 Desember/December 2022					
	Nilai tercatat/ Carrying Value	Level 1	Level 2	Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					
Efek-efek	9,578,603	-	9,578,603	-	9,578,603
Tagihan derivatif	1,746,824	-	1,746,824	-	1,746,824
Penyertaan saham	103,473	-	80,951	22,522	103,473
	<u>11,428,900</u>	<u>-</u>	<u>11,406,378</u>	<u>22,522</u>	<u>11,428,900</u>
Liabilitas					
Liabilitas derivatif	1,447,736	-	1,447,736	-	1,447,736

The table below summarizes the carrying amounts and fair values of those financial instruments not stated at their fair values:

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya: (lanjutan)

	31 Desember/December 2023		31 Desember/December 2022	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Liabilitas				
Liabilitas segera	71,606	71,606	59,045	59,045
Bagi hasil yang belum dibagikan	21,951	21,951	18,996	18,996
Simpanan nasabah	98,457,403	98,457,403	105,168,911	105,168,911
Simpanan dari bank-bank lain	10,822,121	10,822,121	166,131	166,131
Liabilitas akseptasi	2,323,633	2,323,633	2,356,828	2,356,828
Efek-efek yang diterbitkan	202,083	204,635	201,648	204,077
Pinjaman yang diterima	31,355,517	31,388,521	45,067,408	45,106,240
Liabilitas lain-lain	505,982	505,982	330,316	330,316

Nilai wajar dari efek-efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (level 2 - hirarki nilai wajar).

Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar (level 3 - hirarki nilai wajar).

Nilai tercatat dari pembiayaan syariah merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan pinjaman tersebut memiliki tenor jangka pendek.

Nilai wajar surat utang jangka menengah dihitung menggunakan teknik penilaian berdasarkan model internal Bank yaitu model penilaian diskonto arus kas. Input dalam teknik penilaian termasuk arus kas yang akan diterima di masa datang dan suku bunga pasar (level 2 - hirarki nilai wajar).

Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (level 2 - hirarki nilai wajar).

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dinilai dengan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pinjaman terakhir yang digunakan (level 2 - hirarki nilai wajar).

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation of financial instruments
(continued)

The table below summarizes the carrying amounts and fair values of those financial instruments not stated at their fair values: (continued)

	31 Desember/December 2023		31 Desember/December 2022	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Liabilities				
Liabilitas segera	71,606	71,606	59,045	59,045
Bagi hasil yang belum dibagikan	21,951	21,951	18,996	18,996
Simpanan nasabah	98,457,403	98,457,403	105,168,911	105,168,911
Simpanan dari bank-bank lain	10,822,121	10,822,121	166,131	166,131
Liabilitas akseptasi	2,323,633	2,323,633	2,356,828	2,356,828
Efek-efek yang diterbitkan	202,083	204,635	201,648	204,077
Pinjaman yang diterima	31,355,517	31,388,521	45,067,408	45,106,240
Liabilitas lain-lain	505,982	505,982	330,316	330,316

The fair value for securities, which maturity date is more than 1 year, are estimated using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine fair value (level 3 - fair value hierarchy).

Carrying value of sharia financing approximates the estimates fair value since sharia financing have short-term tenure.

The fair value of medium term notes was calculated using valuation technique based on the Bank's internal model which is discounted cash flow valuation model. Inputs into the valuation technique include expected future cash flows and interest rates (level 2 - fair value hierarchy).

The fair value of bonds payable is estimated by using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).

The fair value of borrowings is estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lender for the last utilization of borrowings (level 2 - fair value hierarchy).

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai wajarnya karena instrumen keuangan bersifat jangka pendek atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala.

Perhitungan nilai wajar dilakukan hanya untuk kepentingan pengungkapan dan tidak berdampak pada pelaporan posisi atau kinerja keuangan Grup. Nilai wajar yang dihitung oleh Grup mungkin berbeda dengan jumlah aktual yang akan diterima/dibayar pada saat penyelesaian atau jatuh tempo instrumen keuangan. Mengingat kategori tertentu instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan, maka terdapat pertimbangan manajemen dalam perhitungan nilai wajar.

Risiko operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional Bank.

Tata Kelola Pengelolaan Risiko Operasional

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap Manajemen Risiko Operasional melalui berbagai komite seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala sesuai *terms of reference* masing-masing untuk membahas risiko operasional.

Satuan Kerja *Operational & Fraud Risk Management* (OFRM) memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko, atas manajemen risiko operasional dan *fraud*. Bank telah merumuskan dan menetapkan profil dan tingkat risiko operasional secara memadai agar sejalan dengan sasaran dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. Pemantauan profil dan tingkat risiko operasional dilakukan melalui perangkat manajemen risiko operasional yaitu *operational risk appetite* dan *key risk indicator* yang menjadi bagian dalam kerangka kerja manajemen risiko operasional.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation of financial instruments
(continued)

The carrying amount of remaining financial assets and financial liabilities are reasonable approximation of fair value because they are short term in nature or re-price to current market rates frequently.

The fair values calculated are for disclosure purposes only and do not have any impact on the Group's reported financial performance or position. The fair values calculated by the Group may be different from the actual amount that will be received/paid on the settlement or maturity of the financial instruments. As certain categories of financial instruments are not traded, there is management's judgment involved in calculating the fair values.

Operational risk

Operational risk is defined as the risks of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, systems failure or external events that impacted to the Bank's operational activities.

Operational Risk Management Governance

The Board of Commissioners and the Board of Directors actively supervise operational risk management through various committees, such as the Risk Monitoring Committee and the Risk Management Committee that conducted periodically in accordance with terms of reference to discuss operational risks.

The Operational & Fraud Risk Management (OFRM) Unit has direct responsibility to the Head of Risk Management, for operational and fraud risk management. Bank had formulated and determined the profile and level of operational risk sufficiently to be in line with overall business goals and strategies of the Bank. Monitoring the operational risk profile and level is carried out through operational risk management tools, such as operational risk appetite and key risk indicators which are part of the operational risk management framework.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Satuan kerja OFRM bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional, BCM (*Business Continuity Management*), Fungsi ICR (*Internal Control & Risk*) dan *fraud* yang kemudian akan dikaji ulang secara berkala, dengan mempertimbangkan setiap perubahan signifikan, baik secara internal maupun eksternal.

Setiap unit kerja wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari. Bank juga telah memiliki sistem dan penetapan limit atau ambang batas untuk mendukung pengendalian umum dan khusus, seperti pemisahan tugas, cuti wajib tahunan, rekonsiliasi dan lainnya.

Kecukupan Proses Manajemen Risiko Operasional

Proses manajemen risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan secara terstruktur dan konsisten. Proses Manajemen Risiko Operasional di Bank diterapkan berdasarkan praktik terbaik yang efektif.

Tahapan proses manajemen risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional adalah sebagai berikut:

1. Risiko operasional dilakukan atas seluruh proses, produk, layanan, sistem, inisiatif dan struktur organisasi baru ataupun perubahannya. Identifikasi risiko operasional juga dilakukan melalui perangkat manajemen risiko operasional di antaranya *Risk Grading Matrix (RGM)*, *Process Risk Control (PRC)*, *Key Risk Indicator (KRI)* dan *Risk Acceptance (RA)*.
2. Proses pengukuran risiko operasional meliputi kegiatan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara berkala melalui *Key Control Self Assessment (KCSA)*, analisa kejadian dan kerugian risiko operasional, pelaksanaan aktivitas pemeriksaan oleh Fungsi *Internal Control & Risk (ICR)*, pengukuran KRI dan *Operational Risk Appetite (ORA)* yang dilaporkan secara berkala dalam rapat Komite Manajemen Risiko (KMR).

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Adequacy of Policies, Procedures, and Determination of Limits

The OFRM is responsible for the formulation and development of operational risk management policies and procedures, BCM (Business Continuity Management), ICR (Internal Control & Risk) and fraud functions which will then be reviewed periodically, taking into account any significant changes, both internally and externally.

Each work unit must adhere to operational risk management policies and procedures in carrying out daily operational activities. Bank also has system and determination of limits to support common and specific controls, such as segregation of duties, annual mandatory block leave reconciliation and others.

Adequacy of Operational Risk Management Process

The process of operational risk management including identification, measurement, monitoring and risk control runs in a structured and consistent manner. The Operational Risk Management process in Bank implemented based on effective best practices.

The operational risk management process which include identification, measurement, monitoring and control of operational risk are describe as follows:

1. *Operational risk identification is carried out on process, product, services, system, initiative and organization for new and changes. The operational risk identification is also perform through operational risk management tools such as Risk Grading Matrix (RGM), Process Risk Control (PRC), Key Risk Indicator (KRI) and Risk Acceptance (RA).*
2. *Risk measurement process includes periodic self-assessment activities through Key Control Self Assessment (KCSA), analysis of operational risk events and losses, inspection activities by Internal Control & Risk (ICR) Function, KRI measurement and Operational Risk Appetite (ORA) which is reported regularly in meetings of Risk Management Committee (RMC).*

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Kecukupan Proses Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

Tahapan proses Manajemen Risiko Operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional adalah sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pemantauan risiko operasional dilakukan melalui pelaporan kepada manajemen senior dan regulator, baik secara rutin ataupun *ad-hoc*, termasuk pelaporan kejadian dengan kategori signifikan melalui SINP (*Significant Incident Notification Protocol*). Hal ini diterapkan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti.
4. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan menerapkan mekanisme kontrol pencegahan, deteksi dan koreksi yang efektif dan/atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan dampak kerugian operasional bagi Bank. Sebagai salah satu tindakan pengendalian, Bank telah memiliki pedoman bagi Manajemen Kelangsungan Bisnis (BCM) yang komprehensif.

Penyediaan aplikasi *Internal Control & Risk System* (ICRS) adalah sebagai *database* di dalam penerapan manajemen risiko operasional dan *fraud* dan sekaligus diharapkan agar dapat menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) untuk risiko operasional yang dilakukan oleh Bank menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) dan sesuai dengan ketentuan regulator.

Bank dan Entitas Anak telah memiliki pedoman pengelolaan kelangsungan usaha yang komprehensif dan mengacu kepada standar industri ISO 22301, dengan tujuan untuk mengantisipasi potensi risiko operasional yang dapat terjadi dari situasi ekstrem/kritikal baik yang disebabkan oleh faktor bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus maupun faktor lainnya seperti demonstrasi, kebakaran, gangguan sistem pasokan listrik, pandemi serta situasi bisnis yang kurang menguntungkan. Hal ini untuk memastikan keberlangsungan layanan kepada nasabah.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Adequacy of Operational Risk Management Process (continued)

The operational risk management process which include identification, measurement, monitoring and control of operational risk are describe as follows: (continued)

3. *Operational risk monitoring is carried out through reporting to senior management and regulators, either on a regular basis or on an ad-hoc basis, including reporting events with significant incident through SINP (Significant Incident Notification Protocol). This is implemented so that any problems that occur can be immediately followed up.*
4. *Operational risk control is also carried out by implementing effective prevention, detection and correction control mechanisms and/or providing adequate insurance to minimize the impacts of operational losses on Bank. As one of the control measures, Bank has guidelines for comprehensive Business Continuity Management (BCM).*

The existence of the Internal Control & Risk System (ICRS) application serves as database in the implementation of operational and fraud risk management and at the same time is expected to be able to present information needs in an accurate, timely and up-to-date manner to facilitate analysis and decision making.

The calculation of the Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for operational risk carried out by the Bank has used standardized approach and comply with regulatory requirements.

The Bank and its Subsidiaries already have comprehensive business continuity management guidelines which refer to the ISO 22301 industry standard, with the aim of anticipating operational risks that may occur from extreme/critical situations either caused by natural disasters such as floods, earthquakes and volcanic eruptions or other factors such as demonstration, fires, disruptions to the power supply system, pandemic and unfavorable business situations. This is to ensure continuity of service to customers.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Operasional

Sistem pengendalian internal atas risiko operasional dilakukan melalui penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*). Pada lini pertahanan pertama, *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu oleh *Business Risk/ICR* dalam pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lini pertahanan kedua, satuan kerja OFRM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit secara independen melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata kelola dan efektivitas manajemen risiko operasional.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak bertanggung jawab atas praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui ICR MSA (*Maturity Self-Assessment*) yang terstandardisasi dan forum-forum yang diselenggarakan oleh satuan kerja OFRM untuk memfasilitasi Fungsi *Internal Control & Risk*.

Manajemen Risiko Fraud

Bank menerapkan *zero tolerance* terhadap setiap kejadian *fraud*. Bank senantiasa menindaklanjuti setiap kejadian *fraud* termasuk memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan maupun yang terlibat dalam kejadian *fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib (bila diperlukan).

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur strategi *anti fraud* yang memadai dan senantiasa disempurnakan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko *fraud* dilakukan secara sistematis melalui sejumlah proses dan strategi.

Terkait dengan proses pencegahan risiko *fraud*, Bank telah menjalankan program *anti fraud awareness* untuk seluruh karyawan dan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan setiap pegawai bank. Penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan strategi *anti fraud* dilakukan secara berkala sehingga tetap sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu dilakukan kajian risiko *fraud* atas setiap produk, proses, sistem dan inisiatif baik baru maupun pengembangannya.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Internal Control System for Operational Risk

Internal control system for operational risk is carried out through the implementation of three lines of defense models. In the first line of defense, the Risk Taking Unit (RTU) assisted by Business Risk/ICR in carried out day-to-day operational risk management. In the second line of defense, the OFRM work unit is overseeing the implementation of risk management process in accordance with stipulated policy.

In the third line of defence, Internal Audit independently examines and evaluates the governance and effectiveness of operational risk management.

Alignment process between the parties responsible for Bank's internal control practices is carried out on an ongoing basis through a standardized ICR MSA (Maturity Self-Assessment) matrix and forums organized by the OFRM work unit to facilitate the Internal Control & Risk Function.

Fraud Risk Management

The Bank has no tolerance to any fraud incident. Bank always follows up on every fraud incident including providing sanctions to employees who commit or are involved in fraud incidents as per prevailing regulations including reporting to the authorities (if necessary).

Bank has adequate policies and procedures of anti fraud strategies which are continuously improved. Fraud risk management is systematically handled through a series of process and strategy.

In relation to fraud risk prevention process, the Bank has implemented anti fraud awareness program for all employees and the signing of integrity pact by the Board of Directors, Board of Commissioners, and every Bank employee. Adjustments to policies and procedures for managing anti fraud strategies are carried out regularly to be in line with current conditions. In addition, both new and development products, processes, systems and initiatives are assessed for potential fraud risk.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Manajemen Risiko *Fraud* (lanjutan)

Sosialisasi *anti fraud awareness* dilakukan melalui beberapa media, yaitu melalui *e-newsletter broadcast, email broadcast, wallpaper desktop PC/laptop, standing acrylics, BTPN Info*, penayangan video animasi *anti fraud, mandatory anti-fraud e-learning*, pelaksanaan *anti-fraud awareness* yang disampaikan secara *in-class training* maupun pelatihan secara *virtual* kepada karyawan. Selain itu, ada layanan *whistleblowing* di Bank yang dapat digunakan untuk melaporkan kejadian berindikasi *fraud*.

Bank juga memberikan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran *fraud* kepada pihak ketiga baik nasabah maupun vendor termasuk melakukan pelatihan secara *virtual* perihal *anti fraud* maupun *Entertainment & Gift* kepada vendor secara berkala untuk turut serta membantu Bank dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Sejalan dengan strategi *anti fraud* yang berlaku, Bank juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi pelaporan *fraud* melalui *whistleblowing channel* sebagai salah satu media pendeteksian kejadian *fraud*, yang secara berkala dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media internal Bank. Karyawan dapat mengungkap dan melaporkan setiap Tindakan pelanggaran (*misconduct*) melalui saluran *e-mail* (Ayo Lapor), Whatsapps, telepon, surat maupun pertemuan tatap muka.

Bank telah memiliki kebijakan yang memadai terkait proses investigasi dan pelaporan kejadian *fraud*. Untuk setiap kasus *fraud* yang terbukti, proses pemberian sanksi diputuskan oleh Komite *Fraud* dan melibatkan unit kerja terkait, *Business Risk/ICR* terkait, satuan kerja Sumber Daya Manusia dan OFRM. Implementasi keputusan Komite *Fraud* dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menentukan upaya perbaikan di masa yang akan datang.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Fraud Risk Management (continued)

Anti fraud socialization and awareness was carried out through several media, namely e-newsletters, email broadcasts, desktop PC/laptop wallpapers, standing acrylics, BTPN Info, anti fraud animation videos, anti fraud mandatory e-learning, in-class or virtual anti fraud awareness training to employees. In addition, there is whistleblowing channel provided by Bank for reporting indication of fraud.

Bank also provides various socialization programs to raise awareness of fraud to third parties, both customers and vendors, including conducting virtual training on anti fraud and Entertainment & Gifts for vendors on regular basis in supporting the Bank to maintaining good corporate governance.

In line with the applicable anti fraud strategy, Bank also continuously socialized the fraud reporting through whistleblowing channel for detecting fraud incident, which is regularly communicated to all employees through various internal Bank media. Employees can disclose and report any violations (misconduct) through e-mail channels (Ayo Lapor), Whatsapps, telephone, letters or face-to-face meetings.

The Bank has adequate policies regarding investigation process and reporting of fraud. For each proven fraud case, the process of imposing sanctions is decided by Fraud Committee involving the relevant work units, related Business Risk/ICR, Human Resources and OFRM unit. The implementation of Fraud Committee's decisions is monitored and evaluated periodically to determine future improvement efforts.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

42. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

The balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows:

	31 Desember/December		
	2023	2022	
ASET			ASSETS
Kas			<i>Cash</i>
Dolar Amerika Serikat	54,843	37,029	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	3,821	3,219	<i>Japanese Yen</i>
Dolar Singapura	602	-	<i>Singapore Dollar</i>
	<u>59,266</u>	<u>40,248</u>	
Giro pada Bank Indonesia			<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Dolar Amerika Serikat	2,312,722	2,505,286	<i>United States Dollar</i>
Giro pada bank-bank lain			<i>Current accounts with other banks</i>
Dolar Amerika Serikat	446,607	1,453,587	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	153,105	390,933	<i>Japanese Yen</i>
Euro Eropa	62,471	89,866	<i>European Euro</i>
Dolar Australia	54,675	38,734	<i>Australian Dollar</i>
Dolar Singapura	52,601	2,234	<i>Singapore Dollar</i>
Poundsterling Inggris	42,308	35,593	<i>British Poundsterling</i>
Baht Thailand	18,448	84,304	<i>Thailand Baht</i>
Lain-lain	14,445	2,088	<i>Others</i>
	<u>844,660</u>	<u>2,097,339</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain			<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Dolar Amerika Serikat	5,897,051	10,578,116	<i>United States Dollar</i>
Efek-efek			<i>Securities</i>
Dolar Amerika Serikat	958,932	1,224,327	<i>United States Dollar</i>
Tagihan akseptasi			<i>Acceptance receivables</i>
Dolar Amerika Serikat	1,504,872	1,171,471	<i>United States Dollar</i>
Yuan China	1,161	-	<i>China Yuan</i>
	<u>1,506,033</u>	<u>1,171,471</u>	
Pinjaman yang diberikan			<i>Loans</i>
Dolar Amerika Serikat	46,063,513	44,368,513	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	606,229	782,342	<i>Japanese Yen</i>
Euro Eropa	79,104	167,004	<i>European Euro</i>
	<u>46,748,846</u>	<u>45,317,859</u>	
Penyertaan saham			<i>Investment in shares</i>
Dolar Amerika Serikat	80,064	80,951	<i>United States Dollar</i>
Aset lain-lain			<i>Other assets</i>
Dolar Amerika Serikat	298,151	852	<i>United States Dollar</i>
Euro Eropa	230	213	<i>European Euro</i>
Yen Jepang	161	-	<i>Japanese Yen</i>
	<u>298,542</u>	<u>1,065</u>	
Jumlah aset	<u>58,706,116</u>	<u>63,016,662</u>	Total assets

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: (lanjutan)

42. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

The balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows: (continued)

	31 Desember/December		
	2023	2022	
LIABILITAS			LIABILITIES
Liabilitas segera			<i>Liabilities due immediately</i>
Dolar Amerika Serikat	4,571	-	<i>United States Dollar</i>
Giro			<i>Current accounts</i>
Dolar Amerika Serikat	8,735,833	10,174,982	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	1,928,682	1,144,277	<i>Japanese Yen</i>
Baht Thailand	10,797	87,556	<i>Thailand Baht</i>
Euro Eropa	98,942	75,158	<i>European Euro</i>
Lain-lain	7,753	10,364	<i>Others</i>
	<u>10,782,007</u>	<u>11,492,337</u>	
Tabungan			<i>Savings deposits</i>
Dolar Amerika Serikat	543,438	344,625	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	215,605	150,877	<i>Japanese Yen</i>
Euro Eropa	74,536	74,828	<i>European Euro</i>
Dolar Singapura	72,622	47,876	<i>Singapore Dollar</i>
Lain-lain	102,377	68,270	<i>Others</i>
	<u>1,008,578</u>	<u>686,476</u>	
Deposito berjangka dan deposito <i>on call</i>			<i>Time deposits and deposits on call</i>
Dolar Amerika Serikat	10,536,100	10,278,476	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	420,523	58,108	<i>Japanese Yen</i>
Dolar Singapura	54,295	-	<i>Singapore Dollar</i>
	<u>11,010,918</u>	<u>10,336,584</u>	
Simpanan dari bank-bank lain			<i>Deposits from other banks</i>
Dolar Amerika Serikat	9,238,200	-	<i>United States Dollar</i>
Liabilitas akseptasi			<i>Acceptance payables</i>
Dolar Amerika Serikat	538,748	483,529	<i>United States Dollar</i>
Yuan China	1,161	-	<i>China Yuan</i>
	<u>539,909</u>	<u>483,529</u>	
Pinjaman yang diterima			<i>Borrowings</i>
Dolar Amerika Serikat	23,018,515	36,926,110	<i>United States Dollar</i>
Euro Eropa	170,383	331,634	<i>European Euro</i>
	<u>23,188,898</u>	<u>37,257,744</u>	
Pinjaman subordinasi			<i>Subordinated loans</i>
Dolar Amerika Serikat	3,079,400	3,113,500	<i>United States Dollar</i>
Liabilitas lain-lain			<i>Other liabilities</i>
Dolar Amerika Serikat	422,215	157,999	<i>United States Dollar</i>
Yuan China	823	-	<i>China Yuan</i>
Yen Jepang	723	333	<i>Japanese yen</i>
Lain-lain	430	10	<i>Others</i>
	<u>424,191</u>	<u>158,342</u>	
Jumlah liabilitas	<u>59,276,672</u>	<u>63,528,512</u>	Total liabilities
(Liabilitas) aset bersih	<u>(570,556)</u>	<u>(511,850)</u>	Net (liabilities) assets

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS
PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), maka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank.

Berdasarkan Siaran Pers yang terakhir diterbitkan di tahun 2023 yaitu Siaran Pers No. PRESS-43/SEKL/2023 tanggal 25 September 2023, tingkat bunga penjaminan LPS menjadi sebesar 4,25% untuk simpanan dalam Rupiah dan 2,25% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Grup adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Premi yang telah dibayarkan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp 233.280 dan Rp 213.414.

44. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Bank

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 Desember 2023 menyetujui penarikan 92.292.198 saham hasil pembelian kembali saham dan karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Bank. Dengan lewatnya jangka waktu penyampaian keberatan dari Kreditor atas perubahan modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perubahan anggaran dasar sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 07 tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0082757.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 7 Februari 2024.

**43. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS
OF COMMERCIAL BANKS**

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation as Substitution of Law No. 7 Year 2009 dated 13 January 2009 regarding with the Determination of Government Regulation as Substitution of Law No. 3 Year 2008, Deposit Insurance Agency ("LPS") was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS), the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp 2,000 per depositor per bank as of 31 December 2023 and 2022.

Based on the latest issued Press Release in 2023 which is Press Release No. PRESS-43/SEKL/2023 dated 25 September 2023, the guaranteed interest rate by LPS is 4.25% for deposits denominated in Rupiah and 2.25% for deposits denominated in foreign currency.

The Group both are participants of the guarantee program. Premium paid for the year ended 31 December 2023 and 2022 were Rp 233,280 and Rp 213,414, respectively.

**44. SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING
DATE**

Bank

- a. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 7 December 2023 approved the withdrawal of 92,292,198 shares resulted from buy back and therefore approves the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Bank's articles of association. By the lapsing of the time period on Creditor's objection filing in regards to the capital changes as meant by the Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company, the changes in the articles of association as stipulated in the Deed No. 7 dated 7 December 2023 which was made by Notary Ashoya Ratam S.H., MKn., has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0082757.AH.01.02. Year 2023 dated 7 February 2024.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

Bank (lanjutan)

- b. RUPSLB tanggal 7 Desember 2023 tersebut juga menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II"). Bank telah memperoleh pernyataan efektif atas PMHMETD II tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-29/D.04/2024 tanggal 19 Februari 2024. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada pemegang saham dalam rangka PMHMETD II pada tanggal 11 Desember 2023, Bank telah mengungkapkan rencana penggunaan dana PMHMETD II tersebut adalah untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha melalui pengambilalihan perusahaan-perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF), dari SMBC dan PT Summit Auto Group.

Terkait dengan pelaksanaan PMHMETD II, pada tanggal 26 Februari 2024 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 2.589.131.077 saham baru atas nama dengan nominal Rp 20,00 (nilai penuh) per saham; sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 8.056.814.671 saham menjadi sejumlah 10.645.945.748 saham.

Pada tanggal 27 Maret 2024, Bank telah mengakuisisi 51% saham biasa (saham seri B) OTO dengan nilai pembelian sebesar Rp 3.926.955. Bank juga telah mengakuisisi 51% saham biasa (saham seri B) SOF dengan nilai pembelian dengan nominal sebesar Rp 2.623.788.

- c. Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 21 Maret 2024, Bank melakukan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sejumlah 20% dari laba bersih Bank tahun buku 2023 yang dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 19 April 2024, yang dibayarkan sesuai daftar pemegang saham Bank pada tanggal 3 April 2024.
- d. Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan BTPNS pada tanggal 20 Maret 2024, Bank telah menerima dividen tunai pada tanggal 19 April 2024 atas saham-saham *scriptless* sebesar Rp 372.887 melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun atas 1% saham *script* (warkat) atas nama Bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk pemenuhan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 sebesar Rp 5.404.

**44. SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING
DATE (continued)**

Bank (continued)

- b. EGMS dated 7 December 2024 also approved the Bank's plan to increase the Bank's share capital by granting pre-emptive rights II ("PMHMETD II"). The Bank has obtained an effective statement regarding PMHMETD II from the Financial Services Authority with letter Number S-29/D.04/2024 dated 19 February 2024. Based on the disclosure of information to shareholders regarding PMHMETD II on 11 December 2023, the Bank has disclosed its plan to use the proceed from the PMHMETD II fund to conduct expansion and business investments through the acquisitions of companies engaging in financing business namely PT Oto Multiartha (OTO) and PT Summit Oto Finance (SOF), from SMBC and PT Summit Auto Group.

Related to the PMHMETD II, on 26 February 2024, the Bank's shares were listed at the Indonesia Stock Exchange with 2,589,131,077 new registered shares with value of Rp 20.00 (full amount) per share; accordingly, the number of shares issued and fully paid changed from 8,056,814,671 shares to 10,645,945,748 shares.

On 27 March 2024, the Bank has acquired 51% of OTO's ordinary shares (series B shares) for a purchase price amounted to Rp 3,926,955. The Bank also has acquired 51% SOF's ordinary shares (series B shares) for a purchase price amounted to Rp 2,623,788.

- c. In accordance with the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (GMS) held on 21 March 2024, the Bank has distributed cash dividends to shareholders in the amount of 20% of the Bank's net profit for the 2023 financial year on 19 April 2024, which was paid to the shareholders according to the shareholder registry on 3 April 2024.
- d. In accordance with the Resolution of Annual GMS of BTPNS dated 20 March 2024, the Bank has received cash dividend on 19 April 2024 towards *scriptless* shares at the amount of Rp 372,887 through PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and also towards the 1% *script* shares under name of the Bank that was not listed in the Indonesian Stock Exchange for the purpose of Government Regulation No. 29 year 1999 at the amount of Rp 5.404.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

Bank (lanjutan)

- e. Bank mendapat pinjaman dari SMBC sebesar USD 200.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 5 Januari 2024. Bank kembali mendapat pinjaman dari SMBC sebesar USD 200.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 25 Maret 2024.

Entitas Anak

- a. Pada tanggal 19 April 2024, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai BTPNS kepada pemegang saham (pemilik warkat *scriptless*) sesuai daftar pemegang saham pada tanggal 2 April 2024.
- b. BTPNS telah pula melaksanakan pembagian dividen tunai (warkat *non-scriptless*) kepada PT BANK BTPN Tbk selaku pemegang saham pengendali, atas kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 April 2024.

**45. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) relevan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- Amandemen PSAK 73 "Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik"

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025:

- Amandemen PSAK 10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**44. SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING
DATE (continued)**

Bank (continued)

- e. The Bank received borrowing from SMBC amounting to USD 200,000,000 (full amount) on 5 January 2024. The Bank received another borrowing from SMBC amounting to USD 200,000,000 (full amount) on 25 March 2024.

Subsidiary

- a. On 19 April 2024, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia distributed BTPNS's cash dividend to shareholders (*scriptless Shareholders*) according to list of shareholders as of 2 April 2024.
- b. BTPNS had also carried out the distribution of cash dividend for non-scriptless shareholders to PT BANK BTPN Tbk as controlling shareholders, for 1% shares ownership that was not registered in the Indonesian Stock Exchange on 19 April 2024.

**45. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING
STANDARDS**

The relevant Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards (DSAK) but not yet effective for the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023 are as follows:

PSAK that will become effective on 1 January 2024:

- Amendments to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements: Disclosure of Long Term Liabilities under the Covenant"
- Amendments to PSAK 2 "Cash Flow Statement"
- Amendments PSAK 60 "Financial Instruments: Disclosure"
- Amendments to PSAK 73 "Lease: Lease Liabilities on Sale and Leaseback Transactions"

PSAK that will become effective on 1 January 2025:

- Amendments to PSAK 10 "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates"

As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the new standard to the consolidated financial statements.

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. REKONSILIASI UTANG BERSIH

46. NET DEBT RECONCILIATION

	Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>	Utang obligasi/ <i>Bonds payable</i>	Pinjaman subordinasi/ <i>Subordinated loans</i>	Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Utang bersih tanggal 1 Januari 2022	34,843,870	1,003,468	2,852,954	500,902	39,201,194	<i>Net debt as of 1 January 2022</i>
Arus kas	10,143,096	(799,000)	-	(146,455)	9,197,641	<i>Cash flows</i>
Perubahan lain*)	80,442	(2,820)	272,624	71,440	421,686	<i>Other changes *)</i>
Utang bersih tanggal 31 Desember 2022	<u>45,067,408</u>	<u>201,648</u>	<u>3,125,578</u>	<u>425,887</u>	<u>48,820,521</u>	<i>Net debt as of 31 December 2022</i>
Arus kas	(15,277,847)	(15,578)	(205,135)	(116,558)	(15,615,129)	<i>Cash flows</i>
Perubahan lain*)	1,565,956	16,013	169,917	44,661	1,796,547	<i>Other changes *)</i>
Utang bersih tanggal 31 Desember 2023	<u>31,355,517</u>	<u>202,083</u>	<u>3,090,360</u>	<u>353,990</u>	<u>35,001,950</u>	<i>Net debt as of 31 December 2023</i>

*) Perubahan lain termasuk pergerakan non-kas yang merupakan dampak perubahan selisih kurs, amortisasi biaya transaksi, dan akrual beban bunga

*) *Other changes include non-cash movements which are effect of exchange rate, amortization of transaction cost, and accrued interest expenses*

47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pasar modal. Oleh karena itu, penambahan pengungkapan telah dilakukan pada Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian.

47. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Bank's plan to conduct Shelf Registration of Continuing Bonds V Bank BTPN, the Bank has reissued its consolidated financial statements as of and for the years ended 31 December 2023 and 2022, in order to conform with the requirements of capital market regulations. Therefore, additions of disclosures had been made on Note 44 to the consolidated financial statements.

48. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN Tbk (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN Tbk (Entitas Induk) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak.

48. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The Bank issued the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT BANK BTPN Tbk (Parent Entity) which account for investments in Subsidiaries using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analysed. The following supplementary financial information of PT BANK BTPN Tbk (Parent Entity) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 1.1

APPENDIX 1.1

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2023	2022	
ASET			ASSETS
Kas	931,530	1,017,618	Cash
Giro pada Bank Indonesia	8,613,155	9,520,923	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain:			Current accounts with other banks
- Pihak ketiga	496,671	1,547,499	Third parties -
- Pihak berelasi	462,061	639,707	Related parties -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>958,574</u>	<u>2,186,791</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,623,654	21,617,714	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>8,626,278</u>	<u>21,620,394</u>	
Efek-efek			Securities
- Pihak ketiga	8,547,321	11,115,529	Third parties -
- Pihak berelasi	-	185,510	Related parties -
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	150,343	149,871	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(799)	(999)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>8,696,865</u>	<u>11,449,911</u>	
Tagihan derivatif			Derivative receivables
- Pihak ketiga	636,924	1,131,664	Third parties -
- Pihak berelasi	496,225	615,160	Related parties -
	<u>1,133,149</u>	<u>1,746,824</u>	
Tagihan akseptasi	3,289,757	3,069,854	Acceptance receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,637)	(4,495)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>3,281,120</u>	<u>3,065,359</u>	
Pinjaman yang diberikan:			Loans:
- Pihak ketiga	141,400,072	132,208,660	Third parties -
- Pihak berelasi	3,773,364	2,387,393	Related parties -
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	932,906	739,758	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,404,131)	(2,810,194)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>142,702,211</u>	<u>132,525,617</u>	
Penyertaan saham			Investment in shares
- Pihak ketiga	22	22	Third parties -
- Pihak berelasi	1,308,462	1,308,462	Related parties -
	<u>1,308,484</u>	<u>1,308,484</u>	
Beban dibayar dimuka	1,136,055	1,412,001	Prepayments
Klaim pengembalian pajak	67,337	50,357	Claims for tax refund
Aset pajak tangguhan	441,560	384,407	Deferred tax assets
Aset tetap	3,958,107	4,017,129	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(2,286,537)	(2,277,391)	Less: Accumulated depreciation
	<u>1,671,570</u>	<u>1,739,738</u>	
Aset takberwujud	3,096,432	2,880,272	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(2,278,908)	(2,035,262)	Less: Accumulated amortization
	<u>817,524</u>	<u>845,010</u>	
Aset lain-lain	961,327	420,460	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105,403)	(52,338)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>855,924</u>	<u>368,122</u>	
JUMLAH ASET	<u>181,241,336</u>	<u>189,241,556</u>	TOTAL ASSETS

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 1.2

APPENDIX 1.2

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/December		
	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas segera	42,261	20,617	<i>Liabilities due immediately</i>
Simpanan nasabah			<i>Deposits from customers</i>
- Pihak ketiga	95,571,983	101,737,505	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	483,776	1,080,514	<i>Related parties -</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	179,647	145,624	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>96,235,406</u>	<u>102,963,643</u>	
Simpanan dari bank-bank lain			<i>Deposits from other banks</i>
- Pihak ketiga	1,257,385	28,875	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	9,561,059	147,352	<i>Related parties -</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>10,825,927</u>	<u>176,227</u>	
Liabilitas derivatif			<i>Derivative payables</i>
- Pihak ketiga	1,014,819	1,323,645	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	57,285	124,091	<i>Related parties -</i>
	<u>1,072,104</u>	<u>1,447,736</u>	
Liabilitas akseptasi			<i>Acceptance payables</i>
- Pihak ketiga	2,160,250	2,157,596	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	163,383	199,232	<i>Related parties -</i>
	<u>2,323,633</u>	<u>2,356,828</u>	
Utang pajak:			<i>Taxes payable:</i>
- Pajak penghasilan	73,029	-	<i>Income taxes -</i>
- Pajak lain-lain	113,988	113,983	<i>Other taxes -</i>
	<u>187,017</u>	<u>113,983</u>	
Efek-efek yang diterbitkan:			<i>Securities issued:</i>
- Utang obligasi	200,569	200,134	<i>Bonds payable -</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	1,514	1,514	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>202,083</u>	<u>201,648</u>	
Pinjaman yang diterima			<i>Borrowings</i>
- Pihak ketiga	12,682,950	7,563,850	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	18,569,798	37,257,744	<i>Related parties -</i>
Beban transaksi yang belum diamortisasi	(48,251)	(9,988)	<i>Unamortized transaction costs</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	151,020	155,802	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>31,355,517</u>	<u>44,967,408</u>	
Akrual	411,413	363,201	<i>Accruals</i>
Pinjaman subordinasi	3,079,400	3,113,500	<i>Subordinated loans</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	10,960	12,078	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>3,090,360</u>	<u>3,125,578</u>	
Liabilitas imbalan kerja karyawan:			<i>Employee benefits liabilities:</i>
- Imbalan kerja jangka pendek	323,918	278,730	<i>Short-term employee benefits -</i>
- Imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya	128,085	43,281	<i>Post-employment and other long-term - employees benefits</i>
	<u>452,003</u>	<u>322,011</u>	
Liabilitas sewa	300,198	358,141	<i>Lease liabilities</i>
Liabilitas lain-lain	1,012,594	594,657	<i>Other liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS	<u>147,510,516</u>	<u>157,011,678</u>	TOTAL LIABILITIES

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 1.3

APPENDIX 1.3

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/December</u>		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
EKUITAS			SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal saham			<i>Share capital</i>
Modal dasar Rp 300.000			<i>Authorised capital of Rp 300,000</i>
terdiri dari:			<i>consists of:</i>
15.000.000.000 saham			<i>15,000,000,000 shares</i>
dengan nilai nominal			<i>with par value of</i>
Rp 20 (nilai penuh) per saham			<i>Rp 20 (full amount) per share</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar			<i>Issued and fully paid-up capital is</i>
8.149.106.869 saham			<i>8,149,106,869 shares</i>
(31 Desember 2022: 8.149.106.869 saham)	162,982	162,982	<i>(31 December 2022: 8,149,106,869 shares)</i>
Tambahan modal disetor	11,167,715	11,167,694	<i>Additional paid-in capital</i>
Cadangan revaluasi aset tetap	950,557	870,785	<i>Reserve on revaluation of fixed assets</i>
Cadangan nilai wajar - bersih	2,804	(7,750)	<i>Fair value reserve – net</i>
Saldo laba			<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	32,596	32,596	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan	21,408,060	19,997,917	<i>Unappropriated -</i>
	<u>21,440,656</u>	<u>20,030,513</u>	
Komponen ekuitas lainnya	260,801	260,801	<i>Other equity components</i>
Saham tresuri	<u>(254,695)</u>	<u>(255,147)</u>	<i>Treasury shares</i>
JUMLAH EKUITAS	<u>33,730,820</u>	<u>32,229,878</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>181,241,336</u>	<u>189,241,556</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 2.1

APPENDIX 2.1

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA			INTEREST INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	13,069,491	10,525,856	Interest income
Beban bunga	(6,285,177)	(3,876,891)	Interest expense
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	6,784,314	6,648,965	NET INTEREST INCOME
Pendapatan operasional lainnya:			Other operating income:
Pendapatan operational lainnya	1,861,815	1,499,304	Other operating income
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	650,386	780,657	Net gains on foreign exchange and derivative transactions
	2,512,201	2,279,961	
Beban operasional lainnya:			Other operating expenses:
Beban kepegawaian	(2,394,073)	(2,210,178)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(2,635,162)	(2,661,322)	General and administrative expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,151,802)	(895,115)	Provision for impairment losses
Beban operasional lain-lain	(534,697)	(452,095)	Other operating expenses
	(6,715,734)	(6,218,710)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	2,580,781	2,710,216	NET OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional	7,154	5,863	Non-operating income
Beban non-operasional	(11,332)	(8,162)	Non-operating expenses
	(4,178)	(2,299)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2,576,603	2,707,917	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(475,892)	(524,941)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH	2,100,711	2,182,976	NET INCOME

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 2.2

APPENDIX 2.2

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	79,772	-	Gain on revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(91,574)	(43,100)	Remeasurement from employee benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	20,146	9,482	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss
	8,344	(33,618)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will be reclassified to profit or loss
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	13,531	(160,967)	Unrealized gains on fair value changes of securities measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	(2,977)	35,413	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss
	10,554	(125,554)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	18,898	(159,172)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	2,119,609	2,023,804	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)			EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)
Dasar	261	271	Basic
Dilusian	261	271	Diluted

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 3.1

APPENDIX 3.1

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Cadangan revaluasi aset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Cadangan nilai wajar - bersih/ Fair value reserve – net	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saham treasury/ Treasury shares	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo tanggal 1 Januari 2023	162,982	11,167,694	870,785	(7,750)	32,596	19,997,917	260,801	(255,147)	32,229,878
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	2,100,711	-	-	2,100,711
Penghasilan komprehensif lainnya: Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	79,772	-	-	-	-	-	79,772
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	(91,574)	-	-	(91,574)
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	13,531 (2,977)	-	-	-	-	13,531 (17,169)
Efek pajak terkait	-	-	-	-	-	20,146	-	-	20,146
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	79,772	10,554	-	2,029,283	-	-	2,119,609
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-	(619,140)	-	-	(619,140)
Penjualan saham treasury ke publik	-	21	-	-	-	-	-	452	473
Saldo tanggal 31 Desember 2023	162,982	11,167,715	950,557	2,804	32,596	21,408,060	260,801	(254,695)	33,730,820

Balance as of 1 January 2023

Net income for the year

Other comprehensive income:
Gain on revaluation of fixed assets

Remeasurement of employee benefit liabilities

Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income

Related tax effect

Total comprehensive income during the year

Dividend payment

Sales of treasury shares to public

Balance as of 31 December 2023

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITYLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor perulu/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Cadangan revaluasi 221 sset tetap/ Reserve on revaluation of fixed assets	Cadangan nilai wajar - bersih/ Fair value reserve - net	Saldo laba yang sudah ditempatkan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditempatkan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saham tresuri/ Treasury shares	Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as of 1 January 2022
	162,982	11,167,694	870,785	117,804	32,596	17,848,559	260,801	(255,147)	30,206,074	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	2,182,976	-	-	2,182,976	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	(43,100)	-	-	(43,100)	Other comprehensive income: Remeasurement of employee benefits liabilities
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(160,967)	-	-	-	-	(160,967)	Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Efek pajak terkait	-	-	-	35,413	-	9,482	-	-	44,895	Related tax effect
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	-	(125,554)	-	2,149,358	-	-	2,023,804	Total comprehensive income during the year
Saldo tanggal 31 Desember 2022	162,982	11,167,694	870,785	(7,750)	32,596	19,997,917	260,801	(255,147)	32,229,878	Balance as of 31 December 2022

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 4.1

APPENDIX 4.1

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan bunga	12,876,098	10,260,840	Receipts from interest
Pembayaran beban bunga	(7,016,441)	(3,782,757)	Payments of interest expense
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	1,708,143	2,347,234	Receipts from other operating income
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	325,612	237,713	Recovery from written-off loans
Pembayaran beban kepegawaian	(2,355,655)	(2,266,186)	Payments of personnel expenses
Pembayaran beban operasional lainnya	(2,022,598)	(2,069,813)	Payments of other operating expenses
Penerimaan lain-lain	7,417	11,564	Other receipts
Pembayaran pajak penghasilan badan	(474,472)	(653,120)	Payments of corporate income tax
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	3,048,104	4,085,475	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
(Kenaikan) penurunan aset operasi:			(Increase) decrease in operating assets:
Pinjaman yang diberikan	(11,142,017)	(10,762,631)	Loans
Tagihan akseptasi	(219,903)	(1,307,292)	Acceptance receivables
Tagihan derivatif	613,675	(1,178,125)	Derivative receivables
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	21,644	10,585	Obligation due immediately
Simpanan nasabah	(6,762,260)	4,411,350	Deposits from customers
Simpanan dari bank-bank lain	10,642,217	(3,707,614)	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	(375,632)	945,245	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	(33,195)	1,396,620	Acceptance payables
Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi	(4,207,367)	(6,106,387)	Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek	(3,407,262)	(2,304,354)	Purchase of securities
Penjualan efek-efek	5,120,218	6,644,183	Proceeds from sale of securities
Perolehan aset tetap	(105,322)	(98,751)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset hak guna	(3,542)	(13,360)	Acquisition of right-of-use assets
Perolehan aset takberwujud	(336,537)	(351,395)	Acquisition of intangible assets
Hasil dari penjualan aset tetap	3,483	2,223	Proceeds from sale of fixed assets
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	1,271,038	3,878,546	Net cash flows provided from investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang obligasi	-	(799,000)	Payments of securities issued
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	27,232,047	16,045,873	Proceeds from borrowings
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima	(40,071,851)	(6,002,777)	Installment payments and settlement of borrowings
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(116,558)	(146,455)	Payments of lease liabilities principals
Penerimaan dividen	498,815	-	Dividend received
Pembayaran dividen	(619,140)	-	Dividend paid
Penjualan saham treasuri ke publik	473	-	Sales of treasury shares to public
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(13,076,214)	9,097,641	Net cash flows (used in) provided from financing activities

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

LAMPIRAN 4.2

APPENDIX 4.2

**PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN ARUS KAS
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
	2023	2022	
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(16,012,543)	6,869,800	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(14,462)	3,376	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	35,242,663	28,369,487	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	19,215,658	35,242,663	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas	931,530	1,017,618	<i>Cash and cash equivalents at end of the year consists of:</i>
Giro pada Bank Indonesia	8,613,155	9,520,923	<i>Cash</i>
Giro pada bank-bank lain	958,732	2,187,206	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,623,654	21,617,714	<i>Current accounts with other banks</i>
Efek-efek	88,587	899,202	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
	19,215,658	35,242,663	<i>Securities</i>
INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS:			
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS			
Pembelian aset tetap yang masih terhutang	(1,248)	(790)	SUPPLEMENTAL CASH FLOWS INFORMATION:
			ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS
			<i>Acquisition of fixed assets still unpaid</i>



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

35th Floor Jakarta Mori Tower
40-41, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (21) 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00310/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/V/2024

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK BTPN Tbk:

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk (secara individu disebut "Bank") dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta catatan, yang terdiri dari informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No.: 00310/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/V/2024

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk:

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk (individually referred to as "the Bank") and its subsidiaries (together referred to as "the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2023 and 2022, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended 31 December 2023 and 2022, and notes, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2023 and 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years ended 31 December 2023 and 2022 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

1. Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan (Kerugian Kredit Ekspektasian “KKE”) Bank

Lihat Catatan 2i.1 (Ikhtisar kebijakan akuntansi yang material – Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan – Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi), Catatan 3 (Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting – Sumber utama ketidakpastian estimasi – Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan – Bank), Catatan 11 (Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – Pinjaman yang diberikan), Catatan 34 (Cadangan kerugian penurunan nilai), dan Catatan 41 (Manajemen risiko – Risiko kredit).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp 4.618.047 juta (31 Desember 2022 sebesar Rp 3.579.119 juta). Termasuk pada saldo tersebut sebagian besar berasal dari portofolio pinjaman yang diberikan Bank sebagai entitas bank umum konvensional, yaitu sebesar Rp 3.404.131 juta (31 Desember 2022 sebesar Rp 2.810.194 juta), mewakili 74% (31 Desember 2022 mewakili 79%) dari total cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan Bank sebagai hal audit utama karena penentuan atas KKE memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Dalam menentukan KKE, Bank mengadopsi model yang kompleks, menggunakan sejumlah asumsi, dan mengandalkan input data internal dan eksternal.

Pengukuran KKE melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan, termasuk antara lain:

- Pemilihan model, data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan KKE;
- Penentuan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atau gagal bayar di dalam klasifikasi pinjaman yang diberikan ke dalam tahap KKE;
- Pengklasifikasian debitur menjadi kategori risiko kredit (peringkat kredit internal) yang tepat dengan melakukan penilaian kualitatif;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

1. The Bank’s allowance for impairment losses of loans (Expected Credit Losses “ECL”)

Refer to Note 2i.1 (Summary of material accounting policies – Allowance for impairment losses of financial assets – Financial assets carried at amortized cost), Note 3 (Critical accounting estimates and judgments – Key sources of estimation uncertainty – Allowance for impairment losses of financial assets – Bank), Note 11 (Loans and sharia financing receivables – Loans), Note 34 (Provision for impairment losses), and Note 41 (Risk management – Credit risk).

As of 31 December 2023, the Group reported allowance for impairment losses of loans and sharia financing/receivables of Rp 4,618,047 million (31 December 2022 amounted to Rp 3,579,119 million). Included in such balances were mainly from loans portfolio of the Bank as a commercial conventional banking entity, amounted to Rp 3,404,131 million (31 December 2022 amounted to Rp 2,810,194 million), representing 74% (31 December 2022 representing 79%) of the total allowance for impairment losses of loans and sharia financing/receivables.

We identified the Bank’s allowance for impairment losses of loans as a key audit matter because the determination of ECL requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In determining the ECL, the Bank adopted complex models, using various assumptions, and relied on internal and external data inputs.

The measurement of ECL involves significant management judgement, including, among others:

- Selection of models, data and assumptions used in the ECL calculation;
- Determination of whether or not there was a significant increase in credit risk or a default in the classification of loans into ECL stages;
- Classification of borrowers into appropriate credit risk categories (internal risk ratings) through performing a qualitative assessment;



- Penentuan skenario makroekonomi untuk perkiraan masa depan, penerapan skenario ekonomi dan pembobotan probabilitas tertimbang setiap skenario;
- Proyeksi atas skenario arus kas masa depan ekspektasian sebagai input untuk metode arus kas diskonto (“DCF”) untuk pinjaman yang memburuk yang secara individual dianggap signifikan.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan *financial risk modelling specialist* kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam menerapkan beberapa prosedur audit.

Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian utama dan pendekatan manajemen dalam menghitung KKE untuk pinjaman yang diberikan dan menilai risiko inheren dari salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya. Sebagai bagian dari penilaian risiko, kami juga mengevaluasi uji retrospektif (analisis *back-testing*) yang dilakukan manajemen untuk menilai kecukupan KKE.

Kami mengevaluasi dan menguji desain dan implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengukuran KKE untuk pinjaman yang diberikan, termasuk antara lain:

- Penilaian dan persetujuan informasi variabel makroekonomi yang digunakan dalam model KKE;
- Penilaian dan persetujuan penentuan klasifikasi risiko kredit debitur;
- Pengendalian teknologi informasi (“TI”) yang bersifat otomatis atas perpindahan data penting dari sistem-sistem sumber ke dalam sistem perhitungan KKE, dan pengendalian TI umum yang relevan untuk merespon risiko TI yang teridentifikasi dan diperlukan untuk mendukung konsistensi operasi dari pengendalian otomatis tersebut;
- Rekonsiliasi dan analisis atas kelengkapan perhitungan KKE terhadap seluruh pinjaman yang diberikan;
- Penilaian dan persetujuan hasil KKE;
- Penilaian dan persetujuan KKE dengan metode DCF untuk pinjaman yang memburuk yang secara individual dianggap signifikan.

- *Determination of macroeconomic variables for forward-looking measurement, application of economic scenarios and its probability weightings;*
- *Projection of expected future cash flow scenarios as an input to the discounted cash flow (“DCF”) method for credit-impaired loans which are considered individually significant.*

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our financial risk modelling specialist, who are an integral part of our core audit team in performing several audit procedures.

We obtained understanding of management’s key controls and approach in the ECL calculation for loans to assess the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks. As part of our risk assessment, we also evaluate retrospective review (back-testing analysis) prepared by the management to assess the sufficiency of ECL.

We evaluated and tested the design and implementation of the internal controls relating to ECL measurement for loans, including, among others:

- *Assessment and approval of macroeconomic variables information used in ECL models;*
- *Assessment and approval of borrower credit risk classification determination;*
- *Information technology (“IT”) automated controls over transfer of critical data from source systems to ECL calculation system, and relevant general IT controls that address identified IT risks and are necessary to support the consistent operations of these automated controls;*
- *Reconciliation and analysis on completeness of ECL calculation over all loans;*
- *Assessment and approval of the ECL results;*
- *Assessment and approval of DCF method ECL for credit-impaired loans which are considered individually significant.*



Kami melakukan pengujian substantif, yang terutama terdiri dari:

- Mengevaluasi model, asumsi (termasuk variabel makroekonomi) dan input yang digunakan untuk menghitung KKE apakah telah memadai, dan melakukan perhitungan ulang KKE atas sampel yang dipilih;
- Membandingkan variabel makroekonomi dan asumsi lainnya yang digunakan dengan sumber informasi eksternal maupun internal, dan mengidentifikasi apakah ada indikator yang berlawanan;
- Pengujian atas relevansi dan keandalan (kelengkapan dan akurasi berbasis sampel) dari data yang digunakan dalam perhitungan KKE ke sistem sumber;
- Pengujian ketepatan pengelompokan pinjaman berdasarkan peringkat risiko kredit. Kami melakukan pengecekan akurasi perhitungan jumlah hari tunggakan dan untuk pinjaman yang diberikan dengan sampel berbasis risiko, kami menelaah penilaian manajemen dengan melakukan evaluasi independen untuk menentukan ketepatan penentuan peringkat risiko internal dan tahap KKE;
- Mengevaluasi kewajaran KKE yang menggunakan metode DCF untuk pinjaman yang memburuk yang secara individual dianggap signifikan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya arus kas ekspektasian dengan memperhitungkan kondisi lingkungan ekonomi terkini dan prospek kondisi ekonomi masa depan, serta kemampuan bayar debitur;
- Melakukan *stand-back assessment* atas jumlah KKE untuk menentukan apakah KKE memadai dengan mempertimbangkan kualitas pinjaman yang diberikan secara keseluruhan, profil risiko, restrukturisasi piutang yang diberikan kepada peminjam, kondisi makroekonomi dan faktor lainnya;
- Melakukan pengujian sensitivitas dari asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan KKE;
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang syariah – piutang murabahah

Lihat Catatan 2i.3 (Ikhtisar kebijakan akuntansi yang material – Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan – Piutang murabahah), Catatan 3 (Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting – Sumber utama ketidakpastian estimasi – Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan – Entitas Anak), Catatan 11 (Pinjaman yang diberikan dan

We performed substantive testing, which primarily consisted of:

- *Evaluate models, assumptions (including macroeconomic variables) and input used in ECL calculation as to whether they are appropriate, and reperform the ECL calculation on selected samples;*
- *Compare the macroeconomic variables and other assumptions used with external and internal information source, and identify contradictory indicators;*
- *Test the relevance and reliability (completeness and accuracy on a sample basis) of data used in calculating ECL to the source systems;*
- *Test the appropriateness of loans classification based on stage of credit risks. We check the accuracy of days past due and for a risk-based selection of loans, we reviewed management's assessment by performing independent evaluation to determine appropriateness of internal risk rating and ECL staging determination;*
- *Evaluate the reasonableness of ECL that applies DCF method for credit-impaired loans which are considered individually significant taking into account the feasibility of expected future cash flows considering the recent economic environment and the prospect of future economic conditions, as well as borrower's repayment ability;*
- *Perform stand-back assessment of the ECL amount to determine if the ECL was reasonable by considering the overall loans quality, risk profile, impact of loan restructurings given to debtors, macroeconomic condition and other factors;*
- *Perform sensitivity testing of key assumptions used in the ECL calculation;*
- *Evaluate the adequacy of disclosures in accordance with the prevailing accounting standards.*

2. Allowance for impairment losses of sharia financing/receivables – murabahah receivables

Refer to Note 2i.3 (Summary of material accounting policies – Allowance for impairment losses of financial assets – Murabahah receivables), Note 3 (Critical accounting estimates and judgments – Key sources of estimation uncertainty – Allowance for impairment losses of financial assets – Subsidiary), Note 11 (Loans and



pembiayaan/piutang syariah – Pembiayaan/piutang syariah), Catatan 34 (Cadangan kerugian penurunan nilai), Catatan 41 (Manajemen risiko – Risiko kredit).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebesar Rp 1.213.542 juta (31 Desember 2022 sebesar Rp 768.259 juta) yang dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang syariah atas portofolio salah satu entitas anaknya, PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (“Entitas Anak”).

Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebagai hal audit utama karena penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Lebih lanjut, dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen menggunakan sejumlah asumsi dan input data internal.

Pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah melibatkan pertimbangan manajemen Entitas Anak yang signifikan, termasuk antara lain:

- Pemilihan model, data dan asumsi;
- Pengklasifikasian debitur ke kategori risiko kredit yang tepat berdasarkan kelompok hari tunggakan;
- Penentuan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini, termasuk dampak atas COVID-19.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan *financial risk modelling specialist* kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam menerapkan beberapa prosedur audit.

Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian utama dan pendekatan manajemen Entitas Anak dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah dan menilai risiko inheren dari salah satu material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya. Sebagai bagian dari penilaian risiko, kami juga mengevaluasi uji retrospektif (analisis *back-testing*) yang dilakukan manajemen untuk menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kami mengevaluasi dan menguji desain dan implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah, termasuk antara lain:

- Penelaahan dan persetujuan model, data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan;

sharia financing/receivables – Sharia financing/receivables), Note 34 (Provision for impairment losses), Note 41 (Risk management – Credit risk).

As of 31 December 2023, the Group reported allowance for impairment losses of murabahah receivables of Rp 1,213,542 million (31 December 2022 amounted to Rp 768,259 million) reported under allowance for impairment losses of sharia financing/receivables account from one of its subsidiaries, PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (“the Subsidiary”)’s portfolio.

We identified allowance for impairment losses of murabahah receivables as a key audit matter because the determination of allowance for impairment losses requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In addition, in determining the allowance for impairment losses, the management use various assumptions, and relied on internal data input.

The measurement of allowance for impairment losses of murabahah receivables involves significant Subsidiary’s management judgement, including among others:

- *Selection of models, data and assumptions;*
- *Classification of borrowers into appropriate credit risk categories based on days past due buckets;*
- *Determination of input parameters, based on historical experience and current economic condition, including the impact of COVID-19.*

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our financial risk modelling specialist, who are an integral part of our core audit team in performing several audit procedures.

We obtained an understanding of Subsidiary’s management’s key controls and approach in the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables to assess the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks. As part of our risk assessment, we also evaluate retrospective review (back-testing analysis) performed by the management to assess the sufficiency of allowance for impairment losses.

We evaluated and tested the design and implementation of the internal controls relating to allowance for impairment losses of murabahah receivables, including, among others:

- *Assessment and approval of model, data and assumptions used in allowance calculation;*



- Pengendalian atas kelengkapan dan akurasi parameter input;
- Penelaahan atas penentuan klasifikasi risiko kredit debitur;
- Penelaahan dan persetujuan hasil perhitungan cadangan penurunan nilai.

Kami melakukan pengujian substantif yang terutama terdiri dari:

- Mengevaluasi apakah model, asumsi dan input yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah memadai;
- Mengevaluasi apakah definisi gagal bayar yang digunakan dalam model sudah konsisten dengan kebijakan akuntansi dan praktik industri;
- Mengevaluasi apakah asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah konsisten dengan titik data, seperti peraturan dan pengalaman historis atau kini;
- Mengevaluasi kewajaran estimasi manajemen atas *management overlay*, termasuk dampaknya terhadap perhitungan cadangan penurunan nilai;
- Pengujian atas relevansi dan keandalan (kelengkapan dan akurasi) dari data yang digunakan dalam perhitungan cadangan kerugian ke sistem sumber;
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. *Pengendalian dan sistem Teknologi Informasi ("TI")*

Sebagai entitas perbankan, Bank dan salah satu entitas anaknya, PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Entitas Anak"), menggunakan beberapa sistem TI yang saling bergantung satu sama lain dalam kegiatan operasionalnya untuk melakukan pemrosesan dan pencatatan volume transaksi yang tinggi. Pengendalian atas akses dan perubahan pada sistem TI sangat penting untuk pencatatan informasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian secara akurat.

Pengendalian dan sistem TI, karena berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, merupakan hal audit utama karena pendekatan audit kami dapat berbeda secara signifikan tergantung pada efektivitas operasi dari pengendalian TI Bank dan Entitas Anak.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan tim audit TI kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam mengevaluasi risiko terkait lingkungan TI Bank

- *Controls over completeness and accuracy of the input parameters;*
- *Assessment of borrower credit risk categories determination;*
- *Assessment and approval of the calculation of allowance for impairment losses.*

We performed substantive testing which primarily consisted of:

- *Evaluate models, assumptions and input used in allowance for impairment losses calculation as to whether they are appropriate;*
- *Evaluate whether the definition of default used in the model is consistent with accounting policy and industry practice;*
- *Evaluate whether the assumption used in allowance for impairment losses calculation is consistent with other data points, such regulatory and historical or recent experience;*
- *Evaluate the reasonableness of management's estimate of the management overlay, including its impact on allowance for impairment losses calculation;*
- *Testing the relevance and reliability (completeness and accuracy) of data used in calculating allowance for impairment losses to the source systems;*
- *Evaluate the adequacy of disclosures in accordance with the prevailing accounting standards.*

3. *Information Technology ("IT") systems and controls*

As a banking entity, the Bank and one of its subsidiaries, PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("the Subsidiary"), utilize multiple interdependent IT systems in their operational activities to process and record a high volume of transactions. Controls over access and changes to IT systems are critical for accurately recording financial information and preparing consolidated financial statements.

The IT systems and controls, as they pertain to the recording and reporting of financial transactions, is a key audit matter as our audit approach could significantly differ depending on the effective operation of the Bank and the Subsidiary's IT controls.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our IT audit team, who are an integral part of our core audit team, to assess the risks associated with the IT environment of the Bank and the Subsidiary.



dan Entitas Anak. Tim audit TI kami melakukan pengujian lingkungan atas pengendalian umum TI untuk aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami. Prosedur audit yang dilakukan oleh tim audit TI kami mencakup:

- Menilai tata kelola dan pengendalian level entitas di lingkungan TI Bank dan Entitas Anak, termasuk yang terkait dengan desain, tinjauan, dan kesadaran atas kebijakan TI, dan praktik manajemen risiko TI;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada akses ke program dan data, termasuk manajemen kata sandi, manajemen atas akses istimewa, dan pengendalian pemantauan atas aktivitas akun istimewa untuk semua aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada manajemen perubahan, termasuk permintaan perubahan dan persetujuan pengujian sebelum penerapan perubahan ke lingkungan produksi. Kami juga menguji pemisahan lingkungan TI dan pemisahan tugas antara pengembang dan pelaksana implementasi atas perubahan untuk semua aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada operasi komputer, termasuk proses perpindahan data secara berkelompok dan pemantauan proses membuat data cadangan untuk semua aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada pengendalian TI yang bersifat otomatis untuk aplikasi-aplikasi TI tertentu yang termasuk dalam cakupan audit kami.

Hal Lain

Sebelum penerbitan laporan ini, kami telah mengaudit dan menerbitkan laporan auditor independen No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 atas laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali dengan pengungkapan tambahan sehubungan dengan rencana PT BANK BTPN Tbk untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan yang termasuk dalam Lampiran 1 hingga 4, yang terdiri dari laporan posisi keuangan PT BANK BTPN Tbk (entitas induk saja) tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

Our IT audit team performed tests over the general IT controls for IT applications within the scope of our audit. The audit procedures performed by our IT audit team included:

- *Assessing the governance and entity-level controls across the Bank and the Subsidiary's IT environment, including those related to IT policy design, review, and awareness, and IT risk management practices;*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over access to programs and data, including password management, privileged access management, and monitoring controls for privileged accounts' activities for all IT applications within the scope of our audit;*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over change management, including change request approval and testing approval prior to deployment to the production environment. We also tested the segregation of the IT environments and the segregation of duties between developers and deployers of changes for all IT applications within the scope of our audit;*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over computer operations, including batch process and data backup monitoring, for all IT applications within the scope of our audit;*
- *Testing the design and operating effectiveness of the IT automated controls for certain IT applications within the scope of our audit.*

Other Matters

Prior to the issuance of this report, we have audited and issued our independent auditors' report No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/II/2024 dated 22 February 2024 on the consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and its subsidiaries for the year ended 31 December 2023.

The accompanying consolidated financial statements constitute a reissuance of those consolidated financial statements with additional disclosures in connection with PT BANK BTPN Tbk's plan to conduct shelf registration of continuing bonds.

Our audit was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary information included in Appendix 1 to 4, which comprises the statement of financial position of PT BANK BTPN Tbk (parent entity only) as of 31 December 2023 and 2022, and the related statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows



tersebut, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diwajibkan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian dan, menurut opini kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sehubungan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan 2023, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Jika, berdasarkan pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material atas informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

for the years then ended, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements and in our opinion is fairly stated, in all material respects, in relation to the consolidated financial statements taken as a whole.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in 2023 annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*



- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Widjaja & Rekan

Novie, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 1212

8 Mei 2024

8 May 2024

